



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

Rancangan Awal

# Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Timur

**Tahun 2024**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

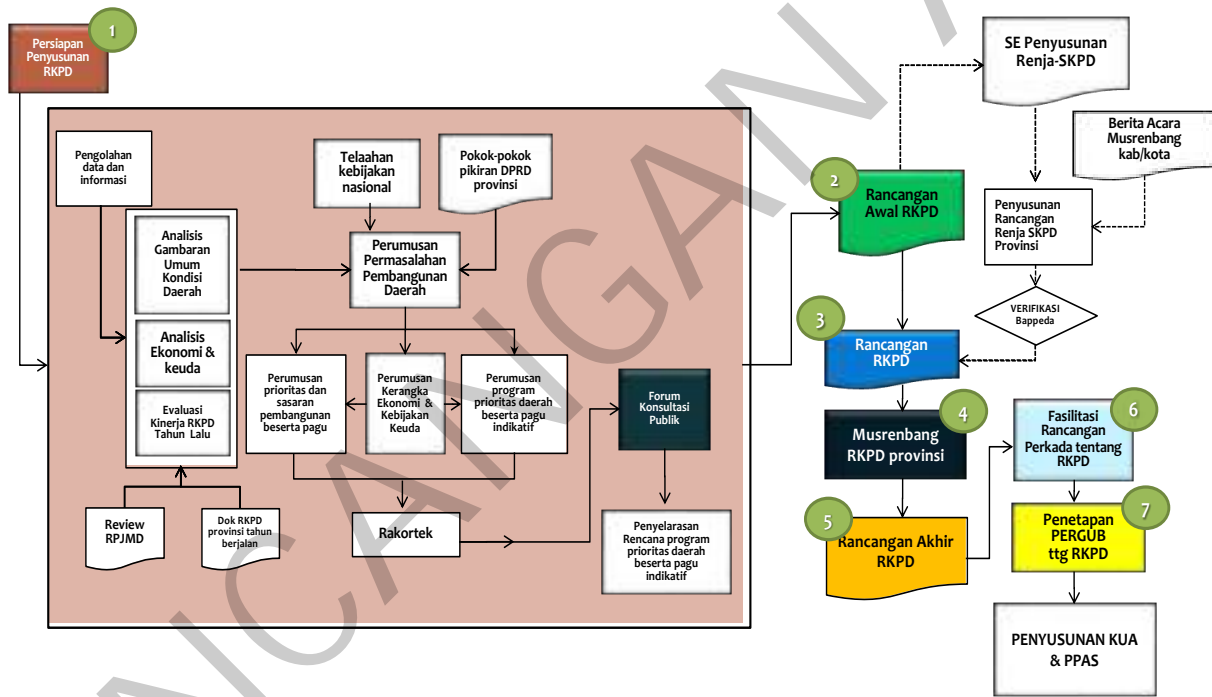
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2024 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD 2024 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

- 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
- 4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD 2024 akan difokuskan pada upaya penguatan resiliensi perekonomian daerah melalui diversifikasi ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan diiringi penguatan daya saing sumber daya manusia, aksesibilitas dan konektivitas layanan infrastruktur yang andal, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.



Gambar 1.1  
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2024

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui 8 (delapan) tahapan yang dapat dilihat pada Gambar I.1, yakni sebagai berikut :

- 1. Persiapan Penyusunan RKPD;
- 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
4. Penyusunan Rancangan RKPD;
5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
6. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
7. Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
8. Penetapan RKPD.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

### 1.2.1 Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

### 1.2.2 Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

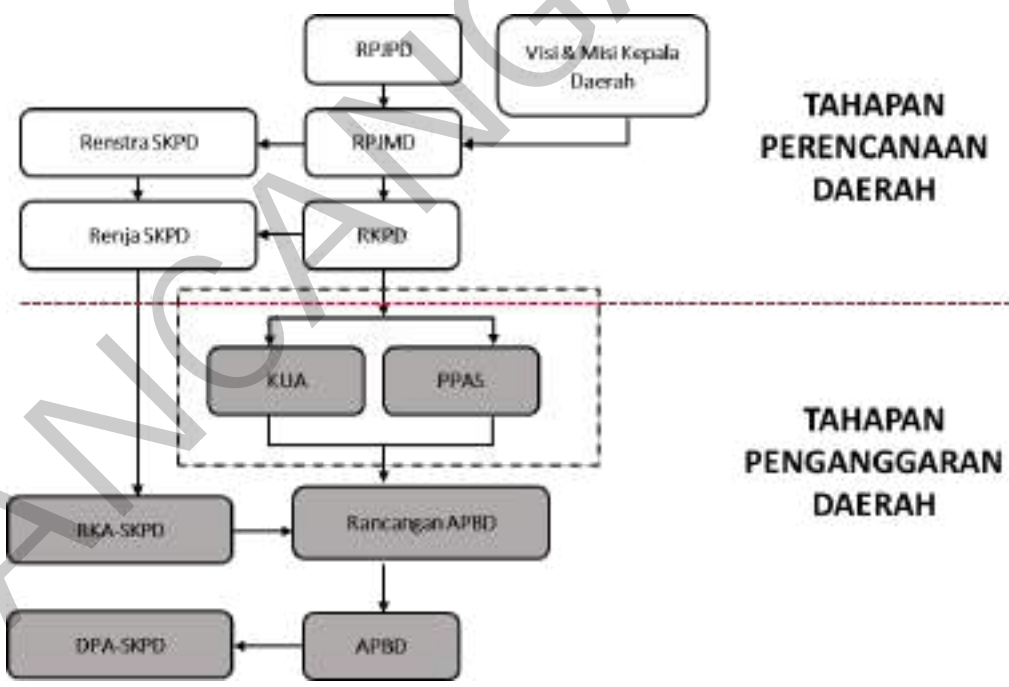
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1); dan
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2024 berpedoman pada :

- a. Kebijakan tahapan pelaksanaan RPD 2024-2026 tahun pertama, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota;
- b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan Tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP Tahun 2024.

Selanjutnya RKPD 2024 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja –PD), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem ini dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1.2  
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2024.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, yaitu:

- a. Menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

#### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

##### BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

##### BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

##### BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam



pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penyajian aspirasi dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

#### BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

#### BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan RKPD, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

#### BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

#### BAB VIII. Penutup

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD yang diantaranya meliputi peran dokumen RKPD dalam pelaksanaan pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula bersifat *unrenewable resources* menjadi *renewable resources* perlu mendapatkan perhatian besar. Sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* bagi daerah untuk menggeser dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian. Besarnya potensi keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan dapat dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

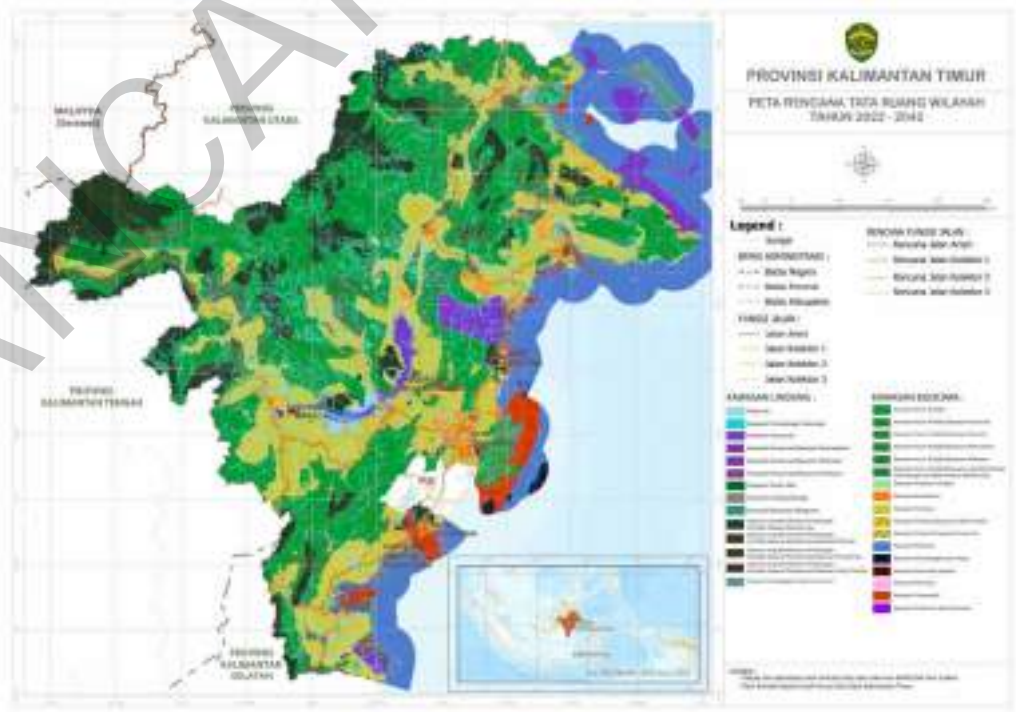
#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 37' 12.99" Lintang Utara (LU) dan -2° 28' 19.31" Lintang Selatan (LS), 113° 50' 3.61"-119° 14' 13.06" Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
- 2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Selat Makassar dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara; dan
- 4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065,18 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha dan wilayah laut yang mencapai 3.997.373 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

**Gambar II.1**  
**Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2035**

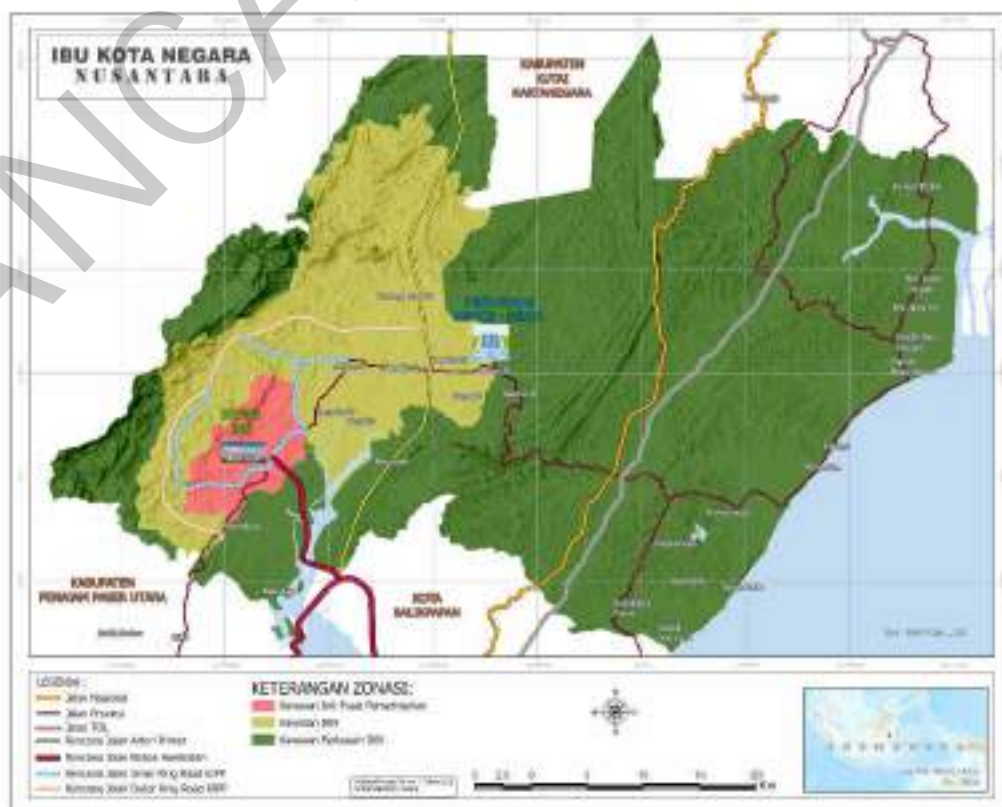


Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.2**  
**Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur**

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan (wilayah daratan) Kalimantan Timur berstatus sebagai Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 Ha (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 Ha dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 Ha. Sedangkan sisanya seluas 4.395.537 Ha (34,52%), berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbagi untuk kawasan perkebunan seluas 3.269.560 Ha (25,67%), kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebesar 412.095 Ha (3,23%), kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), kawasan perikanan seluas 91.547 Ha (0,71%), kawasan pariwisata darat seluas 97.423 Ha (0,76%), kawasan industri seluas 32.887 Ha (0,25%), dan tubuh air seluas 95.758 Ha (0,75%).

Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui undang – undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang. Luas wilayah IKN Nusantara mencapai 324.331 Ha yang terdiri dari luas wilayah daratan mencapai 256.142 ha dan wilayah laut mencapai 68.189 ha. Sehingga luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur setelah ditetapkannya IKN Nusantara mencapai 16.407.734 ha dengan luasan wilayah daratan mencapai 12.478.550 ha dan wilayah laut mencapai 3.929.184 ha.



**Gambar II.3**  
**Peta Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara**

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.



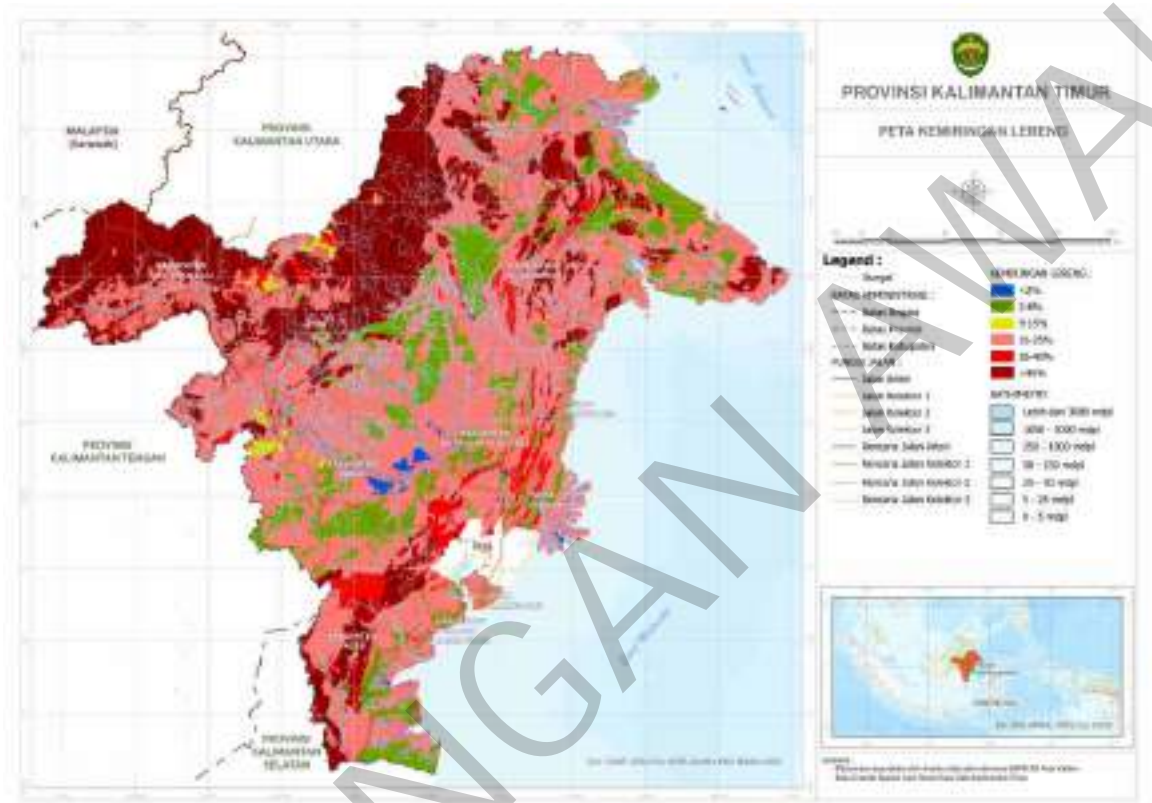
Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.4**  
**Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur**

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M



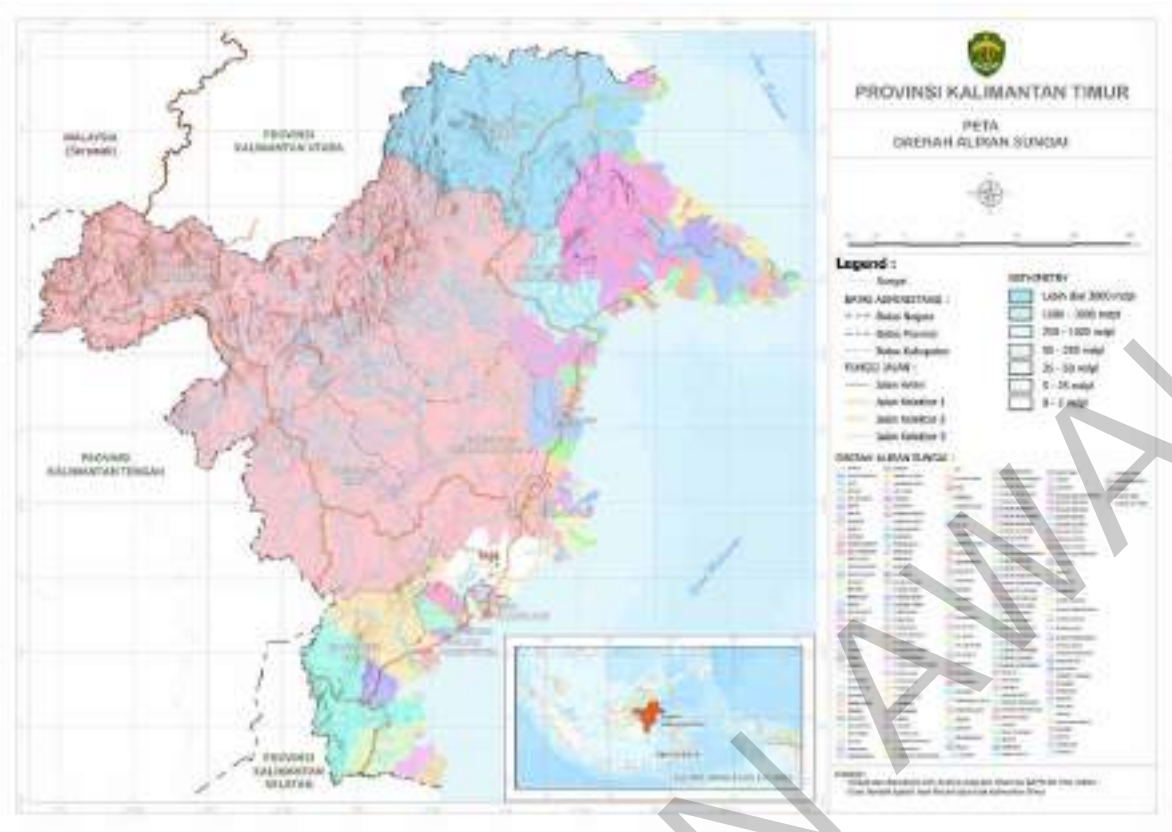
sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.5**  
**Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur**

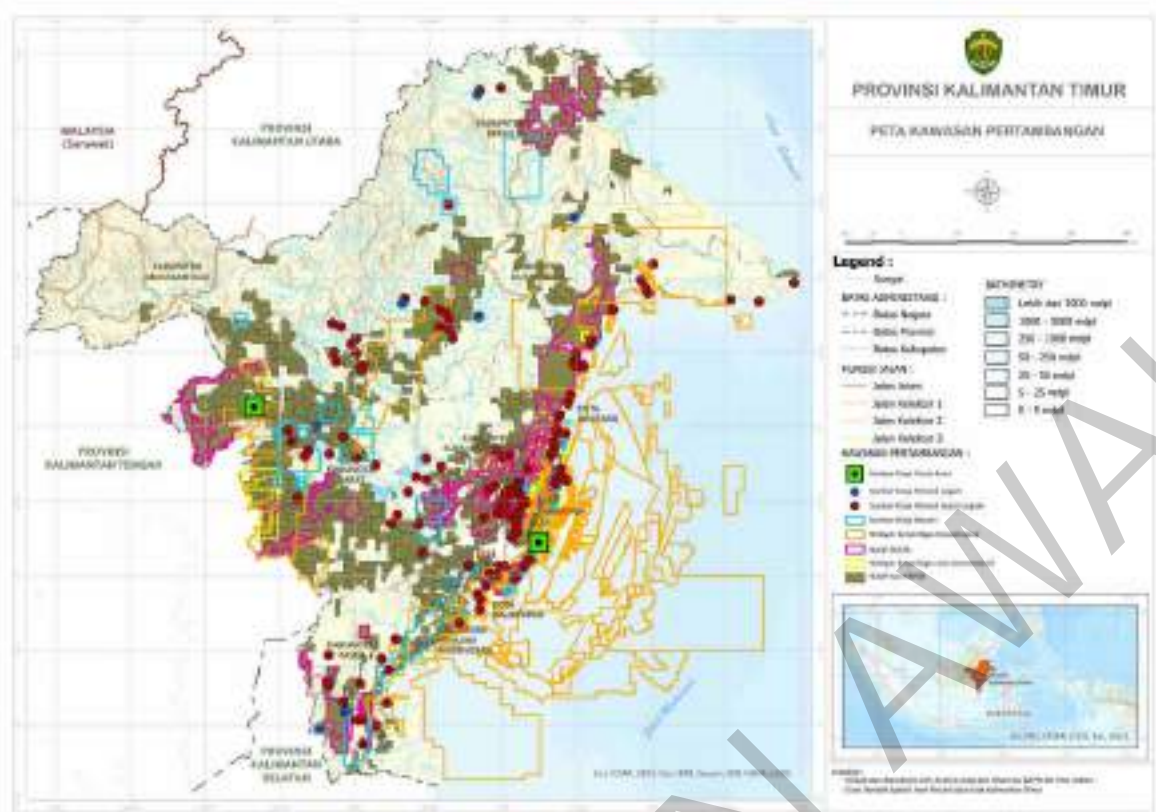
Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam, Gunung Batuayan, Sungai Bahan, Sungai Bani, Sungai Kayan, Sungai Senyur, Sungai Sesayap, Sungai Telen dan Sungai Wahan.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.6**  
**Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur**

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (*mineral industry*) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah “*Good Mining Practice*” yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan pada gambar II.7.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

Gambar II.7  
Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

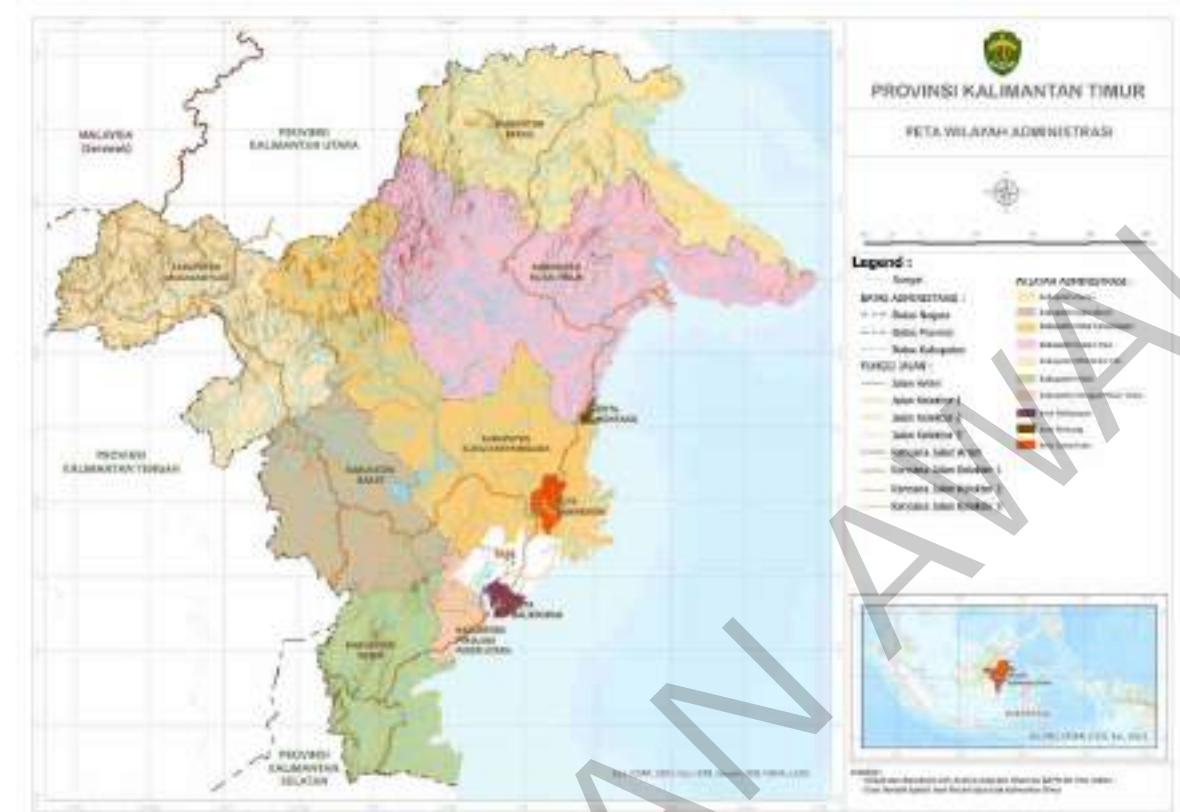
Tabel II.1  
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.104.051	10	144
2	KUBAR	1.360.641	16	194
3	KUKAR	2.527.713	20	237
4	KUTIM	3.120.693	18	141
5	Berau	2.135.715	13	110
6	PPU	203.105	4	54
7	MAHULU	1.850.524	5	50
8	Balikpapan	50.954	6	34
9	Samarinda	71.622	10	59
10	Bontang	16.065	3	15
Kalimantan Timur		12.441.083	105	1.038

Sumber: Bappeda Kaltim dan Kemendagri, 2022



Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar II.7.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

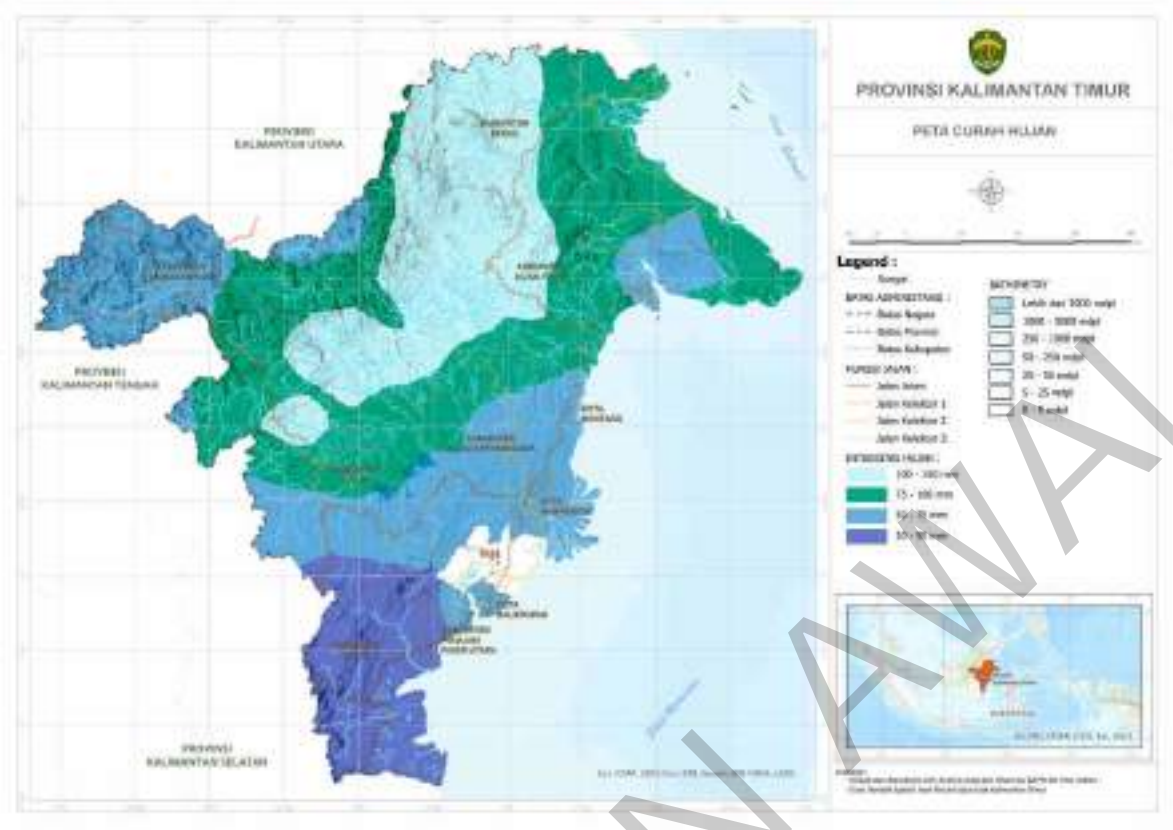
**Gambar II.8**  
**Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur**

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel II.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

**Tabel II.2**  
**Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	24,50	24,20	23,50
	- Maksimum	32,30	31,10	32,70
2	Kelembaban (%)	82	83,30	87
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.011,60	1.010,10	1.011,50
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	3,00	3,50
5	Curah Hujan (mm)	2.599	2.947	2.312
6	Penyinaran Matahari (%)	42	46	49

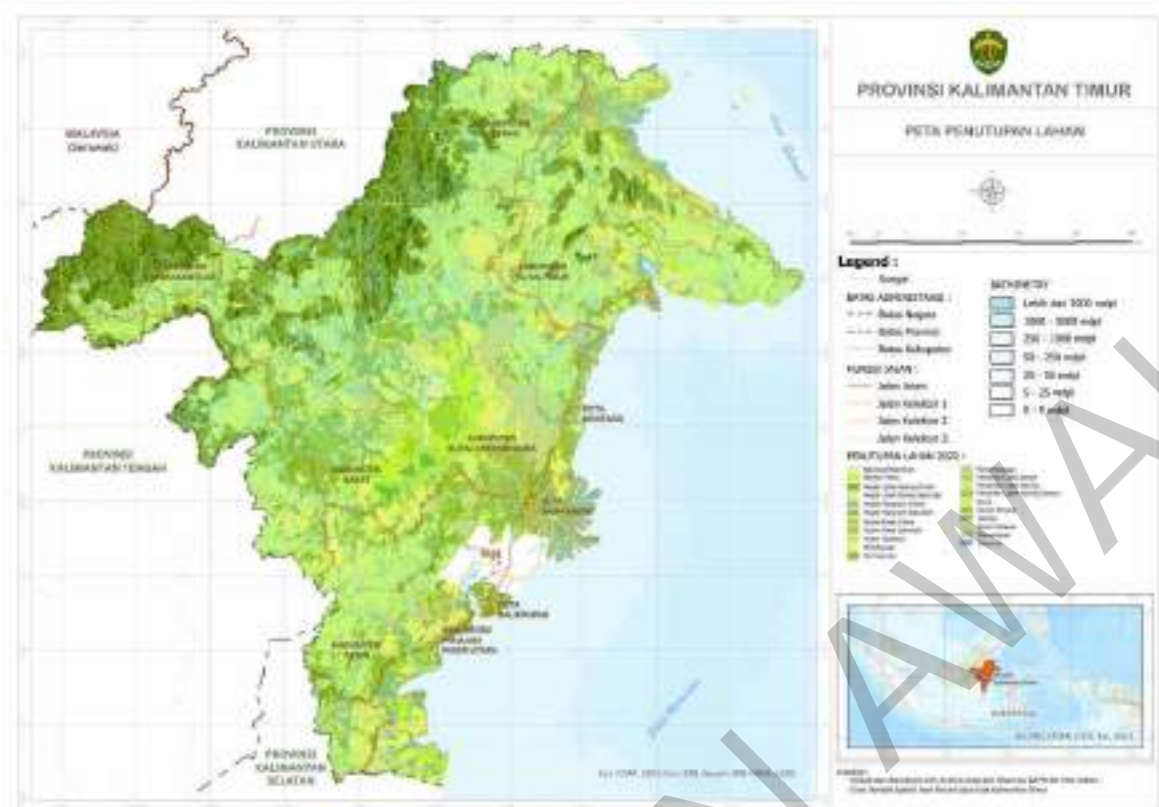
Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2023



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.9**  
**Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur**

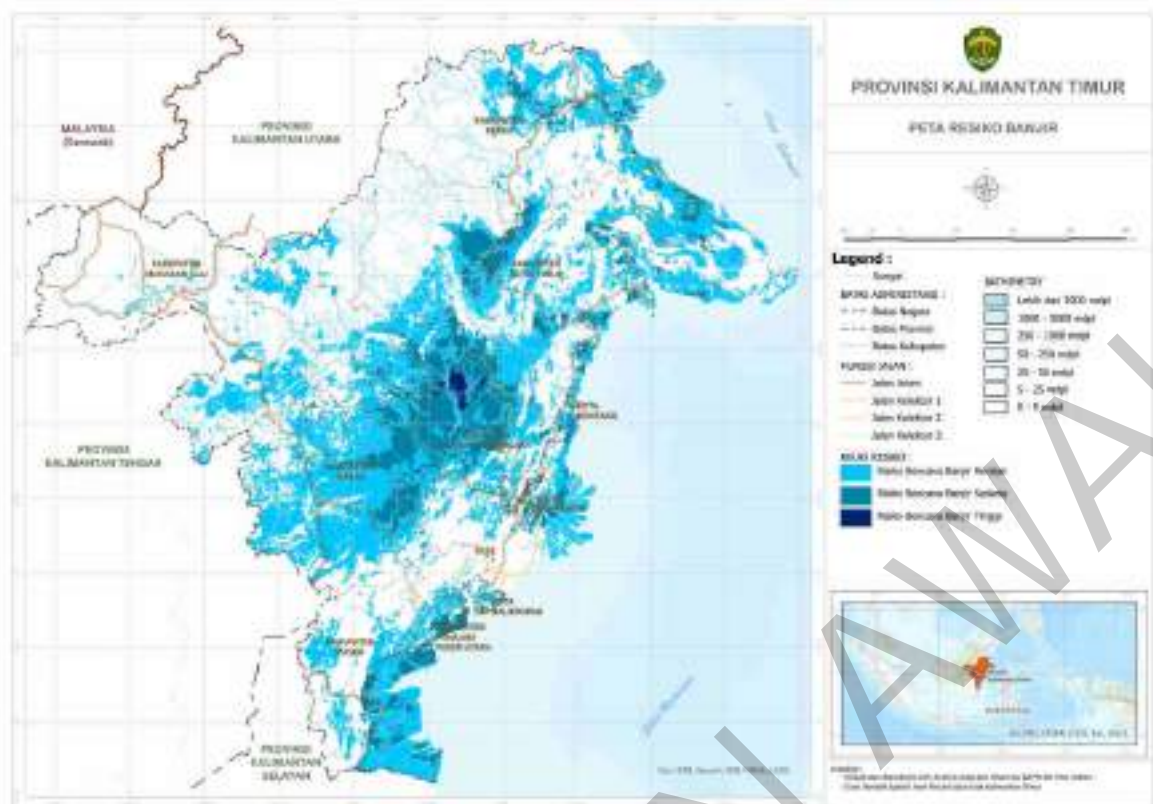
Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar II.10 dibawah ini.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.10**  
**Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur**

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim, diolah Bappeda Prov Kaltim 2022

**Gambar II.11**  
**Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Timur**

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran Banjir; peruntukan tata ruang di dataran Banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran Banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi Banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali Banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil Banjir.

Terjadinya bencana Banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana Banjir, antara lain:

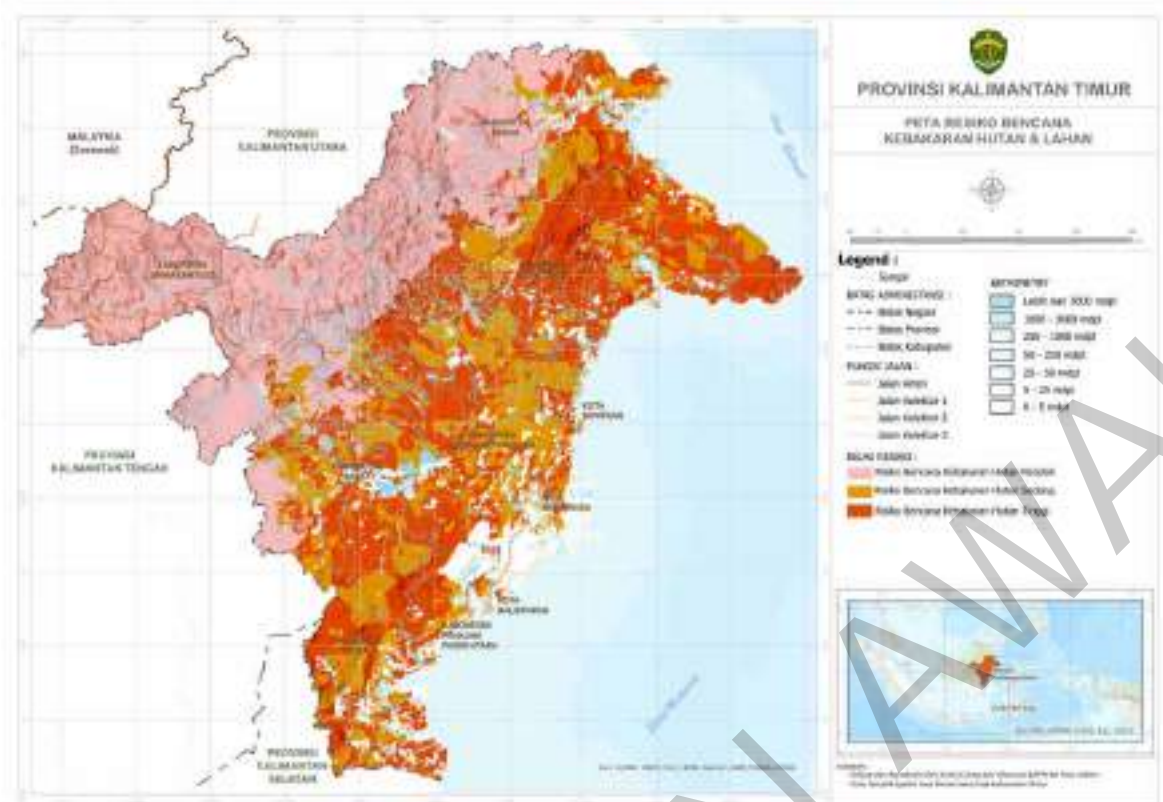
- Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun mengalami Banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan

sehingga saluran dalam arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan dan lama-lama menyebabkan Banjir.

- Daerah resapan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi Banjir.
- Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan Banjir.

Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar ketika berbicara tentang Banjir karena semestinya menjadi tempat untuk mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga kan terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.





Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi KALTIM, Diolah Bappeda Prov Kaltim 2022

**Gambar II.12**  
**Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

Faktor utama penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti El Nino yang didukung oleh kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kerawanan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan lahan berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat, sebagai berikut:

- Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di

permukaan (surface run off). Kondisi demikian menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar, terjadinya sedimentasi dan perubahan kualitas air serta turunnya populasi dan keanekaragaman ikan di perairan. Selain itu kerusakan hidrologi di lahan gambut akan menyebabkan jangkauan intrusi air laut semakin jauh ke darat.

- Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan)
- Penurunan produksi kayu, terganggunya kegiatan transportasi, dan meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

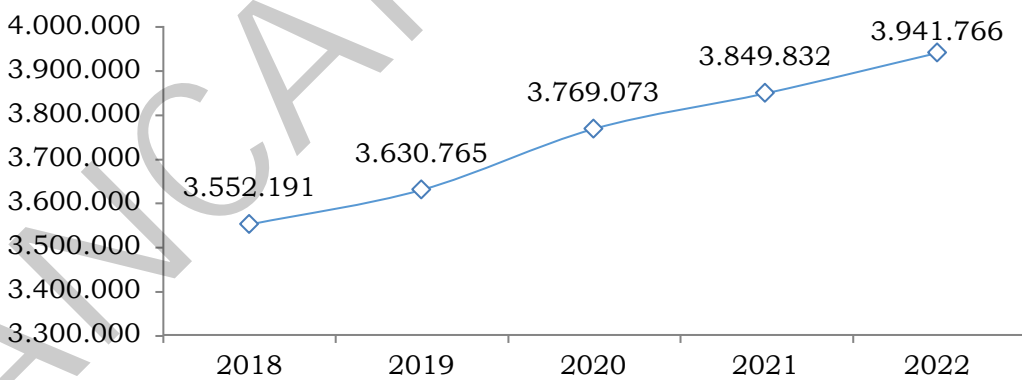
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dokumen informasi kebencanaan dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai dokumen rencana aksi penanggulangan bencana yang menjadi salah satu parameter dalam penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Di Tahun 2021 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki indeks 153,28 dan ditahun 2022, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan risiko bencana menjadi 146,47, atau penurunan sebesar 6.81 point dari tahun 2021, tetapi Provinsi Kalimantan Timur masih berada dalam zona yang memiliki risiko yang tinggi. Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana provinsi kalimantan Timur merupakan sebuah keberhasilan pemerintah

daerah dalam peningkatan Ketahanan Daerah. Ketahanan Daerah merupakan sebuah ukuran keberhasilan, yang ditandai dengan meningkatnya sebuah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan menjadi salah satu parameter penting untuk menentukan tingkat risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana; Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 3.552.191 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.941.766 jiwa pada tahun 2022.



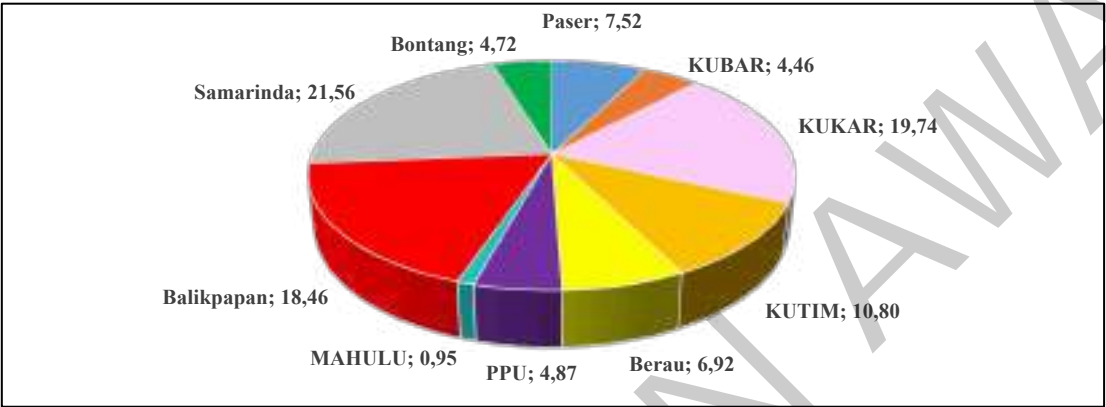
Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

**Gambar II.13**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,56 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan



penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,72%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,87%), Kabupaten Kutai Barat (4,46%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,95%).



Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

**Gambar II.14**  
**Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,98 persen selama lima tahun sejak tahun 2018–2022. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya hingga mencapai 4,39 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,20 persen.

**Tabel II.3**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Laju Pertumbuhan Penduduk (2018-2022) (%)
1	Paser	259.417	265.148	277.401	288.225	296.582	2,26
2	KUBAR	162.200	164.048	165.938	170.871	175.610	1,33
3	KUKAR	677.755	696.784	734.485	753.862	778.096	2,33
4	KUTIM	420.760	422.905	424.334	424.743	425.787	0,20
5	Berau	224.654	232.189	251.439	263.150	272.887	3,29
6	PPU	170.475	173.671	181.349	186.801	191.967	2,00
7	MAHULU	28.833	30.321	35.010	35.274	37.318	4,39
8	Balikpapan	649.806	670.505	697.079	710.293	727.665	1,90
9	Samarinda	778.883	793.576	817.254	831.220	849.717	1,46
10	Bontang	179.408	181.618	184.784	185.393	186.137	0,62
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>3.552.191</b>	<b>3.630.765</b>	<b>3.769.073</b>	<b>3.849.832</b>	<b>3.941.766</b>	<b>1,98</b>

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di Kota Balikpapan mencapai 1.428,08 per km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2,02 per km<sup>2</sup>. Dimana total kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 31,68 per km<sup>2</sup>.

Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

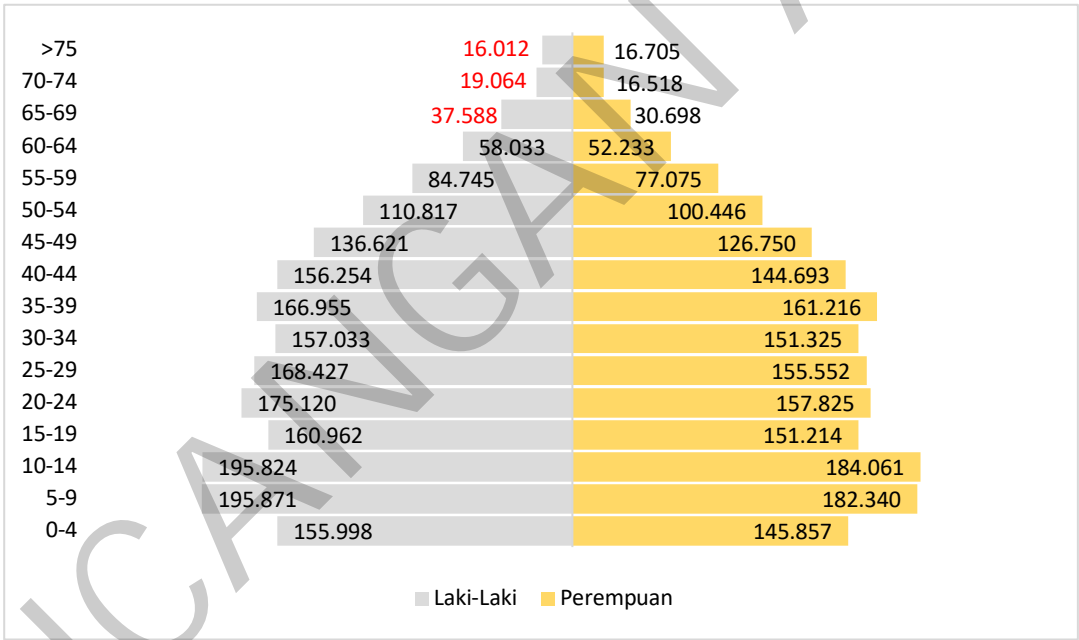
**Tabel II.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan**  
**Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	153.455	143.127	296.582	107,22	26,86
2	KUBAR	92.207	83.403	175.610	110,56	12,91
3	KUKAR	405.154	372.942	778.096	108,64	30,78
4	KUTIM	227.438	198.349	425.787	114,67	13,64
5	Berau	144.720	128.167	272.887	112,92	12,78
6	PPU	99.423	92.544	191.967	107,43	94,52
7	MAHULU	19.920	17.398	37.318	114,50	2,02
8	Balikpapan	371.777	355.888	727.665	104,46	1.428,08
9	Samarinda	432.306	417.411	849.717	103,57	1.186,39

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
10	Bontang	96.433	89.704	186.137	107,50	1.158,65
Kalimantan Timur		2.042.833	1.898.933	3.941.766	107,58	31,68

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 68,92 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat sebesar 45,16 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak dan belum produktif.



Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.15**  
**Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kalimantan Timur pada tahun 2020 pada laki-laki dan perempuan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,14 persen jika dibanding dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,16 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun mengalami penurunan menjadi sebesar 0,88 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 1,82 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 17,95 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 18,95 persen, dan untuk usia 19-24 tahun dimana kategori usia ini adalah merupakan penentu keberhasilan

dalam rangka mencetak para generasi muda Kalimantan Timur dengan kemampuan sumber daya manusia yang handal, pada tahun 2020 kategori penduduk usia 19-24 tahun ada peningkatan menjadi sebesar 70,17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 69,76 persen. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 70,56 persen.

Secara umum, rata-rata usia dari 7-24 tahun persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 26,25 persen jika dibanding dengan tahun 2016 yaitu 25,70 persen. Hal ini menggambarkan bahwa jenjang pendidikan dari usia dini sampai dengan dewasa telah memenuhi target yang ingin dicapai. Namun demikian angka tersebut terjadi kenaikan yang perlu diwaspadai, terlebih capaian tersebut masih di bawah angka Nasional.

**Tabel II.5**  
**Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022**

Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-Laki					
7-12	0,00	0,20	0,03	0,07	0,03
13-15	1,52	1,43	1,34	0,77	1,34
16-18	19,94	17,84	19,17	16,28	19,96
19-24	67,55	71,64	69,98	70,59	71,50
7-24	25,48	26,62	27,32	26,09	26,56
Perempuan					
7-12	0,00	0,13	0,26	0,00	0,00
13-15	0,12	0,48	0,43	0,26	16,22
16-18	16,05	18,40	16,66	19,66	68,99
19-24	72,30	67,62	70,38	69,60	24,69
7-24	24,96	24,19	25,10	25,66	
Laki-Laki + Perempuan					
7-12	0,00	0,16	0,14	0,04	0,01
13-15	0,86	0,98	0,88	0,52	1,21
16-18	18,07	18,10	17,95	17,93	18,22
19-24	69,78	69,76	70,17	70,12	70,29
7-24	25,23	25,45	26,25	25,88	25,65

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Tabel II.6**  
**Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022**

Kelompok Usia Sekolah	Tidak / Belum Pernah Bersekolah				
	2018	2019	2020	2021	2022
7-12	0,24	0,16	0,12	0,36	0,42
13-15	0,25	0,19	0,05	0,58	0,05
16-18	0,38	0,09	0,17	0,06	0,35
19-24	0,38	0,35	0,12	0,02	0,38
7-24	0,31	0,21	0,12	0,23	0,33
Kelompok Usia Sekolah	Masih Bersekolah				
	2018	2019	2020	2021	2022
7-12	99,67	99,68	99,73	99,60	99,57
13-15	98,89	98,83	99,07	98,90	28,74
16-18	81,55	81,81	81,88	82,01	81,43
19-24	29,84	29,89	29,71	29,86	29,33
7-24	74,46	74,34	73,63	73,88	74,02
Kelompok Usia Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi				
	2018	2019	2020	2021	2022
7-12	0,00	0,16	0,14	0,04	0,01
13-15	0,86	0,98	0,88	0,52	1,21
16-18	18,07	18,10	17,95	17,93	18,22
19-24	69,78	69,76	70,17	70,12	70,29
7-24	25,23	25,45	26,25	25,88	25,65

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut agama, maka mayoritas penduduk Kalimantan Timur memeluk agama Islam sebesar 87,4 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Timur.

**Tabel II.7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kong Huchu	Lainnya	Jumlah
1	Paser	272.788	9.769	9.299	488	530	0	5	292.879
2	KUBAR	82.408	54.238	36.078	141	36	1	99	173.001
3	KUKAR	706.546	41.426	14.400	2.569	254	6	83	765.284
4	KUTIM	345.969	41.996	34.964	2.522	133	6	23	425.613
5	Berau	224.748	24.263	15.961	224	649	22	8	265.875
6	PPU	179.143	7.046	2.603	91	39	0	1	188.923
7	MAHULU	8.528	5.422	22.137	60	3	0	3	36.153
8	Balikpapan	648.261	49.750	13.041	1.390	5.935	31	15	718.423
9	Samarinda	766.265	42.477	21.141	825	7.880	284	63	838.935
10	Bontang	167.023	15.248	3.221	298	138	0	0	185.928
Kalimantan Timur		3.401.679	291.635	172.845	8.608	15.597	350	300	3.891.014

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam mensukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang meningkat dari komposisi sektor non migas dan batubara sedangkan dari sektor dengan migas dan non migas mengalami sedikit penurunan di tahun 2020. Nilai PDRB dengan migas Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 607,59 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 505,55 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 314,89 triliun. Penurunan Nilai PDRB pada tahun 2020 dikarenakan terjadi anomali dimana karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam hal ekspor. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai PDRB kembali meningkat seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Timur dengan berkurangnya dampak Pandemi COVID-19, nilai PDRB migas mencapai Rp 921,33 triliun, nilai PDRB non migas sebesar Rp 792,53 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 381,97 triliun.

Tabel II.8  
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2018	636.454.483	518.074.570	291.567.584
2019	652.158.057	539.448.590	310.699.091
2020	607.744.486	505.786.456	315.126.677
2021	696.584.498	584.205.939	338.613.743
2022	921.332.980	792.531.260	381.969.993

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2022 mengalami perbaikan ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen.

RANCANGAN AWAL

**Tabel II.9**  
**Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022**

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50.147.994 (7,89)	51.567.377 (7,91)	53.455.323 (8,80)	59.089.937 (8,48)	64.891.735 (7,04)
B	Pertambangan dan Penggalian	296.725.329 (46,69)	297.371.390 (45,60)	250.845.967 (41,27)	314.198.045 (45,11)	490.501.116 (53,24)
C	Industri Pengolahan	115.272.211 (18,14)	116.204.903 (17,82)	115.564.453 (19,02)	123.816.183 (17,77)	138.636.144 (15,05)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	315.059 (0,05)	344.961 (0,05)	385.062 (0,06)	395.471 (0,06)	422.609 (0,05)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	288.891 (0,05)	307.667 (0,05)	326.534 (0,05)	348.377 (0,05)	379.899 (0,04)
F	Konstruksi	53.500.578 (8,42)	58.472.319 (8,97)	58.308.248 (9,59)	62.313.147 (8,95)	70.945.215 (7,70)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35.227.602 (5,54)	38.245.238 (5,86)	39.053.042 (6,43)	41.474.909 (5,95)	47.547.015 (5,16)
H	Transportasi dan Pergudangan	22.990.716 (3,62)	24.172.248 (3,71)	22.067.334 (3,63)	23.218.927 (3,33)	28.980.671 (3,15)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.106.132 (0,96)	6.691.563 (1,03)	6.479.402 (1,07)	6.707.636 (0,96)	7.520.922 (0,82)
J	Informasi dan Komunikasi	7.988.163 (1,26)	8.708.382 (1,34)	9.390.805 (1,55)	10.206.752 (1,47)	11.087.181 (1,20)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.717.119 (1,53)	10.216.630 (1,57)	10.490.249 (1,73)	11.244.159 (1,61)	13.379.873 (1,45)
L	Real Estate	5.574.934 (0,88)	5.768.853 (0,88)	5.868.848 (0,97)	5.891.471 (0,85)	6.152.947 (0,67)
M,N	Jasa Perusahaan	1.299.480 (0,20)	1.346.710 (0,21)	1.334.744 (0,22)	1.384.556 (0,20)	1.516.507 (0,16)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.337.921 (1,94)	13.019.826 (2,00)	12.750.605 (2,10)	13.198.181 (1,89)	14.448.961 (1,57)
P	Jasa Pendidikan	10.107.377 (1,59)	10.995.564 (1,69)	11.724.048 (1,93)	12.340.328 (1,77)	13.132.703 (1,43)



Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.905.167 (0,61)	4.289.673 (0,66)	5.331.020 (0,88)	6.205.096 (0,89)	6.692.400 (0,73)
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.994.008 (0,63)	4.434.754 (0,68)	4.368.801 (0,72)	4.551.864 (0,65)	5.097.080 (0,55)
PDRB		635.498.680 (100,00)	652.158.057 (100,00)	607.744.486 (100,00)	696.584.498 (100,00)	921.332.980 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

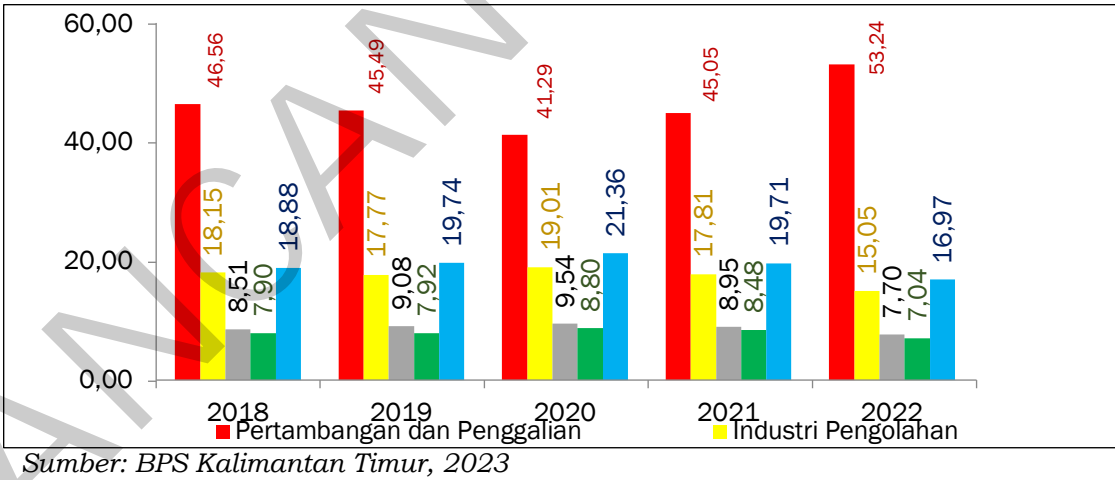
**Tabel II.10**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022**

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.140.165 (6,92)	33.396.194 (6,86)	33.026.690 (6,99)	33.001.680 (6,81)	33.649.338 (6,75)
B	Pertambangan dan Penggalian	218.686.722 (47,06)	233.762.253 (48,03)	222.909.197 (47,17)	227.991.366 (47,07)	235.949.043 (46,72)
C	Industri Pengolahan	96.797.539 (20,83)	96.824.494 (19,89)	93.909.767 (19,90)	96.208.521 (19,86)	99.651.978 (19,70)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	261.834 (0,06)	284.529 (0,06)	317.368 (0,07)	324.789 (0,07)	337.250 (0,06)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	224.574 (0,05)	235.440 (0,05)	247.995 (0,05)	258.504 (0,05)	278.099 (0,06)
F	Konstruksi	33.754.000 (7,26)	35.682.996 (7,33)	35.601.166 (7,49)	37.005.238 (7,63)	39.887.735 (7,68)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.678.998 (5,53)	27.025.570 (5,55)	27.069.910 (5,76)	28.216.889 (5,83)	30.137.130 (5,94)
H	Transportasi dan Pergudangan	13.937.815 (3,00)	14.264.273 (2,93)	13.281.104 (2,83)	13.667.051 (2,83)	15.301.391 (3,00)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.080.239 (0,88)	4.340.118 (0,89)	4.108.417 (0,87)	4.193.399 (0,86)	4.577.468 (0,90)
J	Informasi dan Komunikasi	7.295.360 (1,57)	7.795.537 (1,60)	8.338.485 (1,76)	8.994.261 (1,86)	9.712.239 (1,92)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.751.780 (1,45)	6.966.068 (1,43)	7.137.891 (1,51)	7.320.021 (1,51)	8.012.391 (1,58)
L	Real Estate	4.227.269 (0,91)	4.316.690 (0,89)	4.321.113 (0,91)	4.290.183 (0,89)	4.397.865 (0,88)
M,N	Jasa Perusahaan	896.170 (0,19)	914.126 (0,19)	889.600 (0,19)	911.510 (0,19)	960.338 (0,19)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.941.460 (1,71)	8.252.791 (1,70)	7.951.124 (1,68)	8.108.290 (1,67)	8.727.045 (1,71)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
P	Jasa Pendidikan	6.780.283 (1,46)	7.036.310 (1,45)	7.244.720 (1,53)	7.420.372 (1,53)	7.679.667 (1,53)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.691.435 (0,58)	2.864.486 (0,59)	3.404.048 (0,72)	3.861.218 (0,80)	4.048.704 (0,80)
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.548.786 (0,55)	2.750.363 (0,57)	2.634.733 (0,56)	2.665.592 (0,55)	2.851.225 (0,56)
<b>PDRB</b>		<b>464.694.427 (100,00)</b>	<b>486.712.237 (100,00)</b>	<b>472.393.329 (100,00)</b>	<b>484.438.884 (100,00)</b>	<b>506.158.907 (100,00)</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hingga menjadi 41,29 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan mencapai 45,05 persen sedangkan sektor yang lain mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian kembali meningkat tajam hingga mencapai 53,24 persen akan tetapi sektor yang lain mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



**Gambar II.16**  
**Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (persen)**

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan.

Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2018-2022 sebesar 8,05 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

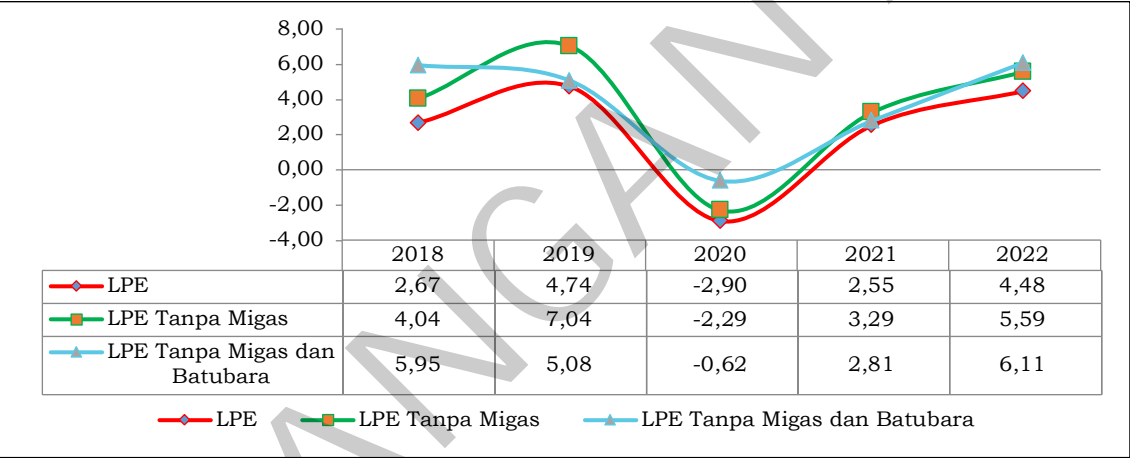
Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2021 kontribusinya hanya sebesar 5,42 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen pada tahun 2018, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,04 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,95 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi negatif 2,90 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 0,62 persen.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 4,48 persen dibandingkan tahun 2021

yang mencapai 5,55 persen. Pertumbuhan bersumber dari peningkatan permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mencapai 5,59 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,11 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut utamanya bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan sejalan dengan tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Di samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kaltim, mobilitas masyarakat yang terus membaik, dan masa panen produk pangan dan pertanian menjadi penopang pertumbuhan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.17**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)**

Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan banyak proyek pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Timur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendatang didukung oleh peningkatan kinerja di industri pengolahan minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi, seiring aktivitas masyarakat yang makin menggeliat. Tenaga kerja Kaltim akan terserap, kebutuhan ribuan pekerja di IKN pasti akan berhubungan dengan petani dan pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk akomodasi baik hotel maupun penginapan juga akan laku karena banyak tamu untuk berbisnis maupun dinas, bahkan pelaku UMKM juga terkena dampak dalam penjualan produk.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dimana terlihat pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19 dan ditahun 2022 seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan diikuti dengan pertumbuhan seluruh sektor lapangan usaha.

RANCANGAN AWAL

Tabel II.11

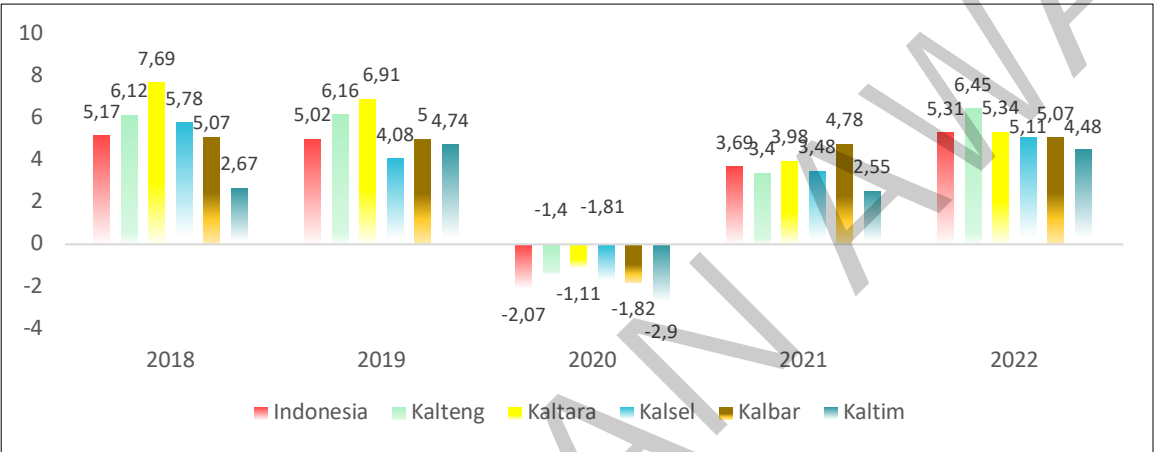
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,14	3,91	(0,98)	-0,08	1,96
B	Pertambangan dan Penggalan	1,07	6,89	(4,61)	2,28	3,49
C	Industri Pengolahan	0,69	0,03	(2,99)	2,45	3,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,76	8,67	11,47	2,34	3,84
E	Pengadaan Air	3,22	4,84	5,33	4,24	7,58
F	Konstruksi	7,91	5,71	(0,87)	3,94	7,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,16	5,24	0,57	4,24	6,81
H	Transportasi dan Pergudangan	5,80	2,34	(6,58)	2,91	11,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,70	6,37	(5,34)	2,07	9,16
J	Informasi dan Komunikasi	4,38	6,86	7,56	7,86	7,98
K	Jasa Keuangan	4,05	3,17	2,47	2,55	9,46
L	<i>Real Estate</i>	4,83	2,12	0,69	(0,72)	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	4,96	2,00	(3,14)	2,46	5,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,11	3,92	(3,83)	1,98	7,63
P	Jasa Pendidikan	7,73	3,78	2,96	2,42	3,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	6,43	20,22	13,43	4,86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,02	7,91	(3,01)	1,17	6,96
<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>2,67</b>	<b>4,74</b>	<b>(2,90)</b>	<b>2,55</b>	<b>4,48</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023



Secara regional, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mulai membaik. Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 6,45 persen, lalu diikuti Kalimantan Utara sebesar 5,34 persen, Kalimantan Selatan sebesar 5,11 persen, Kalimantan Barat sebesar 5,07 persen dan Kalimantan Timur sebesar 4,48 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 5,31 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.18**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)**

**Tabel II.12**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)**

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	102.584,20	109.767,66	110.821,28	115.053,40	125.598,38
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.958,20	3.239,36	3.248,32	3.419,27	3.689,59
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23.760,62	26.360,55	27.129,17	28.315,36	31.283,12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	173.474,79	188.079,94	188.258,10	209.951,00	232.491,11
5	Perubahan Inventori	1.613,95	768,36	1.228,65	383,61	401,29
6	Net Ekspor Barang & Jasa	331.106,93	324.264,39	277.058,96	339.461,86	527.869,49
PDRB		635.498,68	652.480,26	607.744,49	696.584,50	921.332,98

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2018-2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami

penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun. Pada tahun 2022 Ekonomi Kalimantan Timur mulai mengalami perbaikan ekonomi yang mencapai Rp 921,33 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel II.13**  
**Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16,14	16,82	18,23	16,52	13,63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,47	0,50	0,53	0,49	0,40
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,74	4,04	4,46	4,06	3,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,30	28,83	30,98	30,14	25,23
5	Perubahan Inventori	0,25	0,12	0,20	0,06	0,04
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	52,10	49,70	45,59	48,73	57,29

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018-2022 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

**Tabel II.14**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,14	3,15	(0,43)	1,23	3,41
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,57	6,77	(0,99)	0,66	3,03
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,91	8,11	(1,95)	3,03	8,48
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,54	4,81	(1,06)	7,74	5,47
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang & Jasa	0,17	5,05	(4,61)	0,64	4,05
<b>PDRB</b>		<b>2,64</b>	<b>4,70</b>	<b>-2,90</b>	<b>2,55</b>	<b>4,48</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2022 mencapai 4,48 persen. Dimana pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 3,03 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 8,48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB Kalimantan Timur dari sisi pertumbuhannya meningkat dikarenakan kegiatan Pemerintah.

**Tabel II.15**  
**Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Miliar Rp)**

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	34.362,05	35.734,75	34.712,07	36.581,32	36.980,15
2	KUBAR	20.108,76	21.253,83	20.644,38	21.509,56	22.535,73
3	KUKAR	121.509,48	126.272,37	120.953,68	124.197,10	128.805,43
4	KUTIM	88.582,49	95.815,41	92.868,68	92.039,29	97.174,42
5	Berau	26.769,40	28.275,57	27.337,09	28.802,65	29.940,78
6	PPU	6.590,45	6.762,58	6.604,62	6.492,78	7.433,74
7	MAHULU	1.675,32	1.767,80	1.763,93	1.786,29	1.802,46
8	Balikpapan	79.807,11	83.793,41	83.034,71	86.817,89	91.104,44
9	Samarinda	43.323,57	45.491,36	45.041,33	46.294,41	49.342,39
10	Bontang	41.316,22	40.427,70	39.320,23	39.949,08	40.931,39

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2022 mencapai Rp 128,81 triliun disusul perekonomian Kutai Timur dan Kota Balikpapan yang masing-masing dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar Rp 97,17 triliun dan Rp 91,10 triliun. Ketiga daerah ini memang layak memiliki kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja ekonomi adalah mulai menurunnya pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar global, meningkatnya rata-rata harga komoditas pangan (tandan buah segar/TBS kelapa sawi dan minyak kelapa sawit/CPO), Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sehingga terdapat peningkatan *demand* terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan

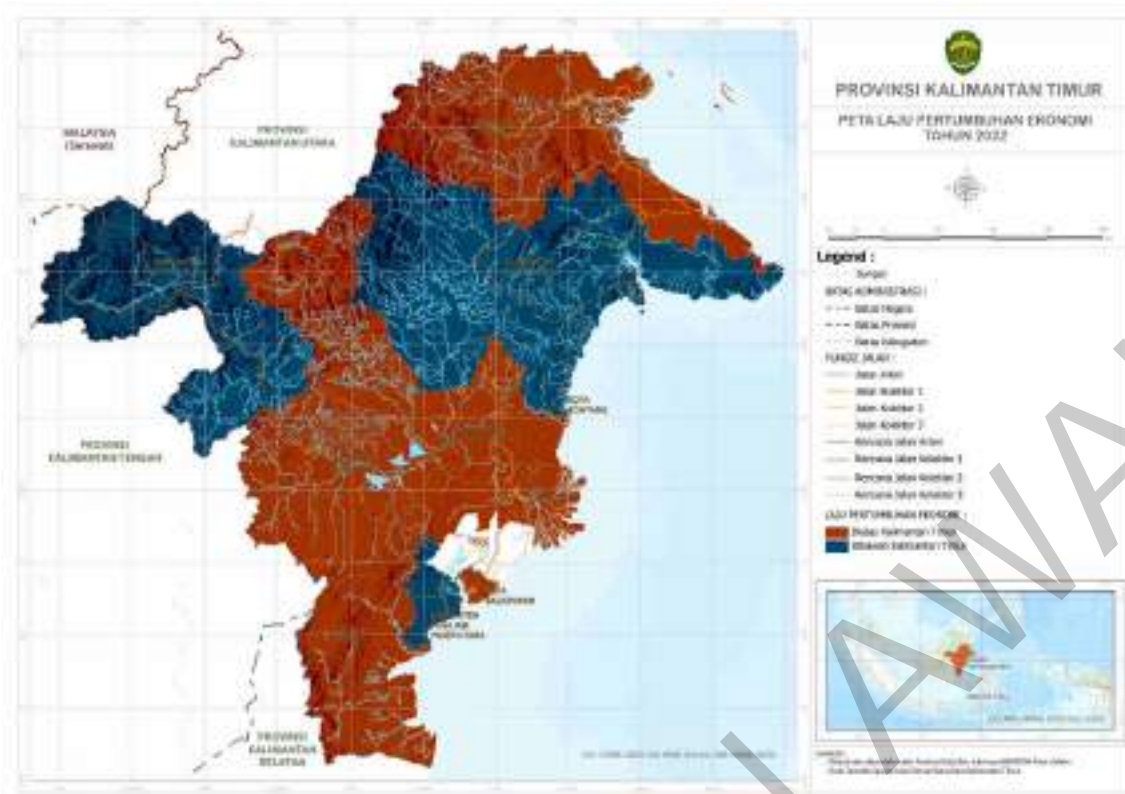
batubara dan kemudian diikuti peningkatan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

**Tabel II.16**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)**

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	3,69	3,99	-2,86	5,39	1,09
2	KUBAR	5,06	5,69	-2,87	4,19	4,77
3	KUKAR	2,16	3,92	-4,21	2,68	3,71
4	KUTIM	2,38	8,17	-3,08	-0,89	5,58
5	Berau	2,07	5,63	-3,32	5,36	3,95
6	PPU	1,28	2,61	-2,34	-1,69	14,49
7	MAHULU	5,40	5,52	-0,22	1,27	0,91
8	Balikpapan	4,97	4,99	-0,91	4,56	4,94
9	Samarinda	4,96	5,00	-0,99	2,78	6,58
10	Bontang	-4,08	-2,15	-2,74	1,60	2,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

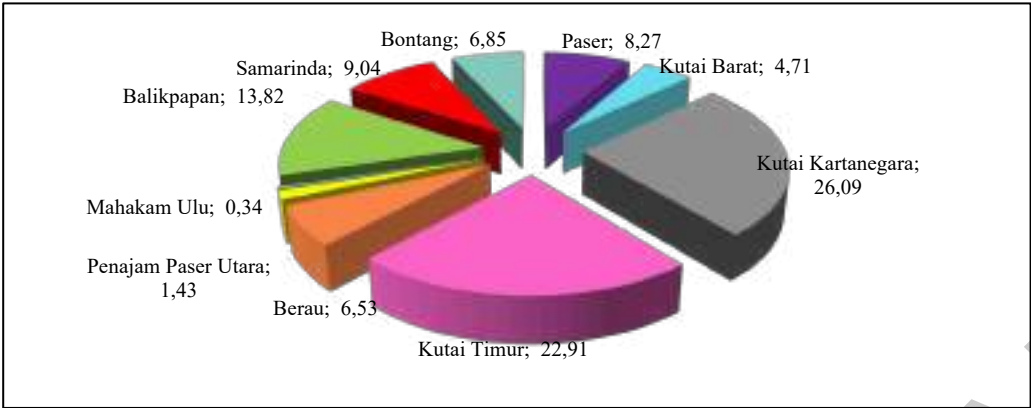
Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Kabupaten yang masih mengalami pertumbuhan yang melambat adalah Kabupaten Paser yaitu 1,09 persen dan Kabupaten Mahakam Ulu 0,91 persen. Sementara itu, wilayah kabupaten/kota lainnya mengalami pertumbuhan yang cepat dengan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan capaian 14,49 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.19**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 26,09 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 22,91 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 13,82 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 10 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.20**  
**Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (%)**

Pada tahun 2022, terdapat 5 (lima) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 85,09 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

**Tabel II.17**  
**Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022**

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	76,37	Pertanian	10,05	Industri	4,17
KUBAR	Pertambangan	57,88	Pertanian	12,27	Konstruksi	9,22
KUKAR	Pertambangan	70,77	Pertanian	10,72	Konstruksi	6,35
KUTIM	Pertambangan	85,09	Pertanian	5,90	Industri	2,55
Berau	Pertambangan	66,98	Pertanian	9,33	Perdagangan	4,99
PPU	Konstruksi	24,11	Pertambangan	22,62	Pertanian	19,41
MAHULU	Pertanian	74,53	Konstruksi	6,73	Pertambangan	6,29
Balikpapan	Industri	47,20	Konstruksi	15,81	Transportasi	10,75
Samarinda	Konstruksi	20,51	Perdagangan	16,07	Pertambangan	15,66
Bontang	Industri	78,72	Konstruksi	7,04	Perdagangan	3,32

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 76,37 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten



Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 70,77 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau. Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

**Tabel II.18**  
**Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran**  
**Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2022**

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	74,38	PMTB	13,57	K. Ruta	9,53
KUBAR	Net Ekspor	54,77	PMTB	27,13	K. Ruta	11,94
KUKAR	Net Ekspor	58,34	PMTB	30,48	K. Ruta	8,79
KUTIM	Net Ekspor	80,07	PMTB	13,92	K. Ruta	4,45
Berau	Net Ekspor	73,45	PMTB	14,41	K. Ruta	8,79
PPU	PMTB	55,19	K. Ruta	34,20	K. Pemerintah	10,18
MAHULU	Net Ekspor	32,87	PMTB	28,89	K. Ruta	24,43
Balikpapan	PMTB	37,72	Net Ekspor	35,07	K. Ruta	23,53
Samarinda	K. Ruta	43,94	PMTB	42,20	K. Pemerintah	12,75
Bontang	Net Ekspor	73,21	PMTB	13,99	K. Ruta	10,35

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Pada tahun 2022, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebanyak tujuh kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT). Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan didominasi oleh komponen PMTB (investasi) yang masing-masing memberi *share* sebesar 55,19 persen dan 37,72 persen. Sementara itu, perekonomian wilayah Kota Samarinda didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsusmsi Akhir Rumah Tangga dengan *share* 43,94.

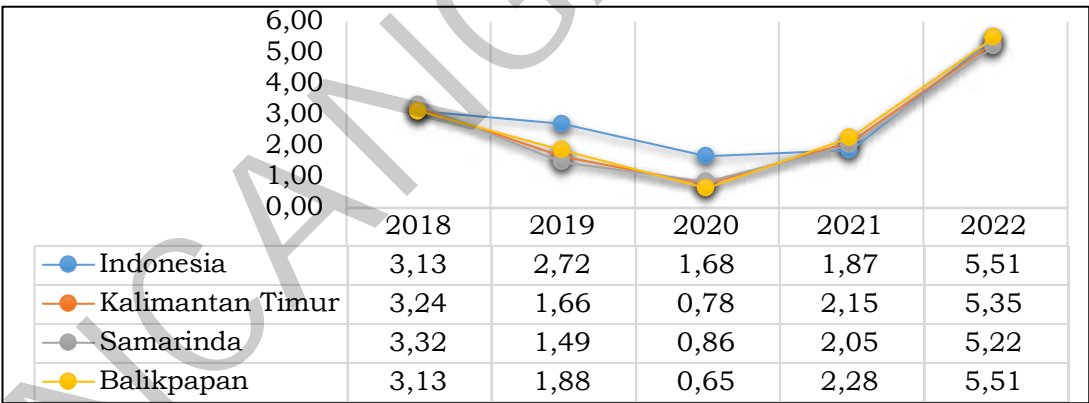
Kabupaten/kota yang porsi tersebarnya merupakan Net Ekspor merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam,



seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai *share* Net Ekspor terbesar adalah Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebesar 80,07 persen. Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau juga memiliki *share* Net Ekspor yang signifikan, yaitu masing-masing sebesar 74,38 persen dan 73,45 persen. Sementara itu, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki nilai *share* Net Ekspor masing-masing sebesar 73,21 persen, 54,77 persen, 58,34 persen dan 32,87 persen.

**B. Laju Inflasi**

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 5,35 persen. Hal ini karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.21**  
**Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)**

Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih disumbang secara dominan oleh bahan makanan menjadi penyumbang terbesar inflasi umum yang berpotensi meningkatkan kemiskinan mengingat alokasi makanan dalam budget rumah tangga miskin cenderung lebih besar ketimbang alokasi makanan dalam budget rumah tangga non miskin karena harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan yang

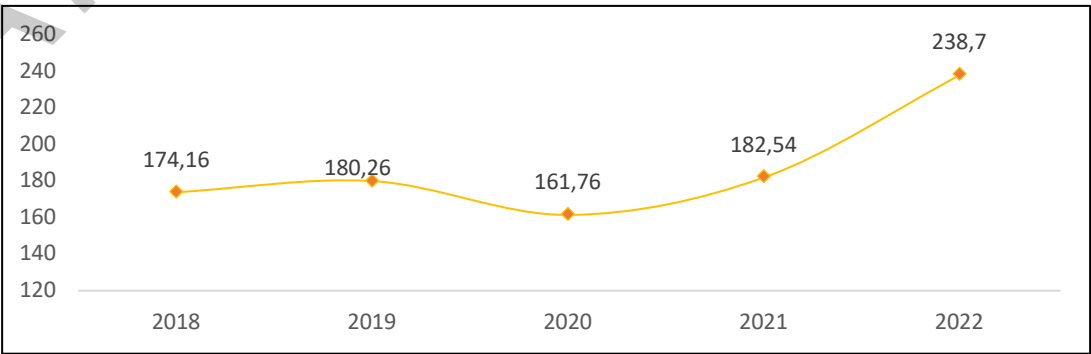
mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Meningkat. Peningkatan inflasi pada tahun 2022 terjadi seiring dengan membaiknya optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian seiring semakin terkendalnya kasus COVID-19 yang mendorong normalisasi permintaan masyarakat.

Kota Balikpapan pada tahun 2022 mengalami inflasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 5,51 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 5,22 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 5,35 persen.

**C. PDRB Per Kapita**

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRBnya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya.

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dari sebesar Rp 180,26 juta menjadi Rp 160,11 juta. Hal ini tentu saja disebabkan adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi makro. Namun di tahun 2022 nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali meningkat mencapai Rp 238,70 juta.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.22**  
**PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

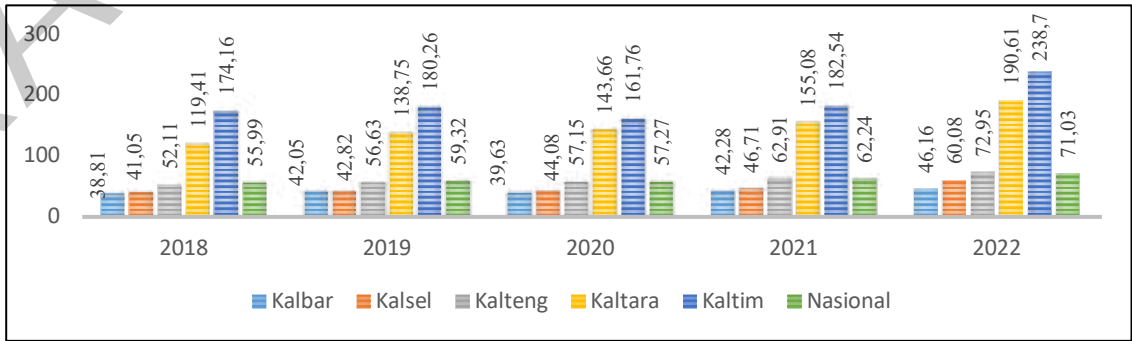
Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2022 yakni di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 450,27 juta, Kota Bontang sebesar Rp 344,56 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 325,67 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 72,05 juta dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 94,51 juta.

**Tabel II.19**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	171,64	173,34	157,18	194,12	272,09
2	KUBAR	192,10	195,40	158,03	184,46	246,65
3	KUKAR	210,47	212,76	204,50	241,84	325,67
4	KUTIM	353,74	367,11	268,80	304,16	450,27
5	Berau	166,27	173,83	143,67	170,34	232,68
6	PPU	55,70	57,76	50,78	55,85	72,05
7	MAHULU	95,32	102,46	85,38	90,17	94,51
8	Balikpapan	151,30	165,69	151,31	160,20	180,96
9	Samarinda	74,08	79,95	80,36	85,60	99,82
10	Bontang	337,45	327,06	311,88	320,44	344,56

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 238,70 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.23**  
**PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

D. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,31 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sebanyak 236,25 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 241,77 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 728.208 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Penurunan angka kemiskinan terjadi karena mulai pulihnya perekonomian sehingga memberikan pengaruh positif pada beberapa lapangan usaha.

**Tabel II.20**  
**Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230,26	6,10
Maret 2021	485.445	203.590	689.035	241,77	6,54
Maret 2022	513.874	214.334	728.208	236,25	6,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Tingkat kemiskinan masyarakat di Kaltim juga tercermin dari peningkatan Garis Kemiskinan (GK) Kaltim dengan peningkatan GK di perdesaan yang lebih besar dibandingkan di perkotaan. GK meningkat dari Rp689.035/kapita/bulan pada bulan Maret 2021 menjadi Rp728.208/kapita/bulan pada Maret 2022. Peningkatan garis kemiskinan Kaltim bersumber dari peningkatan garis kemiskinan baik dari perkotaan maupun perdesaan. Dari sisi lokasi, peningkatan garis kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 6,67% atau lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang meningkat sebesar 5,23%. Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM di perkotaan dan perdesaan utamanya disebabkan oleh komoditas beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras, sedangkan komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKNM di perkotaan dan perdesaan adalah komoditas perumahan. Komoditas beras merupakan penyumbang terhadap GKM di perkotaan dan perdesaan dengan masing-masing tercatat sebesar 14,88% dan 17,41%. Selanjutnya, rokok kretek filter merupakan komoditas yang menyumbang GKM terbesar kedua yang tercatat sebesar 11,14% di perkotaan dan 14,24% di perdesaan.

Selanjutnya, diikuti oleh komoditas telur ayam ras yang tercatat sebesar 4,66% di perkotaan dan 4,35% di perdesaan. Komoditas lainnya yang memberi sumbangan GKM adalah daging ayam ras, mie instan, gula pasir, ikan tongkol, bawang merah, ikan kembung, dan cabai rawit.

**Tabel II.21**  
**Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan**  
**Menurut Daerah Tahun 2022**

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	69,33	Beras	73,30
2	Rokok Kretek Filter	11,14	Rokok Kretek Filter	14,24
3	Daging ayam ras	5,01	Telur ayam ras	4,35
4	Telur ayam ras	4,66	Tongkol/Tuna/Cakalang	3,30
5	Mie Instan	3,50	Mie Instan	3,19
6	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,94	Daging Ayam Ras	2,99
7	Gula Pasir	2,18	Gula Pasir	2,61
8	Bawang Merah	1,92	Bawang merah	2,29
9	Cabe Rawit	1,84	Kembung	1,92
10	Tempe	1,65	Cabe Rawit	1,85

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

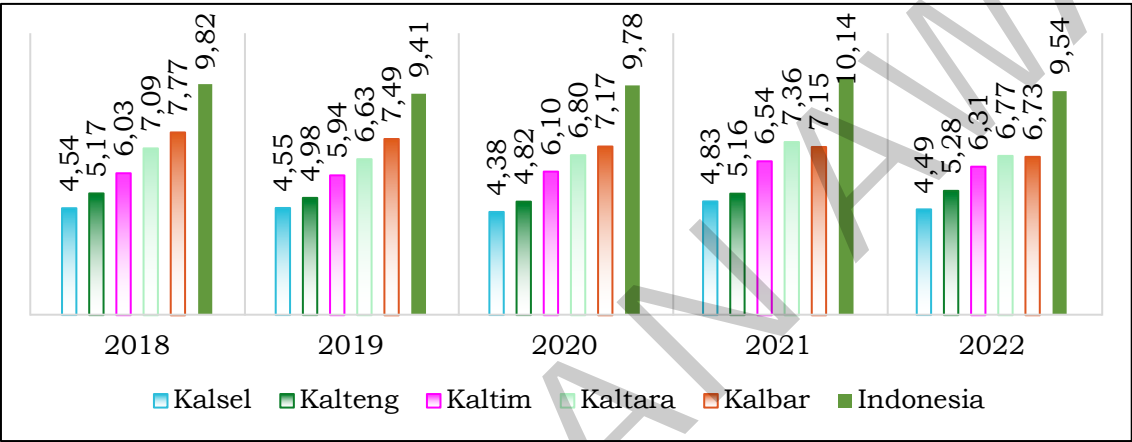
Bila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2022 masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,55 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,45 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, perkembangan positif selalu ditunjukkan dari hasil pembangunan daerah hingga Pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

**Tabel II.22**  
**Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)**

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	9,03	8,95	9,23	9,73	9,43
2	KUBAR	9,15	9,09	9,29	10,24	10,20
3	KUKAR	7,41	7,20	7,31	7,99	7,96
4	KUTIM	9,22	9,48	9,55	9,81	9,28
5	Berau	5,04	5,04	5,19	5,88	5,65
6	PPU	7,40	7,18	7,36	7,61	7,25
7	MAHULU	11,62	11,25	11,44	11,90	11,55
8	Balikpapan	2,64	2,42	2,57	2,89	2,45
9	Samarinda	4,59	4,59	4,76	4,99	4,85
10	Bontang	4,67	4,22	4,38	4,62	4,54

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan tengah meningkat sebanyak 0,12 poin, sementara Kalimantan Timur menurun sebanyak 0,23 poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,54 persen.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.24**  
**Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional**  
**Tahun 2018-2022**

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 62.870 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 41.950 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 36.840 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

**Tabel II.23**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)**

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	25.140	25.450	26.770	27.560	27.020
2	KUBAR	13.490	13.450	13.780	15.380	15.380
3	KUKAR	56.560	56.340	58.420	62.360	62.870
4	KUTIM	33.020	35.310	36.980	37.780	36.840
5	Berau	11.330	11.620	12.300	13.620	13.310
6	PPU	11.760	11.520	11.930	12.130	11.590
7	MAHULU	3.250	3.190	3.260	3.180	3.100
8	Balikpapan	17.010	15.780	17.020	18.530	15.830
9	Samarinda	39.230	39.800	41.920	42.840	41.950
10	Bontang	8.100	7.470	7.910	8.410	8.390

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Tabel II.24**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya**  
**Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2018	0,656	1,229	0,846
Maret 2019	0,610	1,530	0,910
Maret 2020	0,664	1,743	1,015
Maret 2021	1,017	1,673	1,223
Maret 2022	0,672	1,687	0,989
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)			
Maret 2018	0,161	0,270	0,197
Maret 2019	0,130	0,380	0,210
Maret 2020	0,157	0,412	0,240
Maret 2021	0,303	0,413	0,337
Maret 2022	0,149	0,395	0,226

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan begitu juga Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 0,989. Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,337 menjadi 0,226 pada periode yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)



di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2022, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,672 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,687. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,149 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,395. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

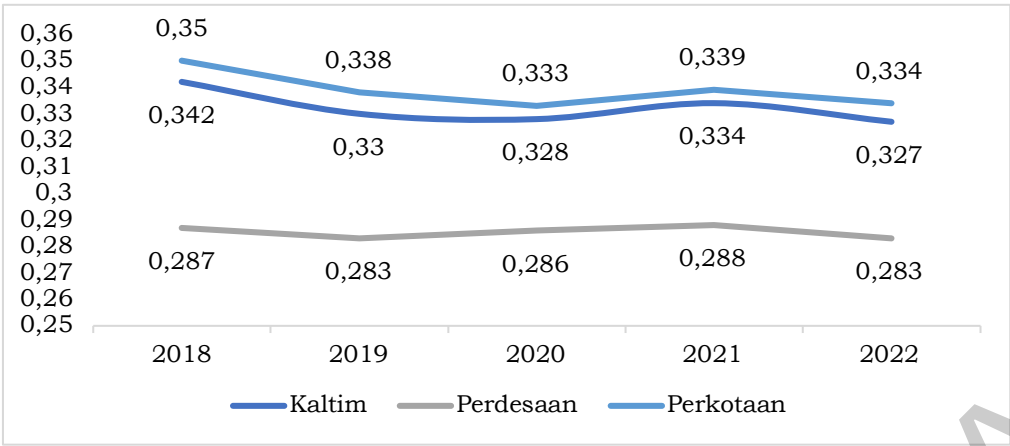
Pada Tabel II.24 menggambarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan terus meningkat dari tahun 2019-2021 dalam 3 tahun ini (2019, dengan nilai 0,910 di tahun 2021 tercatat berada pada nilai 1,223. Sempat menyentuh nilai 1,015 (2020) dan 1,223 (2021) yaitu pada masa Pandemi COVID-19. Serupa dengan Tingkat Keparahan kemiskinan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kalimantan Timur. Sejak tahun 2019 dengan nilai 0,197 meningkat menjadi 0,337 di tahun 2021. Bahkan pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan pernah berada di nilai 0,303 di tahun 2021, yaitu pada masa Pandemi COVID-2019. Kondisi yang tidak baik tersebut akan dipadukan dengan Program Pemerintah Pusat yaitu Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada tahun 2023 dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan di wilayah Perkotaan dan wilayah perdesaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kalimantan Timur menurun 0,989 dan 0,226. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati batas garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin menjadi semakin kecil.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.25**  
**Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2022**

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang diukur dengan Indeks Gini, selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pengalaman performa baik pada tahun 2018 ke 2020 yaitu kondisi penurunan pernah ditunjukkan pada nilai 0,342 menjadi 0,328. Pada tahun 2021 Indeks Gini mengalami peningkatan menjadi 0,334. Rasio gini di Kalimantan Timur tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 0,327 hal ini menunjukkan geliat usaha yang semakin adaptif pasca Pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menjadi faktor utama membaiknya kinerja aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perputaran roda perekonomian, sehingga terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kalimantan Timur. Akan tetapi capaian indeks gini tahun 2022 masih dibawah target sebesar 0,308. Sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan ketimpangan pendapatan penduduk.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.26**  
**Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

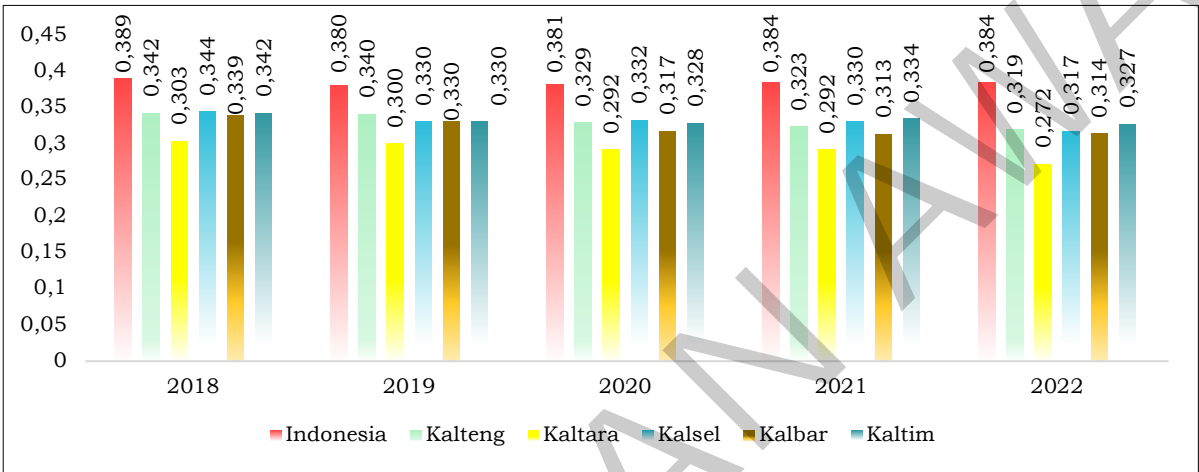
Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki indeks gini paling rendah dengan capaian 0,269. Kabupaten Berau memiliki Indeks Gini tertinggi dengan capaian 0,352.

**Tabel II.25**  
**Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	0,299	0,262	0,290	0,288	0,282
2	KUBAR	0,311	0,334	0,338	0,317	0,300
3	KUKAR	0,302	0,278	0,294	0,283	0,269
4	KUTIM	0,326	0,346	0,325	0,328	0,304
5	Berau	0,303	0,345	0,300	0,377	0,352
6	PPU	0,313	0,322	0,292	0,263	0,274
7	MAHULU	0,334	0,302	0,259	0,270	0,288
8	Balikpapan	0,356	0,302	0,311	0,325	0,334
9	Samarinda	0,317	0,341	0,324	0,322	0,346
10	Bontang	0,376	0,338	0,405	0,340	0,324

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,272. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,384 pada tahun 2022. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.



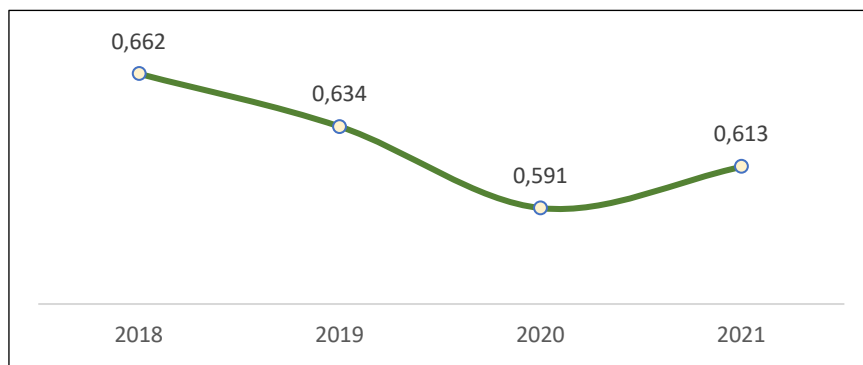
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.27**

**Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2018-2022**

**E. Ketimpangan Antar Wilayah**

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, walaupun terdapat kecenderungan semakin menurun sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,594. Namun di tahun 2021 angka Indeks Williamson mengalami sedikit peningkatan yang mencapai 0,613.



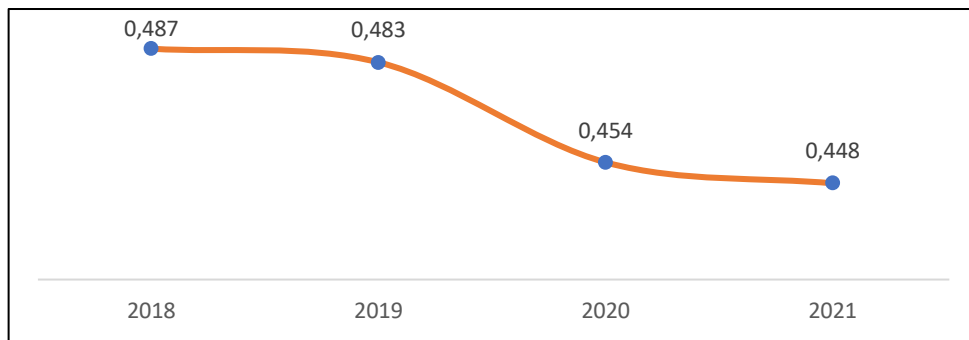
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.28**  
**Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)**  
**Regional Kalimantan Tahun 2018-2021**

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalan menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Pada tahun 2021, Kalimantan Timur memegang 48,46 persen perekonomian di pulau Kalimantan, disusul Kalimantan Barat yang menyumbang 16,53 persen perekonomian, sedangkan Kalimantan Utara hanya menyumbang 7,91 persen. Sedangkan jika dilihat dari PDRB per kapita, Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita yang tertinggi kedua yakni mencapai 182,54 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita di Kalimantan Barat hanya seperempat dari PDRB per kapita Kalimantan Timur, yakni hanya sebesar 42,28 juta rupiah.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

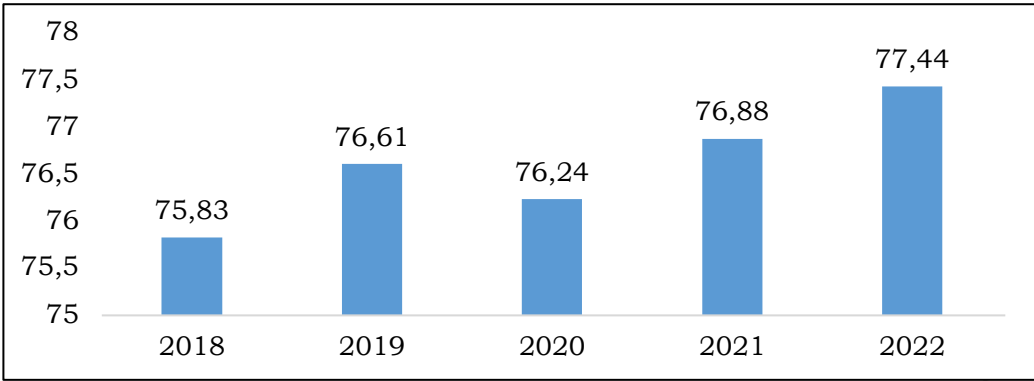
**Gambar II.29**

**Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamsson) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021**

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

**F. Indeks Pembangunan Manusia**

Selama periode 2018-2022, angka IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM mengalami penurunan. Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada rumusan IPM Kalimantan Timur. Pada tahun 2021-2022 IPM Kalimantan Timur kembali mengalami peningkatan mencapai 76,88 dan 77,44. Capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi ketiga di Nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.30**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022**

Peningkatan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2022, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi naik. Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan terbesar adalah Kabupaten Kutai Barat sebesar 1,18 persen dari 72,07 di tahun 2021 menjadi 72,92 di tahun 2022. Selain Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu juga mengalami peningkatan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 1,18 persen dari 67,95 di tahun 2021 menjadi 68,75 di tahun 2022.

**Tabel II.26**  
**Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

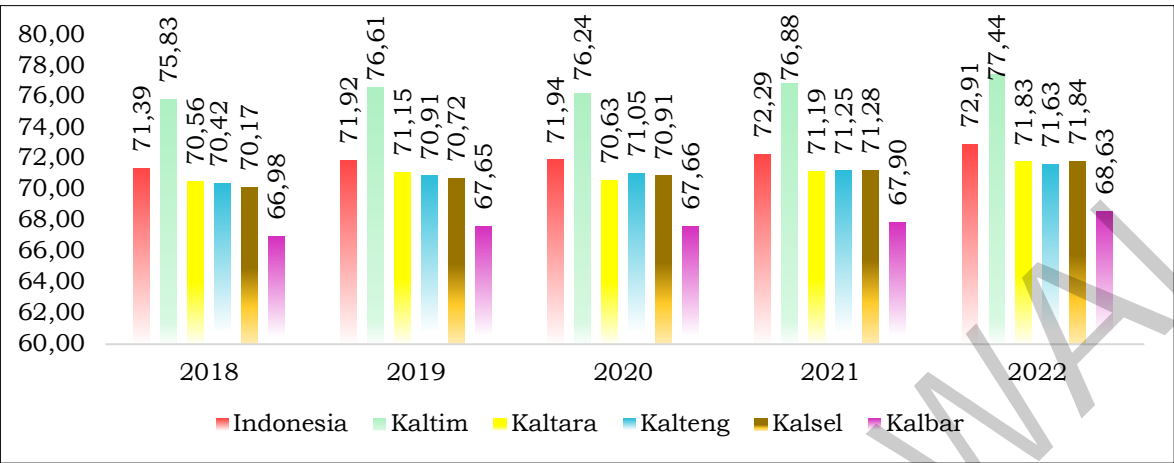
No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	71,61	72,29	72,04	72,93	73,44
2	KUBAR	70,69	71,63	71,19	72,07	72,92
3	KUKAR	73,15	73,78	73,59	74,06	74,67
4	KUTIM	72,56	73,49	73,00	73,81	74,35
5	Berau	74,01	74,88	74,71	75,20	75,74
6	PPU	71,13	71,64	71,41	72,01	72,55
7	MAHULU	66,67	67,58	67,09	67,95	68,75
8	Balikpapan	79,81	80,11	80,01	80,71	81,13
9	Samarinda	79,93	80,20	80,11	80,76	81,43
10	Bontang	79,86	80,09	80,02	80,59	80,94

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 68,63 – 71,84. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi telah berkurang di seluruh



wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak positif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.31**  
**Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia**

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Pola spasial capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 menunjukkan kondisi adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Penduduk kabupaten/kota dengan status pencapaian IPM yang sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” memiliki kemudahan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses hasil pembangunan terutama dalam hal memperoleh atau bahkan meningkatkan pendapatan serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibanding penduduk di kabupaten dengan status pencapaian IPM kategori “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.32**  
**Pola Spasial Status Pencapaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022**

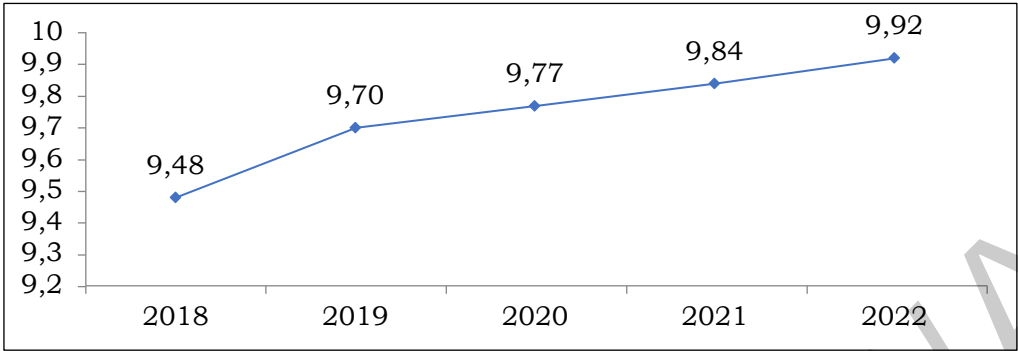
Pada tahun 2022 tidak ada perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda memiliki status IPM “Sangat Tinggi”, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki status IPM “Tinggi” sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki status “Sedang”.

Perkembangan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM diuraikan sebagai berikut:

**1) Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 mencapai 9,92 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian

Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2022 berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.33**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (Tahun)**

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama sekolah tertinggi diatas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota Balikpapan memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,92 tahun. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 8,36 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III). Angka ini masih-belum mencapai target pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

**Tabel II.27**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022 (tahun)**

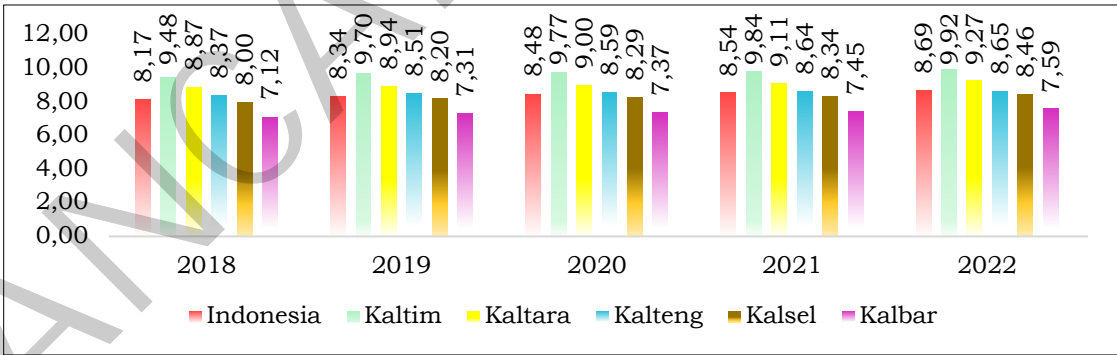
No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	8,22	8,54	8,55	8,79	8,80
2	KUBAR	8,07	8,34	8,47	8,70	8,78
3	KUKAR	8,84	9,10	9,22	9,23	9,24
4	KUTIM	9,08	9,18	9,19	9,43	9,44
5	Berau	8,98	9,25	9,52	9,53	9,54
6	PPU	8,03	8,16	8,28	8,36	8,51
7	MAHULU	7,69	7,89	7,97	8,18	8,36
8	Balikpapan	10,65	10,67	10,68	10,91	10,92
9	Samarinda	10,46	10,47	10,48	10,49	10,71
10	Bontang	10,72	10,73	10,79	10,80	10,81

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Seperti data yang tersaji pada Tabel II.27 diatas, sampai dengan tahun 2022 masih terdapat empat Kabupaten yaitu Kabupaten Mahulu, PPU, Kubar dan Paser yang memiliki angka rata-rata lama sekolah dibawah angka rata-rata lama sekolah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya. Namun demikian dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terlihat adanya trend kenaikan angka rata-rata lama sekolah pada keempat Kabupaten tersebut walaupun tidak signifikan.

Jika dilihat berdasarkan capaian rata-rata lama sekolah yang tertinggi ditahun 2022, Kota Balikpapan menduduki peringkat pertama rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana pendidikan yang sudah lengkap ataupun memadai di semua jenjang Pendidikan di Kota Balikpapan, sedangkan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah adalah Kab. Mahulu dengan capaian tahun 2022 sebesar 8,36 tahun, hal ini dimungkinkan antara lain karena infrastruktur pendidikan di Kab. Mahulu masih perlu mendapat perhatian khusus baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah.

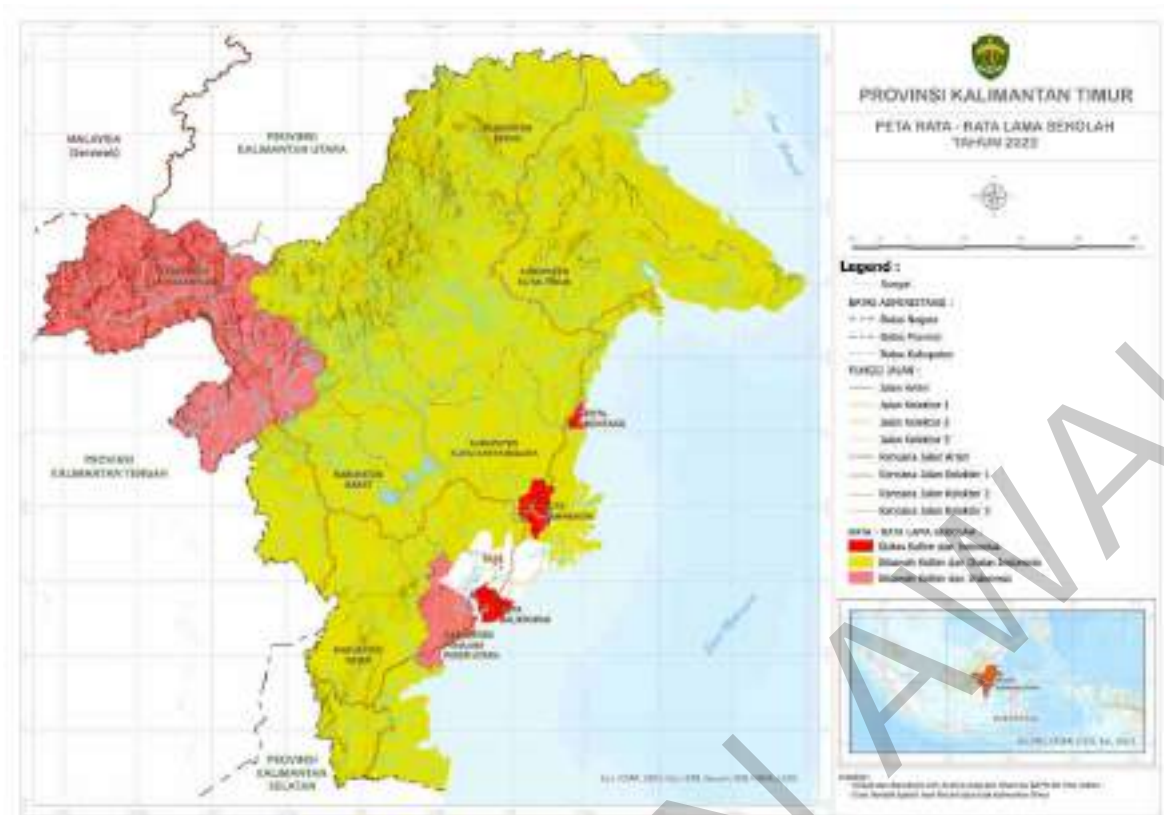
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,92 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,69 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,27 tahun dan 8,65 tahun.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.34**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia**

Pola spasial capaian Rata-Rata Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tingginya angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.



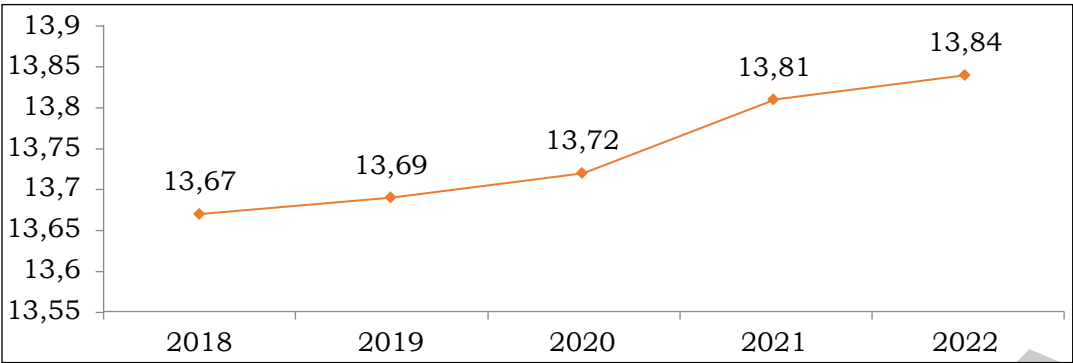
Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.35**  
**Pola Spasial Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2022**

**2) Harapan Lama Sekolah**

Di tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,84 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Namun apabila dilihat pada capaian harapan lama sekolah di setiap kabupaten/kota maka pemerintah juga perlu untuk memberikan perhatian secara optimal khususnya pada kabupaten/kota yang harapan lama sekolahnya masih berada dibawah provinsi seperti: Mahulu, PPU, Kutim, Kubar, Bontang, Paser, Berau dan Kukar yang masih mempunyai harapan lama sekolah dibawah rata-rata Provinsi yaitu sebesar 13,84. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini:





Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.36**  
**Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (Tahun)**

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 15,10 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,62 tahun pada tahun 2022 merupakan capaian harapan lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya.

**Tabel II.28**  
**Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	12,99	13,00	13,10	13,25	13,27
2	KUBAR	12,88	12,89	12,90	13,02	13,09
3	KUKAR	13,57	13,58	13,59	13,60	13,63
4	KUTIM	12,65	12,78	12,89	12,90	13,00
5	Berau	13,3	13,31	13,32	13,33	13,35
6	PPU	12,54	12,55	12,56	12,57	12,70
7	MAHULU	12,48	12,50	12,51	12,61	12,62
8	Balikpapan	14,12	14,13	14,14	14,22	14,23
9	Samarinda	14,66	14,70	14,89	15,09	15,10
10	Bontang	12,89	12,90	13,03	13,17	13,18

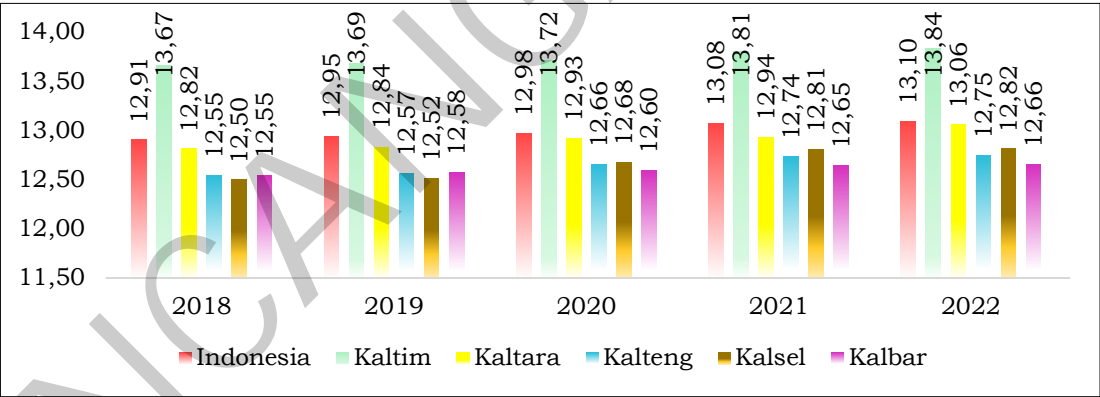
Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

Secara umum Harapan Lama Sekolah pada kabupaten/kota mengalami trend kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2022 meskipun kenaikan harapan lama sekolah di kabupaten/kota belum menunjukkan kenaikan secara signifikan. Sebagai upaya pemerintah terhadap peningkatan harapan lama sekolah di delapan kabupaten dengan angka harapan lama sekolah masih berada dibawah provinsi khususnya Kabupaten Mahulu dengan angka harapan lama sekolah yang paling rendah, maka diperlukan adanya langkah konkret sebagai upaya

pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama sekolah dapat segera diwujudkan.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun tren laju pertumbuhan komponen ini (2018-2022) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.

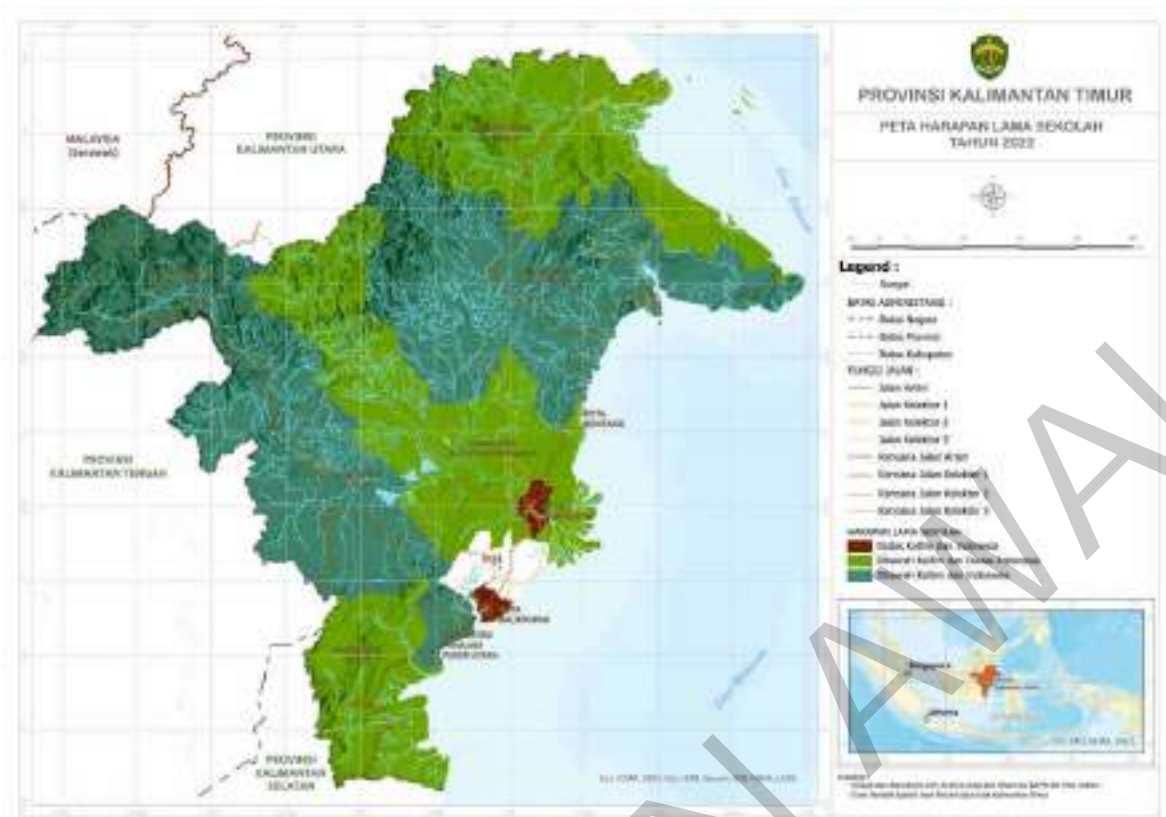


Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.37**  
**Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia**

Pola spasial capaian Harapan Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam Pendidikan formal pada waktu tertentu.



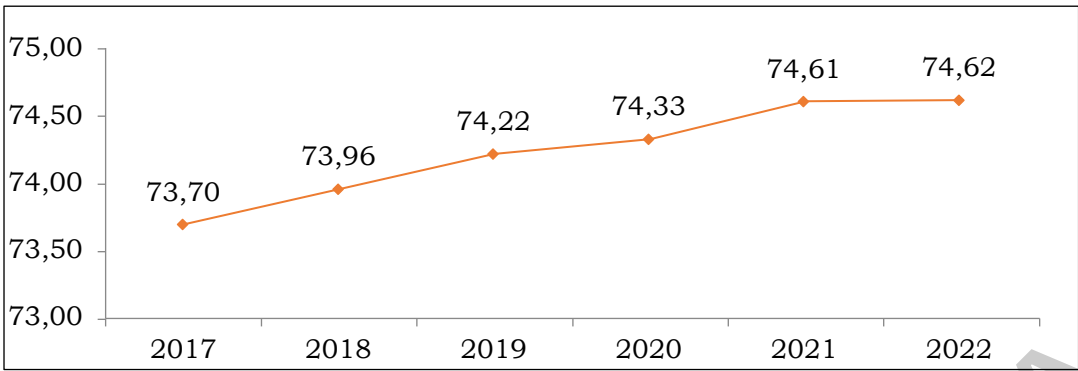


Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.38**  
**Pola Spasial Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2022**

**3) Umur Harapan Hidup**

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 73,96 tahun dan pada tahun 2022 menjadi 74,62 tahun. Selama periode tersebut secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,2 persen per tahun atau secara kumulatif terdapat peningkatan 1,34 poin. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 74,75 tahun. Dari sisi preventif Keberhasilan Pemerintah dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal dan penyakit-penyakit terkait gizi. Sedangkan dari sisi kuratif tergambarkan upaya pemerintah dan swasta di kabupaten/dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar II.39

Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 74,78 tahun dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,71 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 akan memiliki harapan hidup hingga usia 71 tahun.

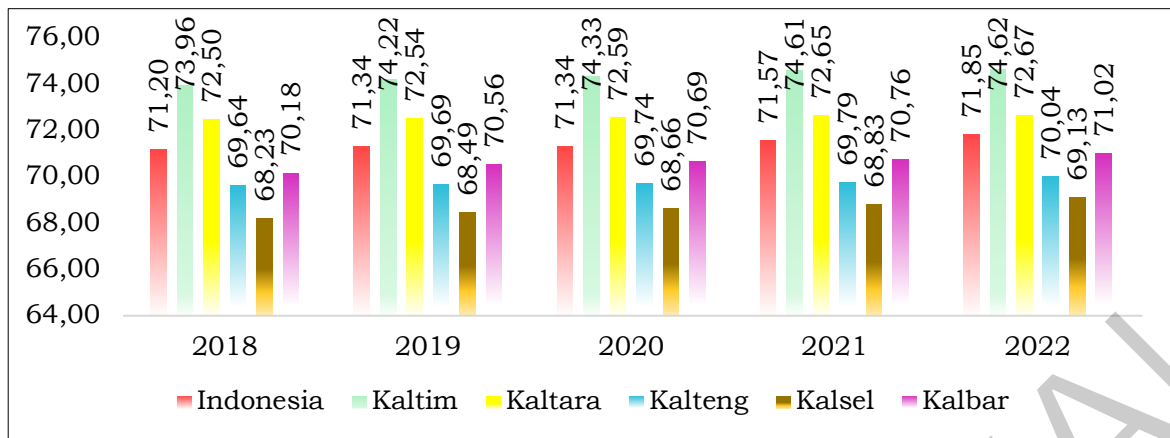
Tabel II.29

Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2022 (tahun)

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	72,05	72,28	72,52	72,62	72,88	72,89
2	KUBAR	72,37	72,57	72,79	72,86	73,10	73,10
3	KUKAR	71,68	71,93	72,21	72,34	72,64	72,65
4	KUTIM	72,51	72,76	73,03	73,16	73,46	73,47
5	Berau	71,44	71,68	71,94	72,06	72,32	72,32
6	PPU	70,82	71,05	71,30	71,41	71,68	71,71
7	MAHULU	71,25	71,56	71,90	72,10	72,33	72,35
8	Balikpapan	73,97	74,18	74,41	74,49	74,76	74,78
9	Samarinda	73,71	73,93	74,17	74,27	74,54	74,56
10	Bontang	73,72	73,94	74,18	74,28	74,55	74,57

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional sebesar 71,85 tahun.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.40**  
**Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia**  
**Tahun 2018-2022**

Pola spasial capaian Usia Harapan Hidup kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.



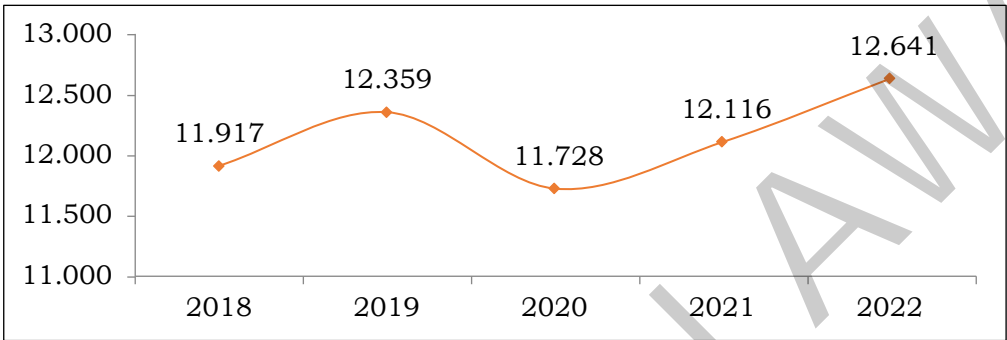
Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.41**

### **Pola Spasial Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2022**

#### 4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per Kapita Disesuaikan selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 4,34 persen per tahun. Pada tahun 2021, Pengeluaran per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 12,12 juta per tahun, atau naik Rp 388 ribu dibandingkan tahun 2020.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.42**  
**Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (Ribu Rp)**

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 merupakan dampak dari adanya pemulihan pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan daya beli masyarakat meningkat karena pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat.

Sedangkan jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bontang memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara kabupaten/kota lainnya mencapai 17.327 ribu rupiah dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 8.215 ribu rupiah merupakan pengeluaran per kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum, peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan pemulihan pandemi COVID-19 dengan banyaknya masyarakat yang telah vaksin di tahun 2021.

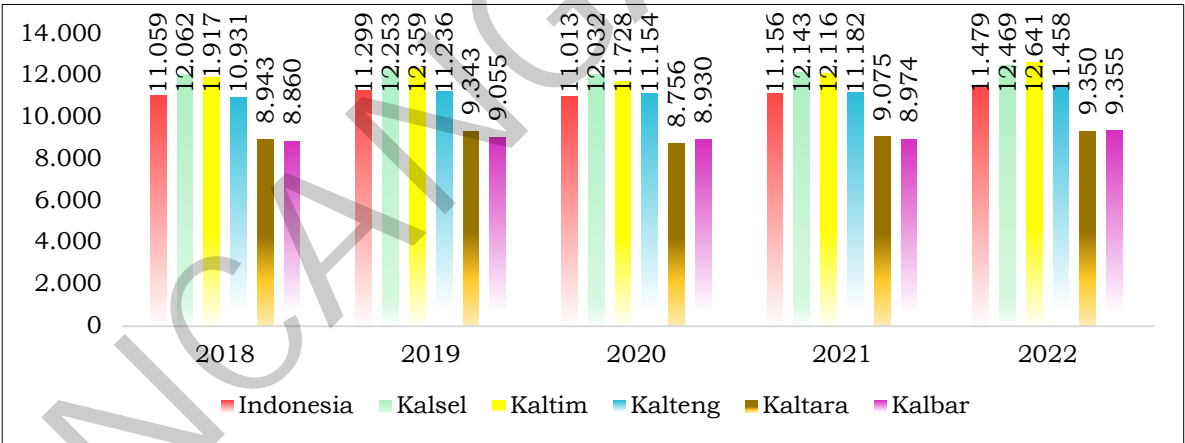
**Tabel II.30**  
**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota**

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (Ribuan Rupiah)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	10.605	10.767	10.344	10.673	11.181
2	KUBAR	9.849	10.338	9.712	10.062	10.740
3	KUKAR	10.959	11.152	10.720	11.048	11.677
4	KUTIM	10.614	11.196	10.485	10.868	11.322
5	Berau	12.207	12.726	12.018	12.435	13.095
6	PPU	11.492	11.750	11.231	11.651	11.890
7	MAHULU	7.653	8.008	7.524	7.802	8.215
8	Balikpapan	14.557	14.791	14.549	14.862	15.455
9	Samarinda	14.466	14.613	14.135	14.582	15.162
10	Bontang	16.698	16.843	16.278	16.765	17.327
Kalimantan Timur		11.917	12.359	11.728	12.116	12.641

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2022, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi kedua setelah Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah tangga.

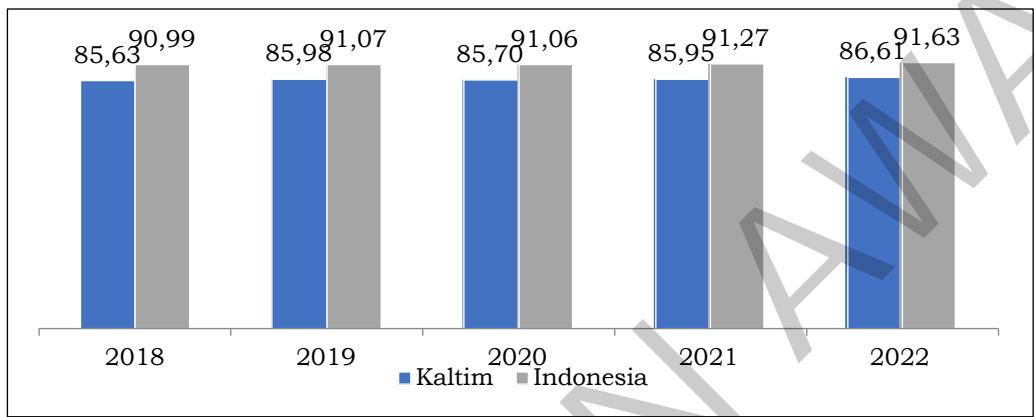


Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.43**  
**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan**  
**Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribuan Rupiah)**

G. Indeks Pembangunan Gender

Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.44**  
**Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (tahun)**

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 86,61. Dalam rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak COVID-19 akan berpengaruh pada penurunan IPG. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan mulai berkurangnya COVID-19 tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 86,61. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki yaitu untuk Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki tahun 2022 sebesar 10,24 tahun sedangkan perempuan 9,71 tahun, Adapun dari sisi pengeluaran perkapita untuk Laki-laki sebesar 19,22 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,46 juta rupiah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.



**Tabel II.31**  
**Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender**

No	Komponen	Laki-Laki	Perempuan
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,80	76,52
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,81	13,92
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,24	9,71
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp)	19,22	7,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 89,76 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 70,64 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

**Tabel II.32**  
**Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	70,64	71,41	71,15	71,19	71,98
2	KUBAR	83,52	83,84	83,87	84,28	84,62
3	KUKAR	78,83	79,14	78,90	79,12	79,80
4	KUTIM	76,03	76,51	76,26	76,40	77,11
5	Berau	87,92	87,93	87,61	87,76	87,76
6	PPU	86,34	86,22	86,39	86,57	86,83
7	MAHULU	80,18	80,89	80,98	81,65	82,32
8	Balikpapan	89,76	89,71	89,65	89,83	89,96
9	Samarinda	89,42	89,41	89,27	89,27	89,75
10	Bontang	86,61	86,72	86,87	87,12	87,52
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>85,63</b>	<b>85,98</b>	<b>85,70</b>	<b>85,95</b>	<b>86,61</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**H. Indeks Pemberdayaan Gender**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.



**Tabel II.33**  
**Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021 (tahun)**

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	62,07	62,76	66,20	65,66	65,67
2	KUBAR	62,63	63,68	61,14	60,60	65,34
3	KUKAR	55,07	56,44	63,74	61,43	62,76
4	KUTIM	53,71	55,72	56,35	53,77	53,78
5	Berau	49,85	50,55	57,66	57,91	56,48
6	PPU	50,30	50,02	50,36	49,75	49,85
7	MAHULU	74,12	76,04	80,61	80,41	80,43
8	Balikpapan	65,52	66,33	69,11	68,97	68,62
9	Samarinda	70,84	69,61	66,29	70,65	67,54
10	Bontang	45,44	46,36	51,99	51,97	45,67
Kalimantan Timur		56,64	57,53	65,65	65,54	66,64

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan capaian 56,64 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54. Tahun 2021 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 66,64. Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 20,37 persen dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 24,56 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional 43,56 persen.

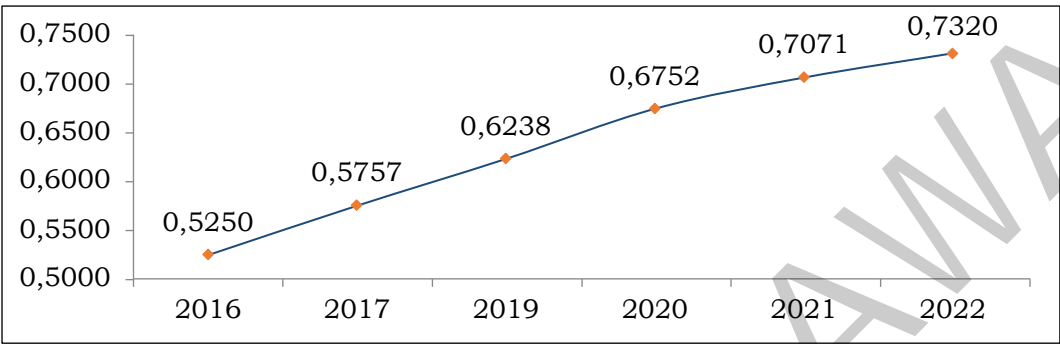
Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 80,43 sedangkan Penajam Paser Utara memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 49,85 yang artinya bahwa di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

**I. Indeks Desa Membangun**

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan desa didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Capaian Indeks Desa Membangun merupakan cerminan status kemajuan dan kemandirian Desa, yang terbagi dalam Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri ( $IDM > 0.8155$ ), Desa Maju ( $0.7072 < IDM \leq 0.8155$ ), Desa Berkembang ( $0.5989 < IDM \leq 0.7072$ ), Desa Tertinggal ( $0.4907 < IDM \leq 0.5989$ ) dan Desa Sangat Tertinggal ( $IDM \leq 0.4907$ ).

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir IDM Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dengan capaian terakhir pada tahun telah mencapai mencapai 0,7320. Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur pada peringkat ke 8 diantara seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga level administrasi terkecil di Kalimantan Timur.



Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.45**  
**Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2016 - 2022**

Capaian IDM pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir seiring berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana desa dan bantuan keuangan spesifik ke seluruh desa. Capaian IDM terendah pada tahun 2022 terdapat pada Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 0,6646 dengan status Berkembang, dan capaian tertinggi pada Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai capaian sebesar 0,7769.

**Tabel II.34**  
**Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017 – 2022**

No	Kab/Kota	2017	2019	2020	2021	2022
1	Paser	0,5856	0,6092	0,6664	0,7240	0,7500
2	KUBAR	0,5233	0,5900	0,6660	0,6953	0,7298
3	KUKAR	0,5815	0,6415	0,6846	0,7128	0,7465
4	KUTIM	0,6037	0,6378	0,6782	0,7119	0,7305
5	Berau	0,6097	0,6539	0,6999	0,7177	0,7261
6	PPU	0,6505	0,6905	0,7085	0,7340	0,7769
7	MAHULU	0,5352	0,5862	0,6181	0,6318	0,6646
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>0,5757</b>	<b>0,6238</b>	<b>0,6752</b>	<b>0,7071</b>	<b>0,7320</b>

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2022

Pada tahun 2022, dari 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di tujuh kabupaten tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan hanya tersisa 17 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 8 desa, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 6 desa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 2 desa dan Kabupaten Berau sebanyak 1 desa. Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Kalimantan Timur, perlu upaya pemerintah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa terutama dalam meningkatkan pencapaian indeks ketahanan ekonomi yang masih rendah daripada 2 komponen lainnya.

**Tabel II.35**  
**Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal
1	Paser	17	76	46	0	0
2	KUBAR	32	75	77	6	0
3	KUKAR	46	73	74	0	0
4	KUTIM	18	61	58	2	0
5	Berau	11	41	47	1	0
6	PPU	12	15	3	0	0
7	MAHULU	0	8	34	8	0
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>136</b>	<b>349</b>	<b>339</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2022

**J. Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mencapai 52,49. Capaian IPK Kalimantan Timur berada diatas capaian IPK Nasional yaitu sebesar 51,90. Dari dimensi

penilaian yang tercakup dalam IPK, Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Ekonomi Budaya 29,65, Dimensi Pendidikan dengan nilai 72,20, dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 72,46 dan dimensi budaya literasi dengan nilai 60,09.

**Tabel II.36**  
**Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekonomi Budaya	29,65	20,69
Pendidikan	72,20	68,71
Ketahanan Sosial Budaya	72,46	66,83
Warisan Budaya	37,44	46,63
Ekspresi Budaya	24,33	27,13
Budaya Literasi	60,09	54,29
Gender	55,88	58,55
<b>IPK</b>	<b>52,49</b>	<b>51,90</b>

Sumber: KEMENDIKBUD, 2022

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif dikarenakan capaian berada diatas capaian IPK nasional. Capaian ini patut diapresiasi dalam pengembangan budaya dan seni serta pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Meskipun beberapa dimensi IPK terus mengalami peningkatan, namun masih diperlukan sinergi antar lembaga terkait di rovinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

**K. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2017 IPP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 53,50 pada tahun 2017 menjadi 54,83 pada tahun 2020. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat 7 secara nasional meningkat dari tahun 2017. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja.

**Tabel II.37**

**Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda  
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Domain: Pendidikan	73,33	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>	<b>76,67</b>
1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,92	10,72	11,24	11,28	11,44
2. APK Sekolah Menengah	95,52	94,35	93,00	93,96	93,85
3. APK Perguruan Tinggi	35,58	35,64	37,78	39,16	40,21
Domain: Kesehatan dan Kesejahteraan	67,50	<b>72,50</b>	<b>70,00</b>	<b>57,50</b>	<b>67,50</b>
1. Angka Kesakitan Pemuda	6,15	5,37	6,52	4,07	6,31
2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	1,37	0,93	1,37	1,67	0,23
3. Pemuda Merokok	20,80	20,80	20,82	20,39	19,14
4. Remaja Perempuan Sedang Hamil	7,99	7,99	2,52	25,55	26,88
Domain: Lapangan dan Kesempatan Kerja	40,00	<b>35,00</b>	<b>45,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35,00</b>
1. Pemuda Berwirausaha Kerah Putih	0,40	0,24	0,48	0,70	0,38
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	15,78	15,21	12,80	13,94	16,01
Domain: Partisipasi dan Kepemimpinan	40,00	<b>43,33</b>	<b>43,33</b>	<b>43,33</b>	<b>30,00</b>
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	77,25	70,55	70,55	70,55	50,56
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam organisasi	3,63	4,87	4,87	4,87	4,15
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat	6,21	5,12	5,12	5,12	2,62
Domain: Gender dan Diskriminasi	46,67	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>53,33</b>
1. Angka Perkawinan Usia Anak	13,90	11,54	12,36	11,79	8,64
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	44,83	44,39	46,10	45,88	46,76
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	24,21	25,29	27,96	24,48	25,17
<b>Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim</b>	<b>53,50</b>	<b>54,83</b>	<b>56,33</b>	<b>54,83</b>	<b>52,50</b>
<b>Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia</b>	<b>49,33</b>	<b>51,50</b>	<b>52,67</b>	<b>51,00</b>	<b>53,33</b>

Sumber: BAPPENAS, 2022

Ket: \*) Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 2022

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja pada Aspek kesejahteraan Masyarakat di provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2017 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel II.38****Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022**

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)					
	– Migas	636.454.48 3	652.158.05 7	607.744.48 6	696.584.49 8	921.332.98 0
	– Non Migas	518.074.57 0	539.448.59 0	505.786.45 6	584.205.93 9	792.531.26 0
	– Non Migas dan Batubara	291.567.58 4	310.699.09 1	315.126.67 7	338.613.74 3	381.969.99 3
2	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	-	15,04	15,04	15,13	
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,96	1,03	1,06	10,47	
4	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)				16,34	
5	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan Non Migas dan Batubara terhadap PDRB (%)		7,46	8,25	7,97	8,24
6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,55	0,56	0,63	0,55	0,43
7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,31	0,33	0,37	0,33	0,27
8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,34	4,33	4,93	4,97	4,22
9	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,48	1,52	1,67	1,56	1,28
10	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,17	1,12	1,15	1,04	0,81
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,67	4,74	-2,90	2,55	4,48
11.1.	LPE Tanpa Migas	4,04	7,04	-2,29	3,29	5,59
11.2.	LPE Tanpa Migas dan Batu Bara	5,95	5,08	-0,62	2,81	6,11
12	Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran					
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	102.584,20	109.767,66	111.183,75	115.437,96	125.598,38

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.958,20	3.238,86	3.250,60	3.407,57	3.689,59
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23.760,62	26.298,93	26.257,95	27.422,86	31.283,12
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	173.474,79	187.939,11	188.195,89	210.237,72	232.491,11
	Perubahan Inventori	1.613,95	722,91	1.238,58	383,59	401,29
	Net Ekspor Barang & Jasa	331.106,93	324.190,59	277.049,17	338.268,63	527.869,49
	PDRB	<b>635.498,68</b>	<b>652.158,06</b>	<b>607.320,78</b>	<b>695.158,33</b>	<b>921.332,98</b>
13.	Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran					
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16,26	16,79	18,30	16,61	13,63
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,47	0,50	0,54	0,49	0,40
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,73	4,03	4,32	3,94	3,40
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,25	28,72	30,97	30,24	25,24
	Perubahan Inventori	0,25	0,11	0,20	0,06	0,04
	Net Ekspor Barang dan Jasa	52,10	49,71	45,67	48,66	57,29
14.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK					
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,14	3,15	(0,48)	1,20	3,41
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,57	6,77	(0,99)	0,30	3,03
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,91	7,70	(1,95)	2,03	8,48
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,54	4,79	(1,06)	8,03	5,47
	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
	Net Ekspor Barang & Jasa	0,17	5,17	(4,60)	5,99	4,05
	PDRB	<b>2,64</b>	<b>4,74</b>	<b>-2,90</b>	<b>2,55</b>	<b>4,48</b>
15.	Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota					
	Paser	34.362,05	35.734,75	34.712,07	36.581,32	36.980,15
	KUBAR	20.108,76	21.253,83	20.644,38	21.509,56	22.535,73
	KUKAR	121.509,48	126.272,37	120.953,68	124.197,10	128.805,43
	KUTIM	88.582,49	95.815,41	92.868,68	92.039,29	97.174,42
	Berau	26.769,40	28.275,57	27.337,09	28.802,65	29.940,78
	PPU	6.590,45	6.762,58	6.604,62	6.492,78	7.433,74
	MAHULU	1.675,32	1.767,80	1.763,93	1.786,29	1.802,46
	Balikpapan	79.807,11	83.793,41	83.034,71	86.817,89	91.104,44
	Samarinda	43.323,57	45.491,36	45.041,33	46.294,41	49.342,39
	Bontang	41.316,22	40.427,70	39.320,23	39.949,08	40.931,39



No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
16.	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota</b>					
	Paser	3,69	3,99	-2,86	5,39	1,09
	KUBAR	5,06	5,69	-2,87	4,19	4,77
	KUKAR	2,16	3,92	-4,21	2,68	3,71
	KUTIM	2,38	8,17	-3,08	-0,89	5,58
	Berau	2,07	5,63	-3,32	5,36	3,95
	PPU	1,28	2,61	-2,34	-1,69	14,49
	MAHULU	5,40	5,52	-0,22	1,27	0,91
	Balikpapan	4,97	4,99	-0,91	4,56	4,94
	Samarinda	4,96	5,00	-0,99	2,78	6,58
	Bontang	-4,08	-2,15	-2,74	1,60	2,46
17.	Laju Inflasi	3,24	1,66	0,78	2,15	5,35
18.	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	174,16	180,26	161,76	182,54	238,7
19.	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota					
	Paser	171,64	173,34	157,18	194,12	272,09
	KUBAR	192,10	195,40	158,03	184,46	246,65
	KUKAR	210,47	212,76	204,50	241,84	325,67
	KUTIM	353,74	367,11	268,80	304,16	450,27
	Berau	166,27	173,83	143,67	170,34	232,68
	PPU	55,70	57,76	50,78	55,85	72,05
	MAHULU	95,32	102,46	85,38	90,17	94,51
	Balikpapan	151,30	165,69	151,31	160,20	180,96
	Samarinda	74,08	79,95	80,36	85,60	99,82
	Bontang	337,45	327,06	311,88	320,44	344,56
20.	Garis Kemiskinan (Periode Maret)					
	Makanan	405.108	429.165	463.823	485.445	513.874
	Non Makanan	169.596	179.991	198.479	203.590	214.334
	Total	574.704	609.155	662.302	689.035	728.208
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	218,9	219,92	230,26	241,77	236,25
	Persentase Penduduk Miskin	6,03	5,94	6,1	6,54	6,31
21.	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Paser	9,03	8,95	9,23	9,73	9,43
	KUBAR	9,15	9,09	9,29	10,24	10,20
	KUKAR	7,41	7,20	7,31	7,99	7,96
	KUTIM	9,22	9,48	9,55	9,81	9,28
	Berau	5,04	5,04	5,19	5,88	5,65
	PPU	7,40	7,18	7,36	7,61	7,25
	MAHULU	11,62	11,25	11,44	11,90	11,55
	Balikpapan	2,64	2,42	2,57	2,89	2,45
	Samarinda	4,59	4,59	4,76	4,99	4,85
	Bontang	4,67	4,22	4,38	4,62	4,54
22.	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota					
	Paser	25.140	25.450	26.770	27.560	27.020
	KUBAR	13.490	13.450	13.780	15.380	15.380
	KUKAR	56.560	56.340	58.420	62.360	62.870
	KUTIM	33.020	35.310	36.980	37.780	36.840
	Berau	11.330	11.620	12.300	13.620	13.310
	PPU	11.760	11.520	11.930	12.130	11.590
	MAHULU	3.250	3.190	3.260	3.180	3.100
	Balikpapan	17.010	15.780	17.020	18.530	15.830
	Samarinda	39.230	39.800	41.920	42.840	41.950
	Bontang	8.100	7.470	7.910	8.410	8.390
23.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					
	Perkotaan	0,656	0,610	0,664	1,017	0,672
	Perdesaan	1,229	1,530	1,743	1,673	1,687
	Perkotaan + Perdesaan	0,846	0,910	1,015	1,223	0,989
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)					
	Perkotaan	0,161	0,130	0,157	0,303	0,149
	Perdesaan	0,270	0,380	0,412	0,413	0,395
	Perkotaan + Perdesaan	0,197	0,210	0,240	0,337	0,226
	Indeks Gini					
	Perkotaan	0,35	0,338	0,333	0,339	0,334
	Perdesaan	0,287	0,283	0,286	0,288	0,283

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Perkotaan + Perdesaan	0,342	0,33	0,328	0,334	0,327
24.	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota					
	Paser	0,299	0,262	0,290	0,288	0,282
	KUBAR	0,311	0,334	0,338	0,317	0,300
	KUKAR	0,302	0,278	0,294	0,283	0,269
	KUTIM	0,326	0,346	0,325	0,328	0,304
	Berau	0,303	0,345	0,300	0,377	0,352
	PPU	0,313	0,322	0,292	0,263	0,274
	MAHULU	0,334	0,302	0,259	0,270	0,288
	Balikpapan	0,356	0,302	0,311	0,325	0,334
	Samarinda	0,317	0,341	0,324	0,322	0,346
	Bontang	0,376	0,338	0,405	0,340	0,324
25.	Indeks Williamson	0,487	0,483	0,454	0,448	
26.	IPM	75,83	76,61	76,24	76,88	77,44
27.	Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota					
	Paser	71,61	72,29	72,04	72,93	73,44
	KUBAR	70,69	71,63	71,19	72,07	72,92
	KUKAR	73,15	73,78	73,59	74,06	74,67
	KUTIM	72,56	73,49	73,00	73,81	74,35
	Berau	74,01	74,88	74,71	75,20	75,74
	PPU	71,13	71,64	71,41	72,01	72,55
	MAHULU	66,67	67,58	67,09	67,95	68,75
	Balikpapan	79,81	80,11	80,01	80,71	81,13
	Samarinda	79,93	80,20	80,11	80,76	81,43
	Bontang	79,86	80,09	80,02	80,59	80,94
28.	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,48	9,70	9,77	9,84	9,92
29.	Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota					
	Paser	8,22	8,54	8,55	8,79	8,80
	KUBAR	8,07	8,34	8,47	8,70	8,78
	KUKAR	8,84	9,10	9,22	9,23	9,24
	KUTIM	9,08	9,18	9,19	9,43	9,44

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Berau	8,98	9,25	9,52	9,53	9,54
	PPU	8,03	8,16	8,28	8,36	8,51
	MAHULU	7,69	7,89	7,97	8,18	8,36
	Balikpapan	10,65	10,67	10,68	10,91	10,92
	Samarinda	10,46	10,47	10,48	10,49	10,71
	Bontang	10,72	10,73	10,79	10,80	10,81
29.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,67	13,69	13,72	13,81	13,84
	Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota					
	Paser	12,99	13,00	13,10	13,25	13,27
	KUBAR	12,88	12,89	12,90	13,02	13,09
	KUKAR	13,57	13,58	13,59	13,60	13,63
	KUTIM	12,65	12,78	12,89	12,90	13,00
	Berau	13,3	13,31	13,32	13,33	13,35
	PPU	12,54	12,55	12,56	12,57	12,70
	MAHULU	12,48	12,50	12,51	12,61	12,62
	Balikpapan	14,12	14,13	14,14	14,22	14,23
	Samarinda	14,66	14,70	14,89	15,09	15,10
	Bontang	12,89	12,90	13,03	13,17	13,18
30.	<b>Usia Harapan Hidup (Tahun)</b>	73,96	74,22	74,33	74,61	74,62
	<b>Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota</b>					
	Paser	72,05	72,28	72,52	72,62	72,88
	KUBAR	72,37	72,57	72,79	72,86	73,10
	KUKAR	71,68	71,93	72,21	72,34	72,64
	KUTIM	72,51	72,76	73,03	73,16	73,46
	Berau	71,44	71,68	71,94	72,06	72,32

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	PPU	70,82	71,05	71,30	71,41	71,68
	MAHULU	71,25	71,56	71,90	72,10	72,33
	Balikpapan	73,97	74,18	74,41	74,49	74,76
	Samarinda	73,71	73,93	74,17	74,27	74,54
	Bontang	73,72	73,94	74,18	74,28	74,55
31.	<b>Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ibu Rp.)</b>	11.917	12,359	11.728	12.116	12.641
32.	<b>Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota</b>					
	Paser	10.605	10.767	10.344	10.673	11.181
	KUBAR	9.849	10.338	9.712	10.062	10.740
	KUKAR	10.959	11.152	10.720	11.048	11.677
	KUTIM	10.614	11.196	10.485	10.868	11.322
	Berau	12.207	12.726	12.018	12.435	13.095
	PPU	11.492	11.750	11.231	11.651	11.890
	MAHULU	7.653	8.008	7.524	7.802	8.215
	Balikpapan	14.557	14.791	14.549	14.862	15.455
	Samarinda	14.466	14.613	14.135	14.582	15.162
	Bontang	16.698	16.843	16.278	16.765	17.327
	Kalimantan Timur	11.917	12.359	11.728	12.116	12.641
33.	<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	85,63	85,98	85,70	85,95	
34.	<b>Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota</b>					
	Paser	70,64	71,41	71,15	71,19	71,98
	KUBAR	83,52	83,84	83,87	84,28	84,62
	KUKAR	78,83	79,14	78,90	79,12	79,80
	KUTIM	76,03	76,51	76,26	76,40	77,11

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Berau	87,92	87,93	87,61	87,76	87,76
	PPU	86,34	86,22	86,39	86,57	86,83
	MAHULU	80,18	80,89	80,98	81,65	82,32
	Balikpapan	89,76	89,71	89,65	89,83	89,96
	Samarinda	89,42	89,41	89,27	89,27	89,75
	Bontang	86,61	86,72	86,87	87,12	87,52
	<b>Kalimantan Timur</b>	85,63	85,98	85,70	85,95	<b>86,61</b>
35.	<b>Indeks Pemberdayaan Gender</b>	57,53	65,65	65,54	66,64	
	<b>Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota</b>					
	Paser	62,76	66,20	65,66	65,67	
	KUBAR	63,68	61,14	60,60	65,34	
	KUKAR	56,44	63,74	61,43	62,76	
	KUTIM	55,72	56,35	53,77	53,78	
	Berau	50,55	57,66	57,91	56,48	
	PPU	50,02	50,36	49,75	49,85	
	MAHULU	76,04	80,61	80,41	80,43	
	Balikpapan	66,33	69,11	68,97	68,62	
	Samarinda	69,61	66,29	70,65	67,54	
	Bontang	46,36	51,99	51,97	45,67	
36.	<b>Indeks Desa Membangun</b>		0,6238	0,6752	0,7071	0,7320
	<b>Indeks Desa Membangun Berdasar Kabupaten/Kota</b>					
	Paser		0,6092	0,6664	0,7240	0,7500
	KUBAR		0,5900	0,6660	0,6953	0,7298
	KUKAR		0,6415	0,6846	0,7128	0,7465
	KUTIM		0,6378	0,6782	0,7119	0,7305

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Berau		0,6539	0,6999	0,7177	0,7261
	PPU		0,6905	0,7085	0,7340	0,7769
	MAHULU		0,5862	0,6181	0,6318	0,6646
	Paser		0,6092	0,6664	0,7240	0,7500
	KUBAR		0,5900	0,6660	0,6953	0,7298
	KUKAR		0,6415	0,6846	0,7128	0,7465
37.	<b>Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan</b>				52,49	
38.	<b>Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)</b>					
	Domain: Pendidikan	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>	<b>76,67</b>	
	Domain: Kesehatan dan Kesejahteraan	<b>72,50</b>	<b>70,00</b>	<b>57,50</b>	<b>67,50</b>	
	Domain: Lapangan dan Kesempatan Kerja	<b>35,00</b>	<b>45,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35,00</b>	
	Domain: Partisipasi dan Kepemimpinan	<b>43,33</b>	<b>43,33</b>	<b>43,33</b>	<b>30,00</b>	
	Domain: Gender dan Diskriminasi	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>53,33</b>	
	<b>Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim</b>	<b>54,83</b>	<b>56,33</b>	<b>54,83</b>	<b>52,50</b>	

Sumber: BPS, LKjIP, dan perangkat daerah, 2023



## **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

### **2.3.1. Urusan Wajib**

#### **A. Pendidikan**

Angka partisipasi sekolah (APS) di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur ternyata belum capai 100 persen, terbukti pada jenjang usia 16-18 tahun mengalami penurunan (81,43) tahun 2022, artinya Masih ada anak belum sepenuhnya mengenyam pendidikan formal bahkan pada tahun 2020 akibat pandemi Corona angkanya mengalami penurunan (81,88). Penyebab tersebut mungkin dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah). untuk itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan berdasarkan kewenangannya lebih memfokuskan/melaksanakan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 105,21. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,21 persen penduduk yang bukan golongan umur 7-12 tahun masih bersekolah ditingkat SD, ini hal disebabkan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. sebenarnya wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya namun tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada

jenjang yang bersesuaian. APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan terkecuali jenjang SLTA mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari keningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur. Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Pada tahun 2021, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

**Tabel II.39**  
**Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur**

KABUPATEN/KOTA	SATUAN PENDIDIKAN									
	SMA			SMK			SLB			TOTAL KESELURUHAN
	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	
Kab. Berau	15	4	19	8	6	14	1	0	1	34
Kab. Kutai Barat	17	5	22	7	7	14	1	0	1	37
Kab. Kutai Kartanegara	35	17	52	17	27	44	1	4	5	101
Kab. Kutai Timur	22	2	24	13	12	25	1	2	3	52
Kab. Mahakam Ulu	4	3	7	0	2	2	1	0	1	10
Kab. Paser	13	4	17	4	8	12	1	0	1	30
Kab. Penajam Paser Utara	7	3	10	6	4	10	1	0	1	21
Kota Balikpapan	9	19	28	6	27	33	1	3	4	65
Kota Bontang	3	8	11	4	9	13	1	5	6	30
Kota Samarinda	18	25	43	22	29	51	2	9	11	105
TOTAL	143	90	233	87	131	218	11	23	34	485

**Tabel II.40**  
**Jumlah Peserta Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur**

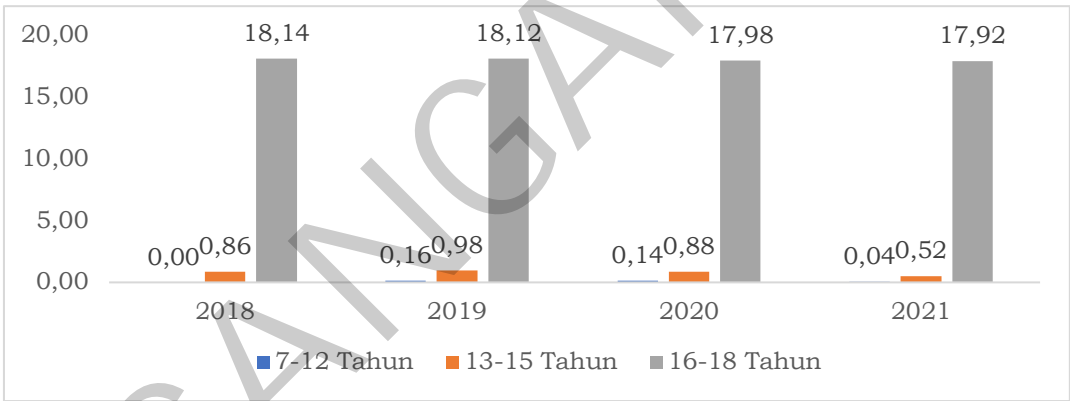
KABUPATEN/KOTA	PESERTA DIDIK									
	SMA			SMK			SLB			TOTAL KESELURUHAN
	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
Kab. Berau	3445	3925	7370	2012	1468	3480	119	63	182	11032
Kab. Kutai Barat	2177	2366	4543	1784	1319	3103	76	35	111	7757
Kab. Kutai Kartanegara	7614	9194	16808	8594	5178	13772	227	106	333	30913
Kab. Kutai Timur	3269	4036	7305	4408	2880	7288	101	50	151	14744
Kab. Mahakam Ulu	654	611	1265	81	64	145	4	2	6	1416
Kab. Paser	2749	3072	5821	2697	1758	4455	41	25	66	10342
Kab. Penajam Paser Utara	1538	2243	3781	2542	1534	4076	73	39	112	7969
Kota Balikpapan	5023	7075	12098	10060	7333	17393	460	193	653	30144
Kota Bontang	1777	2744	4521	2748	1363	4111	172	58	230	8862
Kota Samarinda	7368	9524	16892	12538	10696	23234	459	268	727	40853
<b>TOTAL</b>	<b>35614</b>	<b>44790</b>	<b>80404</b>	<b>47464</b>	<b>33593</b>	<b>81057</b>	<b>1732</b>	<b>839</b>	<b>2571</b>	<b>164032</b>

**Tabel II.41**  
**Jumlah Guru di Provinsi Kalimantan Timur**

KABUPATEN/KOTA	GURU									
	SMA			SMK			SLB			TOTAL KESELURUHAN
	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	
Kab. Berau	392	61	453	205	84	289	17	0	17	759
Kab. Kutai Barat	357	25	382	184	78	262	15	0	15	659
Kab. Kutai Kartanegara	885	136	1021	479	375	854	31	19	50	1925
Kab. Kutai Timur	440	15	455	323	140	463	17	7	24	942
Kab. Mahakam Ulu	96	5	101	0	21	21	2	0	2	124
Kab. Paser	360	33	393	218	102	320	17	0	17	730
Kab. Penajam Paser Utara	192	26	218	220	64	284	11	0	11	513
Kota Balikpapan	467	221	688	492	392	884	44	35	79	1651
Kota Bontang	132	173	305	190	117	307	23	24	47	659
Kota Samarinda	682	279	961	1014	366	1380	66	62	128	2469
<b>TOTAL</b>	<b>4003</b>	<b>974</b>	<b>4977</b>	<b>3325</b>	<b>1739</b>	<b>5064</b>	<b>243</b>	<b>147</b>	<b>390</b>	<b>10431</b>

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,10 poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13,15 tahun turun 0,36 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,06 poin.

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.



Sumber: BPS Kaltim, 2022

**Gambar II.46**  
**Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2021 (persen)**

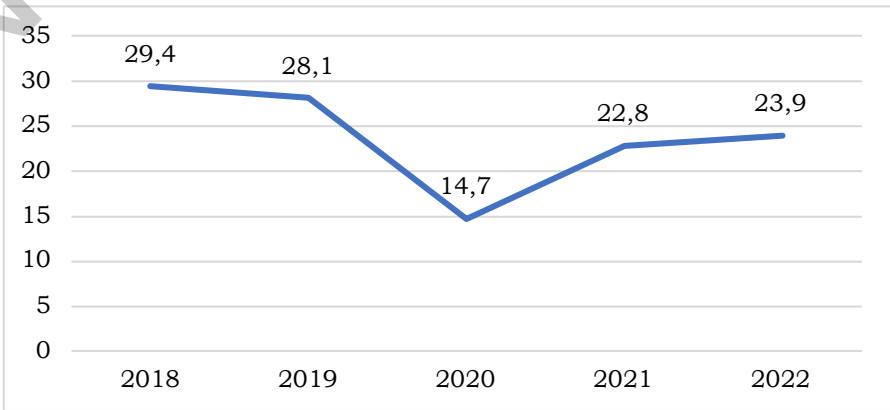
Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 54 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2022, jumlah mahasiswa mencapai 96.091 dengan jumlah dosen sebanyak 4.424 orang.

**B. Kesehatan**

**1) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting**

Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Trend Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2017–2018 sudah terjadi penurunan, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0–11) bulan sudah mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Walau sempat turun tajam pada tahun 2020 menjadi 14,7, namun prevalensi stunting di Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9. Angka ini diatas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,6. Secara regional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan kedua terendah setelah Provinsi Kalimantan Utara. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Mahakam Hulu dan Kota Balikpapan yang masing-masing mencapai 14,8 persen dan 19,6 persen.



Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2023

**Gambar II.47**

**Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022 berdasarkan Hasil Survei SSGI**



Untuk wasting sendiri hasil SSGI Tahun 2022 menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9,1. Angka ini lebih tinggi dibandingkan wasting nasional yang mencapai 7,7. Wasting di Kalimantan Timur dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan berada pada posisi ketiga terendah setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi dan stunting serta wasting di Provinsi Kalimantan Timur.

## **2) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan**

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan Kesehatan masyarakat. Terdapat penambahan sebanyak 15 Rumah Sakit Umum, 6 Rumah Sakit Swasta, 28 Puskesmas, sampai dengan bertambahnya 221 terlihat persebaran fasilitas Kesehatan di kabupaten kota sudah merata. Dengan jumlah 59 Rumah Sakit Umum dan Swasta di Kalimantan Timur pada tahun 2022, terdapat pada Mahulu dan Bontang sudah memiliki 2 RS. Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari jumlah tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang besar farmasi dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

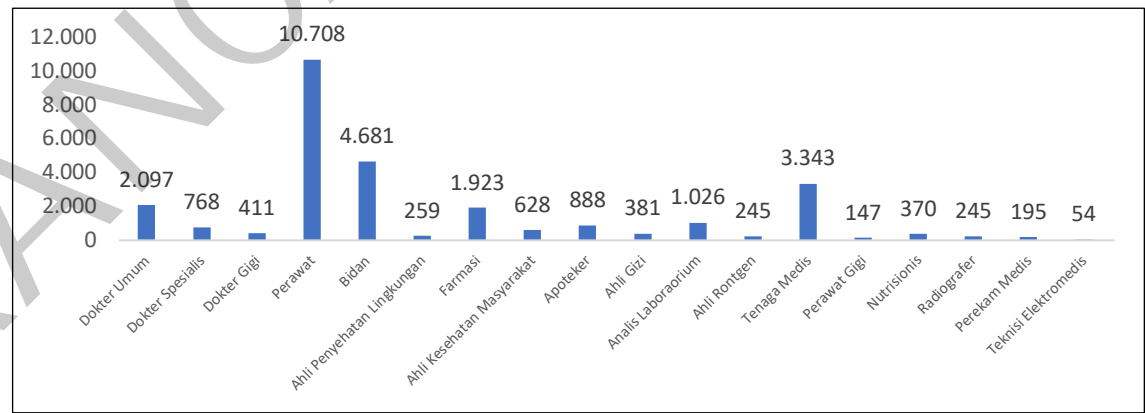
Pada umumnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan atau tetap (puskesmas) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Seluruh jenis fasilitas kesehatan mengalami penurunan, kecuali jumlah apotek meningkat dari 745 menjadi 826.

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak 2017 sampai dengan 2022 penambahan Dokter umum bertambah 983 orang, Dokter gigi 91 orang, Dokter spesialis 90 orang, dan perawat sejumlah 4.127 orang. Persebaran tenaga Kesehatan di Kabupaten Kota sudah merata walaupun perlu di akurasi sampai pada kebutuhan di tingkat kecamatan. Dengan jumlah 11.976 tenaga Kesehatan utama pada tahun 2022, yang terdiri dari Dokter umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan Perawat menggambarkan persebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota upaya pemenuhan pelayanan pada masyarakat sudah terpenuhi.

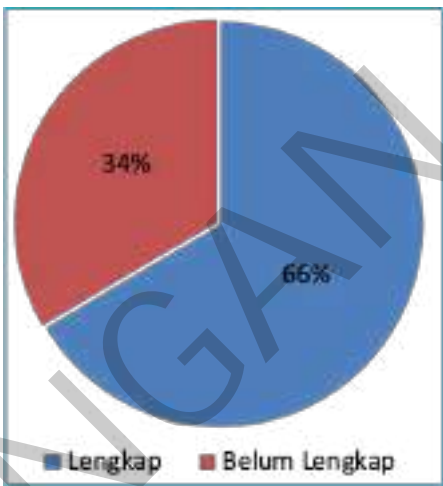
Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.48**  
**Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2021**

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.49**  
**Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

**Tabel II.42**  
**Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan**  
**3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Kab/Kota	Milik	Tipe	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
					Sp.A	Sp.B	Sp.OG	Sp.PD	Sp.An	SP.PK	Sp.Rad
1.	Kabupaten Berau	Kab/Kota	RSUD	RSUD Talisayan		1	1	1	1		
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dr. Abd. Rival berau	3	2	3	3	1	1	2
2.	Kota Balikpapan	Kab/Kota	RSUD	RSUD Balikpapan	2	2	3	4	3	2	
3.	Kota Bontang	Kab/Kota	RSUD	RSUD Taman Husada	3	2	4	3	3	2	2
4.	Kota Samarinda	Kab/Kota	RSUD	RSUD Inche Abdoel Moeis	3	3	3	4	3	2	2
5.	Kabupaten Kutai Barat	Kab/Kota	RSUD	RSUD Harapan Insan Sendawar	2	3	2	3	1	3	1
6.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab/Kota	RSUD	RSUD AM Parikesit Tenggarong	4	3	5	6	4	2	2
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dayaku Raja	1	1		1			
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2	1	1	3	1	1	1
7.	Kabupaten Kutai Timur	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sangkuliran g		1	1	1		1	
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kudungga	1	3	3	4	3	2	1
8.	Kabupaten Paser	Kab/Kota	RSUD	RSUD Panglima Sebaya	3	4	4	3	3	2	2
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kerang			1				
9.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sepaku	1		1				
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1	3	2	2	1	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

**C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat 2 jeins pelayanan SPM di bidang Pekerjaan Umum. Adapun capaian SPM tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

Penyediaan air minum curah kewenangan provinsi akan diimplementasikan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Terdapat lima potensi SPAM Regional yang sedang diupayakan pembangunannya (table II.51). Dalam jangka waktu menengah, pembangunan akan diarahkan ke SPAM Regional sistem Kutai Kartanegara – Bontang yang akan mendapat suplai air baku dari Bendungan Marangkayu. Prioritas pembangunan selanjutnya akan diarahkan pada SPAM Regional sistem Kutai Timur – Bontang yang suplai air bakunya diperoleh dari lubang tambang (VOID) PT. Indominco dan Sungai Mayang. Dokumen perencanaan yang menjadi kriteria kesiapan pembangunan fisik untuk kedua prasarana air minum yang diprioritaskan tersebut telah tuntas disusun pada tahun 2022. Proses pengadaan lahan akan dilakukan tahun 2024 dan pekerjaan fisik dimulai tahun 2025. Dokumen tersebut antara lain dokumen studi kelayakan, detail desain, dokumen lingkungan dan dokumen pengadaan lahan.

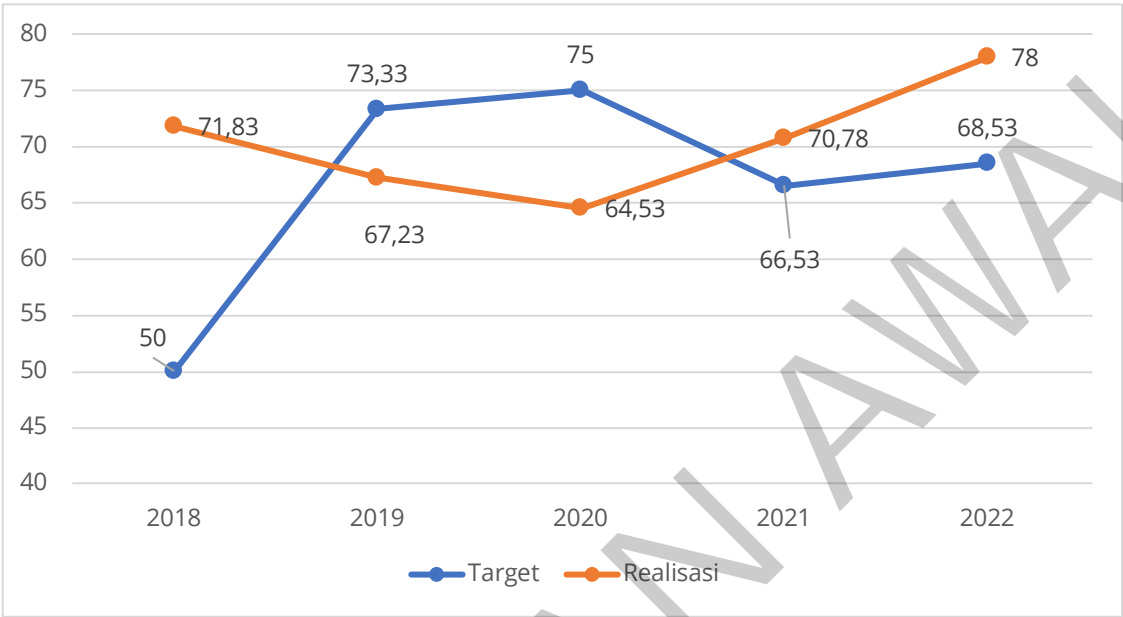
Tabel II.43  
Potensi Penyelenggaraan SPAM Regional

No	Potensi Spam Regional	Area cakupan	Sumber Air Baku	
			Nama	Kapasitas
1	KUKAR- Bontang	2 Kabupaten/Kota (5 Kec – 22 kelurahan)	Bendungan Marangkayu	450 l/det
2	KUTIM-Bontang	2 Kabupaten/Kota (4 kec – 21 kelurahan)	Waduk Ex Tambang Indominco & S. Mayang	Up to 250 l/det
3	KUTIM-Bontang	2 Kabupaten/Kota (4 kec – 21 kelurahan)	Bendali Sukarahmat	Up to 240 l/det
4	PPU – Balikpapan	IKN, 2 Kab/Kota (8 Kec)	Waduk Sepaku Semoi, Waduk Sepaku	Up to 1.270 l/det
5	KUKAR – Balikpapan	IKN, 2 Kab/Kota (8 Kec)	Waduk Batu Lepek	5.000 l/det
6	Paser – PPU	2 Kab/Kota (2 Kec)	Bendung Telake	210 l/det

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2022

Selain upaya pencapaian target SPM, Kalimantan Timur memiliki target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak. Akses air minum layak merupakan kemudahan/kemampuan penduduk memperoleh kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari dari sumber terlindungi baik dari jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Persentase akses air minum layak merupakan rasio antara jumlah penduduk yang telah memperoleh suplai air minum dengan total jumlah penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, capaian akses air minum layak menunjukkan kinerja yang

baik. Walaupun target tidak tercapai pada awal dan pertengahan tahun perencanaan (2019-2020), namun sejak tahun 2021, realisasi pemenuhan akses air minum layak telah melampaui target yang ditetapkan. Grafik target dan realisasi direpresentasikan pada gambar II.51



Sumber: DPUPRPERA Kaltim 2022 – Web SPM tahun 2022

**Gambar II.50**  
**Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2018-2022 (%)**

Angka capaian merupakan agregat dari pencapaian 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (tabel II. 52). Seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki capaian di atas 50% kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara yang aksesnya baru mencapai 30.90%. Sementara capaian tertinggi berada di Kota Balikpapan. Walaupun secara cakupan Kalimantan Timur menunjukkan layanan yang baik, perhatian perlu diberikan pada aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku. Hampir seluruh area perkotaan, terutama tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) utama, memiliki cakupan di atas 80%. Sayangnya, suplai air baku yang mendukung tingginya capaian ini masih berasal dari air tanah, terutama di Kota Bontang dan Balikpapan. Kondisi ini dapat dikatakan tidak ideal dan tidak berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya untuk menyediakan air baku yang memenuhi standar keandalan, yakni bersumber dari air permukaan.

**Tabel II.44**

Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota 2022

No	Kabupaten/Kota	Air minum layak (%)
1	Balikpapan	99.25
2	Penajam Paser Utara	30.90
3	Paser	70.14
4	Bontang	83.55
5	Kutai Timur	51.73
6	Berau	82.16
7	Samarinda	87.27
8	Kutai Kartanegara	72.85
9	Kutai Barat	86.02
10	Mahakam Ulu	66.06
Provinsi		78.00

Dari sisi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Data Susenas Kor (Maret 2022) menunjukkan bahwa terdapat 17.118 Rumah Tangga di Kaltim (1,3%) yang sumber air minumnya berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung. Sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara untuk keperluan domestik lainnya (memasak, mandi, mencuci, dll), terdapat sekitar 5.55% Rumah Tangga yang menggunakan air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung dan sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Hal ini mengartikan bahwa terdapat penduduk yang sumber air bersihnya memiliki potensi terkontaminasi dengan air buangan/limbah domestik (termasuk tangki septik). Kondisi ini dapat membawa resiko negatif bagi kesehatan karena masyarakat berpotensi terpapar bakteri dari buangan air limbah.

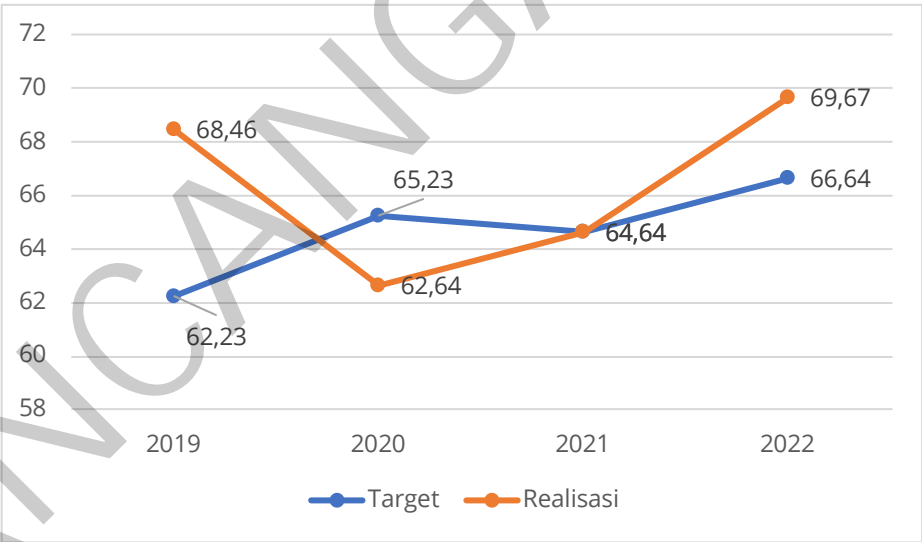
Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target akses air minum layak secara nasional adalah 100% pada tahun 2024. Hingga tahun 2022, capaian air minum layak di Kaltim baru mencapai 78% (tabel II. 52). Oleh karena itu, masih terdapat gap yang cukup besar antara capaian Kalimantan Timur dengan target nasional. Pemerintah Provinsi tidak dapat sepenuhnya mengejar target tersebut mengingat kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada suplai air baku untuk air minum pada cakupan regional atau lintas kabupaten/kota. Dari 841 desa & kelurahan yang ada di Kaltim, rencana SPAM regional diperkirakan hanya mampu mensuplai air minum



curah untuk kurang lebih 260 desa/kelurahan. Oleh karena itu, untuk mencapai target 100% cakupan layanan, diperlukan strategi penanganan khusus, salah satunya melalui mekanisme bantuan keuangan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terutama untuk kompilasi data capaian di setiap kabupaten/Kota yang akan diagregat menjadi capaian provinsi.

**2) Air Minum Layak perpipaan**

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima oleh 69.67% dari jumlah penduduk Kaltim (Gambar II. 52) . Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM. Dalam konteks capaian berdasarkan dokumen RPJMD Kaltim 2019 – 2023, capaian air minum layak perpipaan tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 66,64%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, air minum layak perpipaan di Kaltim ditargetkan mencapai 71.75% pada tahun 2024, sehingga terdapat *gap* antara target nasional dengan kondisi saat ini, yakni berkisar 2.77%.



**Gambar II.51**  
**Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim**

**3) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota**

Kinerja layanan pengolahan air limbah domestik skala provinsi saat ini masih terbatas pada tahap awal/inisiasi. Telah tersusun dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD) regional skala provinsi. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat enam zonasi layanan potensial, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai

Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara. Diperkirakan SPAL regional yang direncanakan dapat memberi layanan akses aman sanitasi untuk 766.571 jiwa pada tahun 2041 (tabel II. 53). Tahun 2023, akan dilakukan studi kelayakan untuk zonasi SPAL regional di Kota Samarinda – Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Tabel II.45**  
**Target Layanan Akses Aman Sanitasi (Air Limbah Regional) Kaltim**

Zona-area		Tahun 2020		Renc. Tahap 1 (s.d 2023)		Renc. Tahap 2 (s.d 2028)		Renc. Tahap 3 (s.d 2041)	
		%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa
Zona 1	Bontang, Kutim, Kukar	1.8	1429	15	15709	50	58553	60	96009
Zona 2A	Samarinda-Kukar (Sambutan-Anggana)	1.4	815	15	12828	50	48724	60	83136
Zona 2B	Samarinda-Kukar (Palaran-Sanga-sanga)	0.7	366	15	11585	50	44656	60	78145
Zona 2C	Samarinda-Kukar (Samarinda Seberang-Loa Janan-Loa Janan Hilir)	2.51	3330	15	27968	50	106600	60	182989
Zona 3	Balikpapan-Kukar-PPU (Balikpapan Barat-Loa Janan-Samboja-Sepaku)	2.33	2977	15	25606	50	94369	60	151627
Zona 4	Balikpapan-Kukar (Balikpapan Utara-Samboja)	4.38	6649	15	28541	50	106458	60	174665
TOTAL RENCANA LAYANAN			15,566		122,237		459,360		766,571

Sumber: Dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kaltim, 2020

Penanganan yang dilakukan hingga saat ini belum secara langsung memperlihatkan manfaat/dampak yang nyata terkait pencapaian SPM air limbah skala provinsi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sektor air limbah serta pemberian pendampingan untuk implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Tahun 2022, pendampingan dilakukan untuk Kota Samarinda dan Kabupaten Berau sementara tahun 2023, pendampingan akan dilakukan untuk Kabupaten Paser, Mahulu, dan Kota Bontang. Nilai capaian sektor sanitasi yang digunakan sebagai indikator merupakan nilai capaian agregat 10 Kabupaten/Kota. Pada dimensi layak, sudah 81,79% penduduk mendapat layanan sanitasi. Namun, capaian masih sangat minim pada dimensi aman, yakni baru mencapai kurang dari 5% (tabel II. 54).

**Tabel II.46**  
**Capaian Sektor Air Limbah 2022**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Air Limbah	
		Layak (%)	Aman (%)
Balikpapan	718.423	91,40	9,18
Penajam Paser Utara	186.801	95,68	3,70
Paser	288.225	71,24	0,71
Bontang	185.928	94,93	7,63
Kutai Timur	424.743	89,10	2,70
Berau	263.150	88,45	3,35
Samarinda	838.935	78,02	7,95
Kutai Kartanegara	753.862	75,02	0,32
Kutai Barat	170.871	59,82	1,59
Mahakam Ulu	35.274	52,50	2,91
<b>Kaltim 2022</b>	<b>3.866.212</b>	<b>81,79</b>	<b>4,71</b>

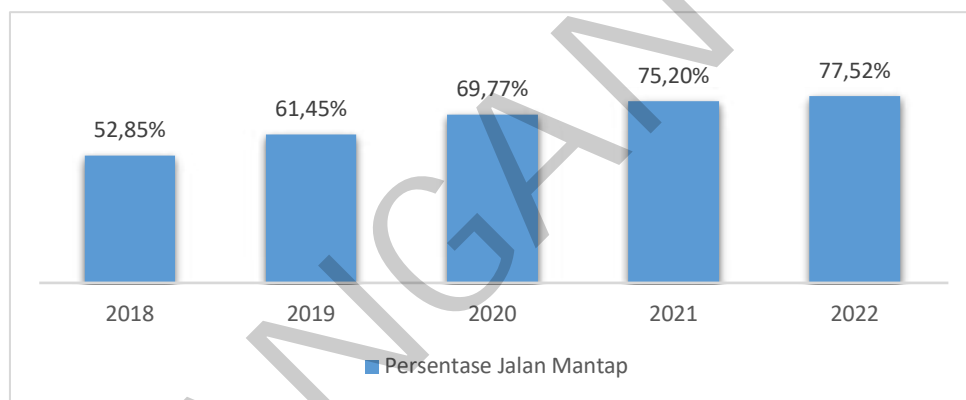
Sumber: DPUPRPERA Kaltim, 2022. Agregasi capaian Kabupaten/Kota

Walaupun belum mencapai kondisi ideal dan masih jauh dari kondisi aman, secara nasional Kaltim memperlihatkan kemajuan penanganan sanitasi yang baik, terutama dari sisi tempat pembuangan tinja. Pada tahun 2022 (Maret), hampir seluruh Rumah Tangga di Kaltim atau 92,83 persen terlayani oleh tangki septik. Kondisi ini sudah berada di atas rata-rata nasional yakni 82,56 persen. Walaupun secara persentase terlihat baik, angka absolut untuk Rumah Tangga yang membutuhkan perhatian dapat dikatakan cukup signifikan. Pada tahun 2021, terdapat 75.956 Rumah Tangga yang masih membuang tinja secara langsung ke berbagai obyek geografis lingkungan alam, seperti kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun/dan lainnya.

**4) Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana jaringan jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2022 mencapai 693,86 km atau 77,52 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 284,86 km, kondisi sedang 409,00 km, kondisi rusak ringan 104,81 km, dan kondisi rusak berat 96,42 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,96 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2021 mencapai 1.409,94 km atau 82,40 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 305,83 Km, kondisi sedang 1.104,11 Km, kondisi rusak ringan 223,89 Km, dan kondisi rusak berat 77,12 Km.

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 yang hanya mencapai 473,05 km, meningkat 220,81 km sehingga pada tahun 2022 telah mencapai 693,86 km. faktor pendorong yang membuat capaian jalan mantap bertambah setiap tahunnya adalah pemeliharaan jalan provinsi oleh UPTD Pemeliharaan Dinas PUPR PERA untuk menjaga kemantapan jalan dan alokasi pendanaan untuk rekonstruksi jalan yang bertambah setiap tahunnya untuk menambah proporsi jalan mantap yang ada di Provinsi Kaltim. Lokus penanganan jalan untuk meningkatkan persentase jalan mantap adalah ruas-ruas jalan provinsi yang mendukung sektor perekonomian seperti ruas jalan Tanjung Redeb-Talisayan yang mendukung Pariwisata dan ruas jalan Patung Lembuswana – Sebulu yang mendukung Pertanian.



Sumber: Dinas PUPR Pera Tahun 2022

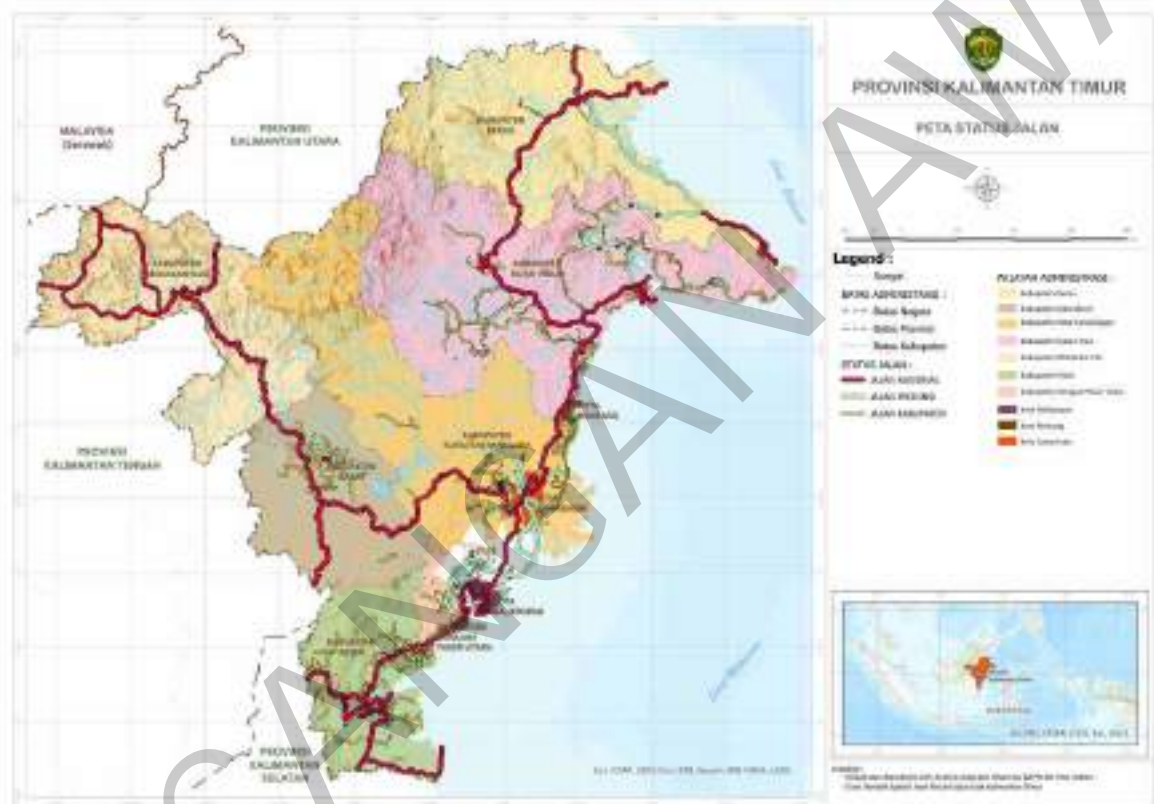
**Gambar II.52**  
**Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2019-2022**

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km<sup>2</sup> (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km<sup>2</sup>) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km<sup>2</sup>. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
- 2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional

maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;

- 4) Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
- 5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
- 6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal;
- 7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.53**  
**Peta Jalan Menurut Status Provinsi Kalimantan Timur**

### 5) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian. Pada dimensi pendayagunaan air aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius penyediaan kapasitas air baku.

Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku saat ini adalah sebesar 7.922 liter/detik. Hal ini masih jauh dari kebutuhan air baku yang diharapkan, kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pembangunan Bendungan Marangkayu dan Sukarahmat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kota Bontang terkendala dalam pelaksanaannya yaitu pembebasan lahan, tumpang tindih dengan HGU, dan lokasi bendungan yang berada di kawasan lindung.

Pemenuhan kebutuhan air baku masih perlu untuk ditetapkan menjadi prioritas daerah, utamanya pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang masih sangat bergantung pada penggunaan air tanah. Pemenuhan air baku dengan mengandalkan air permukaan sangat diperlukan untuk jangka panjang, sementara untuk pemenuhan air baku untuk jangka pendek masih tetap mengandalkan penggunaan air tanah dengan pembangunan sumur dalam. Penambahan kapasitas air baku juga dianggap sangat penting, terutama dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Dengan penetapan IKN di Kalimantan Timur maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan air baku sebagai konsekuensi dari pertambahan penduduk dan tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dalam mendukung IKN.

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengurangan luas genangan banjir. Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, baik karena faktor alam maupun manusia. Faktor alam terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kondisi topografi, pasang surut dan kondisi geografis DAS yang luas. Sedangkan faktor manusia disebabkan oleh daerah tangkapan air (DTA) yang berubah fungsi, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai serta sistem drainase yang tidak tertata dan berfungsi dengan baik. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir.

Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. 3 Kota tersebut ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur yang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar II.55, capaian kinerja pengurangan luas genangan banjir selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun demikian kendala yang dihadapi dalam menyediakan

infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan pembebasan lahan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem pengendali luapan air sungai, adanya utilitas terbangun (jalur pipa PDAM, Listrik, Telekomunikasi dan kabel optik), lokasi penanganan banjir yang merupakan daerah padat penduduk, serta faktor cuaca yang tidak menentu. Selain permasalahan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum optimal.



**Gambar II.54**  
**Luas Genangan Banjir 3 Kota Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2021 (Ha)**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menurunkan luas genangan banjir seluas 279 Ha dalam kurun waktu 4 tahun. Meskipun capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan, namun penanganan banjir masih perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat pada awal periode RPJMD (Tahun 2018) Provinsi Kalimantan Timur, luas genangan banjir masih 4.075 Ha yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

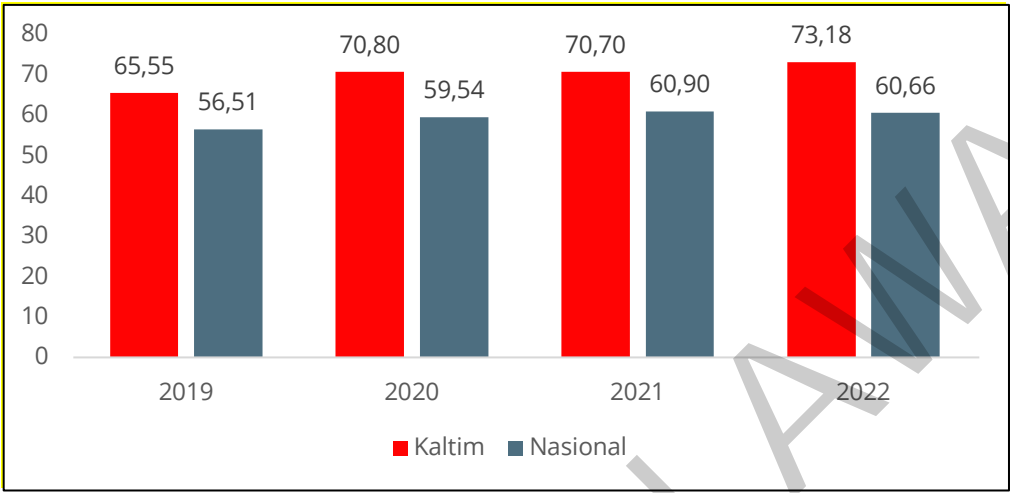
**D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

**1) Rumah Tidak Layak Huni**

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Data SUSENAS KOR tahun 2022 (Maret) menunjukkan bahwa Rumah Tangga di Kalimantan Timur yang telah menempati rumah layak huni mencapai 73,18%. Kondisi ini naik

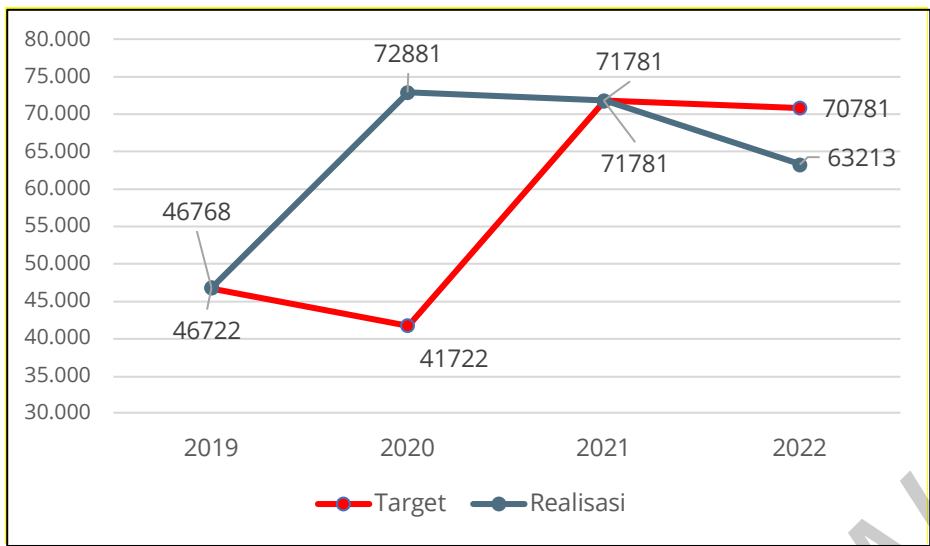


sekitar 2,84% dari tahun sebelumnya (Gambar II. 53). Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar karena masih terdapat 345.031 Rumah Tangga (26,82%) yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni.



**Gambar II.55**  
**Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Kaltim Tahun 2019 – 2022**

Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah tahun 2019 – 2023. Dalam rentang waktu tersebut, pengurangan ditargetkan mencapai 25.000-unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dana APBN, APBD Provinsi Kaltim, serta APBD kabupaten/kota. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2022, terdapat setidaknya 63.213 RTLH di Kaltim yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Dari sisi pelaksanaan, penanganan melalui Dana APBD dilakukan dengan berpedoman pada kriteria penentuan kelayakan hunian bangunan. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui perbaikan atap, lantai, serta dinding pada bangunan-bangunan yang telah terdata dan terverifikasi.



**Gambar II.56**  
**Target dan Realisasi Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni**

Gambar II.56 menunjukkan jumlah rumah layak huni tahun 2019 hingga 2022, yakni target dan capaian. Kinerja dikalkulasi melalui pengurangan RTLH setiap tahun, sehingga semakin kecil nilai RTLH maka kinerja dikatakan semakin baik. Kenampakan visual grafik memiliki sedikit anomali. Hal ini juga menunjukkan salah satu kendala atau kesulitan dalam perhitungan capaian kinerja penanganan RTLH, yakni inkonsistensi data baseline yang menyebabkan perubahan basis perhitungan. Kelemahan pada kondisi data *baseline* ini akan menjadi perhatian dalam proses perencanaan program penanganan RTLH tahun-tahun berikutnya.

**2) Kawasan Kumuh**

Kalimantan Timur memiliki 1,881.67 Ha area yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mendefinsikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Secara lebih detail, Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018 menjabarkan aspek yang menjadi penentu dalam penentuan kawasan kumuh, yakni meliputi tujuh aspek dan 16 variabel. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, pengaruh kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, kondisi pengelolaan persampahan, aspek pengelolaan air limbah, aspek drainase lingkungan, serta kondisi jalan lingkungan.

**Tabel II.47**  
**Target dan Realisasi Luas Kawasan Kumuh**

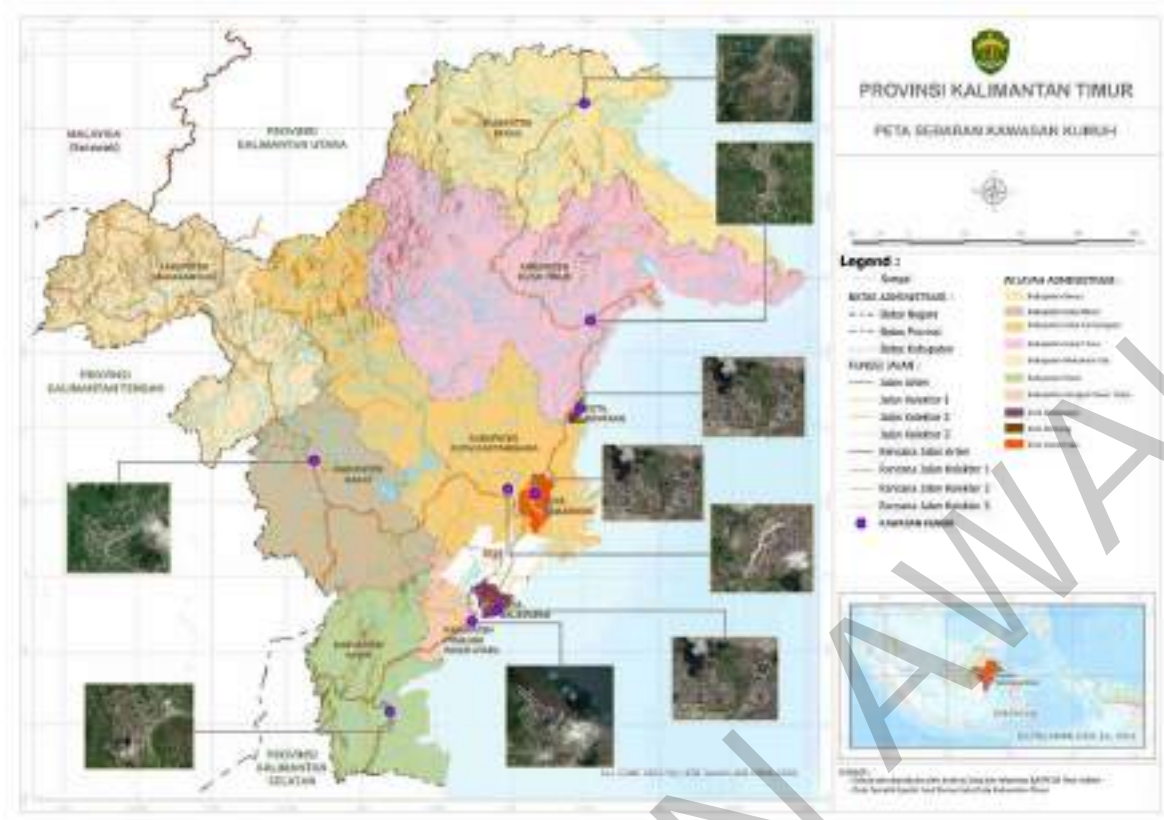
Uraian	Luas kawasan kumuh (Ha)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	673.42	620.06	1.287,82	1.237,82	1.187,82
Realisasi		645.47	1.287,82	1,190.14	1.185,14

Lokasi kawasan kumuh ditetapkan oleh bupati/wali kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menangani areal kumuh dengan luasan 10-15 Ha, pemerintah pusat untuk luasan di atas 15 Hektar, sementara pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menangani areal di bawah 10 Ha. Hingga tahun 2022, luas kawasan kumuh tersisa 1.185,14 Ha (Tabel II. 59). Capaian penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi penanganan antara berbagai sumber pendanaan.

**Tabel II.48**  
**Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan**

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)			SK Bupati/Walikota
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	
1	Paser	180,74	35,06	8,72	No. 653/KEP-116/2021
2	KUBAR	969,43	37,5	38,69	No. 592/K.425/2021
3	KUKAR	122,99	37,51	7,61	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	KUTIM	783,73	0	0	No. 050/KK.268/2016
5	Berau	0	25,79	2,47	No. 30 Tahun 2020
6	PPU	49,07	0	0	No. 593.33/270/2017
7	MAHULU	37,15	0	2,45	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Balikpapan	137,51	10,39	5,4	No. 188.45-326/2020
9	Samarinda	21,43	24,25	24,83	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	32,8	33,35	7,41	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kaltim		2.334,85	203,85	97,58	

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2022



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

Gambar II.57  
Peta Sebaran Kawasan Kumuh

3) **Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi**

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi Kalimantan Timur belum dapat dilakukan mengingat kewenangan provinsi adalah penyediaan rumah untuk korban bencana alam skala provinsi serta warga yang terkena relokasi program pemerintah. Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat setidaknya 2.704 Ha area permukiman yang perlu menjadi perhatian karena wilayahnya berada pada area risiko bencana (Tabel II. 61)

Tabel II.49  
Risiko Bencana dan Permukiman Pada Area Berisiko

Risiko Bencana	Total Area (Ha)	Permukiman pada area Berisiko (Ha)
<b>Risiko tanah longsor</b>	<b>3,179,299.92</b>	<b>76.59</b>
Tinggi	2,431,916.85	48.63
Sedang	739,261.71	9.30
Rendah	8,121.36	18.67
<b>Risiko kebakaran hutan</b>	<b>11,337,251.96</b>	<b>13,396.50</b>
Tinggi	4,436,219.74	6,569.90

Sedang	2,438,406.17	6,557.48
Rendah	4,462,626.05	269.12
<b>Risiko banjir</b>	<b>5,278,811.89</b>	<b>90,741.89</b>
Tinggi	39,703.97	2,510.46
Sedang	1,556,180.47	61,564.28
Rendah	3,682,927.45	26,667.15
<b>Risiko cuaca ekstrim</b>	<b>5,846,803.21</b>	<b>106,827.75</b>
Tinggi	401,091.26	68,667.65
Sedang	4,522,662.64	35,455.64
Rendah	923,049.31	2,704.47

Sumber: Analisis Spasial Peta Potensi Bencana Kaltim & sebaran permukiman di Kaltim 2021

**4) Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi**

Berdasarkan laporan SPM dalam LPPD Tahun 2021, capaian SPM Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 22%.

Pencapaian dua jenis pelayanan dasar yang merupakan SPM bidang perumahan rakyat diatas belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya data yang akurat dan mutakhir terkait jumlah rumah serta penduduk yang perlu penanganan skala provinsi. Upaya yang dilakukan pada tahun 2022 adalah dengan melakukan pendataan awal SPM. Selain itu, tengah dilakukan dokumen Rencana Aksi SPM yang saat ini dalam proses perumusan dan akan disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan sinkronisasi untuk pencapaian SPM perumahan rakyat sesuai kewenangan provinsi. Diantaranya adalah koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta identifikasi proyek-proyek strategis yang berpotensi memerlukan relokasi penduduk. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa terdapat lingkungan hunian di Kaltim yang masuk dalam area risiko bencana, baik tinggi, sedang, maupun rendah.

**E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari beberapa pelayanan dasar dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar

tersebut yang mana Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar tersebut yaitu Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban umum, Ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi
  - 1) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil.
  - 2) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan.
  - 3) Warga Negara yang memperoleh pelayanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat dari Penegakkan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sesuai SOP.
- b) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu
  - 1) Penegakan Perda sesuai SOP;
  - 2) Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar;
- c) Pelayanan Perlindungan Masyarakat dan anggota satpol PP
  - 1) Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas
  - 2) Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas sesuai SOP



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangnda Kemendagri

**Gambar II.58**  
**Capaian SPM Trantibum Tahun 2022**

Berdasarkan pelaporan Standar Pelayanan Minimal ada Sekretariat Bersama SPM Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada triwulan III (tiga) tahun 2022, bidang urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 46,57% pada pelayanan dasar trantibum dengan kualitas pelayanan 8,41%. Hal ini disebabkan belum dialokasikan anggaran terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal terkhusus bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Linmas Provinsi Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketentraman sampai dengan tahun 2020 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparatur pemerintah dan aparatur keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kejahatan yang semakin menurun dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait pengisian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, sehingga kedepannya perlu



dilakukan Peningkatan Kapasitas SDM terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal baik berupa Pelatihan atau Bimtek, selain itu terkait penempatan Tusi Pengolah data SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja yang belum ditetapkan. Pada triwulan IV (empat) tahun 2022 untuk pencapaian Standar pelayanan Minimal bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat tercapai dengan baik capaian kualitas layanan 100%, dengan melakukan koordinasi langsung melalui zoom meeting yang difasilitasi langsung oleh Kemendagri. Namun hal ini tentu saja tetap mendapatkan perhatian yang serius dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengampu Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum dialokasikan anggaran terkait pelaksanaan SPM, untuk itu diperlukan alokasi anggaran terkait pelaksanaan SPM guna menunjang kualitas capaian layanan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu perlunya peningkatan alokasi terhadap penguatan kapasitas Satlinmas Prov.Kaltim, terutama Satlinmas yang sudah dikukuhkan.

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kejahatan dan pelanggaran saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kejahatan dan pelanggaran sebesar 31 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 11 persen, hingga pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14 persen.

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2016, jumlahnya hanya sebesar 2.242. Angka ini mengalami penurunan menjadi 1927 pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum sebagai upaya penurunan angka kriminalitas untuk jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 63 kali, tahun 2017 sebanyak 211 kali, tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 2.793 kali.

Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 30 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020, karena keterbatasan

tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan pilkada. Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari permendagri, program satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2018 terdapat 6.715 tindak pidana, yang turun menjadi 5.253 tindak pidana pada 2019, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.368 tindak pidana.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 87,25 persen, sedangkan pada tahun 2018 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 81,71 persen. Pada tahun 2020, persentase tindak kejahatan yang diselesaikan baru mencapai 38,83 persen dengan posisi data masih bersifat sementara.

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Berdasarkan data 6 (enam) tahun terakhir yakni Tahun 2017 s/d Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2022, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 115 dimana 20,00% (23 demonstrasi) terkait Ekonomi; 10,43% (12 demonstrasi) terkait Politik; 13,04% (15 demonstrasi) terkait Sosial; 46,09% (53 demonstrasi) terkait Hukum; 0,87% (1 demonstrasi) terkait Agama; 9,57% (11 demonstrasi) terkait Kamtibmas.

**Tabel II.50**  
**Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022**

Jenis Demo	2018	2019	2020	2021	2022
------------	------	------	------	------	------

Ekonomi	9	9	1	8	23
Politik	2	0	6	5	12
Sosial	22	15	14	15	15
Budaya	4	0	0	0	0
Pendidikan	0	0	0	0	0
Hukum	33	18	32	34	53
Agama	6	0	1	1	1
Hankam	0	0	0	0	0
Tapal Batas	0	0	0	0	0
Sengketa Lahan	0	8	14	2	0
Kamtibmas	0	4	2	2	11
Lingkungan	0	0	0	3	0
<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>115</b>

**F. Sosial**

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam rangka kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat.

Perkembangan jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktifitas kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tergambarkan pada peningkatan jumlah PMKS yang harus menerima bantuan dengan puncak jumlah tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 108.434 orang.

Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curative), pemulihan (rehabilitative) dan pengembangan (promotive) seperti meningkatkan jumlah Keluarga miskin

dan PMKS/PPKS yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan melibatkan multi program dan lintas sektor.

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur terdapat kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 243.459 orang menjadi 247.465 orang pada tahun 2021, atau bertambah sebanyak 4.006 orang. Jumlah PMKS yang terbesar pada kabupaten/kota berada pada Kabupaten Kutai Barat dan Kota Samarinda yaitu sebesar 87.726 dan 34.899. Berdasarkan inventarisasi permasalahan penanganan PMKS hal utama yang perlu dilakukan selain peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga adalah belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

**Tabel II.51**  
**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**  
**Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	94	-	68	-	1.841	-	59	-	102	-	82	-
2	Anak Terlantar	327	-	743	-	1.542	-	274	-	326	-	1.625	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	71	-	79	-	66	-	48	-	26	-	21	-
4	Anak Jalanan	124	-	81	-	206	-	-	-	-	-	39	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	76	-	63	-	435	-	31	-	14	-	164	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	187	-	24	-	97	-	170	-	59	-	93	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	161	-	921	-	816	-	23	-	-	-	43	-
8	Lanjut Usia Terlantar	29	-	668	-	1.162	-	-	-	422	-	-	-
9	Penyandang Disabilitas	314	-	2.349	-	1.626	-	1.097	-	449	-	530	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	11	-	4	-	51	-	-	-	26	-	10	-
12	Pengemis	9	-	8	-	55	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	21	-	5	-	64	-	-	-	-	-	7	-
14	Kelompok Minoritas	65	-	-	-	38	-	93	-	-	-	17	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	143	-	134	-	439	-	110	-	240	-	298	-
16	Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.091	-	180	-	1.990	-	19	-	43	-	7	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	303	-	75	-	508	-	4	-	6	-	3	-
18	Korban Trafficking	2	-	3	-	8	-	6	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	56	-	-	-	73	-	-	-	-	-	51	-
20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial	399	-	-	-	59	-	-	-	48	-	34	-
21	Korban Bencana Alam	2.807	591	169	43	5.950	1.267	981	214	47.301	9.748	1.211	287
22	Korban Bencana Sosial	948	171	2.477	412	3.288	612	781	192	25.304	5.941	1.011	214

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	56	-	-	-	-	-	27	-	29	-	48	-
24	Fakir Miskin	14.704	3.114	20.114	3.193	14.248	3.101	12.047	3.012	12.678	2.870	13.647	3.291
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	34	-	337	-	-	-	581	-	11	-
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	72	27	1.697	378
<b>JUMLAH</b>		<b>21.998</b>	<b>3.876</b>	<b>28.199</b>	<b>3.648</b>	<b>34.899</b>	<b>4.980</b>	<b>15.770</b>	<b>3.418</b>	<b>87.726</b>	<b>18.586</b>	<b>20.648</b>	<b>4.170</b>

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2022

**Tabel II.56 Lanjutan**

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	77	-	128	-	78	-	-	-
2	Anak Terlantar	502	-	213	-	437	-	-	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	172	-	442	-	43	-	18	-
4	Anak Jalanan	16	-	-	-	51	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	35	-	872	-	43	-	-	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	139	-	187	-	56	-	-	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	147	-	587	-	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	-	-	198	-	337	-	-	-
9	Penyandang Disabilitas	276	-	612	-	795	-	310	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	75	-	19	-	17	-	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	4	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	44	-	-	-	-	-	-	-
16	Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA)	31	-	159	-	160	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	2	-	4	-	4	-	-	-
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial	52	-	-	-	34	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	-	-	712	154	869	196	-	-
22	Korban Bencana Sosial	422	106	392	98	377	95	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Fakir Miskin	9.307	2.107	12.001	3.001	4.587	1.047	1.067	264
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	1.717	411	575	104	-	-	1.250	249
<b>JUMLAH</b>		<b>13.014</b>	<b>2.624</b>	<b>17.101</b>	<b>3.357</b>	<b>7.892</b>	<b>1.338</b>	<b>2.645</b>	<b>513</b>

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021

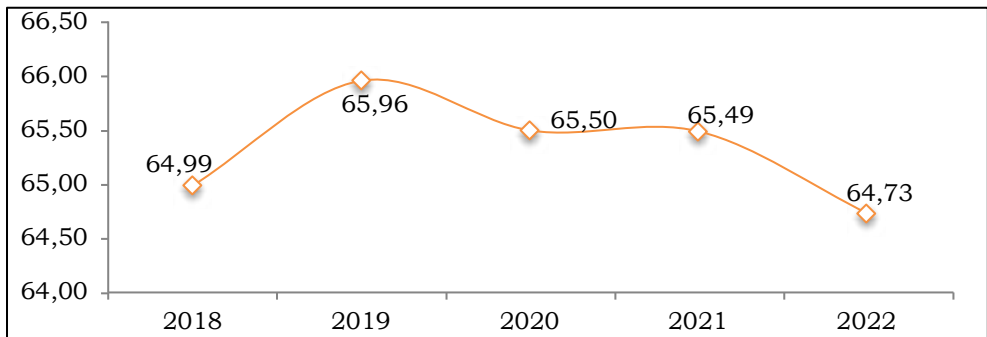


### **G. Ketenagakerjaan**

Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMA/SMK dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma I/II/III.. Pada tahun 2022 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah tercatat 25,98 persen menurun dibanding tahun 2021 yang mencapai 28,57 persen. Sementara Persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus Diploma I/II/III sekitar 3,26 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 3,77 persen.

Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja selama tahun 2018-2022 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun dari 1.693.481 orang di tahun 2019 menjadi 1.692.796 orang di tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk yang bekerja tersebut merupakan salah satu dampak pandemi COVID- 19 yang menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaannya atau usahanya, pengurangan jam kerja ataupun pemberhentian kerja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu serta program pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dilaksanakan pemerintah, jumlah penduduk yang bekerja telah kembali meningkat. Kondisi itu tercermin pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.720.361 orang di tahun 2021 kemudian menjadi sebanyak 1.746.920 orang di tahun 2022.

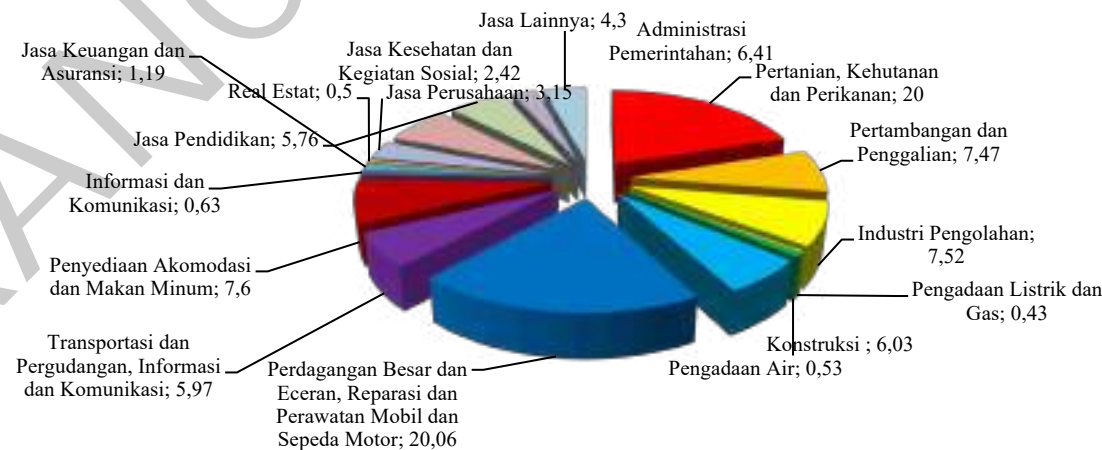
Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi Diploma dan Sarjana ke atas. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi SMA dan SMK. Kedua hal ini juga dapat mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih untuk bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi yang dominan menyerap tenaga kerja di Kalimantan Timur tidak memerlukan kompetensi/keahlian pada jenjang Diploma dan Universitas. Jika melihat fakta, penduduk paling banyak bekerja di wilayah perkotaan dengan lapangan usaha dominan di sektor perdagangan dan jasa (20,06%). Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa para pekerja sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan peluang kesejahteraan yang lebih baik apabila berpendidikan lebih tinggi yang didukung dengan kebutuhan perkembangan sektor ekonominya.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.59**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

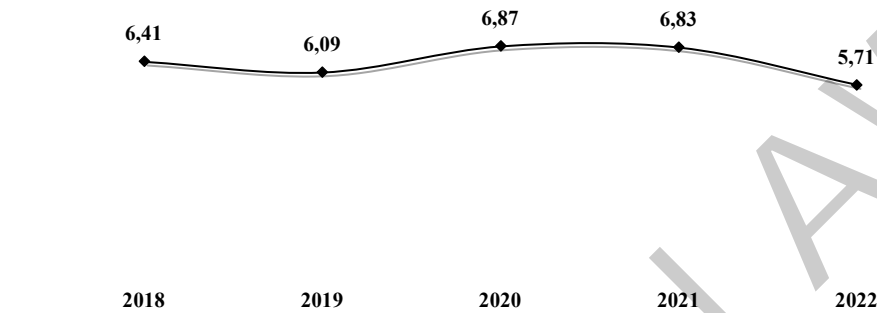
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun dari 65,49 persen menjadi 64,73 persen. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja. Membaiknya kinerja ekonomi turut berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja yang tersedia dan hal tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.60**  
**Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (%)**

Tahun 2022, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 20,06 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 20,00 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas mencapai 0,43 persen.

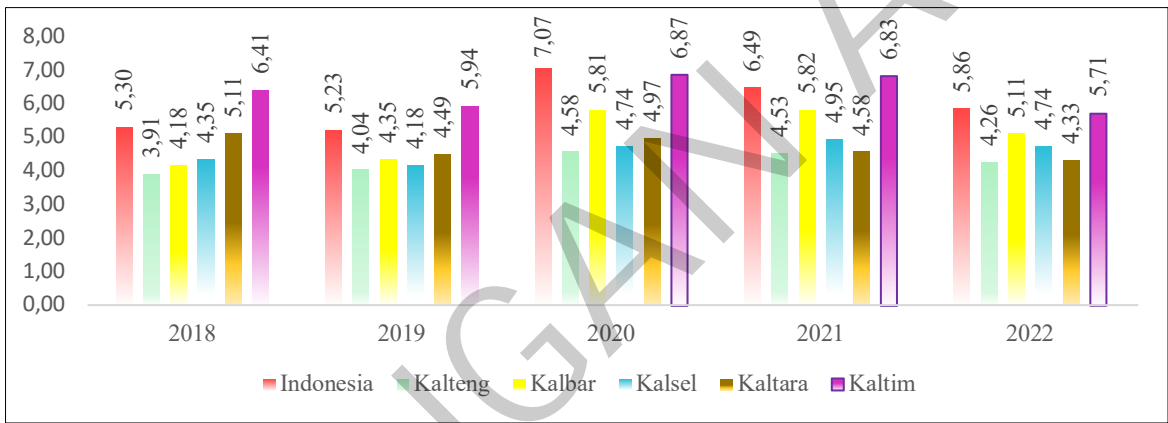


Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.61**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (persen)**

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang mencapai 6,87 persen dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,94 persen. Peningkatan ini diperkirakan akibat dampak dari Pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai terasa dampaknya di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur pada awal tahun 2020 terutama pada sektor transportasi dikarenakan beberapa negara memberlakukan pembatasan berskala besar bahkan ada yang memberlakukan karantina wilayah. Sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate* dan jasa perusahaan. Namun di tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan mencapai 5,71 persen, penurunan terjadi dikarenakan di tahun 2022 pandemi COVID-19 sudah mulai berkurang dan banyaknya masyarakat yang telah di vaksin serta pemulihan ekonomi mulai membaik.

Pada tahun 2022 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 7,81 persen, Kota Balikpapan sebesar 6,90 persen, dan Kota Samarinda sebesar 6,78 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah ditorehkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,12 persen. Jika dilihat dari perbandingan regionalnya, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2022 masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan berada di atas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,86 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.62**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia**

Meskipun TPT Kaltim mengindikasikan penurunan, namun peringkat TPT Kaltim berada di atas TPT wilayah Kalimantan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada Februari 2022 sebesar 6,77% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan dengan TPT provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Secara nasional, Kaltim menempati 10 besar provinsi yang memiliki TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional sebesar 5,83%



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.63**  
**Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur Tahun 2022**

Salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada pencari kerja terutama yang telah mendaftarkan ke dalam database pada Disnakertrans. Untuk kemudian akan disesuaikan dengan data yang bersumber dari perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2021 adalah Kota Samarinda mencapai 33,59 persen. Capaian yang cukup tinggi kemudian

diikuti oleh Kabupaten Berau yang mencapai 29,29 persen dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 25,64 persen.

## **H. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak**

### **I. Pangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi,

IKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 77,65 mengalami peningkatan dari IKP Tahun 2021 yang sebesar 77,46. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sejalan dengan hal tersebut, apabila dilihat hingga level desa masih terdapat 412 pada Tahun 2022 desa di Kalimantan Timur masih termasuk dalam kategori rawan pangan. Desa rawan pangan ini merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Adapun penyebab terbesar terjadinya desa rawan pangan disebabkan oleh factor Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan bersih (beras, jagung, ubi kayu, ubi

jalar, sagu dan stok), rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk dan persentase angka kesakitan/angka harapan hidup.

**J. Pertanian**

Urusan pemerintahan bidang pertanian menjadi kewenangan urusan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan Indikator Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu sebesar 100% pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.

**K. Lingkungan Hidup**

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.



Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.64**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022**

IKLH Kaltim dari tahun 2017-2018 mendapat predikat sangat baik (IKLH > 80) yang dipengaruhi oleh capaian indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan yang juga meningkat. Namun, pada tahun 2019, IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,68 di tahun 2018 menjadi 78,71 (predikat baik,  $70 < \text{IKLH} \leq 80$ ) dan terus menurun pada tahun 2021 menjadi 75,06. Menurunnya IKLH tahun 2021 dapat dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut



(IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 kemudian menurun menjadi 74,46 ( Data Tahun 2022).Capaian ini berada di bawah Target P-RPJMD Kaltim 2019-2023 yakni, 76,05. Capaian IKLH Tahun 2022 ini menurun dikarenakan adanya penurunan angka indeks pada Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kaltim masih belum tercapai apabila dibandingkan dengan target di P-RPJMD.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak hanya diukur di tingkat Nasional dan Provinsi saja namun juga ada pada tingkat Kabupaten/Kota. Jika dilihat melalui capaian IKLH dari 10 Kabupaten/Kota di Tahun 2022 yang ada di Kalimantan Timur, Capaian IKLH Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan capaian terbaik, yakni 82,65 dengan Rating Baik. Capaian ini didukung oleh Capaian Indeks Kualitas Lahan yang sempurna yakni 100 Indeks. Sementara Kabupaten/Kota dengan capaian Rating Sedang adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kabupaten/kota yang memiliki capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang baik adalah kabupaten/kota yang menghasilkan capaian Indeks Kualitas Lahan yang baik pula. Hal ini disebabkan porsi perhitungan Indeks Kualitas Lahan yang lebih besar dalam rumus perhitungan IKLH, yakni 40%.

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alihguna dan degradasi hutan (64%), energi (17%), limbah (17%) dan pertanian (2%).

Strategi transformasi ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan pembangunan dengan cara meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sumber daya alam yang ada selama ini. Dengan melihat semakin menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan semakin menurunnya ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan, maka Pemprov Kaltim melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang, antara berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam yang terbarukan, yang dilakukan secara sistematis. Salah

satu upaya yang dilakukan adalah mengarahkan rencana pembangunan di Kalimantan Timur sejalan dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan strategi pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan disertai upaya mengarusutamakan ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengahkabupaten/kota di Kaltim.

Dalam Konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) adalah suatu keharusan untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar Pemerintah Daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK, meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi dan penyerapan GRK. Selain itu, tahapan PEP ini dapat menjadi momentum untuk penyiapan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan/Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan RAD GRK di tahun-tahun berikutnya. Sejak Tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2022 total aksi yang sudah disetujui dan final di PEP/Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 836 aksi.

Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang terpilih sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru juga memiliki masalah yang populer terjadi di Provinsi yang memiliki kota besar lainnya di Indonesia, yakni permasalahan pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak agar penanganannya dilakukan secara serius dan cepat tanggap.

Maka dari itu dalam menentukan tingkat pencemaran lingkungan dilakukan pengukuran Indeks Pencemaran Lingkungan. Indeks Pencemaran Lingkungan adalah Indeks Pencemaran (IP) dari pemantauan Kualitas Air yang kemudian dilakukan penghitungan indeks pencemarannya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Tahun 2021 capaian Indeks Pencemaran 2,797 (Status Cemar Ringan) dari rata-rata 27 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target yang ditetapkan adalah 8 (Status Cemar Sedang) artinya Indeks Pencemaran pada tahun 2021 masih dibawah status cemar sedang, yaitu cemar ringan. Tahun 2022 data Indeks Pencemar yang dihitung adalah IP sementara (Semester 1 Tahun 2022) dengan hasil nilai perhitungan

sementara adalah 3,34 (Cemar ringan) dari 179 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target tahun 2022 yang ditetapkan adalah 8 (cemar sedang) artinya capaian sementara tahun 2022 masih dibawah status mutu air cemar sedang. Jika dibandingkan dengan capaian IP tahun 2021 (2,797) dan IP sementara tahun 2022 (3,34) terdapat selisih nilai yaitu 0,543, hal ini disebabkan adanya pada Tahun 2022 nilai Indeks Pencemaran dilakukan perhitungan penggabungan titik pantau kualitas air sebanyak 179 titik pemantauan kualitas air antara titik KLHK, titik Provinsi Kaltim dan titik Kabupaten/Kota, sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan Indeks Pencemar pada Provinsi Kalimantan Timur.



**Gambar II.65**  
**Indeks Pencemaran Lingkungan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022**

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF *Carbon Fund* dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

Dalam pengukuran emisi GRK Kalimantan Timur Tahun 2022 (Sementara), menggunakan 2 rumus dalam mendapatkan nilai presentase penurunan emisi dari BAU (%), berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan:

$$\text{Jumlah Penurunan Emisi GRK} = \text{BAU Baseline Total} - \text{Total Emisi GRK}$$

$$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK} = (\text{Jumlah Penurunan Emisi GRK} : \text{BAU Baseline Total}) \times 100\%$$

Saat ini merujuk pada data sementara Tahun 2022, Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 36,4 Juta Ton CO<sub>2</sub> eq atau sebanyak 70,68%. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) di P-RPJMD Kaltim 2019-2023, yakni 28,50. Sehingga dapat dikatakan sementara ini capaian penurunan emisi dari BAU telah melampaui target pada P-RPJMD. Menurut Data Tahun 2021, potensi penurunan emisi sebesar 20,89 Juta ton CO<sub>2</sub> eq, dimana penurunan emisi terbesar berasal dari sektor lahan sebesar 18.9 Juta ton CO<sub>2</sub> eq, energi dan transportasi sebesar 1.6 Juta ton CO<sub>2</sub> eq, sektor limbah sebesar 0.2 Juta ton CO<sub>2</sub> eq dan pertanian-peternakan sebesar 0.098 Juta ton CO<sub>2</sub> eq. Total Penurunan Emisi pada tahun tersebut sebesar 41.96%, penurunan ini jauh dari targetan dalam dokumen RAD GRK 2010-2030 yang sebesar 27.75% untuk tahun 2021. Besaran capaian penurunan Emisi jika di bandingkan target sebesar 151.21%. Fluktuatif capaian ini jelas sangat terlihat dari tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

**L. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Indikator Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD di Tahun 2021 bernilai 100 persen yang didapat dari Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun dengan realisasi dan target sebanyak 2 kali. Pada Indikator Pemanfaatan data kependudukan LPPD OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian 107 kerjasama sebanyak 7 kabupaten/kota dari 37 kabupaten/kota.

**M. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

#### **N. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

#### **O. Perhubungan**

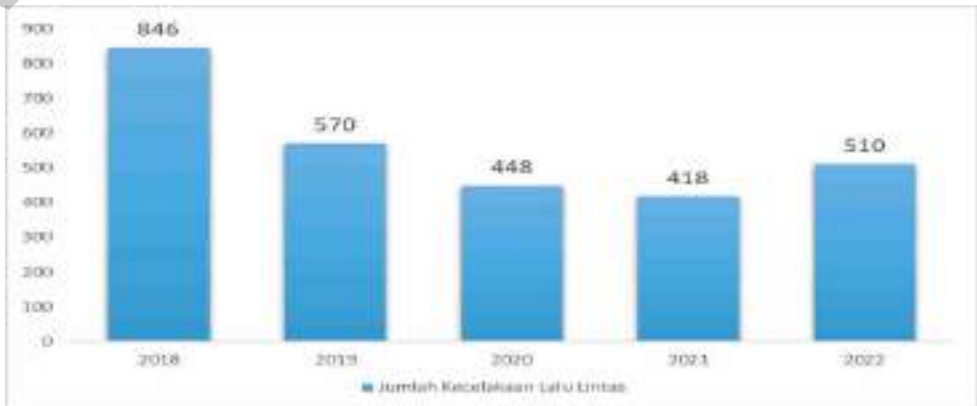
Jumlah Penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang diangkut terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 jumlah orang yang terlayani sebesar 10.721.656 orang penumpang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7.150.906 orang penumpang sehingga menjadi 3.570.750 orang penumpang, kemudian mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 4.667.228 orang penumpang. Pada tahun 2019 jumlah barang yang diangkut sebesar 341.529.297 ton, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47.041.900 ton sehingga menjadi 294.487.397 Ton. Hal ini disebabkan beberapa negara telah melakukan pembatasan penerbangan untuk mencegah wabah pandemi COVID-19 masuk ke negara tersebut. Pada tahun 2021, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dikarenakan telah berkurangnya pandemi COVID-19 dan telah dilaksanakannya vaksinasi sehingga jumlah penumpang dan barang yang diangkut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4.667.228 orang dan 323.233.820 ton. Pada tahun 2022 jumlah penumpang dan barang yang diangkut terus mengalami peningkatan, untuk jumlah penumpang menjadi 8.513.323 orang dan jumlah barang menjadi 513.031.229 ton.



Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.66**  
**Jumlah Penumpang yang terlayani dan Jumlah Barang**  
**Tahun 2017-2022**

Terjadi penurunan jumlah kecelakaan di Kalimantan Timur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data kecelakaan pada tahun 2018 mencapai 846 kasus kecelakaan, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 418 kasus kecelakaan. Hal yang mengakibatkan penurunan kasus kecelakaan adalah pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas-ruas jalan provinsi di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, sinergitas dan koordinasi antar stakeholders untuk menurunkan angka kasus kecelakaan semakin baik. Hal tersebut dicapai melalui rapat – rapat koordinasi secara berkala antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Polda Kaltim dan Stakeholders lainnya. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kecelakaan menjadi sebanyak 510 kasus kecelakaan, hal ini diakibatkan oleh aktifitas masyarakat yang berkendara di jalan terus meningkat karena pada tahun 2022 merupakan tahun pemulihan perekonomian pasca kasus COVID-19.



Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.67**  
**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 – 2022**

Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian yang terletak di Kota Balikpapan. Selain itu layanan transportasi udara yang cukup memadai juga difasilitasi oleh Bandara Kalimantan di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017, namun kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datah Dawai.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di daerah perbatasan.





Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

**Gambar II.68**  
**Peta Bandara Kalimantan Timur**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektifitas dan pola distribusi nasional yang handal (*reliable*) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hirarki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional. Selanjutnya pada tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut mengalami perubahan menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sepuluh) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.

**Tabel II.52**

Rencana Induk Pelabuhan Nasional  
Di Kalimantan Timur Berdasarkan KP 432 Tahun 2017

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	Kab/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber: Kementerian Perhubungan Provinsi KALTIM

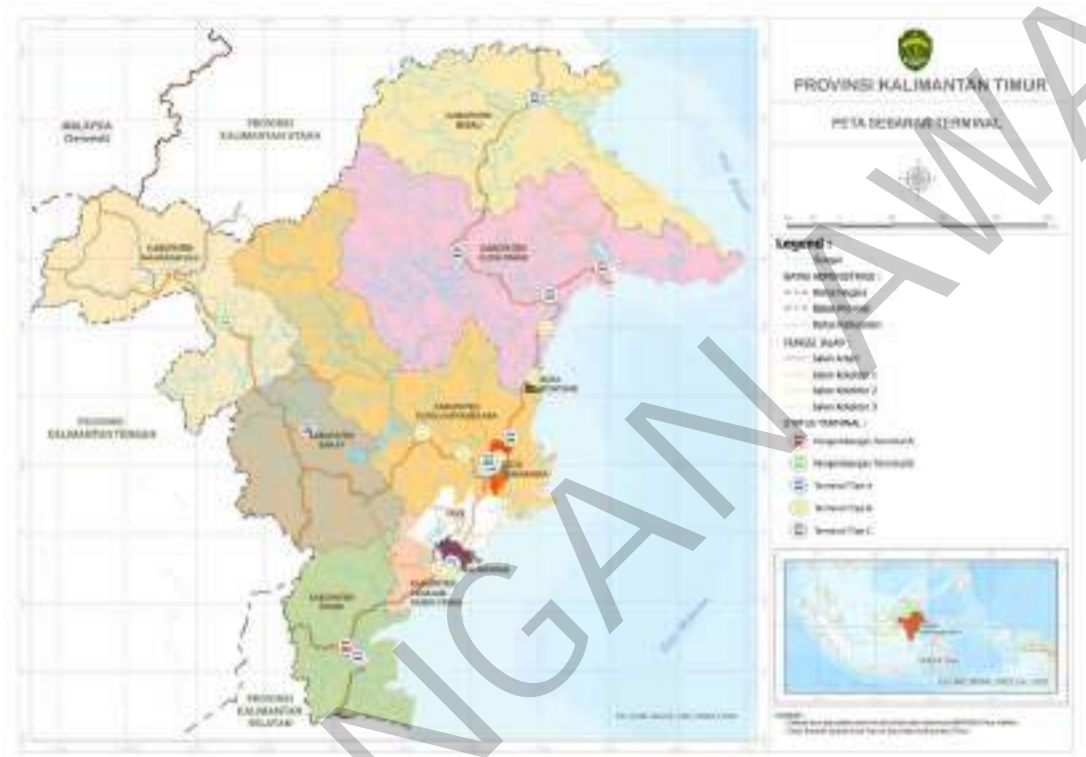
Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

Gambar II.69  
Peta Pelabuhan Kalimantan Timur

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.70**  
**Peta Terminal Kalimantan Timur**

**P. Komunikasi Dan Informatika**

**1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Gerakan menuju 100 Smart City yang diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan untuk mengarahkan setiap provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, serta peningkatan partisipasi warga. Dengan demikian SPBE akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan Good Governance. Melalui SPBE, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Selain itu, unsur-unsur penyimpangan dapat diminimalkan ataupun dihindarkan serta dapat meningkatkan aspek pelayanan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

**Tabel II.53**  
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE	2,89	3,04	3,14	2,22	2,11

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Adapun permasalahan pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- a) Pemahaman tentang SPBE yang belum komprehensif oleh Tim Koordinasi Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Belum terjadi kolaborasi yang berkelanjutan antara Tim Koordinasi SPBE Provinsi dengan Perangkat Daerah pelaksana layanan SPBE.
- c) Sumber Daya Manusia secara khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masing masing perangkat daerah belum menguasai dan memahami SPBE secara mendalam.

- d) Belum adanya Peraturan Gubernur terkait penyelenggaraan SPBE Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel II.54**  
**Indeks SPBE Menurut Kabupaten/Kota**

INSTANSI	INDEKS SPBE	PREDIKAT
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,22	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	2,48	CUKUP
Pemerintah Kab. Paser	1,36	KURANG
Pemerintah Kab. Kutai Barat	1,83	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Timur	1,03	KURANG
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,14	CUKUP
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1,03	KURANG
Pemerintah Kota Saamrinda	2,46	CUKUP
Pemerintah Kota Balikpapan	2,44	CUKUP
Pemerintah Kota Bontang	2,11	CUKUP

Sumber : Kepmenpan RB No. 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

**L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

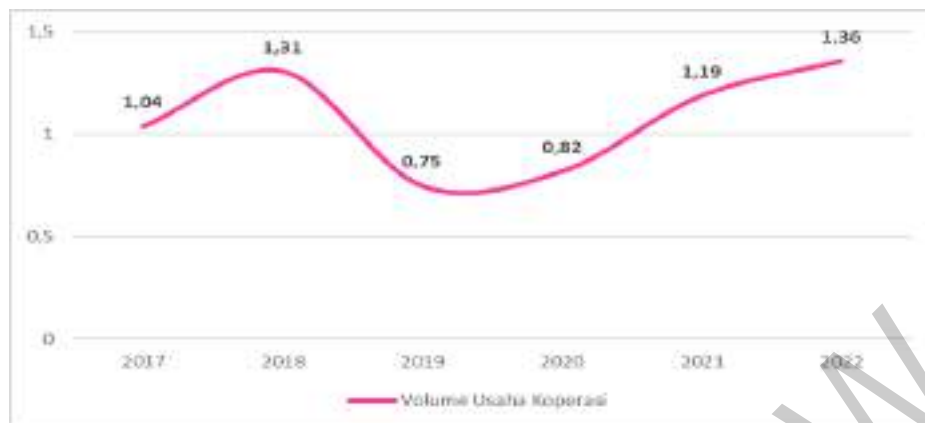
Pentingnya peran koperasi dan UKM di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Koperasi dan UKM merupakan bentuk perekonomian kerakyatan di Kalimantan Timur. Adapun jumlah koperasi aktif tahun 2022 adalah sebanyak 3.117 Koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 6.041 Koperasi. Sedangkan jumlah UKM di Kalimantan Timur tahun 2022 adalah sebanyak 351.963 UKM, terdiri dari 341.157 usaha mikro, 10.155 usaha kecil, dan 651 usaha menengah.

Jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan jumlah seluruh koperasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi. Disamping itu masih rendahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi syarat untuk menjadi koperasi yang bisa dikatakan aktif dan sehat.

Jumlah anggota koperasi di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kondisi tahun 2020 mengalami penurunan jumlah anggota yakni 57.381 orang. Secara umum kendala penurunan di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19, namun kendala lain yang dihadapi adalah berkurangnya modal, berkurangnya pelanggan, dan harga



produk yang menurun. Hal ini juga memberi pengaruh pada jumlah volume usaha koperasi yang tergambar pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim

**Gambar II.71**  
**Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017 – 2022 (dalam Triliun Rupiah)**

Jumlah volume usaha koperasi di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah volume usaha koperasi tahun 2019 dan 2020 berada di bawah 1 Triliun Rupiah. Tahun 2021 jumlah volume usaha koperasi kembali pulih mencapai 1,19 Triliun Rupiah dan 1,36 Triliun Rupiah pada tahun 2022 yang diikuti dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, jumlah anggota koperasi, dan koperasi yang melaksanakan RAT.

Sementara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pergerakan perekonomian daerah khususnya perekonomian masyarakat. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu bertahan lebih baik di saat pandemi COVID-19.

Jumlah UKM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebanyak 344.581 UKM. UKM terbanyak berada di Kota Samarinda dengan jumlah 158.624 UKM, sedangkan terbanyak kedua adalah Kota Balikpapan sebanyak 77.953 UKM. Jenis usaha UKM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur beragam, mulai dari kuliner, industri pengolahan, industri kerajinan, perdagangan dan jasa. Jenis usaha UKM di Provinsi Kalimantan Timur didominasi pada usaha dagang sebanyak 180.384 UKM dan industri kuliner sebanyak 122.580 UKM. Banyaknya usaha dagang dan kuliner ini tidak dipungkiri karena kemudahan dalam penyediaan modal dan banyak peminat. Sedangkan jenis usaha paling sedikit adalah industri

kerajinan yakni 1.652 UKM dimana jenis usaha ini tidak terdapat pada Kabupaten PPU dan Kabupaten Mahulu.

## **M. Penanaman Modal**

### **1) Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)**

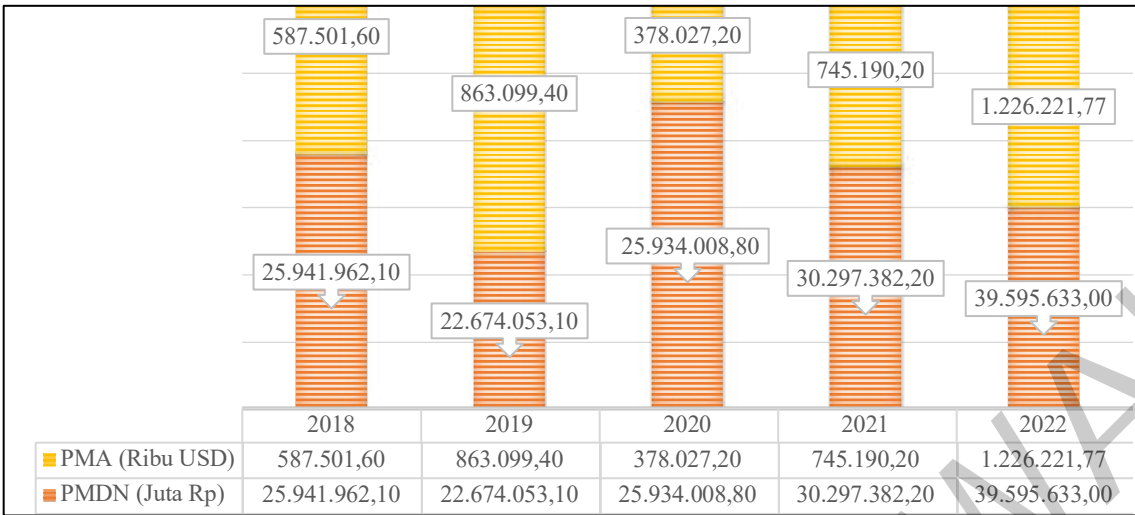
Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah proyek PMDN/PMA di Kalimantan Timur sebanyak 10.325 proyek, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 4.702 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 5.367 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 256 proyek. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik. Pada tahun 2022 jumlah proyek PMDN sebesar 6.706 proyek dan PMA sebesar 1.005 proyek. Proyek pada investasi Dalam Negeri dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 1.850 proyek dan di Kota Samarinda dengan jumlah 1.845 proyek. Begitu juga untuk proyek investasi asing dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 332 proyek.

### **2) Nilai Investasi (PMDN/PMA)**

Nilai realisasi investasi dalam negeri tahun 2022 mencapai Rp 39,59 triliun dengan 5 (lima) sektor utama yakni pertambangan (37,91%), Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi (37,67%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (9,22%), Industri Makanan (6,04%), dan Perdagangan dan Reparasi (1,74%). Selanjutnya nilai realisasi investasi asing mencapai US\$ 1.266,22 Juta dengan 5 (lima) sektor utama yaitu pertambangan (40,74%), Industri Mineral Non Logam (17,06%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (15,01%), Industri makanan (7,59%), dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (7,42%). Dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentunya akan membawa pengaruh yang baik terhadap nilai invesasi di kemudian hari dikarenakan adanya peningkatan aktivitas investasi oleh investor.





Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2023

**Gambar II.72**  
**Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022**

Kalimantan Timur telah dikenal sebagai provinsi yang punya banyak kekayaan alam, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, maupun sektor lainnya seperti Agrikultur, Pariwisata dan Industri pengolahan. Hal ini menjadi daya tarik investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di Kalimantan Timur baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Di samping itu, kehadiran IKN Nusantara tentu menjadi potensi yang baik untuk investasi ke depan.

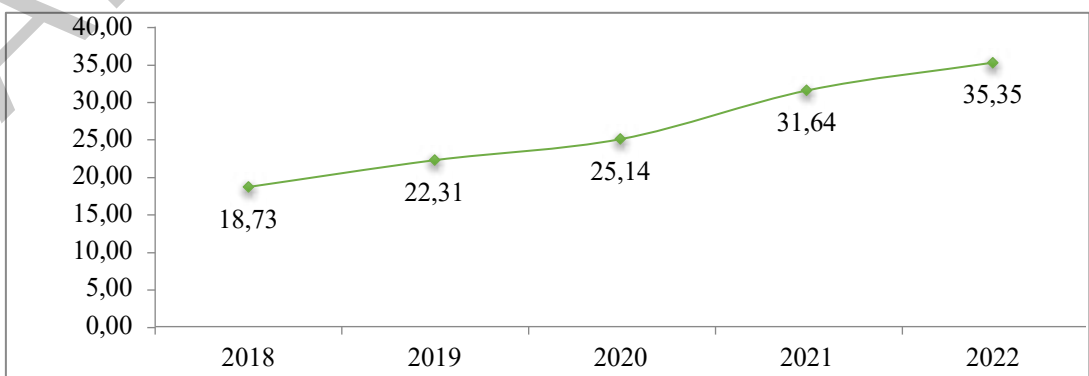
Berdasarkan Realisasi Investasi PMDN, mulai tahun 2017-2019 sektor pertambangan merupakan sektor yang paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, namun sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sektor yang paling dominan di tahun 2020 adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi yang mencapai Rp 7.965,22 miliar dan meningkat tajam di tahun 2021 hingga mencapai Rp 15.145,34 miliar. Investasi sektor pertambangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai Rp 5.859,33 miliar meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3.818,59 miliar diikuti sektor Tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai Rp 4.828,00 miliar. Pada tahun 2022 sektor pertambangan kembali menjadi sektor paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yakni Rp 15.012,38 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya momentum membaiknya harga komoditas batubara pada level tinggi dan menjadi faktor pendorong investasi di sektor pertambangan. Sektor lain

yang juga berkontribusi cukup besar adalah sektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mencapai Rp 14.914,62 miliar, serta sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan mencapai Rp 3.650,82 miliar.

Disamping itu pada realisasi investasi PMA, lapangan usaha pertambangan yang memiliki peranan terbesar di Kalimantan Timur tahun 2017-2022 mengalami peningkatan nilai investasi PMA yang mencapai US\$ 515.919,94 Ribu dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 252.125,20 Ribu. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan tahun 2021 yaitu sektor Industri Makanan yang mencapai US\$ 242.430,00 Ribu. Kondisi ini merupakan posisi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2022 yang hanya mencapai US\$ 96.106,59 Ribu diikuti sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi, serta tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan masuknya investasi asing ke Kalimantan Timur. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi baru yang dikembangkan serta tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang mencapai



Rp

11,42 triliun dan mengalami peningkatan ditahun berikutnya hingga mencapai Rp 35,35 triliun pada tahun 2022.

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.73**  
**Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)**

Nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2021 yang mencapai Rp 31,64 triliun ini terdiri dari investasi PMDN sebesar Rp 24,44 triliun dan PMA sebesar Rp 7,2 triliun. Peningkatan nilai investasi ini dipengaruhi oleh masih tingginya angka kasus Covid-19 di tahun 2021 sehingga kontribusi sektor usaha Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai Rp 15,145 triliun. Selanjutnya nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2022 ditargetkan di angka Rp 35 triliun. Di Triwulan IV target tercapai sebesar Rp 35,35 triliun. Tahun 2023 Nilai Investasi sektor non migas dan batubara ditargetkan mencapai Rp 35,67 triliun dan diharapkan ke depannya investasi sektor non migas dan batubara lebih maksimal.

**N. Kepemudaan Dan Olah Raga**

Setelah sukses meraih peringkat 7 besar pada PON XX Tahun 2021, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. dari hasil capaian tersebut Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional maupun internasional. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

**O. Statistik**

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah bernilai 100 persen pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Jumlah OPD

yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah berjumlah 37 OPD dari 37 OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

**P. Persandian**

Pada Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada Tahun 2021 bernilai 1,73, dimana didapat dari hasil penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI), yang dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: 1. 1. Fase Persiapan : 2,54 2. Fase Aksi 1,76 3. Fase Tindak Lanjut 0,90.

**Q. Kebudayaan**

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim. dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

**Tabel II.55**  
**Karya Budaya Benda dan tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2021**

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda
1.	KUBAR	Alat Musik Kelentangan Tari Ngerangkau Tari Gong Alat Musik Sapeq Tari Perang Dayak Suliikng Dewa Belian Bawo Hudoq Upacara adat Kwangkay Musik Genikng Pakaian Kulit Kayu	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	Bunker Komando Gudang Peluru Kolam Belanda Penampungan Air Belanda Pillbox Sumur Kembar Belanda Lamin Mancong Lamin Tolar

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda
		Parapm Api Bayaq Rumah Panjang Dayak	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	
2.	SAMARINDA	Sarung Tenun Samarinda	Nasional	
3.	KUKAR	Tari Dewa Memanah Tari Ganjur Tari Datun Ngentau Tari Topeng Kemindu Undang-Undang Kerajaan Kutai Kertanegara (uu Panju Selatan) Erau Kertanegara Suling Dewa Punan Leto Kanjat Lasan Belian Namang Naek Ayun Muang Tarsul Kutai Begasing Kutai Nutuk Beham	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	
4.	Paser	Tari Ngarang Petis Udang Paser Ronggeng Paser Pentengan Gambus Paser	Nasional Nasional Nasional Nasional	
5.	Kutai Timur	Lom Plai Blontang Bekanjong Mandau	Nasional Nasional Nasional Nasional	
6.	Provinsi			1. Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkuliran Mangkalihat 2. Situs Penguburan Gunung Selendang

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 698 Cagar Budaya, 9 Museum, 537 Komunitas Budaya, 245 Tenaga Budaya, dan 216 Adat Istiadat/Tradisi.

**Tabel II.56**  
**Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/Tradisi
1	Paser	83	1	58	9	7
2	Kubar	13	1	81	31	19
3	Kukar	187	2	69	39	8
4	Kutim	57	0	7	10	7
5	Berau	167	3	7	7	2
6	PPU	33	0	24	12	7
7	Mahulu	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	75	1	29	29	29
9	Samarinda	32	1	222	93	0
10	Bontang	4	0	40	6	0
	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>698</b>	<b>9</b>	<b>537</b>	<b>245</b>	<b>216</b>

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

**R. Perpustakaan**

Perkembangan Indikator Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (online dan onsite) di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuatif, dimana di tahun 2018 berjumlah 137.841 orang, meningkat di tahun 2019 menjadi 145.731 orang, namun menurun Kembali di tahun 2019 menjadi 77.884 orang.

**S. Kearsipan**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan.

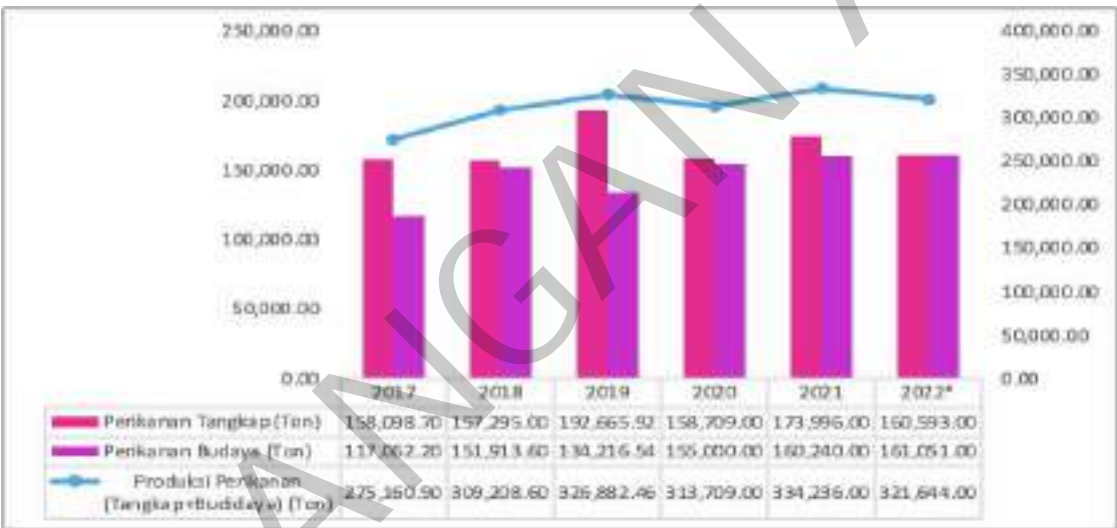
**2.3.2. Urusan Pilihan**

**A. Kelautan dan Perikanan**

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun

budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Namun pada tahun 2022 produksi perikanan di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 321.644 Ton atau menurun dari tahun sebelumnya. Dalam pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu, masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan, serta sistem pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.



Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2022 (diolah)

**Gambar II.74**  
**Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2022**

**B. Pariwisata**

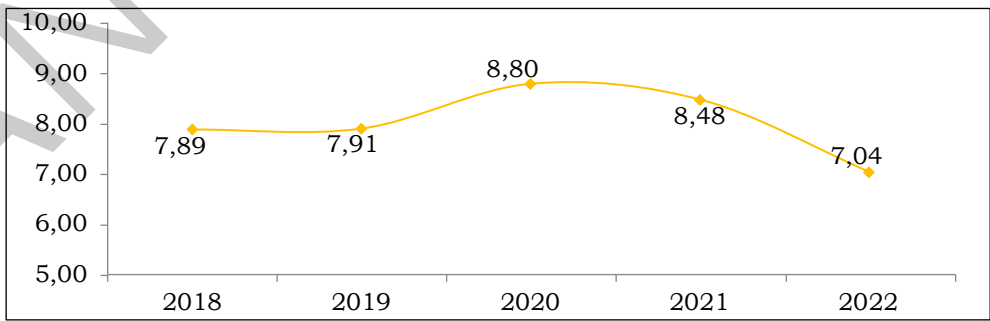
Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun mengalami trend penurunan. Penurunan terjadi akibat terjadinya wabah COVID – 19 yang masuk ke Indonesia tahun 2020 sehingga terjadinya pembatasan social berskala besar seperti adanya larangan berpergian ke dalam maupun luar negeri. Di samping itu belum optimalnya kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata terutama dalam hal promosi dan destinasi pariwisata. Pengembangan sarana dan prasarana masih sangat diperlukan dalam rangka menunjang perkembangan pariwisata di Provinsi Kalimantan



Timur. Untuk capaian jumlah kunjungan wisatawan (wisman – wisnus) pada Triwulan III tahun 2022 sebesar 2,511,419 orang tercapai 125,26 dari target 2022 sebesar 2,005,000 orang. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat hambatan dalam analisis pasar promosi pariwisata. Diharapkan dengan analisis tersebut promosi pariwisata bisa lebih terarahkan.

**C. Pertanian**

Kontribusi sektor Pertanian Arti Luas Tahun 2018-2022 secara umum mengalami trend fluktuasi, dimana tercatat pada Tahun 2022 kontribusi sektor mencapai 7,04%. Kontribusi sektor pertanian arti luas di Kaltim didominasi oleh kinerja sub sektor Tanaman Perkebunan dan sub sektor Perikanan. Kedua kontributor tersebut sangat dipengaruhi oleh harga komoditi di pasar dan biaya produksi. Subsektor Tanaman Perkebunan pada tahun 2022 terjadi penurunan pendapatan di tingkat petani dikarenakan adanya pelarangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang mengakibatkan hasil panen petani tidak terserap dan berimbas pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani turun signifikan. Untuk Sub sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh biaya produksi dan iklim. Selain itu usaha pertambangan batu bara sejak 2021 sudah kembali bangkit, yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB belum dapat menyaingi kecepatan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian. Sejalan dengan hal tersebut, sektor pertanian di Kalimantan Timur masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian.



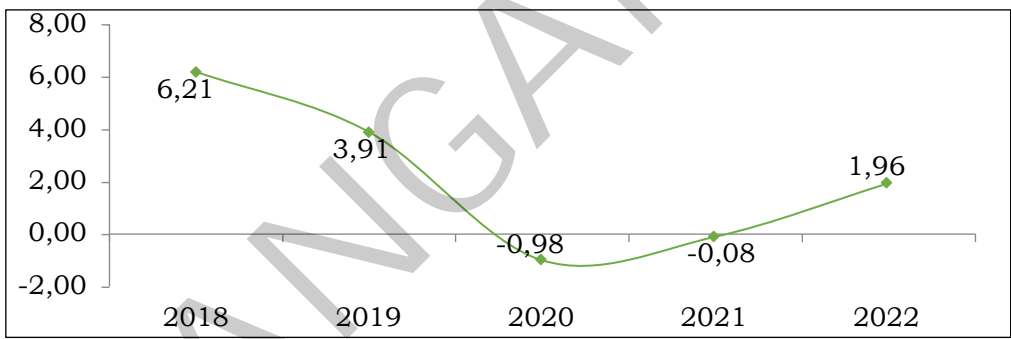
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.75**  
**Kontribusi Sektor Pertanian**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)**

Pada gambar di atas, terlihat pada tahun 2022 masih mengalami penurunan dimana target kontribusi PDRB sektor pertanian di tahun 2022

sebesar 8,99 persen. Berdasarkan hasil evaluasi, belum berhasilnya pencapaian target pada tahun 2022 ini salah satunya dikarenakan sektor pertanian masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas sektor pertanian.

Dari sisi Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian Arti Luas dari tahun ke tahun menunjukkan trend penurunan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Subsektor Pertanian Arti Luas mengalami pertumbuhan negative yaitu pada angka -0,98 dan -0,08%. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang berkontraksi cukup pada tahun 2020 yaitu sebesar -6,28 dan kontraksi yang cukup dalam juga terjadi pada sub sektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar -4,48. Namun hal menggembirakan terjadi pada tahun 2022, dimana Laju Pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian telah mampu tumbuh positif sebesar 1,96 persen, dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.76**  
**Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)**

**1) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum, terjadi penurunan produktivitas padi selama empat tahun terakhir dimana pada tahun 2018 mencapai 4,04 ton per hektar dan menurun hingga 3,69 ton/ha. Selain karena penurunan produksi, menurunnya produktivitas ini juga ternyata dikarenakan fluktuasinya luas panen secara umum. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi salah satunya adalah pemberian bantuan saprodi pertanian kepada petani dan Kegiatan Gerakan Tanam yang menjadi motivasi bagi petani untuk menanam padi. Namun program tersebut belum terlalu efektif untuk mewujudkan swasembada pangan.

## **2) Perkebunan**

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investor dari luar daerah adalah kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,59 juta Ha dengan tingkat produksi mencapai 17,36 juta ton. Kemudian komoditas yang juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian adalah tanaman karet dengan luas tanam saat ini mencapai 123.776 Ha dan produksi sebesar 71,4 ribu ton pada Tahun 2022. Luasan dan Produksi ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada Tahun 2022 sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya. Namun peningkatan produksi perkebunan di Kalimantan Timur masih dihadapkan pada tantangan berupa mahalnya harga pupuk yang berpengaruh pada produksi tanaman. Serta masih adanya tanaman tua/rusak belum dilakukan peremajaan maupun rehabilitasi.

Secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkebunan Kelapa Sawit dengan Kabupaten Kutai Timur sebagai kabupaten yang memiliki produksi terbanyak yaitu sebanyak 6,84 juta ton pada tahun 2022, Sedangkan Kabupaten Kutai Barat merupakan penghasil jenis karet terbesar di Kalimantan Timur sebanyak 32,04 Ribu Ton. Untuk tanaman lada, produksi terbesar ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah produksi sebanyak 2.961 ton, Kabupaten Paser menjadi kabupaten dengan penghasil kelapa terbesar dibanding kabupaten/kota lain dengan jumlah produksi sebesar 2.325 ton dan Kabupaten Kutai Timur

dengan produksi tanaman kakao terbesar yaitu 1.664 ton. Dengan tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi sehingga kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi namun akan dapat terintegrasi dari hulu – hilir. Dimana pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Namun jika dilihat dari pola pengelolaannya dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat masih jauh jika dibandingkan dengan produktivitas komoditi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan/swasta. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pendampingan pemerintah terhadap petani terutama pada aspek akses terhadap benih unggul, sarana dan prasarana produksi, serta akses modal dan pasar.

### **3) Peternakan**

Peningkatan kuantitas dan kualitas peternakan terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal, populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 63,97 juta ekor, ayam kampung 4,65 juta ekor dan ayam ras petelur 1.102,99 ribu ekor. Disamping itu, terdapat populasi sapi potong sebanyak 120,45 ribu ekor dan babi sebanyak 82,98 ribu ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Untuk mendukung program pemerintah berupa swasembada dan ketahanan pangan, maka jumlah ketersediaan daging sapi harus mampu mengimbangi jumlah kebutuhan daging sapi masyarakat di Kalimantan Timur dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau sehingga kebutuhan akan daging sapi terpenuhi.

Ketersediaan daging sapi sampai saat ini belum bisa mengimbangi kebutuhan akan daging sapi setiap tahunnya untuk masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan hanya mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan. Hal ini dikarenakan populasi sapi di Kalimantan Timur masih tergolong sedikit, sehingga masih harus memasok dari luar daerah seperti dari Sulawesi Selatan, NTT, NTB. Keterbatasan fasilitas yang pada umumnya menimbulkan efek langsung untuk usaha peternakan juga mempengaruhi

produksi daging sapi, serta adanya kecenderungan peternak berusaha sendiri sendiri.

Sehingga sebagai upaya mendorong pemenuhan konsumsi daging sapi maka Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan strategi pengembangan peternakan sapi pada lahan bekas tambang melalui fasilitasi miniranch dan areal kebun sawit melalui Program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA).

#### **D. Kehutanan**

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektor Kehutanan menempatkan kewenangan terbatas dalam pemanfaatan hutan. Bilamana sebelumnya UPTD KHP dan Tahura dapat melakukan pemanfaatan Kawasan hutan, namun kemudian UPTD KPH dan Tahura berperan sebagai fasilitator dalam pemanfaatan Kawasan hutan. Perubahan kebijakan pemanfaatan hutan juga mengubah penyebutan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, yang dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan multi-usaha kehutanan.

Dari pemanfaatan hutan tersebut, kontribusi subsektor kehutanan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi kenaikan. Dalam empat tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi subsektor kehutanan sebesar Rp. 1,12 Milyar, lalu terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,13 Milyar. Kontribusi terbesar subsektor kehutanan terjadi pada tahun 2022 yang mencapai Rp. 1,17 Milyar sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kontribusi terendah yakni sebesar Rp. 1,04 Milyar.



Sumber: Dinas Kehutanan, 2023

**Gambar II.77**  
**Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PNPB**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 (Rp. Miliar)**

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Perubahan tutupan lahan di Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami perubahan tutupan lahan dari satu tipe menjadi tipe lainnya, dengan laju perubahan. Persentase tutup lahan meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 sebesar 5,66%, pada tahun 2020 sebesar 13,98%, dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 14,40%, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 14,12%. Umumnya perubahan tersebut memicu berkurangnya luasan hutan alami karena perluasan hutan tanaman, perkebunan, pertanian, pertambangan, serta meningkatnya lahan-lahan tidur seperti tanah terbuka dan semak belukar.



**Gambar II.78**  
**Persentase Tutupan Lahan Di Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019 – 2022 (%)**

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur seluas 8.371.478,05 hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018, Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 275.272 Hektar (diperbaharui setiap 5 tahun). Pada tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.771,77 Hektar. Pada tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan seluas 66.302,27 hektar. Pada tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan seluas 38.737,80 hektar. Pada tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 39.900,80 hektar dan pada tahun 2022 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 1.144,00 hektar. Jumlah total lahan kritis yang direhabilitasi hingga tahun 2022 adalah 184.856,64 hektar dengan persentase 67,15%.

Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi. Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus



dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas dan fungsi untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut. Hal lain yang juga penting adalah bagaimana mendorong SDM untuk lebih cerdas dan professional dalam menangani perkara-perkara illegal logging/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Guna optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari illegal logging dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan hutan.

Melalui program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya di tahun 2022 berorientasi pada menurunnya intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, illegal logging/perambahan, dan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, drone pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami kenaikan

dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m3 menjadi 4.471.286,16 m3 di TW IV tahun 2022. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendukung yaitu 1). Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Unit Manajemen terkait aspek produksi, lingkungan dan sosial; 2.) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pemegang Izin terkait penatausahaan hasil hutan; 3). Adanya akses ke sistem pelaporan (SI-PUHH, SI-CAKEP, SI-HHBK, SI-PNBP, SIMPONI) sehingga produksi Hasil Hutan unit manajemen dapat terpantau melalui sistem. Namun demikian, adapun yang menjadi penghambat pada pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu : 1). Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu menurun karena adanya beberapa faktor: a). Curah hujan tinggi menyebabkan produksi terganggu; b). Peralatan Produksi yang sudah berumur sehingga produktifitas alat rendah; c). Harga kayu yang menurun cukup tajam (terutama pada bulan – bulan terakhir) karena lesunya permintaan pasar dunia sementara biaya operasional meningkat karena kenaikan bbm, kenaikan biaya perawatan, biaya sparespart dll

Sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara eropa pada beberapa bulan terakhir yaitu 826,05 ton.

**Tabel II.57**  
**Data Rekapitulasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)**  
**Revisi VII Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

NO	Kabupaten/Kota	Status dan Fungsi Kawasan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Paser	6,703.20	11,483.43	3,421.56	23,528.38	45,136.57
2	Kutai Barat	13,809.10	10,806.60	-	5,271.50	29,887.19
3	Kutai Kartanegara	5,264.61	30,362.96	1,497.82	19,193.10	56,318.49
4	Kutai Timur	11,395.93	15,947.34	685.74	9,017.65	37,046.67
5	Berau	20,963.55	18,183.52	181.72	2,615.23	41,944.01
6	Penajam Paser Utara	-	2,421.47	-	-	2,421.47
7	Mahakam Ulu	11,742.98	6,863.48	318.73	25,332.58	44,257.77
8	Balikpapan	-	127.55	-	-	127.55
9	Bontang	-	-	61.98	-	61.98
TOTAL		69,879.36	96,196.35	6,167.55	84,958.44	257,201.70

Sumber: Dinas Kehutanan Kaltim, 2022

Dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, menurunkan pengangguran dan memberikan akses secara legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan, maka Pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi lahan kawasan hutan dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar dari total kawasan hutan Indonesia untuk dikelola oleh masyarakat setempat, dan Kalimantan Timur mendapatkan luas kawasan yang dikelola sebesar 250 ribu hektar. Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan ini, pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS). Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan instrumen yang disiapkan untuk memberikan arahan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dibawah skema Perhutanan Sosial tersebut. Namun Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat memiliki kendala yaitu Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur dan Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman.

**Tabel II.58**  
**Data Rekapitulasi Perkembangan Perhutanan Sosial**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

N O	Kabupate n/ Kota	Jumlah					Luas (Ha)					Total Per Kab/Kota	
		H D	HK m	HT R	Ke mit raa n	H A	HD	HKm	HTR	Kemi t raan	HA	Ju m lah	Luas (Ha)
1	Berau	10	-	1	3	-	80.089	-	1.096	425	-	14	81.610
2	Kutai Timur	5	3	9	1	-	24.945	2.996	9.482	109	-	18	37.532
3	Kutai Kartanega ra	12	29	4	-	-	43.550	8.375	3.574	-	-	45	55.499
4	Kutai Barat	5	-	3	-	1	19.706	-	989	-	48,85	9	20.744
5	Paser	2	-	-	-	1	1.550	-	-	-	7.722	3	9.272
6	Mahakam Ulu	10	-	-	1	-	30.776	-	-	96	-	11	30.872
7	Balikpapa n	-	11	-	-	-		1.897				11	1.897
TOTAL		44	43	17	5	2	200.61 6	13.26 8	15.14 1	630	7.770,8 5	11 1	237.42 6

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Pada tahun 2022, perkembangan perhutanan sosial mencapai 111 unit dengan luas sebesar 237.426 hektar.

Perhutanan Sosial (*social forestry*) sebagai program pemerintah pada dasarnya sudah dimulai sekitar 4 (empat) dasawarsa lalu, namun baru menjadi program utama Kementerian LHK pada 4 (empat) tahun terakhir. Perhutanan Sosial secara resmi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016).

Mencermati kondisi lapangan yang begitu kompleks terutama dengan kehadiran berbagai sektor usaha di luar kehutanan di dalam dan sekitar kawasan hutan, maka upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menjadi sangat penting, terlebih lagi dengan kesempatan berusaha yang semakin luas melalui berbagai skema perhutanan sosial. Perkembangan positif ini bukan tanpa dampak negatif dan konsekuensi yang berat bagi Pemerintah Provinsi, terutama karena tingginya minat dan kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber peningkatan ekonomi. Proses cukup panjang dan membutuhkan pendampingan intensif oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan berakibat pada tingginya beban kerja Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan. Dirumuskan bahwa masalah utama pada Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

KUPS sangat penting diketahui karena berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar hutan. Desa yang memiliki

hutan memiliki potensi membentuk KUPS. KUPS sendiri merupakan amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Desa yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepemilikan areal hutan didorong untuk membentuk KUPS. Namun, terlebih dahulu membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

RANCANGAN AWAL

**Tabel II.59**  
**Perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)**  
**Di Kalimantan Timur Tahun 2022**

N O	Kabupaten / Kota	HUTAN DESA						HUTAN KEMASYARAKATAN					
		Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS
			Platinu m	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue	
1	Berau	80.089			6	7	13						
2	Kutai Barat	19.706			15	6	21						
3	Kutai Kartanegara	43.55			-	8	8	12.771		1	1	12	14
4	Kutai Timur	24.895			-	7	7	2.996		-	-	-	-
5	Mahakam Ulu	30.776			15	4	19						
6	Paser	1.55			-	-	-						
7	Balikpapan							1.4		1		24	25
	<b>TOTAL</b>	200.566			36	32	68	12.771		2	1	36	39

KLHK membuat tingkatan kemandirian KUPS dengan beberapa kategori. Pertama adalah kategori Biru, yaitu baru mendapatkan izin/hak pengelolaan hutan sosial, Kedua adalah kategori Perak/Silver, yang berarti sudah menyusun Rencana Kerja Usaha dan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya Ketiga adalah Kategori Emas/Gold, yaitu yang telah memiliki unit usaha dan memasarkan produk, dan terakhir, Kategori keempat adalah Platinum, yang berarti KUPS tersebut telah memiliki pasar yang luas, baik nasional maupun internasional. Di Kalimantan Timur hingga tahun 2022 baru mencapai 2 KUPS dengan Kategori Gold. Melalui Dinas Kehutanan, Kalimantan Timur berfokus untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang telah mendapatkan izin hutan sosial.

**E. Energi Dan Sumber Daya Mineral**

**1) Ketenagalistrikan**

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Tabel II.60  
Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi

DATA RASIO DESA BERLISTRIK DAN RASIO ELEKTRIFIKASI													
PER KABUPATEN/KOTA													
KALIMANTAN TIMUR													
TAHUN 2022 TW III													
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Desa Berlistrik (%)	Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)
					PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	Non PLN	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8-8	10	11	12=10+11	13=(8/9)*100	14=(12/4)*100
I	S Balikpapan	34	240.079	720.295	34	0	34	0	224.989	418	225.413	100.00%	93.89%
II	Berau	130	88.437	265.190	82	28	110	0	68.252	13.104	81.356	100.00%	92.00%
III	Kutai Kartanegara	237	243.862	753.862	221	16	237	0	198.502	13.426	211.928	100.00%	86.90%
IV	Samarinda	99	272.054	831.220	99	0	99	0	181.599	0	181.599	100.00%	100.00%
V	Kutai Timur	141	130.068	424.743	86	45	141	0	84.798	30.253	114.851	100.00%	83.58%
VI	Bontang	25	58.252	185.393	19	0	25	0	52.447	1.123	53.570	100.00%	91.90%
VII	Pemang Paser Utara	54	59.995	186.801	54	0	54	0	48.687	2.363	46.652	100.00%	82.76%
VIII	Paser	144	94.080	288.225	133	11	144	0	77.728	6.652	84.380	100.00%	89.69%
IX	Kutai Barat	154	55.788	170.871	124	70	194	0	44.152	8.388	52.539	100.00%	94.17%
X	Mahulu	50	12.185	35.274	21	29	50	0	4.596	6.461	11.057	100.00%	90.74%
TOTAL KALTIM		1.038	1.263.831	3.849.832	839	199	1.038	0	1.083.760	82.581	1.166.341	100.00%	92.29%

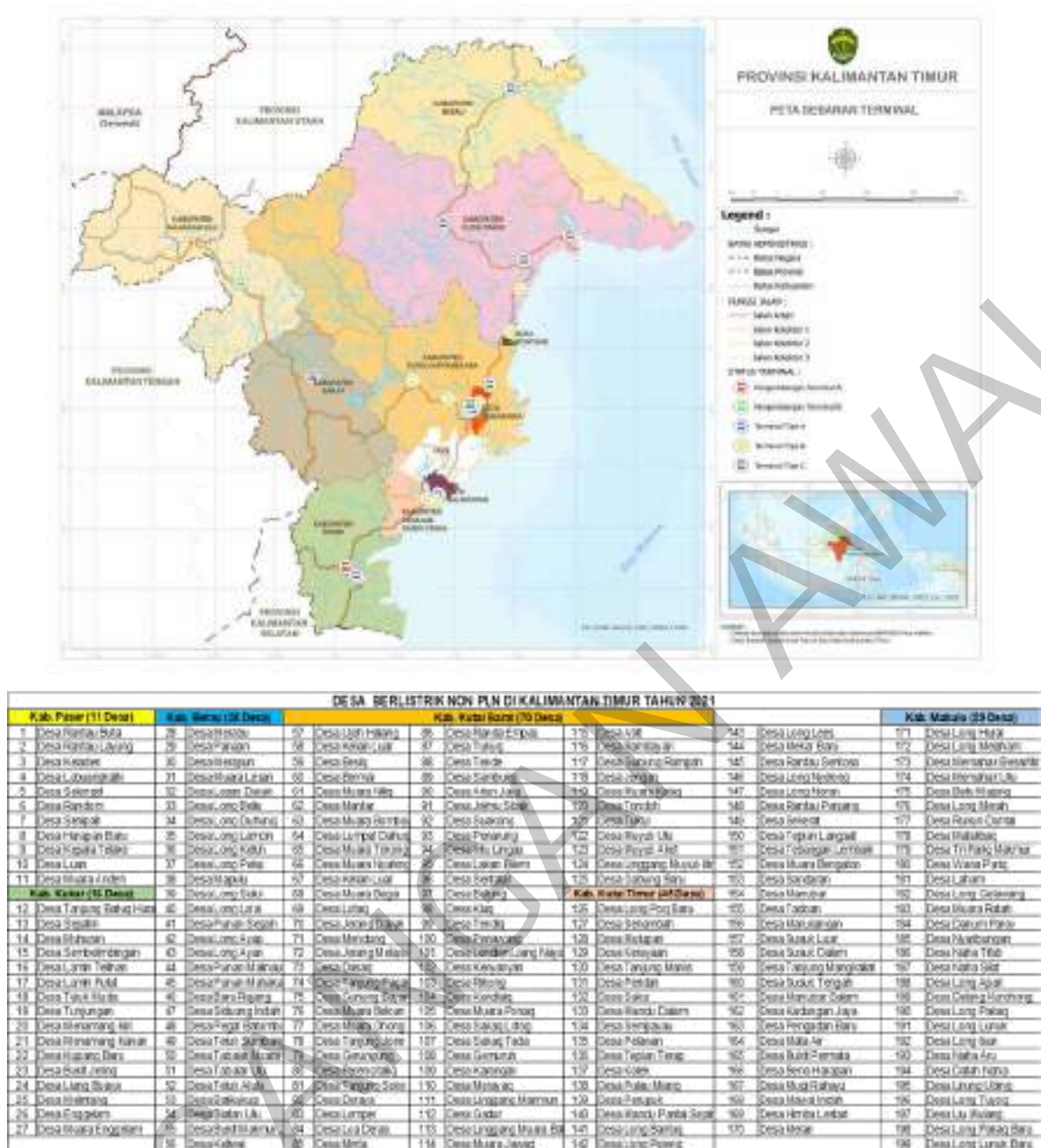
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022

Dari total 1.263.831 jumlah KK dan 3.849.832 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 85,75 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 6,53 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2022 masih terdapat 199 Desa Berlistrik Non PLN dan 82.581 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2022, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 91,98 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 92,29 persen pada tahun 2022.

Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 199 desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.





**Gambar II.79**  
**Data Desa Berlistrik Non PLN**

Sistem ketenagalistrikan Kalimantan Timur ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi yang disebut Sistem Mahakam yang terkoneksi dengan Sistem Barito Kalimantan Selatan. Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Kalimantan Timur tidak hanya ditopang oleh pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Timur namun juga Kalimantan Selatan.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.80**  
**Peta Sistem Ketenagalistrikan**

Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal, potensi energi matahari selalu ada setiap perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur ditambah dengan luasan wilayah merupakan Provinsi Peringkat 2 di NKRI sehingga dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari sangat lebih baik. Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 7 Kabupaten (Paser, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, & Mahakam Ulu dan 3 Kota (Samarinda, Balikpapan & Bontang) dengan desa/kelurahan sebanyak 1.038 desa/kelurahan. Desa Belum Berlistrik PLN tahun 2021 sebanyak 199 desa yang mana diantaranya desa-desa tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun pelaksanaan program unggulan pembangunan PLTS Terpusat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.61  
Data Listrik di Seluruh Desa Berbasis Potensi Lokal

NO.	TAHUN	AKTIFITAS	LOKASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT/OUTCOME
1	2019				
2	2020	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Bentan Wita, Kec. Batu Sapiang, Kab. Paser Desa Sandaran, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur Desa Sandaran, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	51 Pelanggan, kapasitas 25 kWp 130 Pelanggan, kapasitas 65.34 kWp 54 Pelanggan, kapasitas 27.72 kWp
3	2021	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Tadcan, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur Desa Enggalam, Kec. Muara Wita, Kab. Kutai Kartanegara Desa Kotaboh Desa Enggalam, Kec. Muara Wita, Kab. Kutai Kartanegara Desa Long Lamein, Kec. Kalay, Kab. Berau Desa Rantau Layung, Kec. Batu Sapiang, Kab. Paser Desa Tanjung Solok, Kab. Bongan, Kab. Kutai Barat		203 Pelanggan, kapasitas 58.80 kWp 201 Pelanggan, kapasitas 85.36 kWp 91 Pelanggan, kapasitas 47.03 kWp 67 Pelanggan, kapasitas 29.40 kWp 79 Pelanggan, kapasitas 33.60 kWp 49 Pelanggan, kapasitas 24.48 kWp
4	2022	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Selengon, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser Desa Fagat Betumbuk, Kec. Pulau Darawa, Kab. Berau Desa Menandang Rantau, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara Desa Menaman Giri, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara Desa Long Dulung, Kec. Kalay, Kab. Berau		293 Pelanggan, kapasitas 75.65 kWp 139 Pelanggan, kapasitas 40.45 kWp 208 Pelanggan, kapasitas 85.34 kWp 141 Pelanggan, kapasitas 27.45 kWp 69 Pelanggan, kapasitas 21.89 kWp
5	2023	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Fagat Betumbuk, Kec. Pulau Darawa, Kab. Berau Desa Long Sulul, Kec. Kalay, Kab. Berau Desa Lemper dan Desa Seraya, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat Desa Mela Uhaq, Kec. Long Habaq, Kab. Mahakam Ulu Desa Ujoh Melang, Kec. Long Isam, Kab. Kutai Barat Desa Melayu Desa Seneh Hutung, Kec. Muara Kaman, Kab. Paser Desa Lahan Kaley, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser		

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022

Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pada tahun 2020 pembangunan PLTS Terpusat berlokasi di Paser dengan jumlah 51 pelanggan dan Kutai Timur dengan jumlah 184 pelanggan dengan jumlah pembangunan 235 Pelanggan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Kutai Timur dengan jumlah 203 pelanggan, Kutai Kartanegara dengan jumlah 292 pelanggan, Berau dengan jumlah 67 pelanggan, Paser dengan jumlah 79 pelanggan, dan Kutai Barat dengan jumlah 49 pelanggan dengan jumlah pembangunan 690 pelanggan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Paser dengan jumlah 293 pelanggan, Berau dengan jumlah 208 pelanggan, dan Kutai Kartanegara dengan jumlah 349 pelanggan dengan jumlah pembangunan 850 Pelanggan pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 ini masih dalam proses pembangunan.

Infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebanyak 1.038 Desa dan telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 839 Desa dan yang bersumber dari non-PLN sebanyak 199 Desa, sehingga rasio desa berlistrik pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 menjadi 91,98 persen pada tahun 2021.

## **2) Energi Baru Terbarukan (EBT)**

Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi baru dan terbarukan masih mengalami kendala, lokasi sebagian besar berada dikawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, bioenergy, panas bumi, gelombang laut dan lahan bekas tambang.

Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (Solar Cell) merupakan pembangkit listrik yang mampu mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan mengingat sifatnya yang berkelanjutan (sustainable) serta jumlahnya yang sangat besar. Untuk wilayah khatulistiwa seperti Kalimantan Timur, potensi radiasi sinar matahari mencapai 1000 Wattpeak (Wp) per meter persegi. Dengan efisiensi panel surya 20%, maka dapat diperoleh daya listrik sebesar 200 Wp per meter persegi. Bila diasumsikan daya yang dapat diperoleh dari sistem tenaga surya sebesar 1 MWp per Hektar, maka apabila luasan void tambang yang dibangun dengan sistem tenaga surya terapung seluas 1000 Ha akan diperoleh daya listrik sebesar 1 GWp.

**Tabel II.62**  
**Rincian data Kualitatif/Absolut Terkait Presentasi Pemanfaatan**  
**EBT (Realisasi Capaian 7,27)**

Rincian Data Kualitatif/Absolut terkait Presentasi Pemanfaatan EBT (Realisasi 7,27)					
				Satuan Energi	
JENIS ENERGI	UNIT	2022	Konversi ke BOE	BOE	TOE
Minyak Bumi					
Total konsumsi					
1. BBM					
Avgas	KL		5,53	0	0
Avtur	KL	105932	5,8907	624013,6324	87361,90854
MFO	KL	89128	6,9612	620437,8336	86861,2967
180/380					
RON 95/98	KL	1754	5,8275	10221,435	1431,0009
RON 88	KL	0	5,8275	0	0
RON 89/90	KL	480251	5,8275	2798662,703	391812,7784
RON 92	KL	52472	5,8275	305780,58	42809,2812
IDO	KL	0	6,6078	0	0
CN 48	KL	23714,776	6,4871	153840,1234	21537,61727
(murni)					
CN 51	KL	63526	6,4871	412099,5146	57693,93204
(murni)					
CN 53	KL	16514	6,4871	107127,9694	14997,91572
(murni)					
Kerosene	KL	237	5,9274	1404,7938	196,671132
Biogasoil	KL	2104371	6,4871	9555885,58	1337823,981
(B20/B30)					
2. LPG	MT	112650	8,5246	960296,19	134441,4666
Total				15549770,35	2176967,85
Batubara					
total Konsumsi					
1. Bahan Bakar	Ton	660238,804	4,2	2773002,977	388220,4168
Pembangkit					
2. Bahan Bakar	Ton		4,2	0	0
Industri					
Total		660238,804		2773002,977	388220,4168
Gas Bumi					
Total					
Konsumsi					
1. bahan Bakar	mmscf	3710,36888	0,1796	666,3822508	93,29351512
Pembangkit					
2. Bahan bakar	mmscf	264,996	0,1796	47,5932816	6,663059424
industri					
3. Jargas	sambungan	62735	0,1796	11267,206	1577,40884
Rumah Tangga	RT/mmscf				
4. Sektor	mmscf		0,1796	0	0
Komersial					
Total				11981,18153	1677,365415

Energi baru terbarukan (EBT)						
Non Listrik						
Total konsumsi						
1. FAME	KL	2104371	6,4871		1010193,618	141427,1066
2. Etanol	KL		2,2979		0	0
3. Biomassa	Ton		3,2979		0	0
4. Kapasitas Biogas RT	m3/tahun	183898,4	0,00634		1165,915856	163,2282198
Total					1011359,534	141590,3348
Listrik			Cf	Eff		
Kapasitas Terpasang On Grid Off Grid			E	F		
1. PLTA	MW		0,6	0,33	0,00	0
2. PLTB	MW		0,5	0,25	0,00	0
3. PLT BIOGAS	MW	9	0,8	0,25	154652,54	21651,35616
4. PLT Biomassa	MW	11	0,8	0,25	189019,78	26462,76864
5. PLTM	MW		0,6	0,25	0,00	0
6. PLTMH	MW	0,529	0,6	0,25	6817,60	954,4639507
7. PLTP	MW		0,9	0,33	0,00	0
8. PLTS/PLTS ATAP	MW	9,16	0,2	0,13	75674,00	10594,36017
9. PLTS Hybrid	MW	0,15	0,17	0,13	1053,32	147,4651662
10. PLT Sampah	MW		0,8	0,25	0,00	0
11. PJUTS	MW				0,00	0
12. LTHSE	MW				0,00	0
Total					427217,24	59810,41409
Total EBT					1438576,78	201400,7489

Perhitungan Bauran Energi 2022		
Energi Primer	MTOE	%
Minyak Bumi	2176967,85	78,64011443
Batubara	388220,4168	14,02395447
Gas Bumi	1677,365415	0,06059263
EBT	201400,7489	7,275338468
Total	2768266,381	100

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022

Bio-energi yang berasal dari biomassa, baik dalam bentuk cair, gas atau padat yang didukung oleh:

- a. limbah ternak seperti kotoran sapi perah, potong, kambing dan unggas.
- b. limbah industri seperti tahu, kelapa sawit (POME), dan tapioka.
- c. limbah rumah tangga dan perkotaan seperti kotoran manusia, sampah industri dan rumah tangga, biomass seperti hutan tanaman energi,



hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, limbah kayu, sekam padi, tongkol jagung, cangkang sawit, tangkos sawit.

**Tabel II.63**  
**Potensi Bioenergi dari Pome**

Potensi Bioenergi dari Pome : Kalimantan Timur						
No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pabrik Minyak Sawit	TBS Diolah / Tahun (ton)	Pome Yang Dihasilkan (m3)	Listrik Yang Dihasilkan (MWh)	Kabupaten Pembangkitan (MW)
1	Kutai Timur	34	8.325.264	4.995.158	264.978	32,6
2	Kutai Kartanegara	18	4.260.823	2.556.494	135.614	16,7
3	Berau	11	3.064.374	1.838.624	97.534	12
4	Kutai Barat	6	1.736.580	1.058.148	56.132	6,9
5	Penajam Paser Utara	7	1.405.494	843.296	44.734	5,5
6	Paser	17	3.080.340	1.848.204	98.942	12,1
7	Mahakam Ulu	1	162.550	91.530	4.856	0,60
Jumlah		94	22.025.425	13.231.454	702.789	86,4

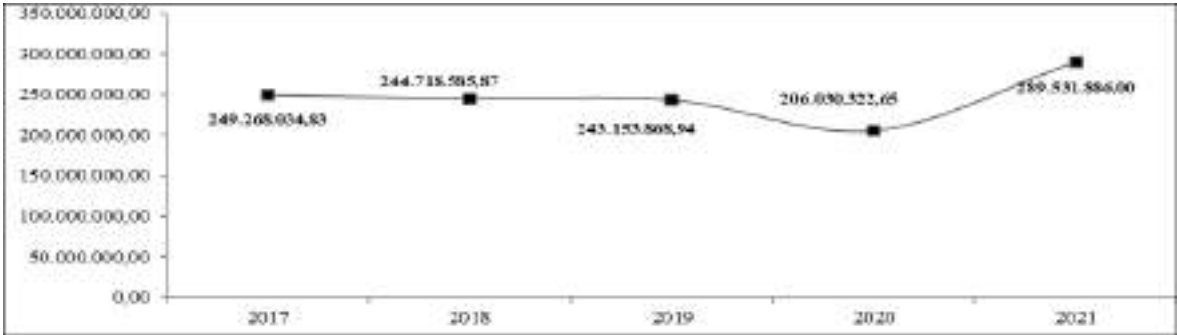
Sumber : Disbun Kaltim, 2021 (Data Diolah)

**Tabel II.64**  
**Potensi Bioenergi dari Biomass Hutan Energi**

Unit Usaha	Lokasi (Kab)	Luas (ha)	Kelas Perusahaan	Luas Alokasi HTE	Rencana Penanaman 2015-2024	Jenis Tanaman Energi
Unit Usaha yang telah mengembangkan THE di Kaltim						
PT. Dharma Hutani Makmur	Kutai Kartanegara	41.545	Pertukangan dan energi	7.500	7.500	Akasia, Gamal, Giant Bamboo
Unit Usaha yang Berkomitmen untuk Mengembangkan Bioenergi di Kaltim						
PT. Inhutani I	Paser	16.816		0	0	
PT. Hutan Mahligai	Kutai Barat	11.275		100	0	
PT. Belantara Pusaka	Berau	14.010		500	500	
PT. Oceanic Timber Product	Berau	16.600		3000	0	

3) **Pertambangan**

Produksi batubara tahun 2021 adalah sebesar 289,53 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.





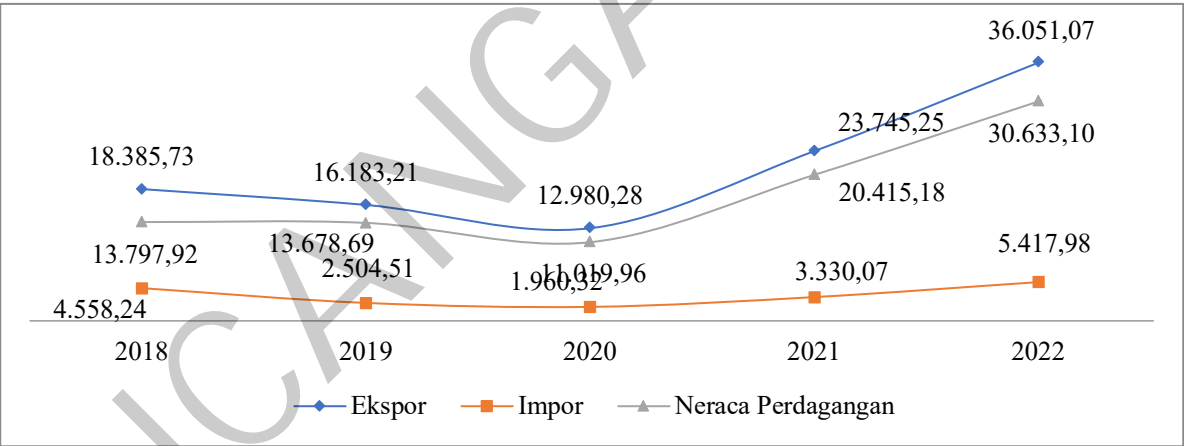
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.81**  
**Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2021 (Ton)**

Pada tahun 2021 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan produksi migas tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja aktivitas hulu migas.

**F. Perdagangan**

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

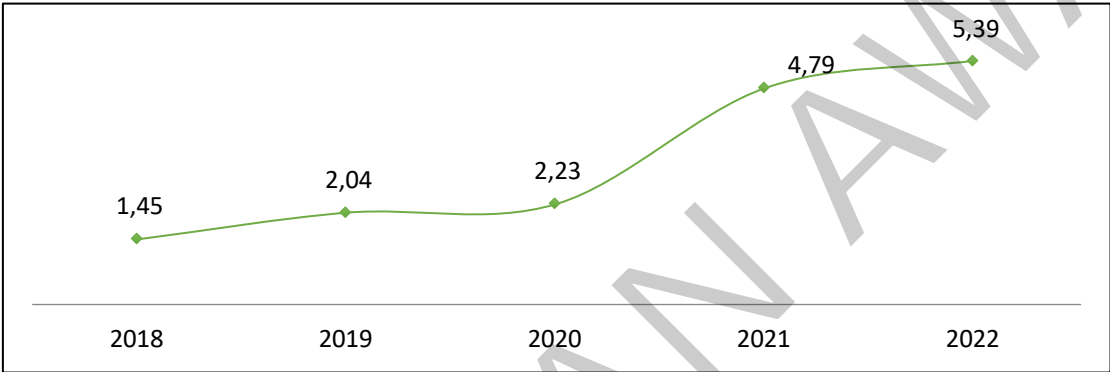
**Gambar II.82**  
**Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2018-2022, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 32,84 persen dibanding tahun 2021 yaitu dari US\$ 24,16 miliar menjadi US\$ 36,05 miliar. Peningkatan ekspor tahun 2022

disebabkan oleh naiknya nilai ekspor barang migas maupun non migas. Ekspor barang migas tahun 2022 mencapai US\$ 2,99 miliar naik sebesar 129,01 persen dibanding tahun 2021. Sementara ekspor barang non migas mencapai US\$ 33,05 miliar naik sebesar 24,39 persen dibanding tahun 2021.

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 5,39 miliar US\$ pada tahun 2022 mengalami peningkatan 12,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 miliar US\$.



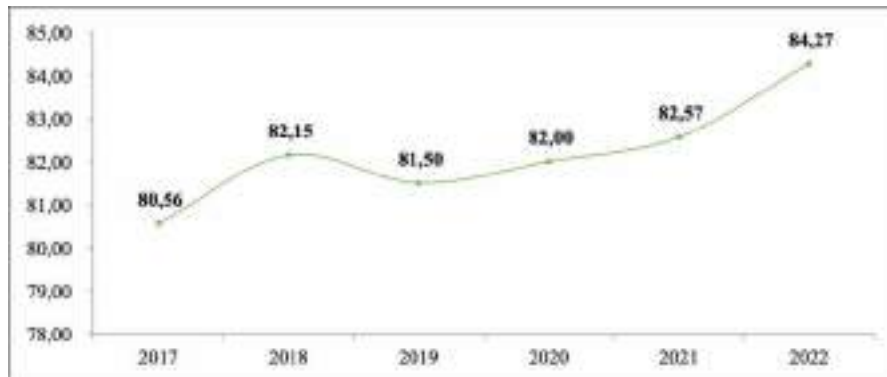
Sumber: BPS Prov KALTIM, 2022

**Gambar II.83**  
**Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Miliar US\$)**

**2.3.3. Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah**

**1) Indeks Kepuasan Masyarakat**

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2022 meningkat di angka sementara 84,27 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 82,57. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM

**Gambar II.84**  
**Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2022**

## 2) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 memperoleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 78,10 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat baik. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,6% berada di angka 78,10 dengan predikat BB.

Peningkatan ini belum sepenuhnya berkualitas baik, beberapa aspek yang menjadi catatan dalam implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang belum berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Antara lain adalah perumusan sasaran strategis pada beberapa Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja (outcome) yang diharapkan akan dicapai dan indikator kinerja yang dimiliki belum memenuhi kriteria yang sesuai untuk mencapai target yang seharusnya. Kemudian permasalahan belum selaras antara perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pada kinerja sehingga evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja tidak sebanding dengan yang diharapkan.

## 3) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mendapat predikat BB dengan skor 77,82. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

#### **2.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **A. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

##### **B. Keuangan**

Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2021 adalah 53,93 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2021. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan asset-asset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, pada tahun 2012 hanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 Kabupaten/Kota masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabupaten Mahakam Ulu masih belum mendapatkan status opini

dari BPK dan pada tahun 2020 seluruh Kabupaten Kota telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

### **2.3.5. Pengawasan**

#### **1. Tingkat Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)**

Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berada pada Level 3 atau Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP

kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai pilot project Maturitas SPIP Terintegrasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan Quality Assurance (QA) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada perangkat daerah yang pemangku penanggung jawab atas pencapaian RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana dari hasil Quality Assurance tersebut hasil sama dengan seperti pada tahun 2021 yang pada level 3 atau pada tingkat maturitas Terdefinisi. Penilaian Maturitas pada Tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan atas peraturan Perka BPKP menggunakan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Penilaian Maturitas New SPIP Terintegrasi yang bertujuan agar penilaian Maturitas SPIP lebih berkaitan dengan Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan SPIP.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap:
  - (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.
2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
5. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan Evaluasi atas pelaksanaan Benturan Kepentingan.



6. Pemprov Kaltim belum mempunyai Sistem Pengendalian Froud (*Fraud Control System*) dan Impelementasinya.

Rekapitulasi seluruh capaian indikator kinerja pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum disajikan pada tabel di bawah.

RANCANGAN AWAL

**Tabel II.65**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>1</b>						
1.1	<b>Angka Partisipasi Sekolah (Usia Sekolah)</b>					
	07-12 Tahun	99,76	99,68	99,73	99,6	99,57
	13-15 Tahun	98,89	98,21	99,07	98,9	98,75
	16-18 Tahun	81,55	82,07	81,88	82,1	81,43
1.2	<b>Angka Partisipasi Kasar</b>					
	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
	SD	108,02	106,84	105,75	105,26	105,21
	SLTP	92,57	91,03	92,17	92,03	91,47
	SLTA	96,08	94,96	95,23	95,52	95,09
1.3	<b>Angka Partisipasi Murni</b>					
	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
	SD	98,4	98,41	98,44	98,36	98,45
	SLTP	79,68	80,42	81,28	81,3	82,65
	SLTA	68,43	68,55	69	69,29	69,1
1.4	<b>Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan</b>					
1.4.1.	<b>Jumlah Sekolah</b>					
	Sekolah Dasar (SD)					
	Negeri					1.652

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Swasta					268
	MI					133
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	Negeri					453
	Swasta					233
	MTs					170
	Sekolah Menengah Atas (SMA)					
	Negeri					143
	Swasta					90
	MA					80
	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
	Negeri					87
	Swasta					131
1.4.2.	<b>Jumlah Murid</b>					
	Sekolah Dasar (SD)					
	Negeri					347.886
	Swasta					63.435
	MI					30.179
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	Negeri					127.778
	Swasta					32.664
	MTs					31.829
	Sekolah Menengah Atas (SMA)					
	Negeri					65.859

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Swasta					12.905
	MA					10.890
	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
	Negeri					65.859
	Swasta					12.905
1.4.3.	<b>Jumlah Guru</b>					
	Sekolah Dasar (SD)					
	Negeri					22.323
	Swasta					3.546
	MI					2.194
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	Negeri					8.593
	Swasta					2.247
	MTs					3.027
	Sekolah Menengah Atas (SMA)					
	Negeri					3.941
	Swasta					963
	MA					1.565
	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
	Negeri					3.941
	Swasta					963
1.4.4.	<b>Rasio Murid Guru</b>					
	Sekolah Dasar (SD)					
	Negeri					15,58

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Swasta					17,89
	MI					13,76
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	Negeri					14,87
	Swasta					14,54
	MTs					10,52
	Sekolah Menengah Atas (SMA)					
	Negeri					16,71
	Swasta					13,4
	MA					6,96
	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
	Negeri					16,71
	Swasta					13,4
1.4.5.	<b>Rasio Murid Sekolah</b>					
	Sekolah Dasar (SD)					
	Negeri					210,84
	Swasta					252,73
	MI					226,91
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	Negeri					285,86
	Swasta					147,8
	MTs					187,23
	Sekolah Menengah Atas (SMA)					
	Negeri					463,8

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Swasta					150,06
	MA					136,13
	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
	Negeri					463,8
	Swasta					150,06
1.5.	<b>Angka Putus Sekolah (Persen)</b>					
	07-12 Tahun	0,00	0,16	0,14	0,04	
	13-15 Tahun	0,86	0,98	0,88	0,52	
	16-18 Tahun	18,14	18,12	17,98	17,92	
1.6.	<b>Indikator Perguruan Tinggi</b>					
1.6.1.	<b>Jumlah Perguruan Tinggi</b>					
	Negeri				5	5
	Swasta				48	49
	Jumlah				53	54
1.6.2.	<b>Jumlah Tenaga Pendidik</b>					
	Negeri				1.955	2.123
	Swasta				2.291	2.301
	Jumlah				4.246	4.424
1.6.3.	<b>Jumlah Mahasiswa</b>					
	Negeri				45.681	44.714
	Swasta				50.932	51.377
	Jumlah				96.613	96.091
<b>2</b>						

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.	<b>Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota</b>					
	Paser	27,50	32,20	15,50	23,60	24,9
	KUBAR	30,00	35,70	16,60	15,80	23,1
	KUKAR	35,70	36,50	14,30	26,40	27,1
	KUTIM	30,50	39,40	16,10	27,50	24,7
	Berau	31,70	24,70	17,60	25,70	21,6
	PPU	31,60	27,00	11,40	27,30	21,8
	MAHULU	32,80	36,60	9,60	20,30	14,8
	Balikpapan	23,80	14,00	13,30	17,60	19,6
	Samarinda	26,30	24,70	11,90	21,60	25,3
	Bontang	26,60	29,00	20,90	26,30	21,0
	Provinsi Kalimantan Timur	29,40	28,10	14,70	22,80	23,9
2.2.	<b>Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan</b>					
	Rumah Sakit Umum	54	53	57	59	
	Rumah Sakit Swasta	19	19	22	22	
	RS Bersalin	15	9	7	10	
	Puskesmas	186	187	187	188	
	Puskesmas Pembantu	716	716	730	742	
	Pedagang Besar Farmasi	48	49	52	53	
	Apotek	637	704	759	745	
2.3.	<b>Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota</b>					
2.3.1.	<b>Rumah Sakit Umum</b>					
	Paser				2	2
	Kutai Barat				2	3



No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kutai Kartanegara				3	3
	Kutai Timur				7	6
	Berau				2	2
	Panajam Paser Utara				2	2
	Mahakam Ulu				2	2
	Balikpapan				11	11
	Samarinda				11	11
	Bontang				5	5
	<b>Jumlah</b>				<b>47</b>	<b>47</b>
2.3.2.	<b>Rumah Sakit Swasta</b>					
	Paser				0	
	Kutai Barat				1	
	Kutai Kartanegara				0	
	Kutai Timur				5	
	Berau				0	
	Panajam Paser Utara				0	
	Mahakam Ulu				0	
	Balikpapan				4	
	Samarinda				3	
	Bontang				4	
	<b>Jumlah</b>				<b>17</b>	
2.3.3.	<b>Puskesmas</b>					
	Paser				19	
	Kutai Barat				19	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kutai Kartanegara				32	
	Kutai Timur				21	
	Berau				21	
	Panajam Paser Utara				11	
	Mahakam Ulu				6	
	Balikpapan				27	
	Samarinda				26	
	Bontang				6	
	<b>Jumlah</b>				<b>188</b>	
2.3.4.	<b>Puskesmas Pembantu</b>					
	Paser				123	
	Kutai Barat				84	
	Kutai Kartanegara				175	
	Kutai Timur				116	
	Berau				112	
	Panajam Paser Utara				43	
	Mahakam Ulu				30	
	Balikpapan				14	
	Samarinda				0	
	Bontang				2	
	<b>Jumlah</b>				<b>699</b>	
2.3.5.	<b>Pedagang Besar Farmasi</b>					
	Paser				0	
	Kutai Barat				0	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kutai Kartanegara				0	
	Kutai Timur				1	
	Berau				0	
	Panajam Paser Utara				0	
	Mahakam Ulu				0	
	Balikpapan				19	
	Samarinda				32	
	Bontang				0	
	<b>Jumlah</b>				<b>52</b>	
2.3.6.	<b>Apotek</b>					
	Paser				38	
	Kutai Barat				36	
	Kutai Kartanegara				122	
	Kutai Timur				51	
	Berau				71	
	Panajam Paser Utara				34	
	Mahakam Ulu				6	
	Balikpapan				165	
	Samarinda				285	
	Bontang				18	
	<b>Jumlah</b>				<b>826</b>	
2.4.	<b>Fasilitas Kesehatan</b>					
	Dokter Umum	1.010	1.024	1.106	2.097	
	Dokter Gigi	309	314	320	411	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Dokter Spesialis	503	597	649	768	
	Perawat	7.823	6.524	7.510	10.789	
2.5.	<b>Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota</b>					
2.5.1.	<b>Dokter Umum</b>					
	Paser				61	
	Kutai Barat				62	
	Kutai Kartanegara				111	
	Kutai Timur				113	
	Berau				108	
	Panajam Paser Utara				39	
	Mahakam Ulu				24	
	Balikpapan				368	
	Samarinda				305	
	Bontang				163	
	<b>Jumlah</b>				<b>1.354</b>	
2.5.2.	<b>Dokter Gigi</b>					
	Paser				23	
	Kutai Barat				16	
	Kutai Kartanegara				33	
	Kutai Timur				34	
	Berau				23	
	Panajam Paser Utara				13	
	Mahakam Ulu				2	
	Balikpapan				89	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Samarinda				112	
	Bontang				35	
	<b>Jumlah</b>				<b>380</b>	
2.5.3.	<b>Dokter Spesialis</b>					
	Paser				32	
	Kutai Barat				18	
	Kutai Kartanegara				68	
	Kutai Timur				50	
	Berau				25	
	Panajam Paser Utara				23	
	Mahakam Ulu				1	
	Balikpapan				393	
	Samarinda				302	
	Bontang				104	
	<b>Jumlah</b>				<b>1.016</b>	
2.5.4.	<b>Perawat</b>					
	Paser				543	
	Kutai Barat				611	
	Kutai Kartanegara				1.096	
	Kutai Timur				858	
	Berau				665	
	Panajam Paser Utara				287	
	Mahakam Ulu				211	
	Balikpapan				1.974	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Samarinda				2.438	
	Bontang				763	
	<b>Jumlah</b>				<b>9.226</b>	
2.6.	<b>Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas</b>					
2.6.1.	<b>Puskesmas</b>					
	Paser				19	
	Kutai Barat				19	
	Kutai Kartanegara				32	
	Kutai Timur				21	
	Berau				21	
	Penajam Paser Utara				11	
	Mahakam Hulu				6	
	Kota Balikpapan				27	
	Kota Samarinda				26	
	Kota Bontang				6	
	Jumlah				<b>188</b>	
2.6.2.	<b>Lengkap</b>					
	Paser				17	
	Kutai Barat				4	
	Kutai Kartanegara				22	
	Kutai Timur				7	
	Berau				15	
	Penajam Paser Utara				5	
	Mahakam Hulu				1	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kota Balikpapan				26	
	Kota Samarinda				22	
	Kota Bontang				6	
	Jumlah				<b>125</b>	
2.6.3.	<b>Belum Lengkap</b>					
	Paser				2	
	Kutai Barat				15	
	Kutai Kartanegara				10	
	Kutai Timur				14	
	Berau				6	
	Penajam Paser Utara				6	
	Mahakam Hulu				5	
	Kota Balikpapan				1	
	Kota Samarinda				4	
	Kota Bontang				0	
	Jumlah				<b>63</b>	
2.6.4.	<b>% Pemenuhan</b>					
	Paser				89.47	
	Kutai Barat				21.05	
	Kutai Kartanegara				68.75	
	Kutai Timur				33.33	
	Berau				71.43	
	Penajam Paser Utara				45.45	
	Mahakam Hulu				16.67	



No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kota Balikpapan				96.30	
	Kota Samarinda				84.62	
	Kota Bontang				100.00	
	Jumlah					
<b>3</b>						
3.1.	Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak					
	Target	50	73,33	75	66,53	68,53
	Realisasi	71,83	67,23	64,53	70,78	77,56
3.2.	<b>Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota</b>					
	Balikpapan					99.25
	Penajam Paser Utara					30.08
	Paser					70.14
	Bontang					83.55
	Kutai Timur					51.73
	Berau					82.16
	Samarinda					87.27
	Kutai Kartanegara					70.85
	Kutai Barat					86.02
	Mahakam Ulu					64.13
	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>					<b>77.56</b>
3.3.	<b>Potensi Penyelenggaraan SPAM Regional</b>					
	<b>Area cakupan</b>					
	KUKAR- Bontang				2 Kab/Kota (5 Kec – 22 kelurahan)	
	KUTIM-Bontang				2 Kab/Kota (4 kec – 21 kelurahan)	
	KUTIM-Bontang				2 Kab/Kota (4 kec – 21 kelurahan)	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	PPU – Balikpapan				IKN, 2 Kab/Kota (8 Kec)	
	KUKAR – Balikpapan				IKN, 2 Kab/Kota (8 Kec)	
	Paser – PPU				2 Kab/Kota (2 Kec)	
	<b>Nama Sumber Air Baku</b>					
	KUKAR- Bontang				Bendungan Marangkayu	
	KUTIM-Bontang				Waduk Ex Tambang Indominco & S. Mayang	
	KUTIM-Bontang				Bendali Sukarahmat	
	PPU – Balikpapan				Waduk Sepaku Semoi, Waduk Sepaku	
	KUKAR – Balikpapan				Waduk Batu Lepek	
	Paser – PPU				Bendung Telake	
	<b>Sumber Air Baku Kapasitas</b>					
	KUKAR- Bontang				450 l/det	
	KUTIM-Bontang				Up to 250 l/det	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	KUTIM-Bontang				Up to 240 1/det	
	PPU – Balikpapan				Up to 1.270 1/det	
	KUKAR – Balikpapan				5.000 1/det	
	Paser – PPU				210 1/det	
<b>3.4.</b>	<b>Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan</b>					
	Target	62,23	65,23	64,64	66,64	
	Realisasi	68,46	62,64	64,64	68,98	
<b>3.5.</b>	<b>Capaian Sektor Air Limbah s.d September 2022</b>					
<b>3.5.1.</b>	<b>Air Limbah Layak</b>					
	Balikpapan					91.40%
	Penajam Paser Utara					87.00%
	Paser					70.14%
	Bontang					94.93%
	Kutai Timur					89.10%
	Berau					88.45%
	Samarinda					78.02%
	Kutai Kartanegara					75.02%
	Kutai Barat					59.82%
	Mahakam Ulu					52.50%
	<b>Kaltim 2022 (s.d September)</b>					<b>81.47%</b>
<b>3.5.2.</b>	<b>Air Limbah Aman</b>					
	Balikpapan					9.18%
	Penajam Paser Utara					3.70%
	Paser					0.71%
	Bontang					7.63%

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kutai Timur					2.70%
	Berau					3.35%
	Samarinda					7.95%
	Kutai Kartanegara					0.32%
	Kutai Barat					1.59%
	Mahakam Ulu					2.91%
	<b>Kaltim 2022 (s.d September)</b>					<b>4.71%</b>
<b>3.6.</b>	<b>Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (km)</b>					
3.6.1.	<b>Nasional</b>					
	Panjang (Km)					1.710,96
	Aspal					1.428,99
	Kerikil					16,25
	Tanah					0
	Lainnya					265,72
3.6.2.	<b>Provinsi</b>					
	Panjang (Km)					895,09
	Aspal					465,29
	Kerikil					127,59

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Tanah					27,17
	Lainnya					275,04
<b>3.7.</b>	<b>Rasio Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi</b>					
3.7.1.	<b>Nasional</b>					
	Baik					305,83
	Sedang					1.104,11
	Rusak Sedang					223,89
	Rusak Berat					77,12
3.7.2.	<b>Provinsi</b>					
	Baik					284,86
	Sedang					409,00
	Rusak Sedang					104,81
	Rusak Berat					96,42
3.7.3.	<b>Kabupaten/Kota</b>					
	Baik					6.859,70
	Sedang					2.265,13
	Rusak Sedang					2.035,89
	Rusak Berat					2.355,49

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Total</b>					
	Baik					7.450,39
	Sedang					3.778,24
	Rusak Sedang					2.364,59
	Rusak Berat					2.529,03
<b>3.8.</b>	Persentase Kemantapan Jalan	52,85	61,45	69,77	75,20	77,52
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>					
4.1.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni		65,55	70,80	70,70	
4.2.	<b>Target dan Realisasi Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni</b>					
	Target		46.722	41.722	71.781	70.781
	Realisasi		46.768	72.881	71.781	71.741
4.3.	<b>Target dan Realisasi Luas Kawasan Kumuh</b>					
	Target	673.42	620.06	1287.82	1237.82	1187.82
	Realisasi		645.47	1287.82	1,190.14	1190.14
4.4.	<b>Luas Kawasan Kumuh Menurut Kabupaten/Kota</b>					
4.4.1.	<b>Luas Total (Ha)</b>					
	Paser					224,52
	KUBAR					1,032.38

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	KUKAR					98,49
	KUTIM					106,47
	Berau					51,52
	PPU					49,07
	MAHULU					39,6
	Balikpapan					153,3
	Samarinda					52,76
	Bontang					73,56
	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>					<b>1,881.67</b>
4.4.2.	<b>Kew. Provinsi (Ha)</b>					
	Paser					35,06
	KUBAR					345,05
	KUKAR					50,07
	KUTIM					0
	Berau					25,79
	PPU					0
	MAHULU					0
	Balikpapan					32,78



No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Samarinda					23,54
	Bontang					33,35
	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>					<b>545,64</b>
4.4.3.	<b>SK Bupati/Walikota</b>					
	Paser					No. 653/KEP-332/2020
	KUBAR					No. 592/K.425/2021
	KUKAR					No. 454/SK-BUP/HK/2019
	KUTIM					No. 050/KK.268/2016
	Berau					No. 30 Tahun 2020
	PPU					No. 593.33/270/2017
	MAHULU					No. 050.136.146/K.63/2020
	Balikpapan					No. 188.45-326/2020
	Samarinda					No. 663/404/HK-KS/XI/2020

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Bontang					No. 188.45/509/ DPKP2/2020
	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>					
4.5.	<b>Risiko Bencana dan Permukiman Pada Area Beresiko</b>					
4.5.1.	<b>Total Area (Ha)</b>					
4.5.1.1.	<b>Risiko tanah longsor</b>				<b>3,179,299.92</b>	
	Tinggi				2,431,916.85	
	Sedang				739,261.71	
	Rendah				8,121.36	
4.5.1.2.	<b>Risiko kebakaran hutan</b>				<b>11,337,251.96</b>	
	Tinggi				4,436,219.74	
	Sedang				2,438,406.17	
	Rendah				4,462,626.05	
4.5.1.3.	<b>Risiko banjir</b>				<b>5,278,811.89</b>	
	Tinggi				39,703.97	
	Sedang				1,556,180.47	
	Rendah				3,682,927.45	
4.5.1.4.	<b>Risiko cuaca ekstrim</b>				<b>5,846,803.21</b>	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Tinggi				401,091.26	
	Sedang				4,522,662.64	
	Rendah				923,049.31	
4.6..	<b>Permukiman pada area Berisiko (Ha)</b>					
4.6.1.	<b>Risiko tanah longsor</b>				<b>76.59</b>	
	Tinggi				48.63	
	Sedang				9.30	
	Rendah				18.67	
4.6.2.	<b>Risiko kebakaran hutan</b>				<b>13,396.50</b>	
	Tinggi				6,569.90	
	Sedang				6,557.48	
	Rendah				269.12	
4.6.3.	<b>Risiko banjir</b>				<b>90,741.89</b>	
	Tinggi				2,510.46	
	Sedang				61,564.28	
	Rendah				26,667.15	
4.6.4.	<b>Risiko cuaca ekstrim</b>				<b>106,827.75</b>	
	Tinggi				68,667.65	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Sedang				35,455.64	
	Rendah				2,704.47	
<b>5</b>						
<b>5.1.</b>	<b>Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan</b>					
	Kasus Narkoba	1582	1700	1419		
	Kasus Pembunuhan	19	12	12		
	Kasus Kejahatan Seksual	77	80	129		
	Kasus Penganiayaan	444	296	214		
	Kasus Pencurian	981	680	624		
	Kasus Penipuan	331	130	105		
	Kasus Pemalsuan Uang	7	1	1		
	Jumlah	3441	2899	2504		
<b>5.2.</b>	<b>Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat</b>					
	Aparat dan Sarana Keamanan (orang)	23.026	23.028	23.811		
	Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja (orang)	439	441	1.224		
	a. Provinsi	143	145	172		
	b. Kabupaten/ Kota	1.502	1.502	1.052		
	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (orang)	22.587	22.587	22.587		
	a. Provinsi	30	30	30		
	b. Kabupaten/ Kota	22.557	22.557	22.557		
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam (kali)	2.793	2.793	2.793		
	Jumlah Pos Siskamling (Unit)	1.927	1.927	1.927		

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	- Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa	2	2	2		
	Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (kasus)	138	138	138		
	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (kasus)	365	365	365		
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (persen)	264	264	264		
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	4	4	3		
<b>5.3.</b>	<b>Angka Kriminalitas</b>					
	Dilaporkan	6.715	5.253	4.368	4.184	
	Tertunggak	1.228	670	506	506	
	Diselesaikan	5.487	4.583	1.696	1.696	
	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	81,71	87,25	87	85	
	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk	18,9	14,47	6,01	6,01	
<b>5.4.</b>	<b>Jumlah Demonstrasi Menurut Jenis</b>					
	Politik	2	-	6	5	
	Ekonomi	9	9	1	9	
	Sosial	22	15	14	15	
	Jumlah	33	24	21	29	
<b>6</b>	<b>Sosial</b>					
6.1.	Jumlah PMKS	243.459	251.234	251.234	247.465	
	PMKS yang ditangani	26	26	26	26	
	Persentase Penanganan PMKS	1	1	1	1	
	PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	78.387	78.387	81.247	108.434	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	PMKS yang diberikan Bantuan	1.200	1.052	1.134	2.708	
	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	1,53	1,34	1,40	2,50	
	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	0,1	1,34	1,4	1,4	
	Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	n/a	46.510	46.510	23.355	
	Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	n/a	100	100	24	
<b>B</b>	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>					
<b>1</b>						
<b>1.1.</b>	<b>Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan</b>					
	SD ke Bawah	477.106	482.844	493.889	491.456	453.853
		(29,43)	(28,51)	(29,18)	(28,57)	(25,98)
	SMP	260.843	273.257	267.721	260.789	259.693
		(16,09)	(16,14)	(15,82)	(15,16)	(14,87)
	SMA/SMK	609.994	659.047	643.105	666.878	760.250
		(37,63)	(38,92)	(37,99)	(38,76)	(43,52)
	Diploma I/II/III	64.291	57.174	64.507	64.906	56.923
		(3,97)	(3,38)	(3,81)	(3,77)	(3,26)
	Universitas/DIV	208.735	221.159	223.574	236.332	216.201
		(12,88)	(13,06)	(13,21)	(13,74)	(12,38)
	<b>Kalimantan Timur</b>	1.620.969	1.693.481	1.692.796	1.720.361	1.746.920
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
<b>1.2.</b>	<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	64,99	65,96	65,50	65,49	64,73
<b>1.3.</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	6,41	6,09	6,87	6,83	5,71

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.4.</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota</b>					
	Paser	5,00	4,55	4,52	5,70	4,88
	KUBAR	4,86	5,08	4,97	5,14	4,62
	KUKAR	5,96	5,98	5,70	5,66	4,14
	KUTIM	5,93	5,53	5,45	5,35	6,48
	Berau	5,62	5,08	5,08	5,82	5,02
	PPU	4,76	6,26	6,22	2,95	2,12
	MAHULU	4,17	3,69	3,49	3,14	2,44
	Balikpapan	9,52	7,29	9,00	8,94	6,90
	Samarinda	6,16	5,87	8,26	8,16	6,78
	Bontang	9,61	9,19	9,46	9,92	7,81
<b>1.5.</b>	<b>Persentase Penempatan Tenaga Kerja</b>					
	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	49.552	26.148	30.719	22.358	47.254
	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	11.266	7.690	5.538	3.531	12.334
	Pencari Kerja yang Belum ditempatkan (orang)	26.969	36.158	25.181	18.827	34.920
	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	22,74	29,41	18,03	15,79	26,10
<b>1.6.</b>	<b>Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota</b>					
<b>1.6.1.</b>	<b>Pencari Kerja Terdaftar (Orang)</b>					
	Paser				504	2.592
	KUBAR				3.603	3.116
	KUKAR				3.018	13.622
	KUTIM				-	3.815
	Berau				6.105	6.215



No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	PPU				433	1.149
	MAHULU				-	-
	Balikpapan				357	4.077
	Samarinda				2.441	4.261
	Bontang				5.897	8.407
<b>1.6.2.</b>	<b>Penempatan Pencari Kerja (Orang)</b>					
	Paser				11	657
	KUBAR				122	388
	KUKAR				89	335
	KUTIM				-	2.485
	Berau				1.788	2.282
	PPU				111	447
	MAHULU				-	-
	Balikpapan				70	1.630
	Samarinda				820	1.878
	Bontang				520	2.232
<b>1.6.3.</b>	<b>Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)</b>					
	Paser				2,18	25,35
	KUBAR				3,39	12,45
	KUKAR				2,95	2,46
	KUTIM				-	65,14
	Berau				29,29	36,72
	PPU				25,64	38,90
	MAHULU				-	-

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Balikpapan				19,61	39,98
	Samarinda				33,59	44,07
	Bontang				8,82	26,55
<b>3</b>	<b>Pangan</b>					
<b>3.1</b>	<b>Indeks Ketahanan Pangan (IKP)</b>					
<b>3.1.1</b>	<b>Ketersediaan</b>					
	Paser		53,68	81,01	82,75	
	KUBAR		36,15	0,00	5,72	
	KUKAR		85,80	81,76	81,4	
	KUTIM		0,00	49,27	30,53	
	Berau		81,51	82,39	86,54	
	PPU		86,85	88,10	88,95	
	MAHULU		28,23	41,96	-	
	Balikpapan		44,26	42,45	-	
	Samarinda		73,70	66,12	-	
	Bontang		0,00	0,00	-	
	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>60,64</b>	<b>60,90</b>	<b>60,64</b>	<b>53,7</b>	
<b>3.1.2</b>	<b>Keterjangkauan</b>					
	Paser		86,93	87,25	85,36	
	KUBAR		87,62	84,59	86,56	
	KUKAR		89,96	91,64	91,71	
	KUTIM		88,45	87,78	86,26	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Berau		94,06	93,71	94,4	
	PPU		90,85	90,23	89,88	
	MAHULU		82,10	79,92	82,07	
	Balikpapan		97,64	97,44	98,01	
	Samarinda		92,44	88,62	89,13	
	Bontang		92,30	91,29	93,41	
	<b>Kalimantan Timur</b>		<b>94,56</b>	<b>89,25</b>	<b>89,68</b>	
<b>3.1.3</b>	<b>Pemanfatan</b>					
	Paser		75,17	79,46	75,13	
	KUBAR		74,31	74,01	75,18	
	KUKAR		79,46	80,65	81,99	
	KUTIM		77,61	80,05	77,87	
	Berau		78,80	81,26	81,22	
	PPU		77,38	81,75	81,49	
	MAHULU		64,08	66,52	70,32	
	Balikpapan		81,46	79,66	81,06	
	Samarinda		79,26	74,31	79,29	
	Bontang		79,63	79,11	82,18	
	<b>Kalimantan Timur</b>		<b>75,64</b>	<b>77,68</b>	<b>78,57</b>	
<b>3.1.4</b>	<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>					
	Paser		72,25	82,26	80,48	
	KUBAR		66,85	54,98	57,76	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	KUKAR		84,51	84,28	84,73	
	KUTIM		57,58	73,13	66,19	
	Berau		84,19	85,34	86,77	
	PPU		84,26	86,20	86,24	
	MAHULU		58,73	63,17	52,75	
	Balikpapan		88,74	87,66	88,68	
	Samarinda		85,19	80,75	83,72	
	Bontang		85,34	84,59	87,24	
	<b>Kalimantan Timur</b>		<b>76,90</b>	<b>78,24</b>	<b>77,46</b>	
3.2.	<b>Jumlah Desa Rawan Pangan Berdasarkan Hasil FSVA Kabupaten/Kota</b>					
3.2.1	<b>Jumlah Kecamatan</b>					
	Paser	10	10	10	10	10
	KUBAR	16	16	16	16	16
	KUKAR	18	18	18	18	18
	KUTIM	18	18	18	18	18
	Berau	13	13	13	13	13
	PPU	4	4	4	4	4
	MAHULU	5	5	5	5	5
	Balikpapan	6	6	6	6	6
	Samarinda	10	10	10	10	10
	Bontang	3	3	3	3	3
	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
3.2.2	<b>Jumlah Desa</b>					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Paser	144	144	144	144	144
	KUBAR	194	194	194	194	194
	KUKAR	237	237	237	237	237
	KUTIM	141	141	141	141	141
	Berau	110	110	110	110	110
	PPU	54	54	54	54	54
	MAHULU	50	50	50	50	50
	Balikpapan	34	34	34	34	34
	Samarinda	59	59	59	59	59
	Bontang	15	15	15	15	15
	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>
3.2.3	<b>Desa Rawan Pangan</b>					
	Paser				35	
	KUBAR				50	
	KUKAR				60	
	KUTIM				44	
	Berau				19	
	PPU				11	
	MAHULU				21	
	Balikpapan				16	
	Samarinda				26	
	Bontang				5	
	<b>Kalimantan Timur</b>				<b>287</b>	
3.2.4	<b>% Per Kab/Kota</b>					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Paser				24,31	
	KUBAR				25,77	
	KUKAR				25,32	
	KUTIM				31,21	
	Berau				17,27	
	PPU				20,37	
	MAHULU				42,00	
	Balikpapan				47,06	
	Samarinda				44,07	
	Bontang				33,33	
	<b>Kalimantan Timur</b>				<b>27,65</b>	
3.2.5	<b>% Provinsi</b>					
	Paser				12,20	
	KUBAR				17,42	
	KUKAR				20,91	
	KUTIM				15,33	
	Berau				6,62	
	PPU				3,83	
	MAHULU				7,32	
	Balikpapan				5,57	
	Samarinda				9,06	
	Bontang				1,74	
	<b>Kalimantan Timur</b>				<b>100,00</b>	
<b>4</b>						

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4.1.	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	81,68	78,81	75,25	75,06	74,53
4.2.	<b>Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut</b>					
	IKA		77,09	53,7	51,92	53,02
	IKU		89,42	89,06	88,84	87,59
	IKL		72,12	79,76	82,21	82,35
	IKAL		-	83,51	85,4	81,45
4.3	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota</b>					
4.3.1	<b>IKA</b>					
	Kabupaten Kutai Timur					50,00
	Kota Balikpapan					50,00
	Kota Bontang					60,00
	Kabupaten Kutai Barat					62,31
	Kabupaten Kutai Kartanegara					53,08
	Kota Samarinda					45,81
	Kabupaten Mahakam Ulu					61,88
	Kabupaten Paser					54,09
	Kabupaten Penajam Paser Utara					48,33
	Kabupaten Berau					53,48
4.3.2	<b>IKU</b>					
	Kabupaten Kutai Timur					86,61
	Kota Balikpapan					84,29
	Kota Bontang					86,60
	Kabupaten Kutai Barat					91,50
	Kabupaten Kutai Kartanegara					89,31



No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kota Samarinda					81,81
	Kabupaten Mahakam Ulu					92,56
	Kabupaten Paser					89,53
	Kabupaten Penajam Paser Utara					89,90
	Kabupaten Berau					83,76
4.3.3	<b>IKL</b>					
	Kabupaten Kutai Timur					81,09
	Kota Balikpapan					49,79
	Kota Bontang					36,30
	Kabupaten Kutai Barat					66,09
	Kabupaten Kutai Kartanegara					70,87
	Kota Samarinda					25,90
	Kabupaten Mahakam Ulu					100,00
	Kabupaten Paser					72,02
	Kabupaten Penajam Paser Utara					61,70
	Kabupaten Berau					94,73
4.3.4	<b>IKLH</b>					
	Kabupaten Kutai Timur					71,64
	Kota Balikpapan					63,84
	Kota Bontang					65,58
	Kabupaten Kutai Barat					74,96
	Kabupaten Kutai Kartanegara					71,65
	Kota Samarinda					56,03
	Kabupaten Mahakam Ulu					82,65

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kabupaten Paser					72,37
	Kabupaten Penajam Paser Utara					68,09
	Kabupaten Berau					74,77
4.3.5	<b>Target</b>					
	Kabupaten Kutai Timur					70,44
	Kota Balikpapan					68,15
	Kota Bontang					65,33
	Kabupaten Kutai Barat					70,08
	Kabupaten Kutai Kartanegara					73,14
	Kota Samarinda					58,25
	Kabupaten Mahakam Ulu					83,86
	Kabupaten Paser					71,43
	Kabupaten Penajam Paser Utara					73,18
	Kabupaten Berau					76,71
4.3.6	<b>Rating</b>					
	Kabupaten Kutai Timur					BAIK
	Kota Balikpapan					SEDANG
	Kota Bontang					SEDANG
	Kabupaten Kutai Barat					BAIK
	Kabupaten Kutai Kartanegara					BAIK
	Kota Samarinda					SEDANG
	Kabupaten Mahakam Ulu					BAIK
	Kabupaten Paser					BAIK
	Kabupaten Penajam Paser Utara					SEDANG

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kabupaten Berau					BAIK
4.4.	Indeks Pencemaran Lingkungan	9.304 (cemar sedang)	5.299 (cemar sedang)	6.509 (cemar sedang)	2.797 (cemar ringan)	3.340 (cemar ringan)
4.5.	Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	42,14	34,65	24,41	20,89	36,4
<b>5</b>						
5.1.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (persen)	82,84	84,83	n/a		
5.2.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (persen)	92,30	92,69	n/a		
5.3.	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk (kebijakan)		0	0	6	6
5.4.	Kebijakan terkait pencatatan sipil (kebijakan)		0	0	6	6
5.5.	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan (kebijakan)		0	0	5	5
5.6.	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD (kali)				100%	
5.7.	Pemanfaatan data kependudukan lppd (OPD)				18.919	
<b>6</b>						
<b>6.1.</b>	<b>Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>					
	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa				27	
	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya				8	
	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan				15	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan				30	
	Persentase pengentasan desa tertinggal				90	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri				0.658 %	
	Indeks Desa Membangun			0.6752 %	0,7070 %	
	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan		35	35		
	Jumlah Bumdes Yang Aktif		15	360		
	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		80	80		
	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat		1	1		
	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar		18	18		
	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan		150	165		
	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat		1	1		
	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran		15	363		
	Jumlah Desa berkembang		15	329		
	Jumlah Kampung/Desa Iklim	-	-	40		
	Desa Tertinggal (Desa)	381	285	128	78	28
	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)				30	35
	Desa yang telah melaksanakan Penataan				7	7
	Kampung/Desa Iklim + (Desa				25	27

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatnya Desa Berkembang (Desa)	381	285	128	30	35
	Desa Berkembang				30	30
	Meningkatnya Bumdes yang aktif (Bumdes)	289	304	323	30	35
	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan				30	30
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan	323	338	363		
<b>7</b>	<b>Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>					
<b>7.1.</b>	<b>Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>					
	peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga		100			
	terwujudnya keluarga berencana dalam kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk		100			
	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)		100 org			
	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	50	-	70		
	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	0	0	1	1	
	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	33	40	
	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	1	1	
	Kebijakan tentang pengendalian penduduk				1	
	Jumlah dokumen grand desai pembangunan Kab/Kota dalam 5 aspek				1	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				160	
	Peningkatan jumlah peserta KB				160	
	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				140	
	peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				140	
	TFR (Angka Kelahiran Total)				2,51	
	Kampung KB	154	160	175		
<b>8</b>						
8.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.392.536	10.721.656	3.570.750	4.667.228	5.902.660
8.2	Jumlah barang (ton)	325.051.663	341.529.897	294.478.397	323.233.820	268.282.159
8.3	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%)	83	83	84	85	85
8.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (kasus)	846	570	448	418	510
<b>9</b>						
9.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,89	3,04	3,14	2,22	3,44
9.2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Kabupaten/Kota					
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur					2,22 (cukup)
	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara					2,48 (cukup)
	Pemerintah Kab. Paser					1,36 (kurang)
	Pemerintah Kab. Kutai Barat					1,83 (cukup)
	Pemerintah Kab. Kutai Timur					1,03 (kurang)
	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara					2,14 (cukup)

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu					1,03 (kurang)
	Pemerintah Kota Samarinda					2,46 (cukup)
	Pemerintah Kota Balikpapan					2,44 (cukup)
	Pemerintah Kota Bontang					2,11 (cukup)
<b>10</b>						
10.1.	Jumlah Koperasi Aktif	3.428	2.832	2.751	2.844	
10.2.	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	657	583	351	457	
10.3.	Jumlah Seluruh Koperasi	5.406	5.664	5.619	5.676	
10.4.	Jumlah Anggota Koperasi	86.297	82.054	57.381	68.580	
10.5	Volume Usaha Koperasi	1,31	0,78	0,82	1,19	
10.6.	Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten/Kota					
10.6.1.	<b>Kuliner</b>					
	Paser				12.029	
	KUBAR				1.224	
	KUKAR				25.245	
	KUTIM				311	
	Berau				4.009	
	PPU				3.087	
	MAHULU				22	
	Balikpapan				28.861	
	Samarinda				34.966	
	Bontang				13.644	
	Jumlah				<b>122.580</b>	
10.6.2.	<b>Industri Pengolahan</b>					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Paser				3.809	
	KUBAR				1.574	
	KUKAR				721	
	KUTIM				1.204	
	Berau				62	
	PPU				1.076	
	MAHULU				1	
	Balikpapan				1.999	
	Samarinda				111	
	Bontang				994	
	Jumlah				<b>11.551</b>	
10.6.3	<b>Kerajinan</b>					
	Paser				651	
	KUBAR				719	
	KUKAR				85	
	KUTIM				18	
	Berau				53	
	PPU				-	
	MAHULU				-	
	Balikpapan				6	
	Samarinda				104	
	Bontang				16	
	Jumlah				<b>1.652</b>	
10.6.4	<b>Dagang</b>					



No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Paser				35.209	
	KUBAR				6.061	
	KUKAR				9.541	
	KUTIM				878	
	Berau				8.122	
	PPU				19.040	
	MAHULU				10	
	Balikpapan				47.069	
	Samarinda				99.167	
	Bontang				5.287	
	Jumlah				<b>180.384</b>	
10.6.5.	<b>Jasa</b>					
	Paser				10.782	
	KUBAR				1.459	
	KUKAR				325	
	KUTIM				578	
	Berau				851	
	PPU				24	
	MAHULU				-	
	Balikpapan				18	
	Samarinda				24.276	
	Bontang				101	
	Jumlah				<b>28.414</b>	
10.6.6.	<b>Total</b>					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Paser				62.480	
	KUBAR				11.037	
	KUKAR				35.917	
	KUTIM				2.989	
	Berau				13.097	
	PPU				23.227	
	MAHULU				33	
	Balikpapan				77.953	
	Samarinda				158.624	
	Bontang				20.042	
	Jumlah				<b>344.581</b>	
11.	<b>Penanaman Modal</b>					
11.1.	<b>Jumlah Proyek PMDN/PMA</b>					
	<b>PMDN</b>	520	2.227	3.924	9.291	6.706
	<b>PMA</b>	513	903	778	1.034	1.055
	<b>Total</b>	1.033	3.130	4.702	10.325	7.711
11.2.	<b>Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor</b>					
11.2.1	<b>Sektor Primer</b>					
	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	3.747.269,70	4.278.148,30	4.738.083,60	4.828.002,20	3.650.817,60
	Kehutanan	602.835,40	283.625	125.549,60	73.973,60	346.853,60
	Perikanan	.	.	3,00	0,50	2,00
	Pertambangan	12.559.385,40	8.712.257,70	3.818.587,60	5.859.330,30	15.012.379,10
11.2.2	<b>Sektor Sekunder</b>					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Industri Makanan	1.687.495,70	569.890,60	1.397.339,40	671.841,30	2.390.781,50
	Industri Tekstil	.	.	-	2,00	431,00
	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	-	-	-
	Industri Kayu	264.104,30	350.224	97.509,90	5.996,00	24.001,70
	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	0	5,00	500,00
	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	1.034,70	444.145,60	7.965.221,90	15.145.338,40	14.914.625,40
	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	.	9.000	70,80	-	7.209,90
	Industri Mineral Non-Logam	17.919,90	292.133,10	95,00	2.351	18.184,90
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	.	.	5.000	10,30	521.796,50
	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	0	39,50	4.381,50
	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	7.620	151.706,50	3.626,30	9.221,80	21.487,30
	Industri lainnya	.	509,50	70.348,60	5.200,50	48.889,00
11.2.3	<b>Sektor Tersier</b>					
	Listrik, Gas, dan Air	2.559.556,90	2.021.363,60	759.122,70	298.896,80	165.780,50
	Konstruksi	3.204.289,50	1.223.384,70	5.777.776,90	113.413,70	55.394,60
	Perdagangan dan Reparasi	82.557,40	341.327,60	218.379,90	295.260,00	687.631,40
	Hotel dan Restoran	480	1.086.261,80	25.127	55.384,90	199.549,50
	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	165.403,80	940.606,30	459.299,20	1.503.072,30	573.564,20
	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	26.874,40	345.944,10	53.687,40	840.351,30	286.654,80
	Jasa Lainnya	1.015.135	1.623.524,70	419.150	589.690,80	664.717,90
	<b>Total</b>	25.941.962,10	22.674.053,10	25.934.008,80	30.297.382,20	39.595.633,00

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
11.3.	<b>Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor</b>					
11.3.1	<b>Sektor Primer</b>					
	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	64.114.100	185.796.300	67.781.500	58.097.000	190.013.892
	Kehutanan	657.100	2.751.700	2.071.400	2.330.000	37.276.491
	Perikanan	135.500	.	-	-	-
	Pertambangan	188.763.000	306.457.800	167.858.400	252.125.200	515.919.940
11.3.2	<b>Sektor Sekunder</b>					
	Industri Makanan	118.386.600	14.264.600	41.235.500	242.430.000	96.106.592
	Industri Tekstil	.	.	-	-	-
	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	-	-	-
	Industri Kayu	6.600	33.300	-	15.291.200	1.811.899
	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	-	-	-
	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	760.700	60.000	32.861.600	66.411.000	60.176.592
	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	256.700	561.100	986.400	990.600	136.400
	Industri Mineral Non-Logam	.	15.809.600	24.840.000	40.020.700	216.016.282
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	22.600	1.879.400	276.400	24.600	93.934.693
	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	253.200	1.533.400	3.550.700	1.084.700	1.967.500
	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	.	43.800	-	-	10.091.596
	Industri lainnya	526.100	134.600	-	-	-
11.3.3	<b>Sektor Tersier</b>					
	Listrik, Gas, dan Air	53.012.000	280.607.900	278.800	-	-
	Konstruksi	5.093.100	.	-	-	-
	Perdagangan dan Reparasi	3.738.700	4.258.100	5.618.500	3.804.800	9.497.500

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Hotel dan Restoran	2.245.800	1.297.000	791.000	586.000	3.682.299
	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	86.566.000	14.847.700	29.415.000	52.588.300	16.726.698
	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	301.200	146.900	221.300	9.379.800	6.288.898
	Jasa Lainnya	62.662.600	32.616.200	240.700	26.300	6.574.500
	<b>Total</b>	587.501.600	863.099.400	378.027.200	745.190.200	1.266.221.770
11.3.4.	<b>Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)</b>	18,73	22,31	25,14	31,64	35,35
<b>12</b>						
12.1.	Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	107	107	305
12.2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	42	42	45	45	38
12.3.	Jumlah Klub Olahraga	1.050	1.087	1.109	1.109	1.112
12.4.	Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	101	102	105	105	105
12.5.	Jumlah Kegiatan Olahraga	152	152	161	161	120
12.6.	Jumlah Organisasi Olahraga	57	63	63	63	63
<b>13.</b>	<b>Statistik</b>					
13.1.	Tersedianya buku profil daerah				1	
13.2.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan				1	
13.3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan				1	
13.4.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS				1	
13.5.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS				1	
13.6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan Statistik sektoral				100	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
13.7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral				100	
13.8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				100%	
13.9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				100%	
13.10	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur				50	
13.11	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Lingkup Daerah Provinsi				50	
<b>14.</b>	<b>Persandian</b>					
14.1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan				40	
14.2.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah				63,28	
14.3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah				54,69	
14.4.	Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi				84,33	
14.5.	Tingkat keamanan informasi pemerintah				173.333	
14.6.	Indeks keamanan informasi				Level 2	
14.7.	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)				Level 2	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>15</b>						
15.1.1	<b>Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kabupaten/Kota</b>					
15.1.2	<b>Cagar Budaya</b>					
.	Paser				83	
	KUBAR				13	
	KUKAR				187	
	KUTIM				57	
	Berau				167	
	PPU				33	
	MAHULU				47	
	Balikpapan				75	
	Samarinda				32	
	Bontang				4	
	<b>Kalimantan Timur</b>				698	
15.1.2	<b>Museum</b>					
	Paser				1	
	KUBAR				1	
	KUKAR				2	
	KUTIM				0	
	Berau				3	
	PPU				0	
	MAHULU				0	
	Balikpapan				1	
	Samarinda				1	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Bontang				0	
15.1.3	<b>Kalimantan Timur</b>				9	
	<b>Komunitas Budaya</b>					
	Paser				58	
	KUBAR				81	
	KUKAR				69	
	KUTIM				7	
	Berau				7	
	PPU				24	
	MAHULU				0	
	Balikpapan				29	
	Samarinda				222	
	Bontang				40	
	<b>Kalimantan Timur</b>				537	
15.1.4	<b>Tenaga Budaya</b>					
	Paser				9	
	KUBAR				31	
	KUKAR				39	
	KUTIM				10	
	Berau				7	
	PPU				12	
	MAHULU				9	
	Balikpapan				29	
	Samarinda				93	



No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Bontang				6	
	<b>Kalimantan Timur</b>				245	
15.1.5	<b>Adat Istiadat/ Tradisi</b>					
	Paser				7	
	KUBAR				19	
	KUKAR				8	
	KUTIM				7	
	Berau				2	
	PPU				7	
	MAHULU				137	
	Balikpapan				29	
	Samarinda				0	
	Bontang				0	
	<b>Kalimantan Timur</b>				216	
<b>16</b>						
16.1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk				5,49	
16.2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat				1,43	
16.3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk				0,001	
16.4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				6.16	
16.5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat				19	
16.6	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun				575	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
16.7	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah				3050	
16.8	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah				5	
16.9	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah				575	
16.10	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya				30	
16.11	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa				0	
16.12	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)				150	
16.13	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi				8,1	
16.14	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat				100	
16.15	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif				2	
16.16	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (online dan onsite) (orang)	137.841	145.731	77.884		
<b>17</b>	<b>Kearsipan</b>					
17.1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip				73,09	
17.2	Persentase arsip in - aktif yang telah dibuatkan daftar arsip				100	
17.3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik				80,48	
17.1.4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN				4	
17.1.5.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK				16991	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
17.1.6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK				0	
17.1.7	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi				3552	
17.1.8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK				23115	
17.1.9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK				625	
17.1.10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK				33	
17.1.11	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				64.38 %	
17.1.12	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 7.39 % 111 kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				7,39	
17.1.13	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip				90	
17.1.14	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan				10	
17.1.15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip yang Autentik dan Terpercaya				125	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
17.1.16	Pelaksanaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah				1 OPD	
17.1.16	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta				200	
17.1.19	Penyelamatan Arsip OPD akibat Penggabungan, Pembubaran dan Pemekaran Organisasi				2 OPD	
<b>C</b>	<b>Urusan Pilihan</b>					
<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
1.1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	157.295	192.666	158.709	173.996	160.593
1.2.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	151.913	134.216	155.000	160.240	161.051
1.3.	Jumlah	309.208	326.882	313.709	334.236	321.644
<b>2</b>	<b>Pariwisata</b>					
1.1.1	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara</b>					
	Kota Balikpapan	2,837,034	2,878,561	1,072,569	1,431,862	1,214,958
	Kota Samarinda	2,036,236	1,643,536	654,984	1,119,174	700,798
	Kota Bontang	409,319	472,037	215,029	156,212	93,965
	Kabupaten Paser	39,566	7,501	32,965	89,931	44,534
	Kabupaten Penajam Paser Utara	86,375	57,576	20,263	114,869	49,824
	Kabupaten Kutai Kartanegara	1,715,660	1,394,171	692,689	617,018	221,918
	Kabupaten Kutai Timur	36,717	70,560	40,129	72,438	12,757
	Kabupaten Kutai Barat	32,205	56,125	25,929	10,871	54,126
	Kabupaten Mahulu	3,464	3,058	2,596	5,590	5,002
	Kabupaten Berau	283,294	292,692	127,176	141,398	102,770
	<b>Jumlah Se-Kalimantan Timur</b>	<b>7,479,870</b>	<b>6,875,817</b>	<b>2,884,329</b>	<b>3,759,363</b>	<b>2,500,652</b>

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.1.2	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara</b>					
	Kota Balikpapan	47,040	56,577	16,510	17,458	8,860
	Kota Samarinda	4,835	2,735	2,075	444	80
	Kota Bontang	174	168	-	-	1,024
	Kabupaten Paser	431	-	-	1	1
	Kabupaten Penajam Paser Utara	135	8	26	-	-
	Kabupaten Kutai Kartanegara	4,557	3,872	557	46	4
	Kabupaten Kutai Timur	2,340	345	365	6	2
	Kabupaten Kutai Barat	279	273	28	5	190
	Kabupaten Mahulu	47	-	5	-	562
	Kabupaten Berau	2,586	8,323	220	85	44
<b>3</b>						
3.1.	Kontribusi Sektor Pertanian	7,89	7,91	8,80	8,48	7,04
3.2.	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian	6,21	3,91	-0,98	-0,08	1,96
3.3.	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura					
3.3.1.	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi					
	Luas Panen (Ha)	64.961	69.708	73.569	66.269	64.031
	Produksi (ton)	262.774	253.818	262.436	244.678	232.144
	Produktivitas (Ton/Ha)	4,04	3,64	3,57	3,69	3,63
3.4.	Perkebunan					
3.4.1.	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan					
	Luas Tanam (Ha)					
	Karet				118.626	123.776
	Kelapa				20.018	20.068
	Kopi				1.488	1.495
	Lada				8.221	8.321
	Kakao				7.617	7.777
	Kelapa Sawit				1.392.965	1.411.861

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.4.2	<b>Produksi (Ton)</b>					
	Karet				68.456	71.483
	Kelapa				10.170	7.201
	Kopi				167	165
	Lada				4.173	5.080
	Kakao				2.181	2.566
	Kelapa Sawit				17.277.404	16.938.307
3.4.4	<b>Produktivitas (Ton/Ha)</b>					
	Karet				1,28	
	Kelapa				0,63	
	Kopi				0,25	
	Lada				0,72	
	Kakao				0,51	
	Kelapa Sawit				16,77	
3.4.5.	<b>Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman</b>					
	<b>Kelapa Sawit</b>					
	Paser				2.014.529	1.974.991
	KUBAR				743.193	728.607
	KUKAR				2.959.954	2.901.860
	KUTIM				6.972.556	6.835.708
	Berau				4.144.842	4.063.493
	PPU				305.680	299.681
	MAHULU				127.323	124.824
	Balikpapan				487	477

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Samarinda				8.719	8.548
	Bontang				121	118
	<b>Kelapa</b>					
	Paser				3.283	2.325
	KUBAR				208	147
	KUKAR				2.355	1.667
	KUTIM				1.060	751
	Berau				1.569	1.110
	PPU				1.021	723
	MAHULU				5	4
	Balikpapan				480	340
	Samarinda				178	126
	Bontang				11	8
	<b>Karet</b>					
	Paser				8.334	8.703
	KUBAR				30.703	32.064
	KUKAR				14.811	15.466
	KUTIM				1.789	1.868
	Berau				6.950	7.256
	PPU				1.498	1.564
	MAHULU				-	-
	Balikpapan				4.066	4.246
	Samarinda				305	316
	Bontang				-	-
	<b>Kopi</b>					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Paser				72	71
	KUBAR				21	21
	KUKAR				7	7
	KUTIM				51	51
	Berau				13	13
	PPU				2	1
	MAHULU				-	-
	Balikpapan				1	1
	Samarinda				-	-
	Bontang				-	-
	<b>Kakao</b>					
	Paser				3	4
	KUBAR				20	24
	KUKAR				39	44
	KUTIM				1.414	1.664
	Berau				411	484
	PPU				2	2
	MAHULU				288	339
	Balikpapan				1	1
	Samarinda				3	4
	Bontang				-	-
	<b>Lada</b>					
	Paser				15	18
	KUBAR				5	6
	KUKAR				2.432	2.961
	KUTIM				128	156
	Berau				457	556
	PPU				1.019	1.240
	MAHULU				-	-
	Balikpapan				104	127
	Samarinda				13	16
	Bontang				-	-



No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>3.5.</b>	<b>Data Perbandingan Produktivitas Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Swasta (Ton/Ha)</b>					
3.5.1.	<b>Kelapa Sawit Swasta</b>					
	1. Kutai Kartanegara				14.92	
	2. Kutai Timur				14.81	
	3. Kutai Barat				6.54	
	4. Penajam Paser Utara				10.80	
	5. Paser				13.42	
	6. Berau				22.52	
	7. Mahakam Ulu				5.88	
	8. Samarinda					
	9. Balikpapan					
	10. Bontang				13.60	
	Kalimantan Timur				14.06	
3.5.2	<b>Kelapa Sawit Rakyat</b>					
	1. Kutai Kartanegara				9.75	
	2. Kutai Timur				11.37	
	3. Kutai Barat				0.87	
	4. Penajam Paser Utara				4.51	
	5. Paser				8.80	
	6. Berau				15.97	
	7. Mahakam Ulu				0.00	
	8. Samarinda				7.21	
	9. Balikpapan				12.82	
	10. Bontang				0.75	
	Kalimantan Timur				11.85	
3.5.3	<b>Karet Swasta</b>					
	1. Kutai Kartanegara				0.63	
	2. Kutai Timur				0.01	
	3. Kutai Barat				0.02	
	4. Penajam Paser Utara					
	5. Paser				0.75	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	6. Berau					
	7. Mahakam Ulu					
	8. Samarinda					
	9. Balikpapan					
	10. Bontang					
	Kalimantan Timur				0.09	
3.5.4.	<b>Karet Rakyat</b>					
	1. Kutai Kartanegara				0.65	
	2. Kutai Timur				0.11	
	3. Kutai Barat				0.73	
	4. Penajam Paser Utara				0.24	
	5. Paser				0.48	
	6. Berau				0.01	
	7. Mahakam Ulu				0.00	
	8. Samarinda				0.54	
	9. Balikpapan				0.60	
	10. Bontang					
	Kalimantan Timur				0.52	
<b>3.5</b>	<b>Jumlah Perusahaan Besar Sawit (PBS)</b>					
3.5.1	<b>Perusahaan Besar Sawit</b>					
	1. Kutai Kartanegara				18	
	2. Kutai Timur				35	
	3. Kutai Barat				8	
	4. Penajam Paser Utara				7	
	5. Paser				17	
	6. Berau				11	
	7. Mahakam Ulu				1	
	8. Samarinda				0	
	9. Balikpapan				0	
	10. Bontang				0	
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>				<b>97</b>	
<b>3.6</b>	<b>Jumlah Perusahaan Besar Sawit (PBS)</b>					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.6.1	<b>Kapasitas Produksi TBS (ton/jam) Terpasang</b>					
	1. Kutai Kartanegara				975	
	2. Kutai Timur				1917	
	3. Kutai Barat				460	
	4. Penajam Paser Utara				360	
	5. Paser				890	
	6. Berau				685	
	7. Mahakam Ulu				60	
	8. Samarinda				0	
	9. Balikpapan				0	
	10. Bontang				0	
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>				<b>5347</b>	
3.6.2	<b>Kapasitas Produksi TBS (ton/jam) Terpakai</b>					
	1. Kutai Kartanegara				858.87	
	2. Kutai Timur				1746.32	
	3. Kutai Barat				446.99	
	4. Penajam Paser Utara				238.33	
	5. Paser				674.67	
	6. Berau				636	
	7. Mahakam Ulu				50.5	
	8. Samarinda				0	
	9. Balikpapan				0	
	10. Bontang				0	
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>				<b>4651.68</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Peternakan</b>					
<b>3.7.1.</b>	<b>Populasi Ternak</b>					
	Sapi Potong	117.504	119.485	119.974	121.290	124.930
	Sapi Perah	110	91	87	94	78
	Kambing	66.378	67.892	69.929	68.997	71.068
	Domba	439	590	635	694	714
	Babi	78.968	82.546	83.652	82.980	78.581
	Kerbau	6.157	6.194	6.552	6.539	6.734

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kuda	97	102	95	143	146
	Kelinci	14.189	8.859	10.830	11.044	
	Ayam Kampung	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.654.618	4.960.453
	Ayam Ras Pedaging	66.672.445	67.886.566	59.402.832	63.971.068	72.283.207
	Ayam Ras Petelur	1.055.432	853.693	1.218.994	1.102.995	1.975.927
	Itik	248.978	254.683	254.749	247.956	335.203
<b>3.7.2.</b>	<b>Jumlah Miniranch</b>					
	Paser		1	2	3	9
	KUBAR		1	2	3	6
	KUKAR		-	3	5	12
	KUTIM		2	-	4	5
	Berau			1	5	8
	PPU		1	2	3	4
	MAHULU		-	2	-	2
	Balikpapan		-	-	-	2
	Samarinda		-	-	-	1
	Bontang		-	-	1	1
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>		5	12	24	49
<b>4</b>						
4.1.	Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PNPB (Rp. Miliar)		1,12	1,13	1,04	1,17
4.2.	Persentase Tutupan Lahan (persen)		5,66	13,98	14,40	12,21
4.3.	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)	38.771,77	66.302,27	38.737,80	39.900,80	1.144,00
4.4.	Jumlah Luas Hutan yang Rusak/Terbakar/Perambahan/Illegal Logging					
	Kab. Berau					1.823
	Kab. Kutai Timur					2.260
	Kab. Kutai Kartanegara					2.454
	Kab. Kutai Barat					471

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kab. PPU					1.096
	Kab. Paser					2.050
	Kab. Mahakam Ulu					16
	Kota Bontang					13
	Kota Balikpapan					13,84
	<b>Total</b>					<b>10.197</b>
<b>5</b>						
5.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,13	4,40	4,80	6,53	6,97
5.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	945.607	1.032.475	1.105.227	1.143.533	1,197,475
5.3.	<b>Pelanggan Listrik Rumah Tangga</b>					
	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	1.018.222	1.089.707	1.163.243		
	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (GWh)	2.053,4	2.213,4	2.379,9		
	Produksi Pertambangan Batubara	244.718.585,87	243.153.868,94	206.030.322,65	289.531.886,00	
5.4.	Produksi Pertambangan Unggulan					
	Batubara (Ton)	244.718.585,87	243.153.868,94	206.030.322,65	294.252.801,68	
	Minyak Bumi (Ribuan Barrel)	23.720,00	21.038,83	19.296,85	17.742,36	
	Gas Bumi (Ribuan MMBTU)	296.830,00	231.067,41	203.955,18	172.829,53	
<b>6</b>						
6.1	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)		2,04	2,23	4,75	4,25
6.2	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara				116,56	102,7
6.3.	Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi					
6.3.1.	Migas	4.302,83	3.356,38	2.068,20	1.605,15	2.102,65

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Minyak Mentah	334,70	12,63	7,27	-	13,93
	Hasil Minyak	12,97	224,05	108,64	7,40	588,30
	Gas	2.977,57	1.831,52	1,032,38	1.597,75	1.500,42
6.3.2.	Non Migas	13.230,03	15.029,36	14.113,59	22.140,09	24.524,04
	Hasil Tambang	13.580,80	12.408	9.600,36	17.364,22	20.271,85
	Hasil Industri	1.445,92	1.696,72	2.222,52	4.769,25	4.247,59
	Hasil Pertanian	4,21	8,87	9,11	6,63	4,60
6.3.3.	Total Ekspor	18.385,73	16.183,21	12.980,28	23.745,24	26.626,69
6.4.	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	1,45	2,04	2,23	6,48	4,25
6.5.	Nilai Impor	4.558,24	2.504,51	1.960,32	3.330,07	3.705,64
6.6.	Nilai Neraca Perdagangan	13.797,92	13.678,69	11.019,96	20.415,18	22.921,05
<b>E</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
<b>1</b>						
	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah				76,19	
	Tingkat Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan				75	
	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Yang Digunakan Dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				90	
	Persentase Kesesuaian Rencana Program/Kegiatan Yang Dilaksanakan Mendukung Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi				75	
	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran				94,02	

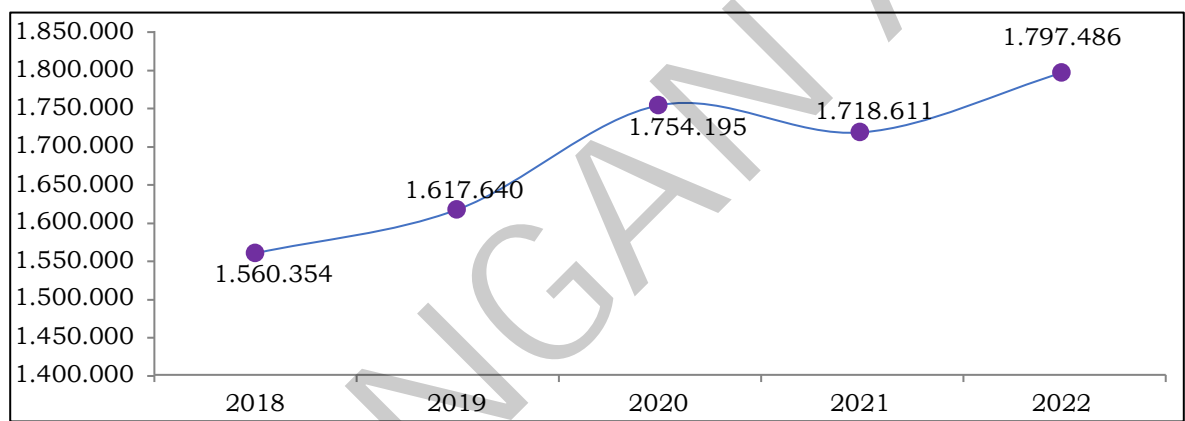
No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran				100	
	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian Dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA) Yang Dijabarkan Dalam Dokumen Anggaran				85	
	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran				85	
	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	82,3	89,42	87		
<b>2</b>						
	<b>Derajat Otonomi Fiskal Daerah</b>					
	PAD (Ribu Rupiah)	5.800.270.286,00	6.555.852.805,00	4.116.573.388,00	6.111.918.272,28	5.200.813.725,65 (rata-rata2018-2021)
	Total Pendapatan (Ribu Rupiah)	10.669.542.802,00	11.775.086.446,00	8.763.476.903,00	10.220.142.967,27	9.595.145.984,16 (rata-rata2018-2021)
	DOF (Persen)	54,36	55,68	46,97	59,8	53,93 (rata-rata2018-2021)
<b>F</b>						
2	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	2	3	3	3	3

Sumber: BPS, LkjIP, data perangkat daerah, diolah

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama 5 tahun terakhir, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang mencapai Rp. 1.718.611,- per bulan. Namun di tahun 2022, pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mengalami meningkat mencapai Rp. 1.797.486,-. Penyebab naiknya pengeluaran rata-rata per kapita adalah meningkatnya pengeluaran konsumsi makanan di tahun 2022 yang mencapai Rp 813.448 (42,85 persen) dimana pengeluaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 736.465 (45,06 persen).



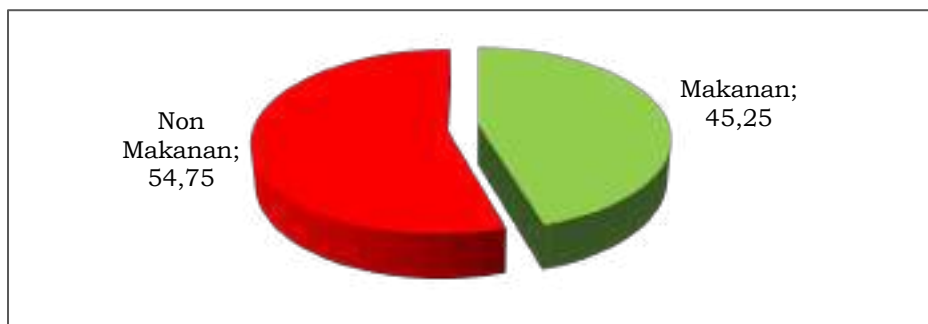
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.85**  
**Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Rupiah)**

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).





Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.86**  
**Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

### C. Nilai Tukar Petani

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan tahun 2019 – 2022 selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan NTP tahun 2022 disebabkan meningkatnya NTP pada hampir seluruh sub sektor, kecuali sub sektor tanaman pangan dan perikanan yang mengalami penurunan. Selanjutnya, ada tiga sub sektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Penurunan NTP subsector Tanaman Pangan disebabkan menurunnya indeks harga yang diterima petani (It) sejak bulan februari dan terus menurun hingga bulan mei tahun 2022 dan mulai sedikit meningkat pada bulan juni tahun 2022. Bahkan pada bulan mei tahun 2022 angka indeks harga yang diterima petani dibawah 100. Artinya pada bulan mei tersebut, harga produk pertanian tanaman pangan yang diterima petani nilainya dibawah harga tahun dasar 2018. Sedangkan penyebab menurunnya nilai NTP tahun 2022 subsektor perikanan adalah karena sejak bulan Juli hingga Oktober, indeks harga yang diterima petani perikanan lebih rendah daripada yang harus dibayarkan. Sehingga menyebabkan NTP bulan Juli hingga Oktober tahun 2022 berada dibawah 100 yang artinya pada bulan-bulan tersebut petani perikanan merugi.

Diantara kelima subsector dalam pembentukan NTP, petani pada subsector perkebunan rakyat adalah petani yang paling sejahtera dibandingkan dengan subsektor yang lain karena rata-rata NTP tiap tahun

sudah diatas 150 artinya bahwa nilai yang diterima dari hasil produksi perkebunannya sudah 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal untuk proses produksi perkebunannya. Untuk subsector yang lain masih belum aman karena nilai NTP masih berfluktuasi disekitaran angka 100.

Ternyata fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur, juga terjadi diwilayah lain di pulau Kalimantan, bahwa petani subsector perkebunan rakyat lebih sejahtera dibandingkan dengan subsector yang lain. Sementara subsector tanaman pangan dan perikanan merupakan subsector yang masih rentan berfluktuasi nilai NTP-nya berada dibawah 100.

Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 107,33. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi kedua sebesar 126,03, dibawah Kalimantan Barat sebesar 141,34.

**Tabel II.66**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional**  
**Menurut Subsektor Tahun 2022**

No	Uraian	Kaltim	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltara	Nasional
	NTP Gabungan	126,03	141,34	121,60	107,33	109,00	107,33
1.	Tanaman Pangan	92,34	92,59	94,63	98,79	96,78	98,82
2.	Hortikultura	112,32	102,01	111,82	105,54	101,41	108,74
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	162,54	167,77	139,17	123,02	154,16	126,22
4.	Peternakan	108,77	100,53	107,74	102,38	104,55	101,24
5.	Perikanan	97,98	102,64	94,46	100,60	104,29	105,24

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**D. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2017-2021, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan skill tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga

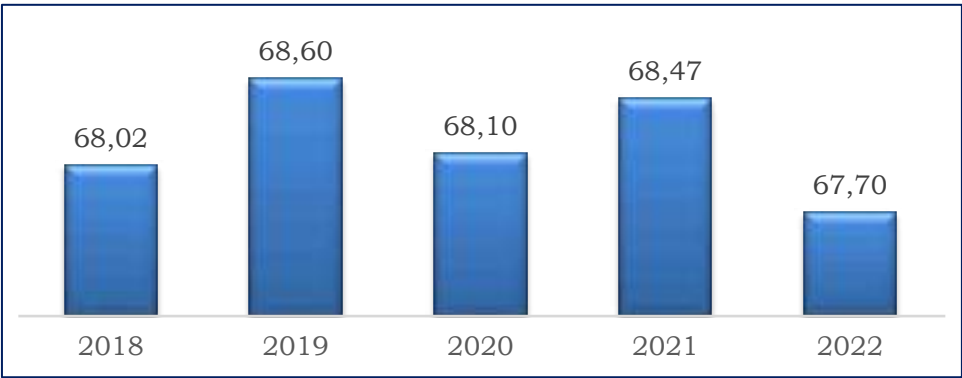
kerja yang lebih sedikit. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja lebih kepada masyarakat lokal melalui peningkatan investasi yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat.

Sektor usaha tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2022 pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) paling banyak diserap oleh sektor pertambangan sebesar 41,03 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 28,88 persen. Hal ini terjadi dikarenakan nilai realisasi investasi dan jumlah proyek terbesar pada PMDN adalah sektor pertambangan. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) paling banyak diserap oleh sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan menyerap 50,59 persen tenaga kerja, sedangkan sektor pertambangan menyerap tenaga kerja sebanyak 26,13 persen. Sama halnya seperti pada PMDN, pada PMA penyerapan tenaga kerja sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan terbanyak juga dipengaruhi dengan nilai investasi dan jumlah proyek yang tinggi pada sektor tersebut. Kemudian dengan berkembangnya investasi, efek yang akan diperoleh yakni terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

#### **E. Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan perbaikan guna menunjang reformasi birokrasi yang baik dan mengarah kearah tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pada tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di angka 68,10 dengan predikat B (Cukup Baik), sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,54% berada di angka 68,47 dengan predikat B (cukup baik).



Sumber: Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2023

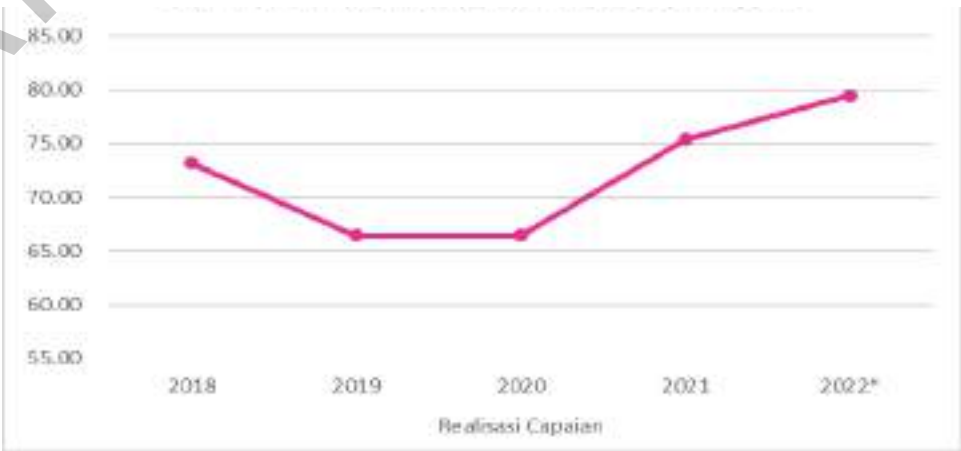
Gambar II.87

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur

F. Luas Wilayah Produktif

Dalam perwujudan penyelenggaraan penataan ruang, skoring penyelenggaraan penataan ruang menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan kinerja penataan ruang. Realisasi capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2019 sebesar 66.46% dan capaian yang sama pada tahun 2020.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi ditetapkan dengan Perda RRTR melainkan menjadi bagian dari substansi Perda RTRW itu sendiri, sehingga hal ini mempengaruhi indikator pada aspek pelaksanaan penataan ruang. Sehingga, pada tahun 2021 dan 2022, terdapat peningkatan skoring menjadi 75,38% dan 78,57% dikarenakan progress revisi RTRWP telah berjalan sesuai dengan target.



Gambar II.88

Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang

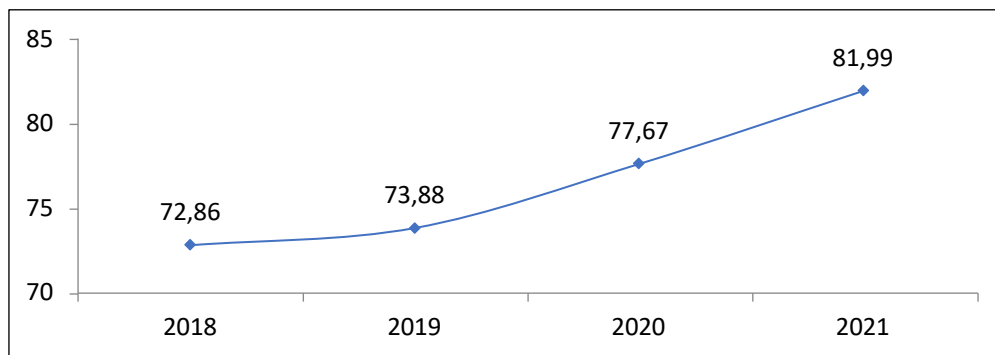
Pada tahun 2023 ditargetkan pencapaian Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang mencapai 83,10% dimana diperlukan peningkatan sebesar 4,53%. Adapun target ini didasarkan kepada peningkatan kinerja dari masing-masing aspek yaitu Aspek Pembinaan Penataan Ruang (38,30), Aspek Pengaturan Penataan Ruang (23,50) dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang (23,10). Selain itu diharapkan pada awal tahun 2023, Revisi RTRWP sudah dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga Kabupaten/Kota yang saat ini sedang melakukan peninjauan kembali dan proses revisi perda dapat mengacu perda RTRWP.

Peran RTRWP sebagai pedoman perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi, juga sebagai pedoman perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor. Adanya dinamika dan arah pengembangan pembangunan memberikan dampak intensitas penggunaan dan pemanfaatan ruang yang tinggi.

Terhadap adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, baik berupa alih fungsi lahan dan konflik dalam pemanfaatan ruang, serta dalam upaya menjaga kualitas kawasan yang berfungsi lindung, maka kegiatan yang juga harus terus dilanjutkan adalah pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

#### **G. Indeks Demokrasi**

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 81,02 persen pada tahun 2022 dan di level nasional berada pada peringkat ke Lima, nilai indeks ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan metode dalam perhitungan indeks demokrasi mengalami perubahan. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori "*high performing democracy*".



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.89**  
**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2021**

Perkembangan IDI Kalimantan Timur dari 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi, Capaian IDI terendah pada tahun 2017 sebesar 72,86 sedangkan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 81,99. Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru dimana pada metode lama focus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada institutional democracy seperti Lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll sedangkan pada metode baru focus pada demokrasi yang lebih luas dimana mengurangi porsi ukuran institutional democracy dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu pada metode lamaterdapat 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator sedangkan pada metode baru hanya ada 3 aspek dan 22 indikator.

Berdasarkan capaian IDI Tahun 2021 di Kalimantan Timur, masih terdapat 2 indikator yang nilainya masih dibawah 60, yaitu:

1. Indikator Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi

Indikator ini diperoleh dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dari data KPPU, ada peningkatan data dari 4,51 di tahun 2020 menjadi 4,57 di tahun 2021. Kondisi ini didukung dengan peningkatan dimensi regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Indikator Lembaga Kinerja Legislatif

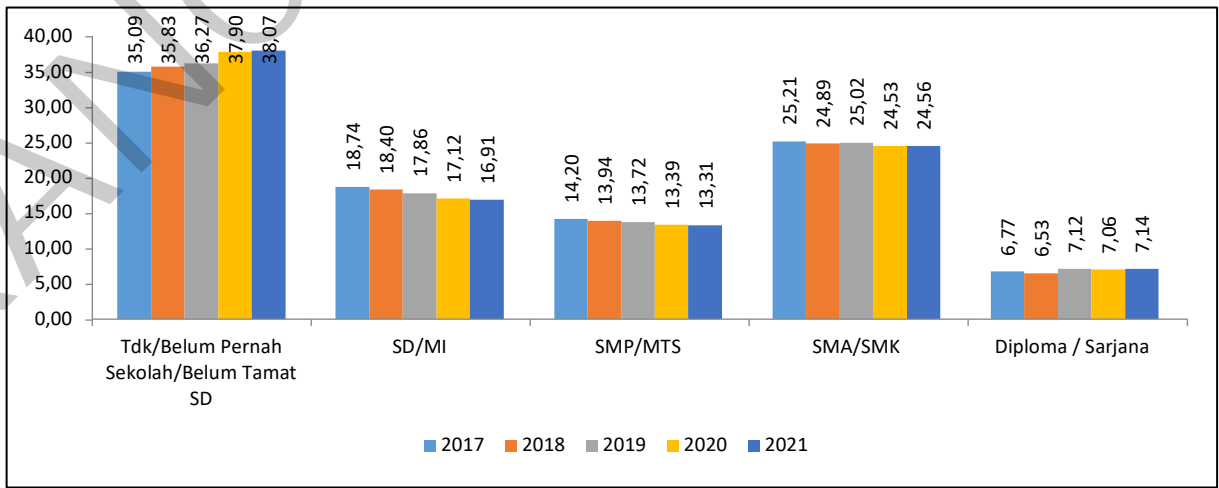
Diperoleh dari persentase perda yang disahkan terhadap target Propemperda. Data dari sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur diperoleh ada 8 perda yang disahkan dari 15 target yang masuk di Propemperda pada tahun 2021.

H. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2021 hanya sebesar 7,14 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (24,56 persen), SLTP/MTs (13,31 persen) dan SD/MI (16,91 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 38,07 persen, persentase ini meningkat dibandingkan presentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

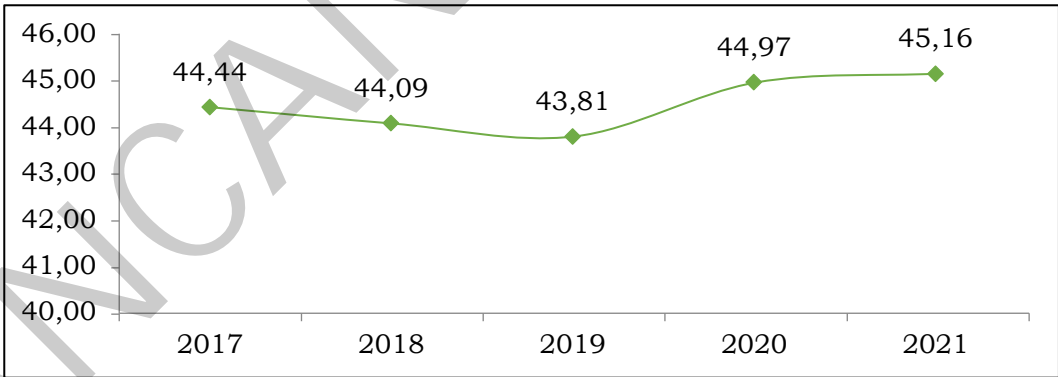


Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.90**  
**Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

**I. Rasio Ketergantungan**

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 45,16, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45-46 orang penduduk usia non produktif. Bila disandingkan dengan tingkat kemiskinan dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan dipengaruhi oleh rasio ketergantungan, dimana pengeluaran per kapita usia produktif harus menanggung biaya hidup kelompok usia non produktif. Upaya mengurangi angka ketergantungan usia non produktif dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendidikan dan keterampilan kelompok usia produktif serta menciptakan kesempatan lapangan kerja yang melibatkan usia non produktif.



Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.91**  
**Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

Seluruh capaian indikator kinerja pada Aspek Daya Saing Daerah disajikan pada tabel di bawah.



**Tabel II.67**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan	1.560.354	1.617.640	1.754.195	1.718.611	1.797.486
2.	<b>Konsumsi Rumah Tangga non Makanan</b>					
	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	857.449	893.217	963.725	982.146	984.038
	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.560.354	1.617.640	1.754.195	1.718.611	1.797.486
	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	54,95	55,22	54,94	57,15	54,75
3.	Rata-Rata Nilai Tukar Petani					
	Indeks Yang Diterima Petani (It)	123,77	107,91	116,96	128,25	140,84
	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	128,75	102,41	104,76	106,05	113,40
	Nilai Tukar Petani (NTP)	96,14	105,38	111,65	120,94	124,20
4.	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Subsektor					
	NTP Gabungan	96,14	94,63	111,36	120,94	124,25
	Tanaman Pangan)	94,57	94,20	101,60	95,28	91,65
	Hortikultura	93,11	93,13	105,20	106,07	112,35
	Tanaman Perkebunan Rakyat	88,42	81,38	124,57	151,10	158,33
	Peternakan	109,16	110,95	101,65	104,28	109,92
	Perikanan	103,32	104,62	103,17	103,01	97,98
5.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja					
5.1.	PMDN					
	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	12.935	20.837	19.952	21.596	24.829
	Jumlah proyek seluruh PMDN	520	2.227	3.924	9.291	4.938
	Rasio daya serap tenaga kerja	24,88	9,36	5,08	2,32	5,03
5.2.	PMA					

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	12.500	15.166	5.868	5.650	11.609
	Jumlah proyek seluruh PMA	513	903	778	1.034	742
	Rasio daya serap tenaga kerja	24,37	16,80	7,54	5,46	15,65
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	68,02	68,60	68,10	68,47	67,60
7.	Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota					
7.1.	Luas Wilayah Produktif (Ha)					
	Paser				301.226	
	KUBAR dan MAHULU				515.012	
	KUKAR				420.324	
	KUTIM				472.421	
	Berau				370.716	
	PPU				113.402	
	Balikpapan				22.538	
	Samarinda				13.320	
	Bontang				5.643	
	Jumlah				2.234.602	
7.2.	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)					
	Paser				445.964	
	KUBAR dan MAHULU				862.681	
	KUKAR				936.710	
	KUTIM				942.679	
	Berau				536.320	
	PPU				145.011	
	Balikpapan				34.069	
	Samarinda				68.888	

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Bontang				10.002	
	Jumlah				3.982.325	
7.3.	Rasio (%)				67,54	
	Paser				59,70	
	KUBAR dan MAHULU				44,87	
	KUKAR				50,11	
	KUTIM				62,12	
	Berau				78,20	
	PPU				66,15	
	Balikpapan				19,34	
	Samarinda				56,42	
	Bontang				56,11	
	Jumlah				67,54	
7.4.	Indeks Demokrasi Indonesia	73,88	77,67	81,99	81,02	
7.5.	Rasio Ketergantungan	44,09	43,81	44,97	45,16	
	Tdk/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	35,83	36,27	37,90	38,07	
	SD/MI	18,40	17,86	17,12	16,91	
	SMP/MTS	13,94	13,72	13,39	13,31	
	SMA/SMK	24,89	25,02	24,53	24,56	
	Diploma / Sarjana	6,53	7,12	7,06	7,14	
7.6.	Rasio Ketergantungan	44,09	43,81	44,97	45,16	

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2022 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel II.68**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ MISI ] 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas																	
[ TUJUAN ] 1 Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berakarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,25		77,44		76,88		77,25		77,44		100,25		100,25		
[ SASARAN ] 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	14,02		13,84		13,81		13,9		13,84		99,57		98,72		
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Tahun	10,04		9,92		9,84		10,04		9,92		98,80		98,80		
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	%	9,19	2.325.000.000	10,64	13.499.680.760	8,1	2.017.396.306	9	5.462.794.661	10,64	13.499.680.760	118,22	247,12	115,78	580,63	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	%	82	894.742.153.237	83,3	946.842.723.002	78,15	518.070.640.416	82	657.333.850.063	83,3	763.661.010.906	101,59	116,18	101,59	105,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
[ SASARAN ] 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	%	0,85		0,88		0,13		0,85		0,88		103,53		103,53		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	%	70	26.000.000.000	71	120.432.779.815	20,59	110.430.633.679	70	118.316.524.305	71,74	120.431.597.843	102,49	101,79	101,43	463,20	Dinas Pemuda dan Olah Raga
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	%	1	8.420.000.000	0,88	8.942.653.376	0,13	1.789.757.399	1	8.081.638.000	0,88	8.942.326.376	88,00	110,65	88,00	106,21	Dinas Pemuda dan Olah Raga
[ SASARAN ] 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	74,6		74,62		74,61		74,65		74,62		99,96		100,03		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
<b>kesehatan masyarakat</b>																	
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melakukan PHBS	Kab/Kota	3	504.923.350	3	388.527.545	3	780.540.850	3	8.081.638.000	3	8.942.326.376	100,00	110,65	100,00	76,95	Dinas Kesehatan
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	%	100	88.073.706.300	100	62.420.498.641	100	35.978.932.834	100	469.523.350	100	388.527.545	100,00	82,75	100,00	70,87	Dinas Kesehatan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	%	40	500.000.000	70	0	60	28.801.187.079	40	72.497.145.630	67,02	62.420.498.641	167,55	86,10	175,00	0,00	Dinas Kesehatan
<b>[ SASARAN ] 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender</b>	<b>Indeks</b>	<b>65,64</b>		<b>66,64</b>		<b>66,64</b>		<b>65,65</b>		<b>66,64</b>		<b>101,51</b>		<b>101,52</b>		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
dalam pembangunan																	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	Kebijakan	1	1.200.000.000	1	1.524.154.513	1	798.506.351	1	1.306.710.000	1	1.524.154.513	100,00	116,64	100,00	127,01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
[ TUJUAN ] 2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	%	6		6,31		6,54		6,15		6,31		97,40		94,83		
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	6,75		5,71		6,83		6,75		5,71		115,41		115,41		
[ SASARAN ] 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6825		0,732		0,7071		0,7071		0,732		103,52		107,25		
[ PROGRAM ] PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	Desa	35	2.698.564.625	35	2.137.318.302	30	1.681.845.362	35	2.190.940.500	35	2.137.318.302	100,00	97,55	100,00	79,20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa



Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	Desa	30	1.281.412.513	38	14.814.563.403	27	624.712.927	30	893.397.500	38	14.814.563.403	126,67	1.658,23	126,67	1.156,11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
[ SASARAN ] 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	%	35		25,08		26,04		35		25,08		71,66		71,66		
[ PROGRAM ] PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	%	70	1.191.517.040	62,22	832.889.618	75	1.261.566.671	70	2.555.911.000	62,22	832.889.618	88,89	32,59	88,89	69,90	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
[ PROGRAM ] PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	31	1.967.167.260	68,43	716.846.853	79,07	1.576.375.854	31	861.978.000	34,88	716.846.853	112,52	83,16	220,75	36,44	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
[ MISI ] 2 Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan																	
[ TUJUAN ] 3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	3,5±1		4,48		2,48		3,5+1		4,48		128,00		128,00		
	PDRB per	Juta Rp	172		238,7		182,54		182,5		238,7		130,79		138,78		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	Kapita (Juta Rp)																
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	%	2		6,11		2,69		2		6,11		305,50		305,50		
	Nilai Tukar Petani		113		126,03		120,94		119		126,03		105,91		111,53		
[ SASARAN ] 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	Miliar Rp	11.038		15.909		10.090		10.861		15.909		146,48		144,13		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	%	100		144,72		92,98		100		144,72		144,72		144,72		Badan Pendapatan Daerah
	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	Wajib Pajak	739	1.633.400.000	879.861.347	697	654.933.456	692	1.237.200.000	739	879.861.347	697	94,32	71,12	94,32	53,87	Badan Pendapatan Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	%	100	19.318.082.000	127,19	11.234.929.165	114,69	6.897.139.934	100	9.443.475.000	127,19	8.768.789.802	127,19	92,86	127,19	58,16	Badan Pendapatan Daerah
[ SASARAN ] 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	Miliar US\$	1,72		5,05		4,75		2		5,05		252,50		293,60		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	%	5	1.185.650.240	15,85	556.639.658	116,56	682.531.738	5	574.185.166	15,85	556.639.658	317,00	96,94	317,00	46,95	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
[ SASARAN ] 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd	%	9,64		8,24		7,97		7,9		8,24		104,30		85,48		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	<b>PDRB (%)</b>																
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	Industri	2	3.022.500.000	2	3.818.212.642	2	587.368.100	2	1.641.231.000	2	3.818.212.642	100,00	232,64	100,00	126,33	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
[ SASARAN ] 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	%	0,65		0,43		0,54		0,6		0,43		71,67		66,15		
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan	%	0,37		0,27		0,32		0,37		0,27		72,97		72,97		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	an terhadap PDRB (%)																
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	%	5,2		4,22		4,97		5,2		4,22		81,15		81,15		
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	1,7		1,28		1,56		1,6		1,28		80,00		75,29		
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	%	1,07		0,81		1,04		1,07		0,81		75,70		75,70		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	25.158.200.136	48.258	25.806.300.490	19.178	17.264.230.139	32.000	17.450.953.875	48.258	25.806.300.490	150,81	147,88	150,81	102,58	Dinas Kehutanan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.000.000		4.471.286		4.104.271,21		5.000.000		4.471.286,16		89,43		89,43		Dinas Kehutanan
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	700	181.688.359.057	826,05	74.141.066.287	97.904.199.304	1.175,38	700	23.467.618.071	826,05	15.163.952.667	118,01	64,62	118,01	40,81	Dinas Kehutanan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Ha	297.806	4.036.245.818	293.031	3.855.107.558	289.048	3.449.833.835	297.805,90	3.986.235.800	293.030,78	3.855.107.558	98,40	96,71	98,40	95,51	Dinas Kelautan Dan Perikanan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	164.441	5.394.447.000	161.230	6.065.065.353	158.086	5.090.172.070	164.441	6.392.307.000	161.051	6.065.065.353	97,94	94,88	98,05	112,43	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	162.593	72.422.675.000	177.514	21.251.309.706	168.964	17.179.335.545	162.593	27.714.746.660	160.593	21.251.309.706	98,77	76,68	109,18	29,34	Dinas Kelautan Dan Perikanan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	Juta Ton CO <sub>2</sub> eq	4,067	1.080.500.000	7,92	2.041.859.335	6,02	1.132.376.875	4,067	1.195.590.000	7,92	1.181.406.320	194,74	98,81	194,74	188,97	Dinas Perkebunan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Jenis	3	1.481.250.000	3	1.447.597.872	2	771.015.020	3	1.573.750.000	3	1.447.597.872	100,00	91,98	100,00	97,73	Dinas Kelautan Dan Perikanan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ;	Ha	8.000	4.716.890.000	8.000	2.875.053.809	7.000	4.414.794.317	8.000	2.965.929.180	8.000	2.875.053.809	100,00	96,94	100,00	60,95	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Jumlah Fasilitas Pengembangan	Unit	7		7		6		7		7		100,00		100,00		Dinas Pangan, Tanaman Pangan

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	Sarana Pertanian Hortikultura																dan Hortikultura
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ;	Kelompok	30	6.722.948.500	36	6.037.862.000	34	6.679.289.750	30	6.997.252.000	36	6.037.862.000	120,00	86,29	120,00	89,81	Dinas Perkebunan
	2) Luas Kebun yang dibangun	Ha	1.462.645		1.575.966		1.540.488		1.462.645		1.575.966		107,75		107,75		Dinas Perkebunan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	49	10.023.538.200	49	7.757.188.752	24	7.430.159.604	49	8.330.342.400	49	7.757.188.752	100,00	93,12	100,00	77,39	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi ;	Ton	279.681	25.533.110.000	280.665	38.729.839.200	244.677,96	18.744.721.100	279.681	43.496.197.500	280.665	38.729.839.200	100,35	89,04	100,35	151,68	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	283.59 2		319.25 7		345.23 0		283.59 2		380.28 3		134, 10		112, 58		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	Ton	18.126.490,20	6.465.557.600	17.022.588,00	13.218.069.532	17.792.792	5.190.021.450	18.126.490,20	14.810.658.000	17.022.588,00	11.156.061.775	93,9 1	75,3 2	93,9 1	204,44	Dinas Perkebunan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	%	21	7.243.486.018	21	3.458.041.537	19	7.171.086.750	21	4.206.881.500	21	2.975.608.741	100, 00	70,7 3	100, 00	47,7 4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah Aparatur Non Aparatur yang di bina ;	Orang	330	3.693.331.700	333	3.522.700.804	91	4.787.423.236	330	3.616.662.000	333	3.522.700.804	100, 91	97,4 0	100, 91	95,3 8	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorpora	Lembaga	4		4		4		4		4		100, 00		100, 00		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	si yang dibina																Hortikultura
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	lembaga	1	3.715.204.900	1	2.131.689.820	1	3.537.377.859	1	1.963.897.000	1	2.131.689.820	100,00	108,54	100,00	57,38	Dinas Perkebunan
[ PROGRAM ] PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	Perusahaan	35	750.000.000	36	583.449.050	41	772.764.300	35	584.700.000	36	583.449.050	102,86	99,79	102,86	77,79	Dinas Perkebunan
[ SASARAN ] 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	Triliun Rp	35		36,17		31,64		35		36,17		103,34		103,34		
[ PROGRAM ] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	Hari	11	3.651.330.000	5	1.372.443.216	5	1.354.323.701	11	1.820.219.524	5	1.372.443.216	154,55	75,40	154,55	37,59	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
																	n Terpadu Satu Pintu
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	%	100	1.500.000.000	100	1.514.309.436	100	1.069.577.836	100	1.610.282.000	100	1.514.309.436	100,00	94,04	100,00	100,95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ SASARAN ] 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	%	13		15,13		12,13		13		15,13		116,38		116,38		
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	%	1	271.143.400	4,84	31.818.261.900	1	436.292.550	1	369.151.000	4,84	31.818.261.900	484,00	8.619,31	484,00	11.734,85	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	%	10	576.519.240	13	705.461.493	0		10	731.659.500	13	705.461.493	130,00	96,42	130,00	122,37	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	%	3	701.986.600	36,2	8.108.087.742	2,75	498.824.200	3	302.400.000	36,2	8.108.087.742	1.206,67	2.681,25	1.206,67	1.155,02	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
[ SASARAN ] 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	%	9,67		8,58		10,47		9,67		8,58		88,73		88,73		
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	%	15,23		14,38		16,34		15,23		14,38		94,42		94,42		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	%	23,53	2.794.999.500	23,53	2.535.799.565	0		23,53	4.583.154.474	23,53	2.535.799.565	100,00	55,33	100,00	90,73	Dinas Pariwisata
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang dikembangkan	Destinasi	3	7.602.445.000	3	4.763.794.929	2	3.956.536.975	3	5.745.573.520	3	4.763.794.929	100,00	82,91	100,00	62,66	Dinas Pariwisata
[ MISI ] 3 Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan																	
[ TUJUAN ] 4 Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	Indeks	0,313		0,327		0,334		0,327		0,327		100,00		95,53		
[ SASARAN ] 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	orang	6.000.000		8.513.323		4.664.922		6.000.000		8.513.323		141,89		141,89		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	Ton	337.000.000		513.031.229		323.231.994		337.000.000		513.031.229		152,23		152,23		
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)	Kawasan	5		5		4		5		5		100,00		100,00		
	Capaian akses air minum layak (%)	%	68,53		78		70,78		68,53		78		113,82		113,82		
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	Ha	14.278,50		14.278,50		14.078,50		14.278,50		14.278,50		100,00		100,00		
	Luas kawasan kumuh (Ha)	Ha	1.187,82		1.185,14		1.190,14		1.187,82		1.185,14		100,23		100,23		
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	Ha	374		318,9		406,3		374		318,9		114,73		114,73		
	Skoring Penyelenggaraan Penataan	%	76,74		78,57		75,94		76,74		78,57		102,38		102,38		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	n Ruang (%)																
	Rasio elektrifikasi (%)	%	93		93,09		91,98		93		93,09		100,10		100,10		
[ PROGRAM ] PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	unit	70.781	43.686.076.280	70.811	38.635.518.094	71.781	38.820.826.321	70.781	44.412.284.978	70.781	36.934.252.000	100,00	83,16	100,04	88,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	meter	3.020	18.611.113.120	2.723,70	12.316.674.513	2.180,2	10.275.217.797	3.020,00	10.739.754.460	2.723,70	7.768.724.512	90,19	72,34	90,19	66,18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	%	66,64	150.384.487.100	69,28	136.777.317.877	67,48	44.446.590.391	66,64	167.235.906.513	69,67	136.777.317.877	104,55	81,79	103,96	90,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	%	7,34	2.920.731.000	7,27	2.003.793.750	6,53	1.812.325.181	7,34	2.184.377.000	7,27	2.003.793.750	99,05	91,73	99,05	68,61	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrikan	KK	1.165.000	54.200.364.300	1.197.475	41.149.510.955	1.143.533	39.092.429.018	1.165.000	44.245.192.660	1.197.475	41.149.510.955	102,79	93,00	102,79	75,92	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	87	5.005.777.515	85	3.090.171.936	83	7.319.264.313	87	3.390.803.000	85	3.090.171.936	97,70	91,13	97,70	61,73	Dinas Perhubungan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	%	76	103.392.334.896	76,95	79.199.791.645	74,07	65.828.802.915	76	104.718.557.425	76,95	79.106.639.213	101,25	75,54	101,25	76,60	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	76,15	728.072.635.446	77,52	810.674.327.488	75,2	668.550.468.742	76	1.144.276.260.054	77,52	664.721.895.183	102,00	58,09	101,80	111,35	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat



Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
																	han Rakyat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	kasus	427	18.601.404.483	195	17.201.253.416	418	15.106.518.512	427	10.634.422.056	195	13.615.817.387	154,33	128,04	154,33	92,47	Dinas Perhubungan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	indeks	0,91	8.000.000.000	0,92	7.788.192.591	0,87	6.786.010.461	0,91	9.131.874.700	0,92	7.788.193.591	101,10	85,29	101,10	97,35	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[ MISI ] 4 Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan																	
[ TUJUAN ] 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		76,05		74,46		75,06		76,05		74,46		97,91		97,91		
[ SASARAN ] 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)		28,5		70,68		41,96		28,5		70,68		248,00		248,00		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ;	Indeks	53,8	6.807.500.000	53,02	4.437.095.398	51,92	3.842.447.826	53,8	4.728.990.700	53,02	4.437.095.398	98,55	93,83	98,55	65,18	Dinas Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ;	Indeks	89,16		87,59		88,84		89,16		87,59		98,24		98,24		Dinas Lingkungan Hidup
	3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ;	Indeks	79,86		81,85		82,21		79,86		81,85		102,49		102,49		Dinas Lingkungan Hidup
	4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	Indeks	83,61		81,45		85,4		83,61		81,45		97,42		97,42		Dinas Lingkungan Hidup
[ SASARAN ] 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana		151,49		146,67		154,02		151,49		146,67		96,82		96,82		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	%	82,67	3.156.119.870	82,67	3.843.054.179	66,67	2.395.860.262	82,67	3.711.345.907	82,67	3.843.054.179	100,00	103,55	100,00	121,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
[ MISI ] 5 Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik																	
[ TUJUAN ] 6 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi		B (71,50)		67,7		68,47		B (69,00)		B (67,70)		98,12		94,69		
[ SASARAN ] 6.1 Terwujudnya	Indeks Kepuasan		82,5		84,41		82,57		82,5		84,41		102,32		102,32		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Masyarakat																
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,25		2,11		2,24		2,75		2,11		76,73		64,92		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamalan dan layanan informasi	indeks	80	8.637.367.937	97,84	3.825.888.344	92	4.639.215.203	85	7.362.108.000	97,84	7.203.081.824	115,11	97,84	122,30	44,29	Dinas Komunikasi dan Informatika
[ SASARAN ] 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja		77		78,1		77,67		79		78,1		98,86		101,43		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah	%	79	4.794.658.057	89,19	3.386.637.313	75,67	1.046.246.218	79	3.656.979.000	89,19	3.386.637.313	112,90	92,61	112,90	70,63	Sekretariat Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)																
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	%	95		91,89		92	865.889.630	95		91,89		96,73		96,73		Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	79		81,03		83,44	510.243.220	79		81,03		102,57		102,57		Sekretariat Daerah
[ SASARAN ] 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang	Tingkat Maturitas Sistem Pengawa		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		100,00		100,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
bersih dan akuntabel	san Intern Pemerintah (SPIP) Pemda																
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	90	13.084.203.070	86,53	9.872.851.607	90	7.093.609.671	90	11.409.744.064	90	9.872.851.607	100,00	86,53	96,14	75,46	Inspektoral

Keterangan :

Sangat Tinggi :  $\geq 90,01$ 

Tinggi : 75,01 - 90



Sedang : 65,01 - 75



Rendah : 50,01 - 65

Sangat Rendah :  $\leq 50$ 

Dari 6 tujuan dan 19 sasaran yang ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2022, terdapat 44 (empat puluh empat) indikator tujuan dan sasaran. Dari total indikator tersebut, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 17 (tujuh belas) indikator masih belum mencapai target di tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dari 54 program prioritas di Kalimantan Timur, terdapat 3 (tiga) program prioritas yang pencapaian targetnya berada di bawah 90 persen. Program tersebut antara lain: Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Program Pengelolaan Hutan.

Dari total 54 (lima puluh empat) program prioritas yang ditetapkan dalam P-RKPD tahun 2022, terdapat sebanyak 65 (enam puluh lima) indikator yang menjadi target kinerja pembangunan yang harus dicapai agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai berhasil. Dari total indikator yang telah ditentukan tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, dan sebanyak 15 (lima belas) masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2022.

## 2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Indikator Makro Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di tahun 2022, diidentifikasi masih terdapat empat permasalahan utama pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

#### 1) Indeks Pembangunan Manusia

Capaian kinerja dari IPM Kalimantan Timur telah melampaui target yang telah ditentukan, tetapi masih terdapat permasalahan karena belum tercapainya kinerja harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta usia harapan hidup.

Belum tercapainya rata-rata lama sekolah disebabkan oleh akses pendidikan wajib belajar 12 tahun belum terpenuhi secara merata. Kabupaten Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Kutai Barat

serta Paser merupakan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah dengan angka capaian di bawah 9 tahun.

Untuk harapan lama sekolah yang belum mencapai target disebabkan oleh pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama sekolah dapat segera diwujudkan. Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara merupakan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah dengan angka capaian di bawah 13 tahun.

Belum tercapainya usia harapan hidup disebabkan oleh akses dan layanan terhadap fasilitas kesehatan masyarakat belum maksimal, khususnya pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,71 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya.

## 2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Capaian kinerja dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) telah melampaui target yang telah ditentukan, tetapi masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang masih bergantung pada pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pembangunan proyek-proyek strategis nasional di fokuskan ke wilayah Kaltim. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada sumber daya alam.

## 3) Indeks Gini

Indeks Gini Kalimantan Timur pada tahun 2022 menunjukkan penurunan angka ketimpangan menjadi 0,327. Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,334. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,272. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,384 pada

tahun 2022. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan terbatasnya konektivitas dan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpencil dan terdalam. Jika aksesibilitas dan konektivitas sudah baik, maka distribusi alur barang dan jasa akan lebih lancar, perekonomian masyarakat dapat bergerak secara lebih efisien dan produktif, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kelompok berpendapatan rendah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

#### 4) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,31 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sebanyak 236,25 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 241,77 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur juga meningkat menjadi sebesar Rp 728.208 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan.

Berdasarkan kabupaten/kota tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2021 masih di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,55 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,89 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu.

Permasalahan lain berdasarkan identifikasi pilar sosial TPB/SDGs adalah belum maksimalnya penjangkauan dan pemerataan program pengentasan kemiskinan dimana program-program masih terpusat pada wilayah perkotaan dan hanya sebagian kecil berada di kabupaten/kota, terlebih di sekitar pedesaan. Situasi ini dimungkinkan faktor aksesibilitas akibat kondisi geografis yang relatif sulit dan pemenuhan fasilitas penunjang lainnya, tidak terkecuali jarak dengan pusat pemerintahan dan perekonomian.

#### 5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 5,71%, lebih baik dari capaian nasional sebesar 5,86%, namun capaian ini masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan. Permasalahan yang masih



dihadapi antara lain Rasio antara lapangan kerja dan pencari kerja masih tidak berimbang; Peserta magang yang telah menjalankan pemagangan di perusahaan menemukan minat yang berbeda dengan kejuruan yang dijalankan, sehingga sebagian dari peserta tidak optimal dalam bekerja; Kompetensi atau skill yang dimiliki peserta magang tidak sesuai dengan standar perusahaan penyelenggara pemagangan, sehingga tidak terjadi penyerapan; Kurangnya pengetahuan tentang pengurusan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) sehingga memperlambat proses pembuatan rekomendasi; Tidak sesuai penyediaan fasilitas bagi tenaga kerja yang di datangkan.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema RKPD Kalimantan Timur tahun 2024.

**Tabel II.69**  
Permasalahan Pembangunan Per Urusan

No	Urusan	Sasaran	Masalah
1	Pendidikan	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Akses pendidikan wajib belajar 12 tahun belum terpenuhi secara merata
			Desain program pendidikan belum tersinkronisasi dengan kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri dan dunia usaha
2	Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Masih minimnya kegiatan kepemudaan yang dapat mengakomodir kreatifitas, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda yang memberi dampak terhadap daya saing kepemudaan. Dalam hal daya saing keolahragaan, pola pengembangan dan pembinaan keolahragaan juga belum terfokus pada cabang olahraga unggulan atau yang berpeluang mendapatkan medali pada setiap pagelaran nasional baik multi event maupun single event

No	Urusan	Sasaran	Masalah
3	Kesehatan	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Akses dan layanan terhadap fasilitas kesehatan masyarakat belum maksimal, khususnya pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)
4	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Program-program yang berorientasi pada pengembangan daya saing dan perlindungan perempuan masih belum optimal dilaksanakan
			Komitmen Pimpinan belum optimal dalam mengimplemntasikan gender pada setiap urusan pembangunan baik provisni maupun kab/kota
			Belum terinternalisasinya proses data pilah dalam setiap sektor sehingga penentuan kebijakan tidak melakukan analisa kesenjangan
			Budaya Patriarki yang melembaga dalam kehidupan masyarakat sehingga munculnya ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki dalam peran pembangunan
5	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	-
6	Tenaga Kerja	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Rasio antara lapangan kerja dan pencari kerja masih tidak berimbang
			Peserta magang yang telah menjalankan pemagangan di perusahaan menemukan minat yang berbeda dengan kejuruan yang dijalankan, sehingga sebagian dari peserta tidak optimal dalam bekerja
			Kompetensi atau skill yang dimiliki peserta magang tidak sesuai dengan standar perusahaan penyelenggara pemagangan, sehingga tidak terjadi penyerapan
			Kurangnya pengetahuan tentang pengurusan AKAD dan AKL sehingga memperlambat proses pembuatan rekomendasi
7	Keuangan	Meningkatnya pendanaan	Tidak sesuainya penyediaan fasilitas bagi tenaga kerja yang di datangkan
			Terdapat banyak potensi pendapatan daerah yang belum masuk kedalam objek retribusi

No	Urusan	Sasaran	Masalah
		pembangunan pemerintah	baru dalam Perda Pajak dan Retribusi Daerah
			Adanya Regulasi berpotensi yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Retribusi Daerah
			Tidak dapat berjalanannya Retribusi Tempat Rekreasi Pada Kawasan Kehutanan akibat Terbitnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana UPTD KPHP Dinas Kahutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat melakukan Usaha Dikawasan Hutan
			Masih terdapat piutang PKB yang belum tertagih sebagai akibat kondisi ekonomi yang masih dinamis
			Masih terdapat Pemilik kendaraan yang berpindah tangan dan belum membalik namakan serta Banyaknya kendaraan dengan Nomor Polisi Luar daerah di Kaltim
			Pemulihan kondisi pasca pemberlakuan PPKM pada sejumlah perusahaan banyak yang tidak beroperasi bahkan tutup sehingga mempengaruhi jumlah Wajib Pajak Pusat maupun Cabang
8	Perindustria n	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Lemahnya koordinasi, sinkronisasi serta komitmen antar organisasi dalam pelaksanaan tugas yang mendukung industri
			Belum maksimalnya daya saing dan daya tarik investasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri.
			Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pelaksanaan tugas.
			Belum ditetapkan 8 (delapan) Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK)
9	Pertanian	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Hambatan dari pelaksanaan ini adalah faktor cuaca, kondisi lokasi banjir dan ketersediaan bahan material yang tidak tersedia jumlahnya
			Rendahnya pengetahuan peternak tentang kawin suntik/IB serta pemanfaatan

No	Urusan	Sasaran	Masalah
			hormon rerproduksi yang kurang optimal
			Sistem pelaporan dari peternak yang kurang aktif ke pada petugas dan petugas juga kurang aktif meminta data ke petani peternak sehingga data kelahiran tidak terdeteksi
			Merubah pola pikir petani/kelompok tani/gapoktan agar berkumpul yang lebih besar dan berbadan hukum secara resmi dengan manajemen usaha yang lebih besar dan melakukan usaha pertanian dari hulu ke hilir.
			Adanya La Nina, curah hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir, yang berdampak pada teredamnya tanaman padi dan menyebabkan kualitas gabah banyak yang hampa.
			Keterlambatan dalam mengidentifikasi CPCL (Calon Lokasi Calon Petani)
			Adanya lahan yang tumpang tindih dengan IUP dan kawasan
			Adanya alih fungsi lahan perkebunan mengakibatkan berkurangnya jumlah lahan untuk komoditi perkebunan
			Kelangkaan pupuk di lapangan
			Pencabutan pupuk subsidi untuk beberapa komoditi
			Bantuan intensifikasi tidak dapat mencakup seluruh komoditas (Kelapa, Kakao, Kelapa Sawit, Lada, Karet) dan tidak sebanding dengan luas perkebunan rakyat di Kalimantan Timur
			Adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada produksi kebun ditingkat petani (pelarangan ekspor CPO)
			Pemahaman terkait korporasi petani yang sesuai dengan Permentan No. 18 Tahun 2018 masih belum dikuasai oleh kelompok tani dan sebagian aparat pemerintah
			Kelembagaan petani belum memiliki <i>business plan</i>
			Minimnya minat patani yang mau mengolah produk perkebunan menjadi bahan jadi maupun setengah jadi terbatasnya permodalan dalam penerapan teknologi

No	Urusan	Sasaran	Masalah
			Masih ada perusahaan, PKS, dan Pekebun tidak berkenan melakukan kemitraan karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk melakukan kemitraan
10	Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Pengembangan ikan endemik lokal dan peningkatan produksi benih udang galah belum optimal
			Belum optimal pembinaan ke Hatchery yang ada di Provinsi Kalimantan Timur
			Tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu
			Mahalnya biaya penetapan SNI untuk produk olahan hasil perikanan
11	Kehutanan	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu menurun karena adanya beberapa faktor: 1. Curah hujan tinggi menyebabkan produksi terganggu. 2. Peralatan Produksi yang sudah berumur sehingga produktifitas alat rendah. 3. Harga kayu yang menurun cukup tajam (terutama pada bulan – bulan terakhir) karena lesunya permintaan pasar dunia sementara biaya operasional meningkat karena kenaikan bbm, kenaikan biaya perawatan, biaya sparespart dll
			Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan Perhutanan Sosial Masih belum Terukur
			lokasi areal perhutanan sosial relatif jauh sementara akses jalan belum memadai
			minimnya Jumlah Penyuluh Kehutanan dalam pendampingan pasca persetujuan Perhutanan Sosial
12	Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Sumber Daya Manusia yang masih terbatas
			Perubahan regulasi terhadap kewenangan Perizinan dan Non perizinan
13	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Beberapa UMKM belum mengerti akses pembiayaan
			Banyak anggota koperasi belum mengerti tentang koperasi dan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi (pemilik koperasi), Banyak Koperasi belum memiliki sertifikat

No	Urusan	Sasaran	Masalah
			kompetensi SKKNI, Manager, Simpan Pinjam.
			Masih terdapat UMKM memasarkan produk belum secara online/digital.
14	Pariwisata	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Masih adanya beberapa kab/kota yang belum memiliki nomenklatur yang membidangi urusan ekraf
			Beberapa potensi usaha dari 17 subsektor ekraf, belum maksimal kontribusinya
			Belum maksimalnya pendataan pelaku ekraf di kab/kota
			Belum maksimalnya kerjasama dan sinergitas lintas sektor antara stakeholder pariwisata (mitra kerja, kab/kota, instansi terkait, dll) karena pengembangan pariwisata merupakan terkait 4A (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Ancillary/kelembagaan)
			Kegiatan fisik terhambat karena adanya force majeure terkait kondisi alam, serta penyediaan bahan akibat eskalasi harga
15	Perhubungan	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Terdapat ketidakpatuhan terhadap aturan pemanfaatan jalan dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi beban batas yang ditetapkan (ODOL)
			Kepemilikan Lahan yang masih dimiliki oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota
16	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan infrastruktur wilayah terutama untuk peningkatan kinerja pusat pertumbuhan ekonomi baru
			Terdapat kondisi bentang alam yang luas, persoalan tenurial (kepemilikan lahan) dan koneksitas wilayah yang rendah (letak pusat-pusat produksi yang berjauhan) sehingga memerlukan biaya aksesibilitas yang tinggi
			Keterbatasan basis data spasial yang terintegrasi sebagai aspek strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kewilayahan
			Permasalahan teknis krisis sumber air di beberapa wilayah (Balikpapan, Bontang, PPU)



No	Urusan	Sasaran	Masalah
			kurangnya kapasitas fiskal daerah dalam peningkatan cakupan layanan SPAM JP dan BJP (terutama Kukar, Kutim, Kubar, Mahulu, Paser, dan PPU)
			belum optimalnya pengarusutamaan air minum sebagai sektor prioritas yang perlu ditangani di hampir seluruh Kabupaten/Kota
			Faktor geografis menyulitkan penyelenggaraan SPAM JP di beberapa Kabupaten/Kota (Kubar, Kutim, Kukar, Berau, Paser)
			Terdapat pemilik lahan yang tidak diketahui identitasnya
			Beberapa paket pekerjaan Fisik dilaksanakan pada waktu yang mendesak, dan juga saat ini pada sebagian paket pekerjaan terkendala kesulitan bahan/material seperti semen, harga bahan bakar minyak (BBM) yang naik, dan terbatasnya ponton untuk pengiriman batu/agregat
			Kinerja pelaksana kegiatan/pekerjaan (kontraktor) yang sebagian masih kurang baik, seperti kemampuan keuangan yang terbatas, peralatan yang bukan milik sendiri (sewa), kemampuan personil juga terbatas, yang berakibat pelaksanaan pekerjaan menjadi terlambat
17	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Target belum tercapai karena masih terdapat beberapa unit yang dilaksanakan lewat tahun anggaran
18	Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Masih rendahnya upaya pengembangan dan implementasi bauran energi baru dan terbarukan pada beragam bidang pembangunan
19	Lingkungan Hidup	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Kurang terjaganya kualitas air, air laut, udara dan tutupan lahan
			Tingginya potensi peningkatan emisi sebagai akibat

No	Urusan	Sasaran	Masalah
			pemanfaatan ruang sektor berbasis lahan
			Rasio yang tidak berimbang antara ketersediaan SDM pengawas lingkungan hidup, dukungan sarana dan prasarana kerja, serta anggaran terhadap izin usaha yang diawasi
			Belum ditetapkannya berbagai kebijakan dan/atau dokumen sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, seperti belum tersedianya dokumen RPPLH, belum ditetapkannya lokasi TPA/TPS regional, belum ditetapkannya lokasi rencana pembangunan incinerator, belum ditetapkannya peraturan kepala daerah sebagai dasar pengukuran merkuri, dan lain sebagainya
20	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	<p>Rendahnya Respon dan pemahaman Masyarakat terhadap pembentukan kelembagaan yang ada di desa atau kelurahan, hal tersebut disebabkan karena Masyarakat merasa bahwa selama ini kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah hanya sebatas pengukuhan kepengurusan saja</p> <p>Ketersediaan anggaran pembentukan Destana terealisasi baru masuk dalam 3 tahapan dari 13 Tahap yg dipersyaratkan (Sosialisasi, Pembentukan Forum Relawan, Pembentukan Forum Destana dan Pengumpulan Data kebencanaan Desa), sehingga Destana yang dibentuk belum bisa masuk dalam katagori Desa yang mampu secara kesiapan diri dan mental tangguh apabila nantinya menghadapi sebuah bencana</p>
21	Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Masih rendahnya implementasi SPBE dalam pengelolaan pemerintahan
22	Sekretariat Daerah	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pada beberapa Perangkat Daerah



No	Urusan	Sasaran	Masalah
23	Pengawasan	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat karena Keterbatasan jumlah dan komitmen SDM aparatur penyelenggara, hingga sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program

RANCANGAN AWAL

## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan yang direncanakan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja makro ekonomi yang direncanakan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting dan berpengaruh serta harus dilakukan pencermatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Analisis kerangka pendanaan memberikan analisis terkait perkiraan besaran pendapatan dari berbagai sumber pendapatan pada sektor-sektor potensial, perkiraan belanja daerah yang akan dilakukan pemerintah, dan pembiayaan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

#### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada masa pemulihan perekonomian daerah pasca pandemi COVID-19, kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2022 masih memiliki tren perbaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 yang mencapai 2,55 persen yang merupakan pertumbuhan positif kali pertama semenjak pandemi berlangsung. Capaian ini sebagai salah satu dampak *base effect* mulai membaiknya perekonomian di tengah kasus COVID-19 yang terjadi, mengingat pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kinerja sektor-sektor di dalam negeri, serta melemahkan permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 tumbuh signifikan mencapai 4,48 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, hampir seluruh provinsi di Kalimantan melanjutkan tren perbaikan kinerja perekonomian meski melambat. Berdasarkan pangsaanya, Kalimantan Timur masih menjadi provinsi dengan ekonomi terbesar di Kalimantan dengan pangsa mencapai 52,14 persen terhadap total perekonomian Kalimantan. Selaras dengan hal tersebut, Perbaikan perekonomian nasional juga mengalami tren perbaikan seperti perekonomian Kalimantan Timur dan Kalimantan. Laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 mencapai 5,31 persen, setelah pada tahun sebelumnya tumbuh 3,69 persen.

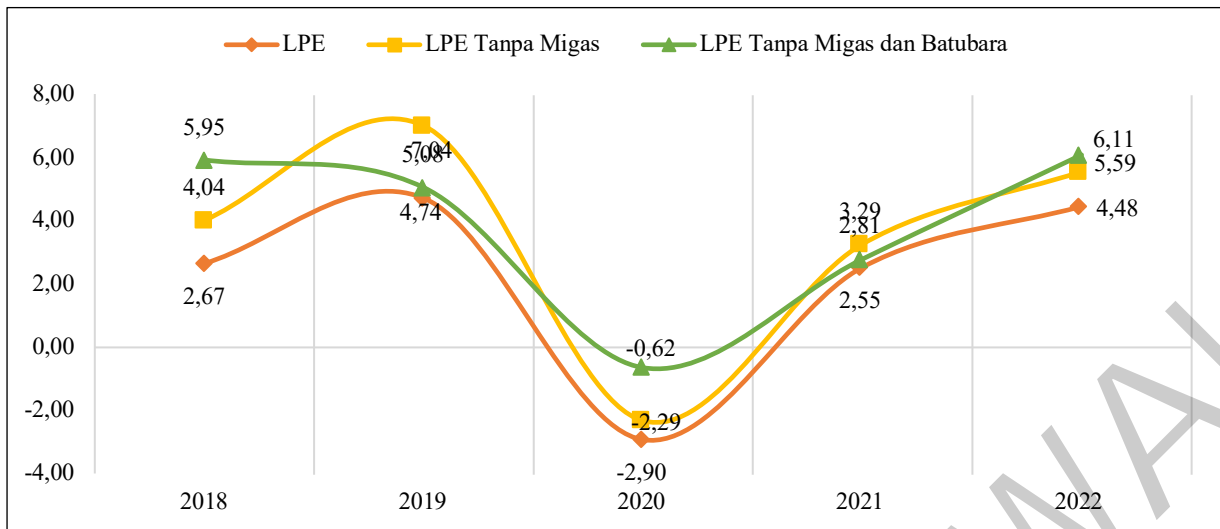
### 3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2024

#### A. Kinerja Ekonomi Daerah

##### 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami perbaikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 setelah terkontraksi pada tahun 2016. Namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi paling dalam hingga 2,85 persen (*y-o-y*) yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja beberapa lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia. Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 seiring dengan keberhasilan program vaksinasi di seluruh wilayah yang mendorong pulihnya aktifitas perekonomian masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat mencapai 2,55 persen (*y-o-y*). Seiring dengan pulihnya perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2022, Laju

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur tumbuh 4,48 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.



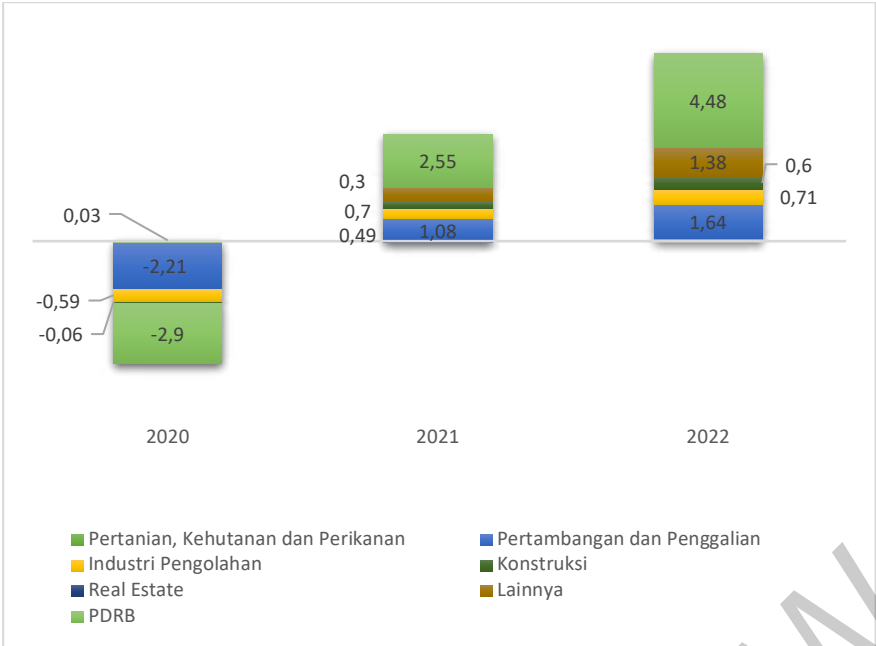
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Gambar III.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%) (y-o-y)

Jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,59 persen, meningkat lebih baik dibandingkan Tahun 2021. Adapun kinerja perekonomian tanpa migas dan batubara juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 6,11 persen di Tahun 2022.

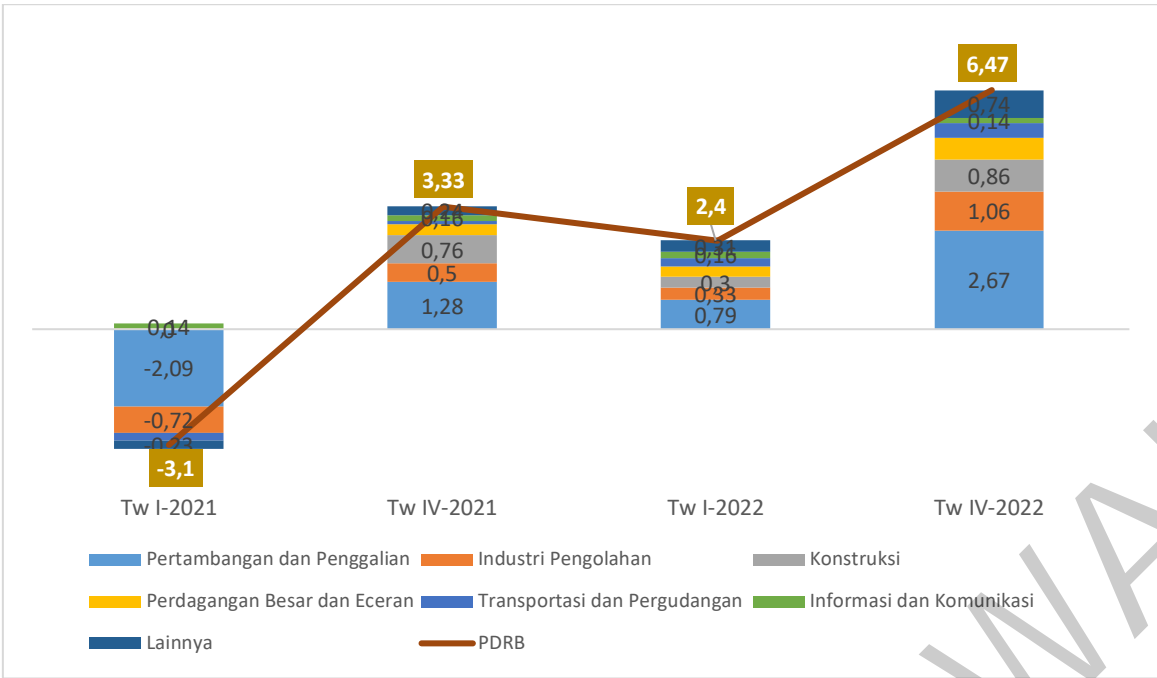
Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja yang positif di seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,96 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 9,46 persen, dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 9,16 persen. Selain itu, kinerja lapangan usaha utama Kalimantan Timur, yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan pada periode ini juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,49 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Gambar III.2  
 Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha  
 Tahun 2020-2022 (persen)

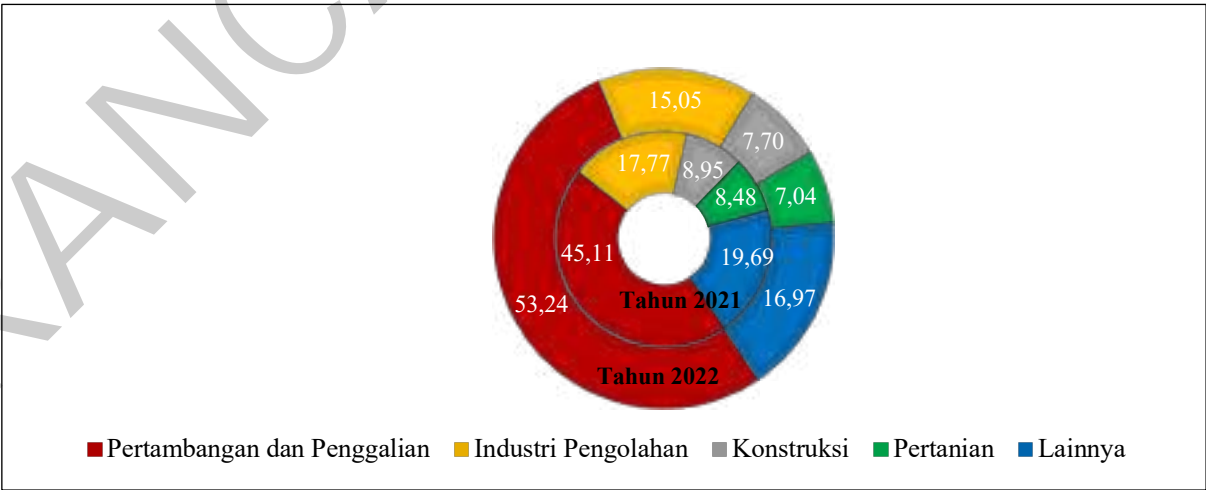
Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha yang memberikan andil positif terbesar, yaitu sebesar 1,64 persen. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan andil positif sebesar 0,71 persen, lapangan usaha Konstruksi dengan andil positif sebesar 0,60 persen, dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil positif sebesar 0,40 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Gambar III.3  
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (*y-on-y*) (Persen)

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 53,24 persen dan industri pengolahan sebesar 15,05 persen. Kemudian disusul sektor konstruksi yang kontribusinya meningkat menjadi sebesar 7,70 persen. Sedangkan kontribusi sektor pertanian yang diharapkan mampu menjadi salah satu sektor yang berkembang di Kalimantan Timur, hanya memberikan kontribusi sebesar 7,04 persen, namun kontribusinya menurun dibandingkan Tahun 2021 sebesar 8,48 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

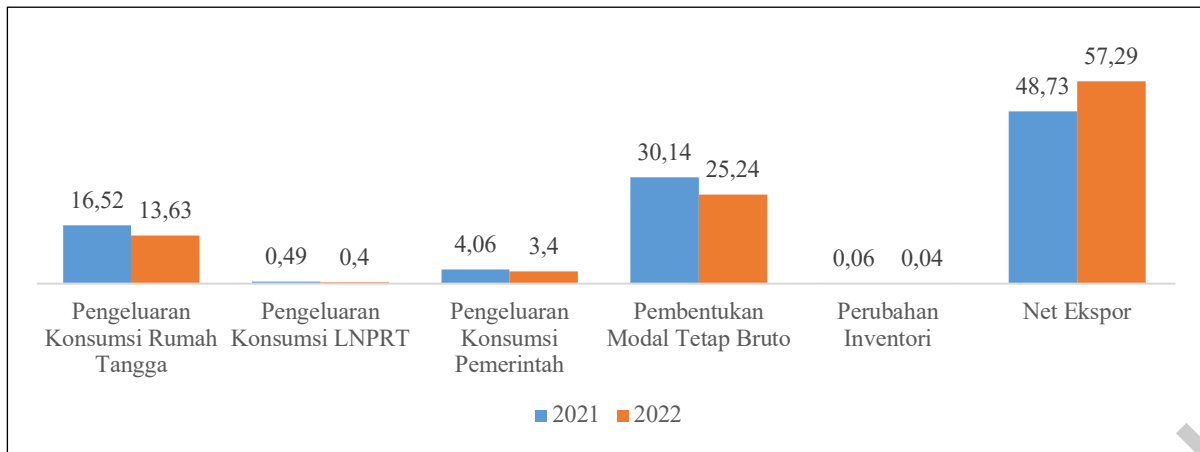
Gambar III.4  
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022 (%)

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat dinamika struktur perekonomian Kalimantan Timur yang mengalami pemulihan. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada Tahun 2022 mengalami peningkatan diakibatkan oleh tren peningkatan harga minyak dunia dan batubara, serta meningkatnya permintaan hasil pertambangan dari negara tujuan ekspor Kalimantan Timur. Selain itu pula, perbaikan ini diakibatkan oleh peningkatan kinerja *lifting* migas di Kaltim yang bersumber baik dari produksi sumur-sumur eksisiting, hasil produksi sumur-sumur baru dan hasil *artificial lift*.

Lapangan usaha industri pengolahan juga memiliki peran yang cukup besar terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Timur dengan kontribusi pada Tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021 dengan capaian 15,05 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kinerja CPO merupakan dampak dari hasil panen yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya akibat efek cuaca buruk pada tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih relatif sama dengan dominasi sektor unggulan yang sama dengan tahun sebelumnya. Terdapat empat lapangan usaha utama yang mendominasi yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 53,24 persen, Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 15,05 persen, Konstruksi dengan peranan sebesar 7,70 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 7,04 persen.

Distribusi PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Tahun 2022 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor dengan peranan sebesar 57,29 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 25,24 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 13,63 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,40 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga sebesar 0,4 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, meningkatnya aktivitas perdagangan Kalimantan Timur menyebabkan meningkatnya porsi terhadap pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran. Meningkatnya permintaan negara tujuan terhadap migas dan batubara mengakibatkan perubahan pada struktur perekonomian Kalimantan Timur.



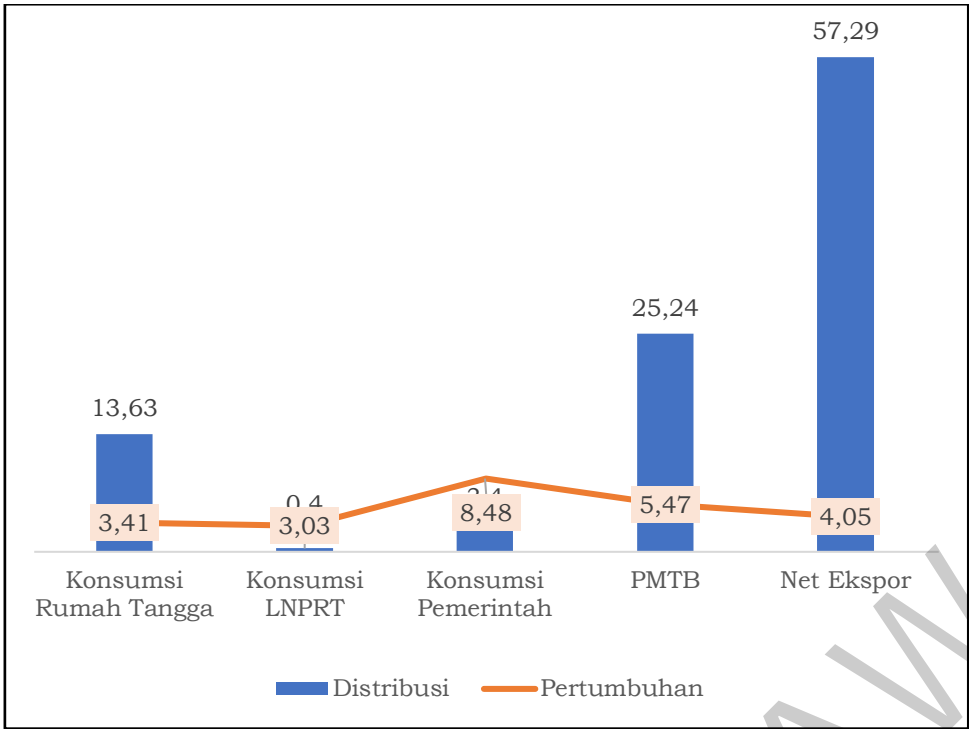
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Gambar III.5  
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2021 dan 2022 (%)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2022 tumbuh positif mencapai 4,48 persen. Seluruh komponen PDRB menurut Pengeluaran mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mencapai 8,48 persen yang disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan pemerintah. Diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 5,47 persen, komponen ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,67 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,41 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 108,00 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 25,24 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 13,63 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,40 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga sebesar 0,40 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut Pengeluaran memiliki peran sebesar 50,71 persen, sehingga Net Ekspor memberikan kontribusi sebesar 57,29 persen terhadap total ekonomi Kalimantan Timur.



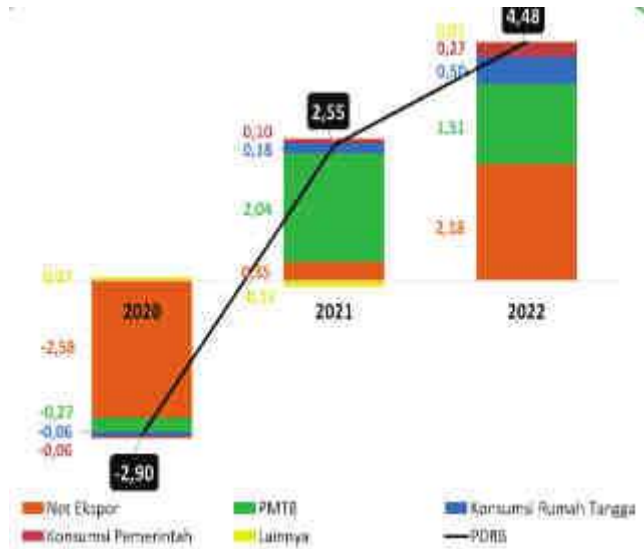


Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Gambar III.6  
Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (%)

Perkembangan PDRB Pengeluaran pada tahun 2022 (*y-o-y*), komponen konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi dengan capaian 8,48 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada Komponen PMTB sebesar 5,47 persen dan komponen konsumsi LNPRT tumbuh paling rendah sebesar 3,03 persen.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 secara (*y-on-y*), maka sumbangan terbesar adalah berasal dari Komponen Net Ekspor, yaitu sebesar 2,18 persen. Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi selanjutnya disumbang dari Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,51 persen, dan Komponen lainnya yang memberikan andil positif sebesar 0,79 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

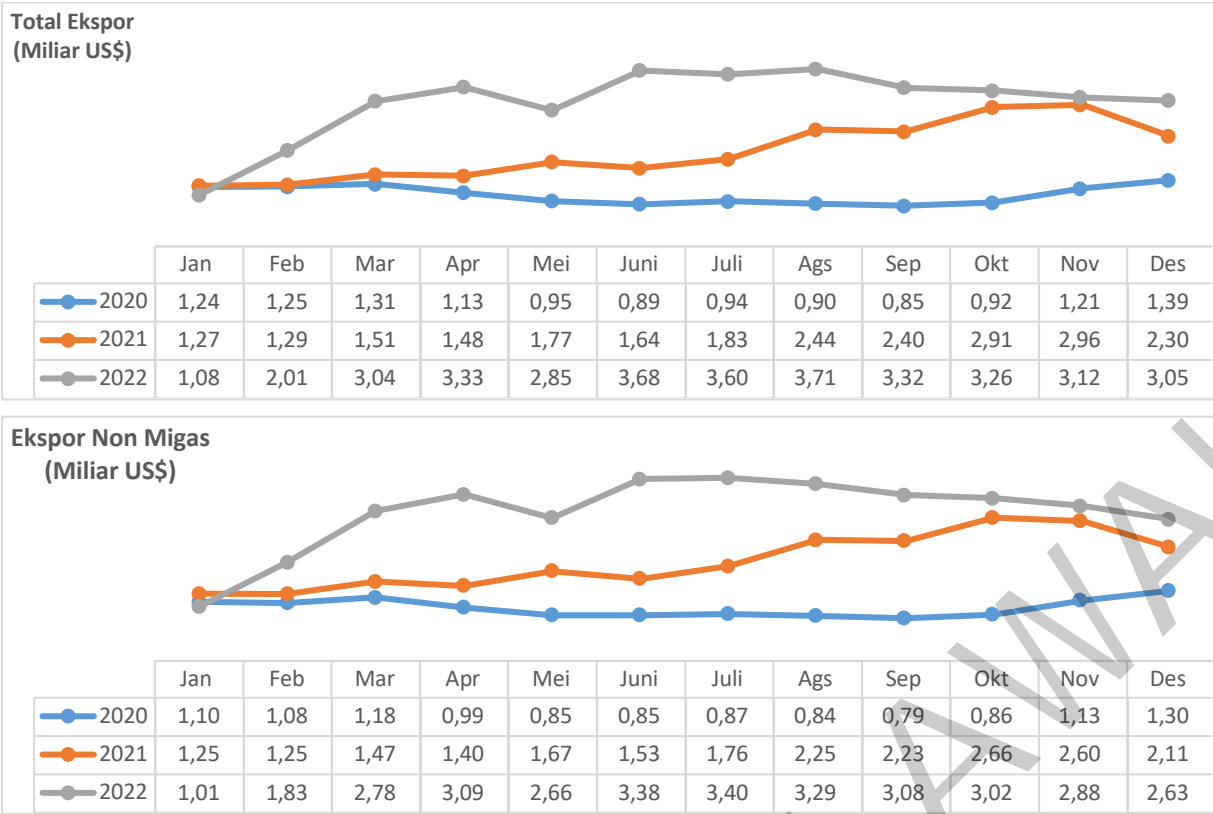
Gambar III.7

Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (y-o-y) (%)

2) Ekspor dan Impor

Nilai Ekspor Kalimantan Timur pada Desember 2022 mencapai US\$ 3,05 miliar mengalami penurunan sebesar 2,09 persen dibanding November 2022 yang mencapai US\$ 3,12 miliar. Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai US\$ 36,05 miliar dan capaian ini lebih tinggi dari capaian ekspor pada tahun 2021 yang mencapai US\$ 5,55 miliar. Penurunan nilai ekspor Desember 2022 disebabkan oleh turunnya ekspor nonmigas sebesar 8,81 persen, sementara ekspor migas naik 79,67 persen. Peranan ekspor nonmigas yang mencapai 86,08 persen mempengaruhi turunnya ekspor secara total. Ekspor non migas Desember 2022 tercatat sebesar US\$ 2,63 miliar, turun dari ekspor migas November 2022 yang tercatat US\$ 2,88 miliar. Sedangkan ekspor migas Desember sebesar US\$ 0,43 miliar, naik dari ekspor migas November yang tercatat US\$ 0,24 miliar.

Nilai ekspor 10 (sepuluh) golongan barang utama pada Desember 2022 jika dibandingkan November 2022 mengalami penurunan sebesar 8,51 persen. Jika dirinci, penurunan terbesar terjadi pada golongan barang pupuk yang menurun sebesar 81,87 persen, disusul golongan bahan kimia anorganik yang menurun sebesar 42,84 persen dan golongan barang yang memiliki peran paling besar yakni bahan bakar mineral nonmigas menurun sebesar 9,75 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Gambar III.8

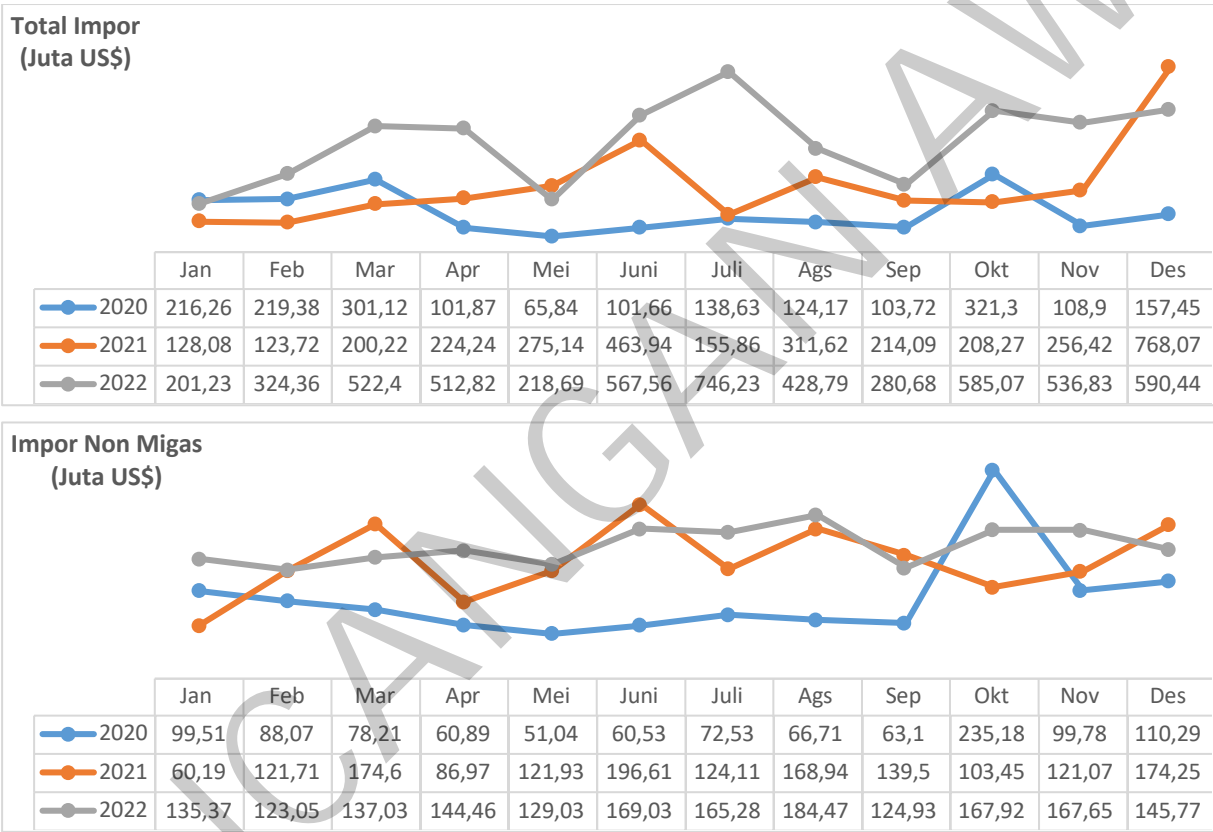
Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022

Total nilai ekspor nonmigas ke 13 negara tujuan utama pada Desember 2022 mencapai US\$2.397,27 juta mengalami penurunan US\$284,59 juta (10,61 persen) dibandingkan November 2022. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya nilai ekspor ke beberapa negara utama seperti ekspor ke negara Tiongkok yang turun US\$ 162,13 juta (16,40 persen), kemudian negara Taiwan yang turun US\$133,47 juta. Di kawasan Eropa nilai ekspor Kalimantan Timur naik US\$32,17 juta (66,79 persen), sedangkan di kawasan Asean naik US\$18,99 juta (3,44 persen). Ekspor Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan nilai cukup signifikan terjadi pada ekspor ke negara Thailand yang naik sebesar US\$59,26 juta (156,77 persen).

Impor Kalimantan Timur pada Desember 2022 mencapai US\$ 590,44 juta dan mengalami peningkatan 9,99 persen dibanding November 2022 serta bila dibanding Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 23,13 persen. Nilai impor barang migas tercatat mencapai US\$ 444,66 juta atau naik 20,45 persen dibanding November 2022. Sementara untuk komoditi barang non migas tercatat mencapai US\$ 145,77 juta atau turun 13,05 persen dibanding November 2022.

Secara kumulatif nilai impor Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai US\$ 5,42 miliar, naik sebesar 62,72 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Peran impor barang migas mencapai 67,75 persen sedangkan peranan impor barang non migas mencapai 32,25 persen.

Jika dibanding dengan November 2022, penurunan nilai impor terbesar pada Desember 2022 terjadi pada golongan barang bahan bakar mineral non migas yang turun 99,99 persen, yaitu dari US\$ 0,33 juta, menjadi US\$ 0,00 juta, kemudian disusul oleh golongan pupuk yang turun 56,77 persen yaitu dari US\$ 49,01 juta menjadi US\$ 21,18 juta serta golongan karet dan barang dari karet yang mengalami penurunan 28,00 persen yaitu dari US\$ 5,62 juta menjadi US\$ 4,05 juta.

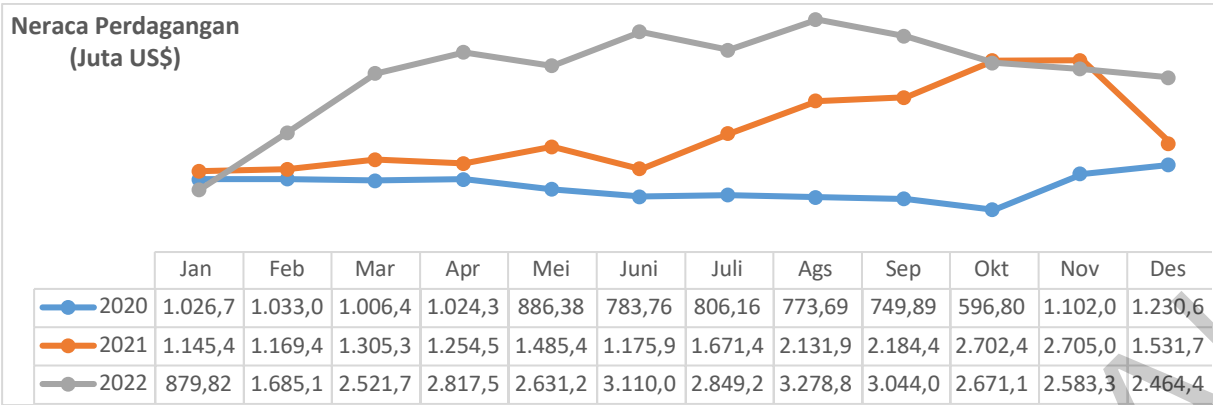


Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Gambar III.9  
Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022

Neraca perdagangan Kalimantan Timur pada Desember 2022 menunjukkan nilai yang positif (surplus) sebesar US\$ 2,46 miliar. Angka ini mengalami penurunan dibanding neraca perdagangan pada November 2022 yang surplus sebesar US\$ 2,58 miliar. Secara kumulatif tahun 2022 neraca perdagangan Kalimantan Timur tercatat surplus sebesar US\$ 30,63 miliar, atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan neraca perdagangan

pada periode yang sama di tahun 2021 yang surplus sebesar US\$ 20,47 miliar.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Gambar III.10  
Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022

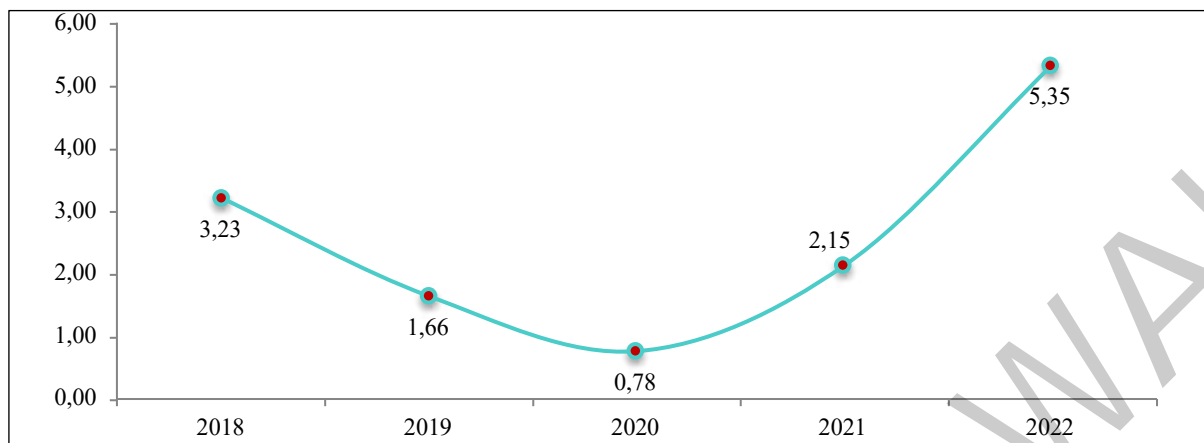
3) Inflasi

Inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat, namun tetap berada di sekitar rentang sasaran inflasi nasional. Proses pemulihan ekonomi Kalimantan Timur yang mendorong berangsurnya peningkatan permintaan dan risiko terganggunya distribusi/pasokan menjadi faktor utama yang akan menyebabkan peningkatan tekanan inflasi.

Selain dari sisi peningkatan permintaan, risiko peningkatan inflasi juga bersumber dari keterbatasan pasokan dari daerah sentra produsen yang utamanya disebabkan oleh gangguan cuaca akibat adanya fenomena La Nina. Tekanan inflasi juga berasal dari sektor pangan berasal dari *pricing behavior* pasca COVID-19 sehingga mendorong produsen meningkatkan harga sebagai kompensasi kerugian di tahun 2020. Sementara itu, tekanan inflasi juga berasal dari sektor transportasi yang disebabkan oleh lebih mudahnya persyaratan masyarakat untuk melakukan perjalanan dan juga diiringi fasilitas kesehatan yang lebih memadai serta terjangkau. Lebih lanjut, kenaikan inflasi juga didorong oleh penyesuaian harga sejumlah komoditas yang terpengaruh kebijakan tarif/fiskal pemerintah seperti kenaikan cukai rokok, kenaikan tarif iuran BPJS kelas III, dan tarif bea materai.

Jika melihat dari tingkat inflasi kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran yang memiliki tingkat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 13,26 persen, diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,56 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya

sebesar 5,62 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,29 persen, kelompok perumahan sebesar 3,87 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Gambar III.11  
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)

#### 4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kalimantan Timur tahun 2022 sebesar 5,71 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 1,12 persen poin dibandingkan tahun 2021.

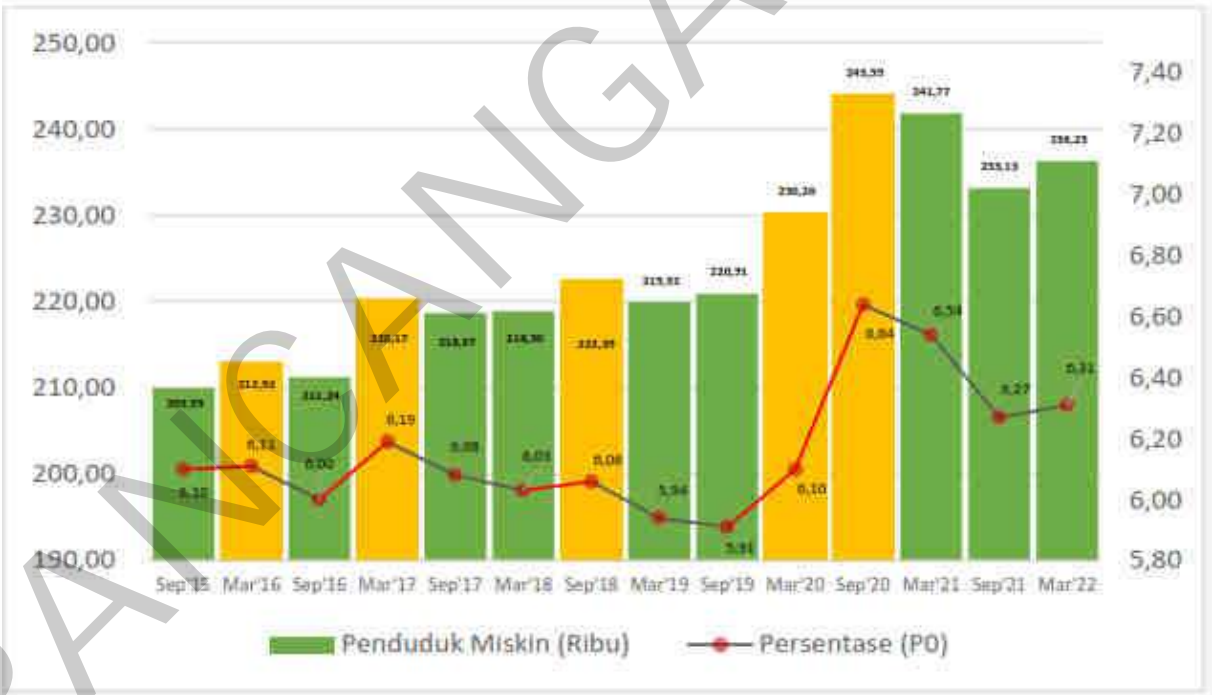
Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki pada tahun 2022 sebesar 5,12 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,90 persen. TPT menurut jenis kelamin memiliki pola yang berkebalikan antara perempuan dan laki-laki, yaitu TPT laki-laki mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dan perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. TPT laki-laki turun 2,10 poin persen, sedangkan TPT Perempuan cenderung naik sebesar 0,77 poin persen.

Jika berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan mencapai 6,72 persen atau lebih tinggi dibanding TPT di daerah perdesaan yang mencapai 3,61 persen. Dibandingkan tahun 2021, TPT perkotaan turun sebesar 0,88 persen dan perdesaan turun sebesar 1,68 persen.

Dampak pandemic COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah mengalami penurunan yang berarti perkembangan aktifitas usaha yang melibatkan tenaga kerja telah berangsur-angsur pulih. Hal ini tampak dari perkembangan jumlah pengangguran karena COVID-19 pada tahun 2022 yang turun sebesar 21.439 orang atau 79,17 persen dibanding tahun 2021. Begitu juga halnya dengan penduduk yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 juga mengalami penurunan.

5) Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada periode Maret 2022 mengalami perbaikan baik dari sisi jumlah maupun presentase. Hal ini menggambarkan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pasca pandemi Covid-19 pertama kali melanda Indonesia dan secara khusus Kalimantan Timur.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Gambar III.12  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur September 2015-Maret 2022

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 236,25 ribu orang. Dibandingkan 2021, jumlah penduduk miskin turun 5,52 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 6,31 persen, turun 0,23 persen poin terhadap Maret.

#### 6) Investasi

Nilai investasi Kalimantan Timur sampai dengan triwulan III Tahun 2022 telah mencapai Rp 41,20 Triliun dengan realisasi PMDN sebesar Rp.28,76 triliun dan realisasi PMA sebesar Rp 12,44 triliun. Realisasi Investasi PMDN paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 9,35 triliun atau 32,51 persen, dan Kabupaten Kutai Timur dengan realisasi sebesar Rp 8,43 triliun. Sedangkan investasi PMA paling besar berada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu mencacapi US\$ 430,54 juta dan Kabupaten Kutai Barat mencapai US\$ 118,61 juta. Adapun sektor usaha yang mampu menarik investasi PMDN tertinggi adalah Pertambangan, Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi serta Industri Makanan. Sedangkan Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Pertambangan memiliki realisasi investasi terbesar yaitu US\$ 449,19 juta atau sebesar 51,80 persen dan Industri Mineral Non Logam yaitu sebesar US\$ 100,18 juta atau sebesar 11,55 persen.

### B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

#### 1) Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- a) Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur yang berpengaruh terhadap permintaan komoditi ekspor;
- b) Isu geopolitik dunia yakni perang dagang Australia- Republik Rakyat Tiongkok, serta Konflik Rusia – Ukraina yang berdampak pada perekonomian global;



- c) Potensi terjadinya krisis ekonomi global akibat gangguan rantai pasok, kerawanan pangan dan tantangan kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan memicu stagflasi perekonomian dunia;
- d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan;
- e) Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara);
- f) Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;
- g) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang melambat akibat masih dalam situasi pemulihan pandemi COVID-19 yang menurunkan tingkat konsumsi masyarakat;

## 2) Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2023 dan 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a) Momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi, terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara;
- b) Tumbuhnya minat investasi di sektor hilirisasi produk turunan batubara dan komoditas kelapa sawit bernilai tambah tinggi seperti biodiesel dan minyak goreng;
- c) Realisasi tambahan perolehan pendapatan daerah melalui sumber pendanaan alternatif dari Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (FCPF-CF) serta potensi sumber pendanaan dari Dana Bagi Hasil Sawit;
- d) Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan/*Refinery Development Master Plan Refinery Unit V (RDMP RU V Pertamina)* dan beberapa proyek swasta lain;
- e) Peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Negara Asia lainnya;

- f) Meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi seiring dengan berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, pengerjaan proyek strategis *multiyears existing* (RDMP RU V, Bendungan Sepaku – Semoi, Pabrik Amonium Nitrat, Pabrik Coal-Methanol) dan realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi;
- g) Optimalisasi Kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40 memberi peluang bagi peningkatan daya serap produk CPO di pasar domestik;
- h) Optimalisasi sumur-sumur migas baru serta optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- i) Perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

#### C. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada tahun 2024

Berdasarkan arahan presiden yang dituangkan pada RPJMN tahun 2020-2024 pembangunan nasional diarahkan berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi. Selain itu pula telah ditetapkan 7 agenda pembangunan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah dengan tujuan akhir yakni peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter;

- 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan;
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional;
- 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Adapun target pembangunan provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 yang ditargetkan pada RPJMN adalah dapat dilihat dalam Tabel III.1 sebagai berikut.

Tabel III.1  
Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Uraian		Tahun 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
4	Indeks Gini	0,374-0,377
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02
6	Nilai Tukar Petani	105-108

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2022

Untuk arah kebijakan pembangunan pembangunan yang berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan timur antara lain mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, memantapkan peran Kalimantan Timur sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Arah kebijakan nasional ini diharapkan mampu meningkatkan pencapaian target makro ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2024.

Strategi untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2024, pemerintah telah merumuskan strategi pertumbuhan yang dituangkan dalam dokumen RKP tahun 2024 yakni pembangunan IKN dan infrastruktur pendukungnya, meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan

kawasan-kawasan strategis, pengembangan sentra produksi pangan (food estate). Selain itu, strategi pemerataan yang direncanakan adalah memperkuat konektifitas wilayah, mengembangkan ekonomi pada kawasan perbatasan, memperluas cakupan SPM dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada daerah 3T.

Melalui arah kebijakan, strategi pertumbuhan dan pemerataan yang direncanakan oleh pemerintah pusat, target pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2024 yang tercantum pada RKPD dapat dilihat dalam Tabel III.2 sebagai berikut.

Tabel III.2  
Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Uraian		Tahun 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,7 - 5,4
3	Tingkat Kemiskinan (%)	3,5 - 4,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023

3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 mengalami perbaikan dan tumbuh positif, dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,48 persen. Perbaikan ini disebabkan oleh tingginya produksi lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mendominasi PDRB Kalimantan Timur seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap batu bara. Selain itu dampak bangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19 juga berakibat pada meningkatnya aktivitas perekonomian lainnya.

Peningkatan daya saing daerah perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyediaan kompetensi angkatan kerja yang dapat memenuhi standar pasar kerja industri di Kalimantan Timur. Selain itu, pengendalian investasi di Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung penunjang Ibu Kota Negara Baru terlebih setelah ditetapkan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru.

A. Sasaran Ekonomi Makro

Pada Tahun 2024, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3  
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian		Target 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,00 - 5,00
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	255,00
3	Inflasi (persen)	3,00 - 4,00

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

Pada Tahun 2024, merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2022 yang diharapkan masih terus berlanjut. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tersebut, diharapkan pada tahun 2024 terus mengalami perbaikan sehingga target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 3,5±1 persen dan untuk tahun 2024 juga diharapkan mampu tumbuh positif pada 4 - 5 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diasumsikan dengan masih terjaganya harga komoditas batubara dan kelapa sawit, berjalannya proyek strategis seperti Refinery Development Master Project (RDMP) RU V Balikpapan, pembangunan proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara beserta dampak ikutannya, dan berbagai proyek lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

B. Arah Kebijakan Ekonomi

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :

1. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 4,10 – 4,90 Persen, yakni melalui :
  - a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan mendorong operasionalisasi pabrik-pabrik pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;
  - b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas) melalui intensifikasi di sektor pangan dan ekstensifikasi di sektor perkebunan (optimalisasi pemanfaatan kawasan perkebunan);
  - c) Mendorong peningkatan sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, serta sektor akomodasi makan dan minum dengan menangkap peluang bangkitan ekonomi terhadap pembangunan IKN;
2. Mendorong Inklusifitas Ekonomi dengan meningkatkan *trickle down effect* pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui upaya peningkatan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
3. Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah, melalui :
  1. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah
  2. Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga
  3. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang signifikan dapat memicu pertumbuhan sektor lainnya
  4. Mendorong peran komoditas hasil olahan industri untuk peningkatan ekspor perdagangan antar wilayah

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1 Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2024 pada Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan asumsi/pendekatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yakni sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi dan perkembangan pendapatan pada tiga tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;

- 2) Dana transfer berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU, DAK dan DID diasumsikan sama dengan Tahun 2022 sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025. Selain itu terdapat penambahan sumber pendapatan bagi hasil yakni dana Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF);
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2024. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 2) Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 3) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Melakukan kajian secara *holistic* untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
- 5) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
- 6) Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7) Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
- 8) Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 9) Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;

- 10) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11) Melakukan *cleansing* data base kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 12) Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
- 13) Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan proyeksi tahun 2023 secara umum dapat dilihat pada tabel III.3. Pada kurun waktu dari tahun 2019 hingga 2022 tren realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 38,03 persen. Peningkatan tren realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan daerah yang signifikan pada tahun 2022 akibat meningkatnya pendapatan pada seluruh komponen pendapatan. Namun proyeksi pendapatan tahun 2023 diperhitungkan akan mengalami penurunan dengan sebesar 11,07 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, target pendapatan daerah tahun 2023 dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,86 persen, pendapatan transfer sebesar 14,71 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 19,18 persen.



Tabel III.4  
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (unaudited) (Rp)	Penetapan Tahun 2023* (Rp)
4	Pendapatan Daerah	11.775.086.836.200	9.987.385.879.199	10.220.142.967.274	16.442.341.253.591	14.621.856.687.106
4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.555.853.195.408	5.143.521.676.422	6.111.918.272.284	8.731.281.736.065	8.045.500.965.106
4.1.01	Pajak Daerah	4.984.520.517.159	3.900.431.414.629	4.774.890.855.289	7.623.604.003.377	7.010.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	26.492.587.130	10.123.187.099	13.590.719.061	19.866.174.340	20.052.388.240
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	392.379.951.610	110.988.636.348	214.599.338.882	310.262.666.522	232.740.891.298
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.152.460.139.510	1.121.978.438.346	1.108.837.359.053	777.548.891.826	782.707.685.568
4.2	Pendapatan Transfer	5.186.147.690.792	4.831.865.557.777	4.094.319.639.990	7.693.912.437.526	6.562.497.042.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.186.147.690.792	4.831.865.557.777	4.094.319.639.990	7.693.912.437.526	6.562.497.042.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.176.264.298.792	4.759.526.731.777	4.056.865.328.990		6.562.497.042.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	3.207.168.795.642	3.544.638.973.637	2.591.967.832.399		5.021.968.600.000
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	815.693.641.000	831.404.756.000	828.050.174.361		857.929.020.000
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	221.093.462.036	212.147.502.140	247.450.542.385		190.152.584.000
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	932.308.400.114	171.335.500.000	389.396.779.845		492.456.838.000

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (unaudited) (Rp)	Penetapan Tahun 2023* (Rp)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	9.883.392.000	72.338.826.000	37.454.311.000		0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	33.085.950.000	11.998.645.000	13.905.055.000	17.147.080.000	13.858.680.000
4.03.01	Hibah	33.085.950.000	11.998.645.000	13.905.055.000	17.147.080.000	13.858.680.000

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2022

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 2023

Tabel III.5  
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023 (persen)

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Penetapan Tahun 2023*
4	Pendapatan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	55,68%	51,50%	59,80%	53,10%	55,02%
4.1.01	Pajak Daerah	76,03%	75,83%	78,12%	87,31%	87,13%
4.1.02	Retribusi Daerah	0,40%	0,20%	0,22%	0,23%	0,25%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	5,99%	2,16%	3,51%	3,55%	2,89%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17,58%	21,81%	18,14%	8,91%	9,73%
4.2	Pendapatan Transfer	44,04%	48,38%	40,06%	46,79%	44,88%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	99,81%	98,50%	99,09%		100,00%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	61,84%	73,36%	63,89%		76,53%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	15,73%	17,21%	20,41%		13,07%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4,26%	4,39%	6,10%		2,90%

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Penetapan Tahun 2023*
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	17,98%	3,55%	9,60%		7,50%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,19%	1,50%	0,91%		0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,28%	0,12%	0,12%	0,10%	0,09%
4.03.01	Hibah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2022

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 2023

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar 25,72 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,14 persen dan penurunan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat signifikan sebesar 35,03 persen. Secara proporsi pada Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah sebesar 60,33 persen.

Tabel III.6  
Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2023	
		Rp	%
4	Pendapatan Daerah	10.861.802.998.578	100,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.585.710.931.582	60,63%
4.1.01	Pajak Daerah	5.444.145.000.000	82,67%
4.1.02	Retribusi Daerah	20.961.945.240	0,32%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	347.177.986.342	5,27%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	773.426.000.000	11,74%
4.2	Pendapatan Transfer	4.263.493.266.996	39,25%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.263.493.266.996	100,00%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.245.684.173.996	99,58%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	2.684.144.500.996	63,22%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	828.907.266.000	19,52%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	255.545.404.000	6,02%
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	477.087.003.000	11,24%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17.809.093.000	0,42%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.598.800.000	0,12%
4.03.01	Hibah	12.598.800.000	100,00%

Sumber: BAPENDA, BPKAD Provinsi KALTIM, 2022

3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel III.7  
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2024

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2024 (Rp)
A	BELANJA OPERASI	12.911.365.607.041
1	Belanja Gaji, Tunjangan dan TTP	2.313.258.515.186
2	Belanja Penerimaan KDH-DPRD	61.573.184.810
3	Belanja Non PNS	455.924.528.744
4	Insentif pemungut Pajak	143.145.000.000
5	Belanja Operasional Kantor	143.958.144.430
6	Dana Alokasi Khusus (DAK)	671.299.147.224
7	Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)	150.000.000.000
8	Dana Insentif Daerah (DID)	
9	Belanja pajak rokok (Dinkes)	80.000.000.000
10	BLUD	822.000.000.000
11	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik (Kesbangpol)	8.123.695.000
12	Bantuan keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	1.300.000.000.000
13	Belanja Tidak Terduga	129.519.461.276
14	Belanja Urusan Pendidikan (diluar Belanja Mengikat)	1.229.532.952.442
15	Belanja Urusan Kesehatan (diluar Belanja Mengikat)	985.315.919.133

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2024 (Rp)
16	Belanja Inspektorat (Pengawasan) 0,3% (diluar Belanja Mengikat)	30.871.450.968
17	Belanja BPSDM (Peningkatan SDM ASN) 0,34% (diluar Belanja Mengikat)	36.443.607.828
18	Belanja Bagi Hasil	4.350.400.000.000
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	169.044.080.460
1	Pembayaran Pokok Utang	-
2	Penyertaan modal	169.044.080.460
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT		13.080.409.687.501

Sumber: *BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, 2022*

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar analisis perhitungan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai yakni belanja Gaji, Tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang diberikan kepada seluruh PNS;
- b) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pj. Gubernur, dianggap belanja mengikat karena merupakan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan (seperti belanja pegawai);
- c) Belanja Non PNS merupakan belanja gaji yang diberikan kepada pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- d) Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Kota merupakan transfer pembagian hasil penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten Kota yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018;
- e) Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayaan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telpon, internet, dan pajak kendaraan;

- f) Insentif pemungut pajak, dianggap belanja mengikat karena peruntukannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 terkait pemberian insentif bagi pemungut pajak;
- g) Dana Alokasi Khusus (DAK), dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya;
- h) DBH-DR, dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017;
- i) Belanja pajak rokok, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur (Dinkes untuk JPKN, Satpol untuk Penegakan Perda) PMK Nomor 102/PMK.07/2015;
- j) BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;
- k) Bankeu/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018;
- l) Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggap belanja mengikat karena bersifat rutin di setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang bersifat prioritas, namun bukan menjadi kewenangan provinsi;
- m) Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi
- n) komponen Belanja Pendidikan, Kesehatan, Inspektorat, dan BPSDM nilainya;
- o) Penyertaan Modal diberikan kepada BUMD yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



### 3.2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah yang terdapat pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Namun pada pelaksanaan pada APBD tahun 2021 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Namun pada realisasi belanja daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Pj. Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
  - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
  - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;

- 3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
  - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Belanja daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 cenderung fluktuatif namun dengan tren pertumbuhan yang positif sebesar 5,72 persen. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dikarenakan terjadinya pelimpahan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota dan nasional ke provinsi sebagai akibat penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian kembali meningkat pada tahun 2022.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.8  
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (unaudited) (Rp)	Penetapan Tahun 2023* (Rp)
5	BELANJA	12.900.000.000.000	10.683.921.000.001	10.723.529.422.431	12.254.119.047.139	17.031.194.223.080
5.01	BELANJA OPERASI	5.940.390.533.458	5.356.491.717.806	4.983.150.466.273	5.900.060.438.024	7.414.552.277.521
5.01.01	Belanja Pegawai	2.276.292.750.006	2.246.712.057.549	2.105.588.712.918	2.333.723.802.442	2.796.363.758.450
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.839.199.050.718	2.870.659.107.195	2.634.941.566.554	3.083.330.472.969	4.207.685.257.571
5.01.05	Belanja Hibah	815.124.182.734	223.050.003.062	228.665.386.800	432.065.962.614	395.879.061.500
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.000	16.070.550.000	13.954.800.000	50.940.200.000	14.624.200.000
5.02	BELANJA MODAL	1.825.021.228.128	1.317.417.909.377	1.514.465.189.715	1.942.103.130.958	4.097.300.945.741
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	500.000.000.000	221.409.234.933	6.688.799.413	129.340.999.818
5.04	BELANJA TRANSFER	5.109.588.238.414	3.510.011.372.818	4.004.504.531.511	4.405.266.678.744	5.390.000.000.000
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	3.087.791.772.893	1.911.308.336.000	2.455.934.232.318	3.542.721.678.744	4.192.500.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.021.796.465.521	1.598.703.036.818	1.548.570.299.193	862.545.000.000	1.197.500.000.000

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2022

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 2023

Tabel III.9  
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Penetapan Tahun 2023*
5	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.01	BELANJA OPERASI	46,05%	50,14%	46,47%	48,15%	43,54%
5.01.01	Belanja Pegawai	38,32%	41,94%	42,25%	39,55%	37,71%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	47,79%	53,59%	52,88%	52,26%	56,75%
5.01.05	Belanja Hibah	13,72%	4,16%	4,59%	7,32%	5,34%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	0,16%	0,30%	0,28%	0,86%	0,20%
5.02	BELANJA MODAL	14,15%	12,33%	14,12%	15,85%	24,06%
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,19%	4,68%	2,06%	0,05%	0,76%
5.04	BELANJA TRANSFER	39,61%	32,85%	37,34%	35,95%	31,65%
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	60,43%	54,45%	61,33%	80,42%	77,78%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	39,57%	45,55%	38,67%	19,58%	22,22%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2022

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 20223

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 sangat diperlukan terlebih dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Pada tahun 2024 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024. Berdasarkan tema pembangunan tahun 2024, arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah untuk percepatan transformasi ekonomi dan berkelanjutan. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
- 4) Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5) Perkuatan perekonomian seperti Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat ;
- 6) Pencapaian target, sasaran, dan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- 7) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan untuk belanja *mandatory* lainnya seperti belanja peningkatan SDM ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi besaran anggaran;

- 8) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun kedepan. Adapun proyeksi 2024 Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.10  
Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	Proyeksi Tahun 2024	
		Rp	%
5	BELANJA	16.555.842.110.030	100%
5.01	BELANJA OPERASI	6.799.100.539.075	41,07%
5.01.01	Belanja Pegawai	2.675.447.949.732	39,35%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3.603.652.589.343	53,00%
5.01.05	Belanja Hibah	510.000.000.000	7,50%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	0,15%
5.02	BELANJA MODAL	3.976.341.570.954	24,02%
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	130.000.000.000	0,79%
5.04	BELANJA TRANSFER	5.650.400.000.000	34,13%
5.04.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.350.400.000.000	76,99%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.300.000.000.000	23,01%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel III.11  
Penetapan Pembiayaan APBD Tahun 2023 dan Proyeksi Pembiayaan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian	Penetapan Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
A	Penerimaan Pembiayaan		
1	Penerimaan Pembiayaan	2.578.143.312.894	500.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.578.143.312.894	500.000.000.000
B	Pengeluaran Pembiayaan		
1	Penyertaan Modal	168.805.776.920	169.044.080.460
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	168.805.776.920	169.044.080.460
	Jumlah Pembiayaan Netto	2.409.337.535.974	330.955.919.540

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2022

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024 dialokasikan untuk penyertaan modal ke BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang bertujuan peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dilakukannya penyusunan perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

Dalam rangka mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah akan diupayakan dengan cara mengoptimalkan dan mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari BUMD, swasta, maupun masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan di Tahun 2024 akan diarahkan pada:

- 1) Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi bagi masyarakat secara lebih luas;
- 2) Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;
- 3) Optimalisasi dan integrasi sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk mendukung pencapaian target-target program prioritas Kalimantan Timur. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun pertama dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Secara umum, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2024 dapat di lihat seperti pada Gambar IV.1 berikut.

RPD Provinsi Kalimantan Tahun 2024 - 2026	
Fokus Utama	
I. SDM yang Berdaya Saing	II. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Ketenagakerjaan 4. Pemberdayaan Gender	1. Diversifikasi Ekonomi 2. Inklusifitas Ekonomi 3. Kemiskinan 4. Infrastruktur Wilayah
Fokus Pendukung/Kondisi Perlu	
III. Lingkungan Hidup	IV. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1. Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi GRK 3. Bauran Energi Baru Terbarukan	1. Reformasi Birokrasi 2. ASN BerAKHLAK

Gambar IV.1

Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RPD Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada rencana tahunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

“Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan”

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Target Tahun 2024
<b>Tujuan 1:</b> <b>Mewujudkan SDM Berdaya Saing</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Poin</b>	<b>78,32</b>
	<b>2</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Persen</b>	<b>5,46</b>
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,95
	2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,10
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,82
	2	Prevalensi Stunting	Poin	21,57
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	27,20
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	67,31
<b>Tujuan 2:</b> <b>Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>	<b>1</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>	<b>Persen</b>	<b>4,10-4,90</b>
	<b>2</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>	<b>Persen</b>	<b>5,78</b>
	<b>3</b>	<b>Indeks Gini</b>	<b>Poin</b>	<b>0,316</b>
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi		LPE Non Migas dan Batubara	Persen	5,5-6,5
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	0,74
	2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,11

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	7,36
<b>Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Poin</b>	<b>75,00</b>
	<b>2 Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)</b>	<b>Persen</b>	<b>31,05</b>
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan <del>Tutupan</del> Lahan	1 Indeks Kualitas Air	Poin	53,52
	2 Indeks Kualitas Air Laut	Poin	81,95
	3 Indeks Kualitas Udara	Poin	88,17
	4 Indeks Kualitas Lahan	Poin	82,35
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca <b>berbasis</b> Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	23,32
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	10,39
<b>Tujuan 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Responsif dan Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung dengan Aparatur BerAKHLAK</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Poin</b>	<b>69,00 (B)</b>
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan Aparatur yang Profesional	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,00
	2 Sistem Merit	Poin	272,00
	3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,70
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	77,86 (BB)
	2 Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,476

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

### 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Selain mempedomani dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2024. Berdasarkan hasil Konsultasi Publik RKP Tahun 2024, didapatkan informasi dari hasil evaluasi pembangunan nasional tahun 2022 bahwa permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia dan emisi gas rumah kaca.

Tabel IV.2  
Capaian Indikator Sasaran RKP Tahun 2022

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Target 2022*)	Capaian 2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,5	5,31
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0	9,57 (Sept 2022)
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,5-6,3	5,86 (Agustus 2022)
4.	Rasio Gini (nilai)	0,376-0,378	0,381 (Sept 2022)
5.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	73,41-73,46	72,91
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%)	26,87	26,87 (Estimasi)
7.	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	103-105	107,33 (Jan-Des 2022)
8.	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	104-106	106,45 (Jan-Des 2022)

\*)Target 2022 bersumber dari Perpres Nomor 115/2021 tentang Pemutakhiran RKP 2022

Adapun beberapa strategi yang telah dan kedepannya dapat terus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui strategi :
  - (1) Pemulihan daya beli dan usaha; dan
  - (2) Diversifikasi ekonomi;
2. Menekan jumlah penduduk miskin, melalui strategi :
  - (1) Penurunan beban pengeluaran; dan
  - (2) Peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan;
3. Menekan tingkat pengangguran, melalui upaya :

- (1) Penciptaan kesempatan kerja baru sebagai upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM;
  - (2) Peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi;
  - (3) Penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan; dan
  - (4) Penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja;
4. Menurunkan tingkat ketimpangan, melalui strategi :
- (1) Memperkuat afirmasi kelompok 40 persen terbawah melalui reformasi sistem perlindungan sosial yang meliputi pengembangan registrasi sosial ekonomi; peningkatan akurasi penargetan; integrasi dan penyederhanaan program; serta penyaluran secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan;
  - (2) Penguatan kelembagaan pelatihan vokasi;
  - (3) Peningkatan peran UMKM;
  - (4) Penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata;
5. Meningkatkan indeks pembangunan manusia, melalui strategi :
- (1) Bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah serta insentif kepada dunia usaha dan penganggur;
  - (2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotive dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;
  - (3) Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam Pendidikan, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;
6. Menurunkan emisi gas rumah kaca, melalui upaya :
- (1) Pelaksanaan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan serta meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK; dan

- (2) Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon yang memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi, utamanya pada sektor lahan dan energi;
7. Menjaga nilai tukar petani, melalui kebijakan :
  - (1) Jaminan ketersediaan input pertanian;
  - (2) Pembentukan korporasi petani dan nelayan;
  - (3) Kawasan sentra produksi pangan (*food estate*);
  - (4) Pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital;
  - (5) Efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan;
  - (6) Percepatan transformasi *platform e-commerce* pertanian/rantai pasok *online*;
  - (7) Pengolahan primer produksi pangan dan pertanian;
8. Meningkatkan nilai tukar nelayan, melalui kebijakan :
  - (1) Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan;
  - (2) Penguatan rantai pasok hasil perikanan;
  - (3) Pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan kampung-kampung perikanan;
  - (4) Penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan;
  - (5) Perlindungan bagi pelaku usaha perikanan, serta pendampingan dan penyuluhan.

Tema RKP tahun 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan fokus pembangunan Nasional yang dijabarkan melalui Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

- Prioritas 1: Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
- Prioritas 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Prioritas 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Prioritas 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

- Prioritas 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- Prioritas 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Prioritas 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan tema RKP 2024 telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan target sasaran nasional pada RKP tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel IV.3  
Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024

No	Sasaran	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7
4	Rasio Gini (Indeks)	0,374-0,377
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02
6	Penurunan Emisi GRK (%)	27,27
7	Nilai Tukar Petani/NTP	105-108
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN	107-110

Sumber: Rancangan Awal Sasaran RKP 2024

Selanjutnya besaran target pembangunan Kalimantan Timur pada RKP 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4  
Target RKP Tahun 2024 untuk Kalimantan Timur

No	Sasaran	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1-5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	3,5-4,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,7-5,4

Sumber: Rancangan Awal RKP 2024, 2023

Penetapan target makro Kalimantan Timur dalam RKP 2024 merupakan target dengan *range* angka yang optimis, oleh karena itu dalam pencapaian target makro tersebut perlu didorong terutama oleh adanya pengembangan komoditas unggulan pertanian dalam arti luas seperti sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta perbaikan harga komoditas minyak, gas bumi serta batubara di pasar internasional. Selain itu pula, dorongan untuk melakukan hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan pertambangan juga terus dilakukan dan ditambah lagi kaitannya dengan proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga merupakan bagian dari faktor pendorong pencapaian target pembangunan yang ditetapkan.

#### 4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara metodologis, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

Perumusan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2023, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel IV.5  
Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	<div>1. Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</div> <div>2. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</div> <div>3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan</div> <div>4. Optimalisasi Boarding School</div> <div>5. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu</div> <div>6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</div> <div>7. Peningkatan literasi dan numerasi</div> <div>8. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar</div>	<div>1. Belum terpenuhi USB untuk wilayah yang telah perhitungkan dengan banyak jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut dan ketersediaan sekolah dasar di wilayah tersebut</div> <div>2. Belum terpenuhi salah satu indikator pemenuhan standar pelayanan minimal untuk sekolah menengah yaitu pemenuhan ruang kelas untuk sekolah yang kekurangan ruang kelas baru sehingga ketimpangan antara jumla rombel dan ruang kelas dapat terpenuhi</div> <div>3. Keterbatasan SDM, yakni:<div>1) Belum semua Puskesmas memiliki tenaga profesi gizi</div><div>2) Belum semua Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas terlatih dalam Tata Laksana Gizi Buruk, Konselor ASI &amp; MP-ASI dan PMBA, dan Pemantauan Pertumbuhan Balita</div></div>	<div>1. Relatif tingginya tingkat kemiskinan</div> <div>2. Masih adanya ketimpangan pendapatan</div> <div>3. Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup</div> <div>4. Masih rendahnya reformasi birokrasi</div>	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<div>9. Percepatan perbaikan gizi masyarakat</div> <div>10. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi</div> <div>11. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta</div> <div>12. pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat</div> <div>13. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</div> <div>14. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya</div> <div>15. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</div> <div>16. Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan</div> <div>17. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan</div> <div>18. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</div> <div>19. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri</div>	<div>4. Keterbatasan sarana dan alat bantu kerja TPG Puskesmas: 1) Masih banyak dijumpai TPG Puskesmas tidak memiliki ruang kerja, meja dan kursi kerja 2) Belum semua TPG Puskesmas/Puskesmas memiliki alat bantu kerja untuk media KIE (buku panduan, food model &amp; lembar balik, konseling kit, dll)</div> <div>5. Keterbatasan obat dan logistik program perbaikan gizi: 1) Belum semua kabupaten/kota mampu memenuhi kewajibannya untuk mencukupi ketersediaan obat dan logistik gizi seperti MP-ASI, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Anak Sekolah, Fe bagi Ibu Hamil maupun bagi Remaja Putri, Vitamin A biru (100.000 IU) dan Vitamin A merah (200.000 IU), Mineral Mix, Taburia, Iodium test, dll sehingga Provinsi yang awalnya berfungsi hanya sebagai bufferstock</div>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<div>20. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja</div> <div>21. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan</div> <div>22. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja</div> <div>23. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi</div> <div>24. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan</div> <div>25. Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik</div> <div>26. Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan</div>	<div>mengalami kekurangan dalam pendistribusian obat</div> <div>6. Kematian Ibu penyebab terbesar adalah karena perdarahan, Usia ibu pada saat hamil, jarak kehamilan, penyakit yang diderita ibu pada saat kehamilan, nutrisi ibu selama hamil dan nifas.</div> <div>7. Penyebab kematian bayi terbesar disebabkan oleh bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram (BBLR) dan Asfeksia. BBLR dan Asfeksia dapat disebabkan karena nutrisi ibu hamil yang kurang baik selama kehamilan.</div> <div>8. Masih cukup tingginya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular</div> <div>9. Belum optimalnya sosialisasi dan aksi pencegahan penyakit</div> <div>10. Pola hidup masyarakat yang belum menerapkan hidup bersih dan sehat, antara lain kurang aktivitas fisik, kurang mengonsumsi buah dan sayur, sering minum alkohol, merokok,</div>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>dan buang air besar di sembarang tempat.</p> <p>11.Jumlah rumah sakit yang ada di wilayah IKN masih kurang.</p> <p>12.Masih kurangnya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diinginkan.</p> <p>13.Minat dokter spesialis yang mendaftar di RSUD dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan masih kurang</p> <p>14.Belum adanya ruang perawatan khusus ibu dan anak</p> <p>15.Realisasi TW III masih rendah karena terhambat belum terkumpulnya semua sertifikat hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan di semua bidang</p> <p>16.Anggaran yang kurang di APBD sehingga dibantu dengan dana BLUD.</p> <p>17.Adanya pandemi COVID - 19 yang berdampak pelaksanaan Bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai tidak dapat tercapai sesuai target.</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<div>18. Penilaian kinerja pegawai belum optimal</div> <div>19. Pembayaran tunai masih menggunakan perhitungan fee for service dan untuk BPJS menyesuaikan</div> <div>20. Masih adanya usulan kebutuhan yang belum diakomodir oleh karena alokasi anggaran yang tidak mencukupi</div> <div>21. Tingginya permintaan diluar perencanaan (bersifat Cito)</div> <div>22. Pelaksanaan sistem Inventory belum maksimal</div> <div>23. Kurang optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan kinerja sesuai rencana aksi dari unit /bidang/ instalasi sehingga proses kompilasi data terhambat</div> <div>24. Belum ada sistem aplikasi yang terintegrasi mulai proses pengusulan perencanaan sampai proses evaluasi realisasi capaian kinerja</div> <div>25. Sumber Pendapatan RS tahun 2022 &gt; 75 % bersumber BPJS</div>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<div>26.Tim Case mix di internal RS belum optimal karena tergantung laporan dari unit / intsalasi</div> <div>27.Regulasi tentang tarif belum update</div> <div>28.Monev KSO alat kesehatan belum optimal</div> <div>29.Kurang optimalnya penghitungan unit cost di RS</div> <div>30.Kepatuhan klinisi terhadap penggunaan obat Fornas dan Forkit masih rendah</div> <div>31.Sistem pendaftaran online yang belum semua terintegrasi</div> <div>32.Tingginya jumlah kunjungan pasien poliklinik dan rujukan pasien ke RS</div> <div>33.RS belum mengoptimalkan sistem e- Rekam Medik</div> <div>34.Kompetensi dan soft skill petugas pemberi layanan kesehatan yang kurang</div> <div>35.Keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan dan penunjangnya</div>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<div>36. Belum optimalnya kerjasama operasional alat dengan pihak ketiga</div> <div>37. Banyak alat yang rusak karena utilitas yang tinggi sebagai RS Rujukan Nasional dan kutangnya maintenance</div> <div>38. Lemahnya perencanaan yang dilakukan dari unit/ instalasi</div> <div>39. Beban anggaran untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan canggih yang tinggi</div> <div>40. Evaluasi tingkat utilisasi alat yang kurang optimal</div> <div>41. Jadwal kalibrasi alat menyesuaikan dengan jadwal dari pusat</div> <div>42. Belum adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kontrak service alat kedokteran canggih</div> <div>43. Kurangnya anggaran untuk pelatihan bagi SDM dengan target 20 jam /tahun/orang</div> <div>44. Masih ada usulan pelatihan dari instalasi dan unit yang belum terakomodir</div>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>45. Pemanfaatan tenaga terlatih yang belum optimal</p> <p>46. Supervisi DPJP/Provider layanan terhadap anak didik masih lemah</p> <p>47. Lemahnya integrasi pelayanan dan institusi pendidikan</p> <p>48. Kurang optimalnya dukungan dari institusi kesehatan terhadap penyelenggaraan pendidikan di RS</p> <p>49. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja sama belum optimal</p> <p>50. Pelaksanaan rekruitmen kerjasama perlu update sesuai aturan / regulasi</p> <p>51. Kompetensi petugas dalam membangun jejaring belum optimal</p> <p>52. Ketersediaan sarana pendukung PKRS</p> <p>53. melaksanakan sosialisasi tentang program pengurangan angka pengangguran kepada perusahaan dan pencari kerja. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.</p>		



Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>Melaksanakannseminar terkait keminatan terkait keminatan dan persiapan untuk pencari kerja terhadap pasar kerja</p> <p>54. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dalam tahapan pembangunan.</p> <p>55. Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan para pengambil kebijakan dalam implementasi PUG bidang politik, hukum, sosial-budaya, dan ekonomi, meliputi penerapan kuota perempuan 30% di legislatif, harmonisasi peraturan yang bias gender, perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pengembangan UMKM, UPPKS, dll.</p> <p>56. Lembaga PUG belum berperan sesuai tugas fungsi</p> <p>57. Tugas kewenangan DKP3A dalam meningkatkan keberhasilan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya</p> <p>58.Perhitungan Data Korban Kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan</p> <p>59.Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda. PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>60.Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak (data pilah) yang aktif</p> <p>61.Masih kurangnya peluang usaha sesuai dengan tuntutan zaman bagi pemuda Kaltim dalam mendukung IKN</p> <p>62.Perilaku generasi muda yang menjurus kepada pengguna/pengedar NAPZA dan Kriminal Remaja</p> <p>63.Masih Kurangnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan (kepemimpinan,</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>kewirausahaan dan kepeloporan) pemuda</p> <p>64. Masih lemahnya kualitas SDM yang menangani ke Olahraga sehingga beberapa prestasi atlit pada event event Olahraga seperti PON dan Seagames cenderung menurun dari tahun ke tahun</p> <p>65. Kurangnya pengetahuan masyarakat arti pentingnya olahraga bagi Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup</p> <p>66. Pembina, Pengurus, pelatih dan Insan Olahraga kurang Profesional baik ditingkat Provinsi, Kab/Kota serta Klub Cabor</p> <p>67. Terbatasnya ruangan baca pagi pengunjung onsite</p> <p>68. Daya tampung gedung yang semakin sempit dengan adanya penambahan koleksi koleksi terbaru sehingga ruang baca bagi pengunjung menjadi terbatas</p> <p>69. Kondisi Gedung perpustakaan yang sering terdampak banjir</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		manakala hujan, sehingga dipandang perlu untuk relokasi gedung perpustakaan yang lebih representatif		
2. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 3. Penguatan Daya Saing Usaha 4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan 5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas 6. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara	1. Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir 2. Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri 3. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri 4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital 5. Peningkatan SDM UKM/IKM untuk tumbuh menjadi eksportir 6. Peningkatan dukungan kemudahan pengurusan ekspor dan kemudahan memperoleh pinjaman bagi UKM/IKM 7. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang	1. Kualitas jaringan jalan provinsi belum optimal yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kerusakan jalan 2. Masih banyak kendaraan yang melebihi kapasitas jalan 3. Kelengkapan fasilitas jalan belum memadai 4. Kelas Jalan belum sesuai dengan peruntukan 5. Masih terdapat daerah minim aksesibilitas dan konektivitas 6. Sistem jaringan jalan belum tertata dengan baik 7. Belum optimalnya sinkronisasi fungsi jalan 8. Belum lengkapnya bukti syah kepemilikan lahan 9. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan 10. Belum terdapat fasilitas keselamatan jalan di beberapa ruas jalan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif</li> <li>• Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur</li> </ul>

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<p>didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata</p> <p>8. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas subsektor kehutanan</p> <p>9. Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.</p> <p>10. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan</p> <p>11. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan</p> <p>12. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak</p> <p>13. Penguatan kelembagaan peternakan</p> <p>14. Peningkatan produksi perikanan</p> <p>15. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan</p> <p>16. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura</p>	<p>11. Regulasi terkait kewenangan pemasangan fasilitas jalan</p> <p>12. Koordinasi antar stakeholders belum maksimal</p> <p>13. Geometric Jalan yang belum sesuai</p> <p>14. Keterampilan Pengemudi yang belum memadai</p> <p>15. Kondisi kendaraan yang tidak layak</p> <p>16. Prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan belum memadai</p> <p>17. Sarana dan prasarana transportasi belum optimal</p> <p>18. Regulasi terkait pembangunan dan pengelolaan prasarana transportasi belum terlaksana dengan baik</p> <p>19. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal masih rendah</p> <p>20. Belum terbangunnya jaringan irigasi teknis</p> <p>21. Ketersediaan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi belum memadai</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	17. Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian 18. Peningkatan iklim usaha dan investasi 19. Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single System (OSS) 20. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar 21. Peningkatan keberfungsian sosial PPKS 22. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan 23. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial 24. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi 25. Peningkatan Daya Saing UMKM	22. Belum terbangunnya bendung/embung 23. Terbatasnya sumber air baku 24. Belum sinkronnya strategi dan arah kebijakan pembangunan antara sektor pertanian dan pekerjaan umum (pengairan) 25. Kurangnya data dan informasi lahan pertanian eksiting 26. Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam pemenuhan jaringan irigasi 27. Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP 28. Belum terbangunnya pengendali banjir 29. Masalah sosial dan lahan 30. Masih rendahnya implementasi dokumen pola dan rencana pengelolaan DAS 31. Belum optimalnya sistem pengendali banjir		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<div>26.Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk kemandirian berusaha</div> <div>27.Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</div> <div>28.Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa</div> <div>29.Peningkatan penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak</div> <div>30.Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi</div> <div>31.Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi</div> <div>32.Pembangunan Jalan pada kawasan pertumbuhan ekonomi</div> <div>33.Peningkatan pelayanan terminal tipe B</div> <div>34.Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan air</div>	<div>32.Pendangkalan dan penyempitan sungai serta bangunan pengendali</div> <div>33.Sistem drainase dan sarana pendukungnya yang belum berfungsi baik</div> <div>34.Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP</div> <div>35.Masih rendahnya infrastruktur penanganan pantai kritis</div> <div>36.Belum optimalnya penanganan pantai kritis</div> <div>37.Belum terbangunnya infrastruktur penanganan pantai kritis</div> <div>38.Terjadinya pergeseran garis pantai akibat abrasi</div> <div>39.Belum selesainya RTRWN</div> <div>40.Belum selesainya RTRWP</div> <div>41.Belum selesainya RTRWK/K dan RDTR</div> <div>42.Belum optimal sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang</div>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<p>35.Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir</p> <p>36.Peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi</p> <p>37.Peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</p> <p>38.Perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan perbatasan, terluar, dan terpencil</p> <p>39.Penguatan distribusi barang khususnya komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan</p> <p>40.Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik</p> <p>41.Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang</p> <p>42.Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah</p> <p>43.Pengimplementasian kebijakan satu peta</p>	<p>43.RTR belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah</p> <p>44.Terdapat beberapa dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan</p> <p>45.Masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pemanfaatan ruang</p> <p>46.Belum memiliki kelembagaan pengelolaan SPAM Regional</p> <p>47.Terdapat kabupaten/kota yang kekurangan sumber suplai air baku yang handal untuk air minum, baik dari sisi kuantitas, kontinuitas, dan kualitas</p> <p>48.Belum tersedianya prasarana yang memberikan layanan air minum curah lintas Kab/Kota</p> <p>49.Keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi untuk mencapai akses universal (100%) air minum layak</p> <p>50.Kondisi geografis dan pemusatan penduduk yang sporadis menyebabkan penyediaan</p>		



Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>layanan air minum dengan sistem regional tidak efisien untuk dilakukan</p> <p>51. Penanganan air minum masih difokuskan untuk akses layak universal</p> <p>52. Tingkat pelayanan air limbah terpusat sangat rendah</p> <p>53. Belum tersedianya prasarana pengolahan air limbah domestik skala regional</p> <p>54. Pengelolaan air limbah domestik skala regional di Kaltim hanya mampu menangani 110 Desa/kelurahan dari 841 Desa/kelurahan.</p> <p>55. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, Tempat Penampungan Sementara/TPS, Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir)</p> <p>56. Capaian akses penanganan sampah domestik baru mencapai 71,68%</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>57. Belum tersedia pengelolaan persampahan yang berorientasi 3R (dari hulu ke hilir).</p> <p>58. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah atau Reuse, Reduce dan Recycle (3R);</p> <p>59. Masih terdapat kawasan kumuh yang perlu perhatian Pemerintah Provinsi</p> <p>60. Sebagian besar rumah dikawasan kumuh berada di kawasan bantaran sunga - biasanya lahan merupakan milik pemerintah - warganya tidak memiliki sertifikat</p> <p>61. Update SK Kumuh terjadi ditengah tahun pelaksanaan jangka menengah daerah sehingga mengganggu perhitungan capaian</p> <p>62. Penanganan belum tepat sasaran - pelaksaan penanganan kumuh bukan merupakan bagian dari aspek kumuh yang</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>dapat mengurangi skor kekumuhan</p> <p>63. Penguasaan lahan telah lebih dahulu daripada penetapan rencana tata ruang</p> <p>64. Penguasaan lahan oleh masyarakat tanpa bukti kepemilikan yang syah</p> <p>65. Ketidakjelasan kriteria penentuan luasan untuk klasifikasi kewenangan</p> <p>66. Proses Pendataan yang belum sempurna</p> <p>67. Keterbatasan finansial warga untuk membeli atau membangun rumah yang layak huni</p> <p>68. Penerapan SPM Perumahan dapat dipenuhi pasca terjadinya bencana (setelah ada penetapan bencana provinsi). Hanya bisa dilakukan tahap-tahap sebelumnya</p> <p>69. Masih terdapat warga yang tinggal di wilayah rawan bencana</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>70.Terdapat warga yang berpotensi terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi</p> <p>71.Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk korban bencana tingkat provinsi</p> <p>72.Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk warga yang terkena relokasi program pemerintah</p> <p>73.Rencana perpindahan Ibukota Negara menuju Kalimantan Timur secara langsung berdampak bagi pertambahan penduduk sehingga akan memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>74.Adanya pandemic COVID-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kaltim</p> <p>75.Terdapat Blank Spot di beberapa Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur hal ini</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>menyebabkan keterlambatan dalam mengupdate data pada daerah yang bersangkutan.</p> <p>76. Belum Optimalnya Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur dalam proses perencanaan dan Implementasi penanganan Program-program Kesejahteraan Sosial</p> <p>77. Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah perdesaan</p> <p>78. Masih terbatasnya pengembangan ekonomi perdesaan bumdes</p> <p>79. Kompetensi SDA desa dan anggota BPD rata rata masih rendah, jumlah perangkat sebagian desa belum terpenuhi, prasarana dan sarana pemdes dan kelurahan belum memadai</p> <p>80. Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi lembaga kemsayarakat desa dan lembaga adat</p> <p>81. Masih terbatasnya potensi desa pada pembangunan kawasan perdesaan, masih terbatasnya</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>pengembangan lembaga masyarakat seperti BKAD dan BUMADES</p> <p>82. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim</p> <p>83. Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi</p> <p>84. Rendahnya Kualitas SDM Koperasi</p> <p>85. Lemahnya sistem pengawasan koperasi</p> <p>86. Minimnya pelaku UKM dalam pemanfaatan pemasaran digital</p> <p>87. Menurunnya aktivitas ekonomi UKM semasa Pandemi COVID-19</p> <p>88. Rendahnya daya saing produk UKM</p> <p>89. Kurangnya informasi permodalan UKM dalam menjalankan usahanya</p> <p>90. Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<div>91. Belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya SDM</div> <div>92. Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi</div> <div>93. Belum optimalnya komitmen perizinan</div> <div>94. Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal</div> <div>95. Terbatasnya prasarana saluran irigasi</div> <div>96. Supply ketersediaan benih udang/ikan yang dihasilkan oleh UPTD Balai</div> <div>97. Benih Udang/Ikan belum optimal</div> <div>98. Rendahnya kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit</div> <div>99. Belum optimalnya penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik</div> <div>100. Bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan</div> <div>101. Struktur armada penangkapan ikan yang masih</div>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>didominasi oleh kapal berukuran kecil</p> <p>102. Penyaluran BBM subsidi untuk nelayan masih belum optimal</p> <p>103. Sulitnya mendapatkan data kapal dan</p> <p>104. data operasional yang valid</p> <p>105. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor kelautan</p> <p>106. dan perikanan</p> <p>107. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern</p> <p>108. Masih banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil perikanan yang</p> <p>109. belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</p> <p>110. Minimnya kerjasama bidang usaha perikanan</p> <p>111. Inovasi peningkatan produk hasil perikanan belum berkembang</p> <p>112. Mutu produk hasil perikanan yang masih rendah</p>		



Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>113. Tenaga pendamping perikanan belum diberdayakan secara optimal</p> <p>114. Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal</p> <p>115. Belum maksimalnya kerjasama dan sinergitas antara stakeholder pariwisata (mitra kerja, kab/kota, dll)</p> <p>116. Belum dimaksimalkannya potensi pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari atraksi yang bisa dinikmati wisatawan.</p> <p>117. Belum optimalnya data subsektor ekonomi kreatif.</p> <p>118. Belum tersedianya pusat kegiatan kreatif tingkat Provinsi</p> <p>119. Belum optimalnya perlindungan terhadap hasil karya pelaku ekraf</p> <p>120. Belum optimalnya pengembangan subsektor ekraf.</p> <p>121. Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf.</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>122. Belum terbangunnya sebuah destinasi wisata unggulan yang siap jual secara utuh serta Belum dibangun secara maksimal ketersediaan sarpras pendukung untuk kenyamanan wisatawan seperti infrastruktur dasar Jalan lingkungan, jaringan air minum, dan listrik, juga permasalahan utiliti dasar seperti telekomunikasi, toilet, pedestrian, pengelolaan limbah/ sampah. Amenitas lainnya yang belum diintegrasikan adalah sarana kesehatan, perbankan, pasar dan lain-lain</p> <p>123. Kurangnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha serta belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan ekraf</p> <p>124. Teknologi pertanian yang belum dilakukan secara modern</p> <p>125. Alih fungsi lahan pertanian</p> <p>126. terbatasnya jalan usaha tani dan jalan produksi</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		127. kurangnya jaringan irigasi 128. Ketersediaan bibit ternak lokal masih kurang 129. manajemen perkawinan ternak belum optimal 130. Keterbatasan lahan usaha peternakan 131. Penataan kawasan peternakan belum optimal 132. Ketersediaan pakan ternak berkualitas masih kurang 133. Hilirisasai dan industrialiasi produk peternakan masih rendah 134. Manajemen pemasaran produk peternakan belum optimal 135. Keterbatasan permodalan 136. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai 137. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi 138. Penggunaan benih yang illegitim 139. Praktek budidaya yang tidak tepat		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<div>140. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun</div> <div>141. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS</div> <div>142. Tidak kontinyu dan tidak padunya proses fasilitasi dan pendampingan kegiatan hulu hilir usaha perkebunan</div> <div>143. Rendahnya kualitas olahan hasil</div> <div>144. perkebunan dan produk olahan yang dihasilkan tidak berorientasi pasar</div> <div>145. Rantai pemasaran produk perkebunan yang panjang</div> <div>146. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah hasil perkebunan masih menggunakan alat dan mesin manual/ sederhana</div> <div>147. Kurangnya sosialisasi dan</div> <div>148. pengenalan produk produk olahan dan pemasaran komoditi perkebunan kepada petani</div>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>pekebun yang ada di Kabupaten/ Kota</p> <p>149. Kawasan agro industri dan infrastruktur pendukungnya belum dikembangkan dengan baik</p> <p>150. Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk Non Migas Non Batubara</p> <p>151. Belum Optimalnya Pemanfaatan/Peluang Ekspor Langsung di Kalimantan Timur</p> <p>152. Terbatasnya Jangkauan Pemasaran Komoditi dan Produk Ekspor</p> <p>153. Minimnya Produksi dan Sarana Distribusi Bahan Pokok</p> <p>154. Belum Optimalnya Fasilitas Sistem Distribusi Perdagangan</p> <p>155. Belum Optimalnya Kerjasama Perdagangan</p> <p>156. Belum memadainya infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		157. Terbatasnya sumber daya manusia industri 158. Kelembagaan industri belum efektif 159. Minimnya pembinaan pengembangan 160. wirausaha industri kecil mikro.		
7. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Pengendalian pencemaran air 3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 4. Pengendalian pencemaran udara 5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan 6. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 7. Pemeliharaan dan Perlindungan Wilayah-Wilayah Penyedia Jasa LH 8. Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan 9. Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan	1. Belum optimalnya penyusunan kajian dan implementasi RPPLH dan KLHS 2. Belum jelasnya teknis kajian dampak lingkungan hidup. 3. Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi para pihak terhadap upaya pemeliharaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. 4. Minimnya Pendanaan untuk program kegiatan prioritas 5. Perubahan pada Metode Perhitungan IKLH dan validasi Nilai IKLH		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan Kualitas lingkungan hidup</li></ul>

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	10.Peningkatan Peranan Konservasi Hutan 11.Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) 12.Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan) 13.Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Rotasi) 14.Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 15.Peningkatan pengelolaan DAS 16.Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan 17.Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan 18.Pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya 19.Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ekonomi masyarakat.	6. Jumlah Pengawas LH dengan izin usaha yang diawasi belum sebanding (kekurangan SDM) 7. Jumlah dana untuk kegiatan pengawasan tidak sebanding dengan target yang wajib diawasi 8. Belum optimalnya kegiatan penanganan sampah di wilayah lintas kabupaten/kota serta pesisir dan laut 9. Masih terbatasnya ketersediaan data pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta kurangnya fasilitas pengelolaan Limbah B3 10.Belum tersedianya prasarana dan sarana penanganan sampah di lintas kab/kota 11.Belum ditetapkannya lokasi TPA/TPST regional 12.Terbatasnya kewenangan Provinsi dalam Penanganan Sampah khususnya penyediaan sarana dan prasarana 13.Tidak terserapnya anggaran secara maksimal, karena kendala teknis administrasi penganggaran (seperti Dana POKIR)		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<div>20. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan</div> <div>21. Pengembangan infrastruktur EBT</div> <div>22. Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan EBT</div> <div>23. Peningkatan edukasi kepada para pihak terutama masyarakat untuk penerapan EBT</div>	<div>14. Belum ditetapkan lokasi rencana pembangunan incinerator</div> <div>15. Masih pada tahap proses penyusunan Peraturan Gubernur sebagai instrumen untuk dasar pengukuran mercuri.</div> <div>16. Belum maksimalnya frekuensi dan titik pemantauan lingkungan</div> <div>17. Belum adanya penetapan alokasi beban pencemar pada badan air</div> <div>18. Belum adanya penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara</div> <div>19. Masih tingginya tingkat kerusakan lahan, danau dan gambut</div> <div>20. Panjangnya Alur Proses Mekanisme dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan</div> <div>21. Perubahan metode perhitungan IKLH dan validasi nilai IKLH</div> <div>22. Kurangnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan kabupaten/kota, terkait data lingkungan</div>		



Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>23.Tidak sinkronnya data antara OPD terkait</p> <p>24.Minimya pendanaan untuk program kegiatan prioritas</p> <p>25.Panjangnya alur proses mekanisme dalam pemulihan kerusakan lingkungan</p> <p>26.Adanya aturan yang tidak selaras</p> <p>27.Meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</p> <p>28.Meningkatnya pelaku usaha yang harus diawasi</p> <p>29.Kurangnya pemahaman lembaga masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lh</p> <p>30.Adanya aturan yang tidak selaras</p> <p>31.Sarana dan prasarana penunjang (kendaraan lapangan medan berat, APD, peralatan sampling in situ, drone, handy talky, dll) untuk pelaksanaan verifikasi lapangan tidak/kurang memadai.</p> <p>32.Jumlah SDM masih kurang</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>33.Kualitas SDM perlu ditingkatkan</p> <p>34.Kurangnya Tenaga Anggota Personil di Lapangan dan Keseterdiaanya Sarana dan Prasarana</p> <p>35.Kurangnya Jumlah Tenaga PPNS dan Kurang Berminatnya ASN Sarjana S1 Kurang Berminat Menjadi PPNS</p> <p>36.PPNS masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya</p> <p>37.Belum aktif dalam menghimpun laporan kebencanaan kebakaran</p> <p>38.Kurang diresponya Permintaan Data Daerah Rawan Bencana Kebakaran</p> <p>39.Rendahnya tata kelola dan fasilitasi hubungan kerja sama antar Lembaga, Mitra dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi</p> <p>40.Rendahnya Penanggulangan pada Tingkat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pelayanan Kedaruratan dan Logistik serta</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>41. Rendahnya kualitas SDM aparatur</p> <p>42. Minimnya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>43. Rendahnya tata kelola dan fasilitasi hubungan kerja sama antar Lembaga, Mitra dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi</p> <p>44. Rendahnya Penanggulangan karhutla pada Tingkat Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pemadaman, dan penanganan Pasca Karhutla</p> <p>45. Rendahnya kualitas maupun Kuantitas SDM aparatur</p> <p>46. Minimnya Sarana dan Prasarana Karhutla</p> <p>47. Rendahnya Sistem Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Karhutla</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>48.Rendahnya Tingkat penyidikan kejadian karhutla</p> <p>49.Kendala dalam pemerataan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik.</p> <p>50.Kendala masyarakat tidak mampu dalam membiayai pemasangan instalasi dan penyambungan listrik PLN.</p> <p>51.Belum optimalnya pembinaan, Pengawasan dan kerjasama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.</p> <p>52.Teknologi pemanfaatan limbah ternak untuk diolah menjadi biogas masih relatif agak tinggi dari segi biaya</p> <p>53.Pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan limbah ternak untuk diolah menjadi biogas masih terbatas</p> <p>54.Sebagian hewan ternak tidak dikandangkan</p> <p>55.Belum tersedianya informasi kehutanan berbasis data di tingkat tapak</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>56. Belum optimalnya inovasi, diversifikasi dan dukungan regulasi terhadap produk dari kawasan hutan</p> <p>57. kurangnya pengawasan terhadap pemegang izin usaha di kawasan hutan produksi baik hulu dan hilir serta terhadap penatausahaan hasil hutan</p> <p>58. Curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, yang berakibat kepada terganggunya kegiatan produksi kayu.</p> <p>59. Biaya operasional produksi kayu yang meningkat karena naiknya harga BBM, diikuti dengan kenaikan biaya sparepart dan biaya perawatan kendaraan, sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022.</p> <p>60. Lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara eropa pada beberapa</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>bulan terakhir (yang sedang menghadapi musim gugur di bulan September hingga November).</p> <p>61. Belum optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan</p> <p>62. Masih tingginya luas kebakaran hutan dan lahan</p> <p>63. Masih kurangnya kawasan bernilai konservasi tinggi</p> <p>64. Jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.</p> <p>65. Belum optimalnya kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>66. Belum optimalnya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>67. Belum optimalnya pengelolaan perbenihan tanaman hutan yang berkualitas</p> <p>68. Penanaman yang dilakukan mitra kerja tidak dilakukan berbarengan, sehingga pelaporan tidak bersamaan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>69. Rendahnya kapasitas dan kompetensi petugas/penyuluh kehutanan</p> <p>70. Belum optimalnya kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Kemitraan di dalam dan sekitar kawasan hutan</p> <p>71. Belum optimalnya peran Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Hak dan Hutan Adat di dalam dan sekitar kawasan hutan.</p> <p>72. Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur</p> <p>73. Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
8. Pelaksanaan Pemilu 2024	<div>1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT</div> <div>2. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi</div> <div>3. Deregulasi Kebijakan</div> <div>4. Penyederhanaan Organisasi</div> <div>5. Perbaikan Tata Laksana</div> <div>6. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur</div> <div>7. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan</div> <div>8. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran</div> <div>9. Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah</div> <div>10. Peningkatan kinerja perangkat daerah dan aparatur</div> <div>11. Penguatan Pengawasan</div> <div>12. Optimalisasi kerja sama daerah yang sinergi dengan pembangunan IKN</div>	<div>1. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan dan penganggaran</div> <div>2. Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota</div> <div>3. Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya</div> <div>4. Keterbatasan data Bidang kominfo/TIK yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan TIK</div> <div>5. Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid</div> <div>6. Keterbatasan SDM analisis data dan informasi</div> <div>7. Proses pembaharuan data pada aplikasi yang kurang cepat</div> <div>8. Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara online karena aplikasi yang ada belum efektif untuk</div>		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel



Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>mendukung pengendalian dan evaluasi</p> <p>9. Masalah ada perbedaan persepsi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintahan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020</p> <p>10. Belum maksimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat di Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <p>11. Belum tersedianya data dan informasi yang terpadu di bidang kesejahteraan rakyat dengan baik.</p> <p>12. Kerjasama belum dianggap sektor yang strategis dalam pembangunan, terlihat dari terbatasnya anggaran Bagian Kerjasama dan Sumber Daya Aparatur yang menangani kurang sesuai pendidikannya,</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>dan belum dibekali dengan Diklat dan Bimtek yang mumpuni.</p> <p>13.Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menelaah Produk Hukum.</p> <p>14.Konsep atau Draft Produk Hukum yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Perundang-Undangan</p> <p>15.Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah.</p> <p>16.Belum efektifnya system pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.</p> <p>17.Belum diterapkannya kebijakan pengadaan barang dan jasa</p> <p>18.Belum ditaatinya kode etik pengadaan barang dan jasa</p> <p>19.Belum di terapkannya prinsip pengadaan barang dan jasa</p> <p>20.Rendahnya kualitas data dan informasi terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<div>21.Rendahnya kualitas data dan informasi terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah</div> <div>22.Belum optimalnya monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja</div> <div>23.Belum Optimalnya Penerapan</div> <div>24.SAKIP, khususnya Penerapan Cascading dan Rencana Aksi Pada Setda</div> <div>25.Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum optimal</div> <div>26.Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum optimal</div> <div>27.Pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi kadang-kadang di lapangan masih ditemui beberapa kendala misalnya bahan untuk rapat anggota dewan masih menunggu</div>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>dari instansi lain, sehingga pelayanan juga agak terhambat</p> <p>28. Pelayanan pada masa reses, sosper dan sosbang masih belum optimal</p> <p>29. Minimnya pemahaman SDM terkait prosedur administrasi keuangan</p> <p>30. Kegiatan anggota DPRD belum diinformasikan kepada media cetak maupun media elektronik sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan anggota DPRD</p> <p>31. Belum optimalnya Perencanaan,</p> <p>32. Pengembangan dan Sistem layanan Informasi Pendapatan</p> <p>33. Tidak tertagihnya Piutang Pajak Daerah</p> <p>34. Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain</p> <p>35. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>36. Belum optimalnya pelaksanaan kajian hukum dan perundang-undangan berkenaan dengan pendapatan daerah</p> <p>37. Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah serta peraturan teknis pendukung lainnya.</p> <p>38. Riset dan inovasi daerah berfokus pada konsep scienced based policy untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan memberdayakan tusi Litbangjirap inovек.</p> <p>39. Terciptanya ekosistem riset dan inovasi daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan strategis (BRIN, Kemendagri, Kemendikbudristek, Kemenkumham, Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang Kab/Kota, Badan Usaha, Lembaga Masyarakat, Penyandang Dana Riset/Yayasan, Mahasiswa, Pelajar, dll.)</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>40.Tersedianya Rencana Induk (Rinduk) Kelitbangan/ Pemajuan Iptek di Kalimantan Timur.</p> <p>41.Terwujudnya sistem informasi riset dan inovasi daerah berbasis teknologi yang terpadu (amanat Perpres 78/2021).</p> <p>42.Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) Iptek/riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi dan sinergi antar Periset dari berbagai lembaga riset, baik pemerintah, swasta, maupun luar negeri.</p> <p>43.Adanya peta jalan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk lembaga riset yang ada di Kab/Kota.</p> <p>44.Terbentuk Sentra HAKI di Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim.</p> <p>45.Adanya skema pendanaan riset dan inovasi daerah yang optimal.</p> <p>46.PPKM akibat pandemi COVID-19 membatasi pelayanan</p> <p>47.Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan belum dilaksanakan secara benar</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>48.Kompetensi SDM pelaksana masih kurang</p> <p>49.Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan</p> <p>50.Penetapan kawasan di TMII sebagai Green Zone sehingga diperlukan kendaraan listrik di lingkungan TMII yang akan berdampak pada jumlah kunjungan</p> <p>51.Belum tersedianya informasi yang akurat terkait IKN</p> <p>52.Masih kurangnya koordinasi dengan stakeholder</p> <p>53.Pedoman Pelaksanaan SPIP yang berubah, sehingga harus di Sosialisasikan Kembali</p> <p>54.Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal</p> <p>55.Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal</p> <p>56.Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten</p> <p>57. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodic</p> <p>58. Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Penanganan Laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan, PMRB, Survey Penilaian Integritas, Wistle Blowing Sistem, Probitiy Audit, LHPKN dan LHKASN</p> <p>59. Penguatan dan peningkatan kapabilitas APIP, penyusunan kebijakan dan prosedur serta Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berkualitas dan berbasis risiko</p> <p>60. Peran Inspektorat Daerah selaku Quality Assurance (QA) dan Advisory belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan perlu adanya sosialisasi dan monev/ pendampingan terkait</p>		



Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>reformasi birokrasi yang terus ditingkatkan serta perlunya komitmen perangkat daerah.</p> <p>61. Penguatan kegiatan pemeriksaan berkala dan tujuan tertentu, reviu atas dokumen perencanaan dan keuangan serta lainnya, evaluasi, monitoring hasil pengawasan dan kegiatan tertentu, pemutakhiran data hasil pengawasan.</p> <p>62. Penguatan penerapan rencana aksi daerah dan implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kegiatan asistensi/ bimtek/ diklat dan layanan konsultasi</p> <p>63. Penguatan kegiatan pelatihan kantor sendiri, peningkatan kemampuan teknis aparat pengawas dan komparasi implementasi kebijakan pengawasan melalui diklat fungsional, substantif dan profesi.</p> <p>64. Jumlah SDM Pengawasan / Jabatan Fungsional Auditor dan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>P2UPD belum sebanding dengan tugas pengawasan baik tugas rutin maupun mandatory</p> <p>65. Masih terdapat tindak lanjut hasil pemeriksaan yg belum selesai dan berlarut-larut penyelesaiannya dan belum adanya penyelesaian melalui majelis TP/TGR serta kurangnya komitmen perangkat daerah</p> <p>66. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi</p> <p>67. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi</p> <p>68. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.</p> <p>69. Melemahnya semangat kebersamaan dan menurunnya kepedulian sosial.</p> <p>70. Meningkatnya simbolisme agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		71.Meningkatnya tindak kekerasan dan disharmoni sosial dalam masyarakat		

Sumber perumusan isu strategis:

- 1. Arah kebijakan RKP Tahun 2024
- 2. Arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
- 3. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
- 4. Permasalahan pembangunan daerah (hasil evaluasi RKPD)

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, maka 5 (lima) isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM);
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel

Adapun penjelasan terhadap masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:

### **1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)**

- a. Pemerataan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Membangun sumber daya manusia di wilayah Kalimantan Timur adalah bagaimana memperkuat kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung proses transformasi ekonomi wilayah Kalimantan Timur menuju ekonomi berkelanjutan serta didukung pengetahuan dan inovasi. Posisi strategis Kalimantan Timur sebagai daerah asal IKN dan menjadi mitra pembangunan IKN memberikan peluang sekaligus tantangan bagi SDM di Kalimantan Timur. Merespon kondisi tersebut, pembangunan daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan SDM, antara lain sistem pendidikan dan sistem kesehatan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Perbaikan sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi perlu terus menjadi perhatian. Selain itu, penataan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar juga perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diarahkan selain untuk peningkatan layanan yang menjangkau masyarakat sampai ke pelosok, juga diharapkan lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan.

b. Peningkatan Daya saing tenaga kerja

Perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, pertambahan penduduk dan persaingan ekonomi menuntut SDM Kalimantan Timur yang terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi. Penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja. Kolaborasi antara pemerintah dan industri perlu didorong mulai dari perancangan program dan disain kurikulum, standar pelatihan hingga penyelenggaraan pelatihan kerja, sehingga kebijakan *link and match* dapat benar-benar berjalan. Dengan demikian, dapat dihasilkan tenaga kerja yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. Lebih lanjut, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, diharapkan tenaga kerja di Kalimantan Timur dapat mengembangkan usaha dan mandiri, bahkan diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru.

c. Peningkatan daya saing perempuan

Ketimpangan gender di Kalimantan Timur masih terjadi. Hal ini tergambar dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih rendah. Secara khusus bila membahas peran perempuan dalam pembangunan, maka indikator IDG Kalimantan Timur masih rendah bila dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan dan berada di bawah IDG nasional. Hal ini menunjukkan Kaltim masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam pembangunan. Untuk itu perlu perhatian yang besar untuk peningkatan kualitas hidup perempuan sehingga dapat berdaya dan produktif.

## **2. Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**

a. Diversifikasi ekonomi

Tantangan pembangunan ekonomi wilayah Kalimantan Timur ke depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian Kalimantan Timur masa mendatang. Transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kalimantan Timur.

Transformasi dari ekonomi berbasis SDA tak terbaharukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbaharukan merupakan tantangan utama yang perlu disiapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah

dan panjang. Proses menipisnya stok SDA tak terbaharukan merupakan hukum alam yang tidak dapat dicegah, sehingga transformasi menjadi suatu keharusan guna menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah Kalimantan Timur. Sektor non migas memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dari sektor migas. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor-sektor non pertambangan yang saat ini belum dimaksimalkan memiliki perilaku pertumbuhan alami yang menjanjikan.

Kalimantan Timur berfokus pada pertambangan batubara yang merupakan sektor primer sebesar 76%, yang seharusnya sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa) harus lebih ditingkatkan dengan adanya inovasi hasil sektor tersebut. Diperlukan otoritas pengawasan pada tingkat daerah untuk mengurangi degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan. Pemerintah bersama dengan pelaku pembangunan lainnya perlu melakukan kolaborasi sektor perkebunan dan peternakan untuk memperkuat produktivitas daerah. Berbagai upaya untuk pengembangan sektor-sektor unggulan non migas dan tambang perlu ditempuh, seperti pendekatan industri teknologi bersih melalui penerapan transformasi digital dan industrialisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan secara berkelanjutan; pembangunan rendah karbon melalui ekonomi sirkular; industri hijau; peningkatan ekowisata dan pariwisata dan penggunaan bahan kimia dan produk kimia dan energi rendah karbon.

#### b. Peningkatan Keberdayaan ekonomi masyarakat

Masalah kesejahteraan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan dengan masalah kemiskinan dengan akar masalah yang sebagian berbeda-beda pada setiap daerah kabupaten/kota. Penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian pemerintah Kalimantan Timur. Berbagai upaya telah dilakukan dan masih terus dilaksanakan, antara lain upaya untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk kemandirian, meningkatkan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, serta penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak.

Pemerintah daerah juga terus berusaha untuk meningkatkan dan menguatkan partisipasi UMKM dan koperasi. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat

serta membuka lapangan kerja. Pengembangan usaha UMKM dan koperasi diarahkan juga untuk mengolah produk-produk lokal hasil pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, serta unggulan lainnya diluar non migas dan tambang.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Pengembangan perekonomian daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal. Pembangunan Kalimantan Timur beberapa tahun diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu layanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, telekomunikasi dan listrik diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu, infrastruktur juga diarahkan ke kawasan-kawasan strategis yang mampu membangkitkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur.

### **3. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur**

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Negara Nusantara memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian negara. Perlu ketersediaan infrastruktur dasar termasuk infrastruktur yang mendukung perekonomian, yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan IKN.

Masalah utama yang ditemui adalah ketersediaan infrastruktur yang belum merata. Selain itu, kondisi infrastruktur yang sebagian tidak dalam kondisi baik, menyebabkan pelayanan tidak optimal. Terjadi kerusakan pada beberapa ruas jalan yang disebabkan faktor *Over Dimension* dan *Over Load* di beberapa ruas jalan sehingga perlu penanganan serius dengan membuat jaringan jalan khusus untuk moda transportasi pertambangan dan perkebunan sawit dan penegakan hukum terkait penggunaan jalan.

### **4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup**

a. Peningkatan kualitas air, air laut, udara dan tutupan lahan

Pembangunan Kalimantan Timur selain untuk mengejar pertumbuhan, juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ditengah upaya pemerintah bersama masyarakat

dan dunia usaha membangun Kalimantan Timur, komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup juga terus dilakukan.

Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh kualitas air, air laut, udara, dan tutupan lahan diharapkan dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Beberapa potensi yang mempengaruhi upaya menjaga kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur antara lain industri petrokimia, migas, batubara, pengolahan kayu, perkebunan, permukiman, pertambangan, peternakan, jumlah kendaraan, limbah padat, sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan dan rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar dan timbunan sampah.

#### b. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau ditopang oleh pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim merupakan suatu keharusan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan timur bersama berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon. Program Pengurangan Emisi GRK: Program Pengurangan Emisi (*Emission Reduction/ER* program) dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur yang telah berlangsung sejak 2019-2024, dirancang bersama oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Program ini merupakan program berbasis kinerja dibawah skema Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund/FCPF-Carbon Fund*) yang dikelola oleh Bank Dunia. FCPF merupakan kemitraan global pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan organisasi Masyarakat Adat yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang. ER Program di Kalimantan Timur merupakan salah satu contoh penerapan nilai ekonomi karbon untuk skema RBPs (pembayaran berbasis kinerja).

Kedepan, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan penekanan yang besar pada penurunan emisi GRK dan intensitas emisi. Penurunan emisi GRK secara khusus diprioritaskan pada sektor kehutanan dan lahan, sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Penurunan emisi deforestasi dan degradasi hutan, pembangunan hutan tanaman, *sustainable management of forest*, dan rehabilitasi hutan meruoakan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon, sekaligus



mendukung pencapaian target NDC. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, akademisi, pihak swasta, mitra pemerintah maupun penggiat dan aktivis lingkungan hidup untuk dapat mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Kalimantan Timur.

#### c. Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi EBT seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari dan angin/bayu sangat melimpah di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia seluas 120 juta hektar memiliki potensi sumber biomassa, energi air, dan panas bumi yang sangat besar. Dari data proyeksi penyediaan energi yang dimuat dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur, bauran energi primer Provinsi Kalimantan Timur dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu batubara, minyak bumi, gas bumi, dan EBT.

Beberapa penyebab harga EBT belum kompetitif yaitu adanya subsidi untuk BBM dan listrik serta masih mahal biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Akibatnya hingga tahun 2015 EBT masih kalah bersaing dengan energi fosil. Hal ini menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan EBT belum optimal dan mengakibatkan ketergantungan yang besar pada energi fosil. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan EBT adalah dengan mengalihkan subsidi yang semula dialokasikan untuk energi fosil menjadi subsidi untuk EBT.

Pencapaian target program RUED Kalimantan Timur diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi. Bauran energi dari EBT ditargetkan mendekati sebesar 12,39% tahun 2025 dan sebesar 28,72% tahun 2050. Pencapaian bauran EBT meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan swasta.

### **5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penerapan reformasi birokrasi. Dalam dokumen tersebut, terdapat tiga sasaran reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; 2. Birokrasi yang Kapabel; dan 3. Pelayanan Publik yang Prima.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Bagi Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk penataan organisasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah sebagian besar berbasis TIK. Adanya beberapa sistem informasi dan integrasi mampu menghasilkan Nilai Indeks SPBE yang meningkat dari tahun ke tahun. Adanya keterbukaan informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) merupakan langkah awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyampaikan jenis-jenis pelayanan dan kinerja Perangkat daerahnya.

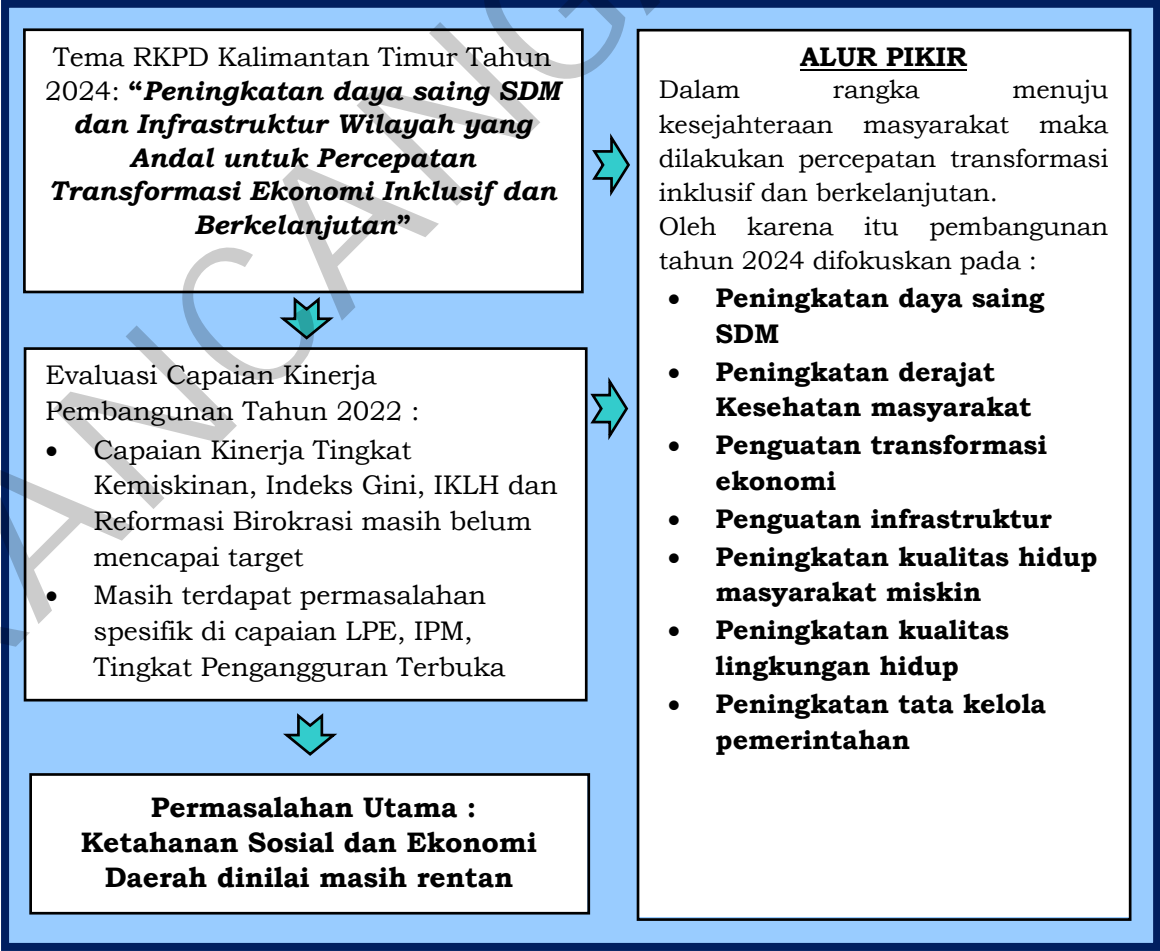
Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen untuk mempercepat pembentukan MPP secara bertahap. Dengan adanya MPP maka pelayanan bagi masyarakat dari pemerintah pusat dan daerah akan terintegrasi dalam satu tempat sehingga memberikan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan. Selain itu, juga dapat berimplikasi dalam meningkatkan daya saing dengan memberikan kemudahan berusaha.

#### 4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2024

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, arah kebijakan RKP tahun 2024, isu strategis serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2024, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah “Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan”.

Tema RKPD tahun 2024 menggambarkan fokus pelaksanaan pembangunan dengan tetap menerapkan prinsip inklusifitas. Pembangunan difokuskan pada upaya-upaya strategis dan taktis untuk mencapai tujuan dan sasaran RKPD. Dengan dicapainya tujuan dan sasaran pembangunan, maka diharapkan dapat tidak saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing Kalimantan Timur.

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menekankan pada kata kunci peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah yang andal, percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. 4 (empat) hal tersebut menjadi perhatian utama untuk pembangunan tahun pertama periode RPD dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kualitas lingkungan hidup serta rendahnya Reformasi Birokrasi. Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah yang andal, percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan industri pengolahan, serta pemenuhan tenaga kerja yang berdaya saing, yang didukung dengan peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur, kemandirian birokrasi, dan pelestarian lingkungan.



Gambar IV.2  
Kerangka Pikir Perumusan Prioritas RKPD Kalimantan Timur  
Tahun 2024

Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian sasaran utama pada tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, dimana RKPD ini juga perlu memperhatikan upaya pencapaian tujuan pembangunan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan. Dengan memahami isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur serta memperhatikan tema pembangunan daerah tahun 2024, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sector unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama;

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan RPD dan permasalahan pembangunan daerah. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan  
RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024
1.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	<div>a. Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</div> <div>b. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</div> <div>c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan</div> <div>d. Optimalisasi Boarding School</div> <div>e. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu</div> <div>f. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</div> <div>g. Peningkatan literasi dan numerasi</div> <div>h. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar</div> <div>i. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</div> <div>j. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri</div> <div>k. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja</div> <div>l. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan</div> <div>m. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja</div> <div>n. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi</div> <div>o. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan</div> <div>p. Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik</div> <div>q. Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan</div>
2.	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya	<div>a. Percepatan perbaikan gizi masyarakat</div> <div>b. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi</div> <div>c. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta</div> <div>d. pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat</div> <div>e. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</div> <div>f. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya</div> <div>g. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</div>

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan</li> <li>i. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</li> </ul>
3.	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertical dan horizontal pada sektor unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir</li> <li>b. Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri</li> <li>c. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri</li> <li>d. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital</li> <li>e. Peningkatan SDM UKM/IKM untuk tumbuh menjadi eksportir</li> <li>f. Peningkatan dukungan kemudahan pengurusan ekspor dan kemudahan memperoleh pinjaman bagi UKM/IKM</li> <li>g. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata</li> <li>h. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas subsektor kehutanan</li> <li>i. Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.</li> <li>j. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan</li> <li>k. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan</li> <li>l. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak</li> <li>m. Penguatan kelembagaan peternakan</li> <li>n. Peningkatan produksi perikanan</li> <li>o. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan</li> <li>p. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>q. Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian</li> <li>r. Peningkatan iklim usaha dan investasi</li> <li>s. Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single System (OSS)</li> </ul>
4.	Penguatan infrastruktur untuk mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi</li> <li>b. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024
	pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<div><div>c. Pembangunan Jalan pada kawasan pertumbuhan ekonomi</div><div>d. Peningkatan pelayanan terminal tipe B</div><div>e. Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan air</div><div>f. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir</div><div>g. Peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi</div><div>h. Peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</div><div>i. Perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan perbatasan, terluar, dan terpencil</div><div>j. Penguatan distribusi barang khususnya komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan</div><div>k. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik</div><div>l. Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang</div><div>m. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah</div><div>n. Pengimplementasian kebijakan satu peta</div></div>
5.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem	<div><div>a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar</div><div>b. Peningkatan keberfungsian sosial PPKS</div><div>c. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan</div><div>d. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial</div><div>e. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi</div><div>f. Peningkatan Daya Saing UMKM</div><div>g. Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk kemandirian berusaha</div><div>h. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</div><div>i. Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa</div><div>j. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak</div></div>
6.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	<div><div>a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan</div><div>b. Pengendalian pencemaran air</div><div>c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut</div><div>d. Pengendalian pencemaran udara</div><div>e. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan</div></div>

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024
		<div><div>f. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</div><div>g. Pemeliharaan dan Perlindungan Wilayah-Wilayah Penyedia Jasa LH</div><div>h. Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan</div><div>i. Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan</div><div>j. Peningkatan Peranan Konservasi Hutan</div><div>k. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)</div><div>l. Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan)</div><div>m. Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Rotasi)</div><div>n. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</div><div>o. Peningkatan pengelolaan DAS</div><div>p. Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan</div><div>q. Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan</div><div>r. Pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya</div><div>s. Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ekonomi masyarakat.</div><div>t. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan</div><div>u. Pengembangan infrastruktur EBT</div><div>v. Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan EBT</div><div>w. Peningkatan edukasi kepada para pihak terutama masyarakat untuk penerapan EBT</div></div>
7.	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public	<div><div>a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT</div><div>b. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi</div><div>c. Deregulasi Kebijakan</div><div>d. Penyederhanaan Organisasi</div><div>e. Perbaikan Tata Laksana</div><div>f. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur</div><div>g. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan</div><div>h. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran</div><div>i. Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah</div><div>j. Peningkatan kinerja perangkat daerah dan aparatur</div><div>k. Penguatan Pengawasan</div></div>
8.	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	<div><div>a. Optimalisasi kerja sama daerah yang sinergi dengan pembangunan IKN</div></div>



Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, maka disusun strategi dan arah kebijakan tahunan yang mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang dapat dilihat pada tabel IV.8.

Tabel IV.6  
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing			
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1	Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		2	Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		3	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan
		4	Optimalisasi Boarding School
		5	Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
		6	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		7	Peningkatan literasi dan numerasi
		8	Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu kesehatan	1	Percepatan perbaikan gizi masyarakat
		2	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
		3	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
		4	Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		5	Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			fasyankes maupun fasilitasnya
		6	Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		7	Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan
		8	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Perluasan kesempatan kerja	1	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
		2	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
		3	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
		4	Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
		5	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja
	Peningkatan mutu dan daya saing tenaga konstruksi	1	Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan	Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan	1	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan
		2	Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik
		3	Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	Pembangunan ekonomi inklusif	1	Peningkatan Daya Saing UKM
		2	Peningkatan Pemasaran Produk UKM
		3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Industri
		4	Pengembangan Hilirisasi Komoditi Hulu Agro, Aneka dan Pangan
		5	Peningkatan Kapasitas SDM yang Berdaya Saing
		6	Pengembangan Destinasi Pariwisata Prov. Kaltim

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7 Peningkatan Pemasaran Pariwisata Daerah
		8 Peningkatan Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi Pariwisata Daerah
		9 Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single System (OSS)
		10 Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri
		11 Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri
		12 Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas subsektor kehutanan
		13 Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.
	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan	1 Revitalisasi lahan perkebunan yang tidak produktif
		2 Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
		3 Memperbanyak penggunaan benih perkebunan unggul bersertifikat
		4 Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan
	Peningkatan produksi dan produktivitas ternak	1 Optimalisasi reproduksi ternak
		2 Meningkatkan produksi dan produktivitas pakan ternak
		3 Meningkatkan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak
		4 Pengembangan dan Penguatan kelembagaan peternakan
	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
		2 Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan
	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1 Revitalisasi lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2 Memperbanyak penggunaan benih TPH unggul bersertifikat

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		3	Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian
	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas dan akses lahan subsektor kehutanan	1	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	1	Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
		2	Peningkatan keberfungsian sosial PPKS
		3	Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
		4	Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial
		5	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi
		6	Peningkatan Daya Saing UMKM
		7	Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk kemandirian berusaha
		8	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
		9	Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa
		10	Revitalisasi, penanganan, dan penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan permukiman yang layak
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Optimalisasi pemenuhan infrastruktur terutama pada kawasan strategis.	1	Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi
		2	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi
		3	Pembangunan Jalan pada kawasan pertumbuhan ekonomi
		4	Peningkatan pelayanan terminal tipe B
		5	Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan air

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		6	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir
		7	Peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi
		8	Peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
		9	Perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan perbatasn, terluar, dan terpencil
		10	Penguatan distribusi barang khususnya komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan
		11	Meningkatkan akses infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah 3T
		12	Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang
		13	Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
		14	Pengimplementasian kebijakan satu peta
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1	Menjaga kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		2	Menjaga kualitas lingkungan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		3	Menjaga kualitas lingkungan melalui pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan
		4	Pemeliharaan dan perlindungan wilayah-wilayah Penyedia Jasa LH
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Pencegahan kerusakan hutan dan pemulihan kawasan hutan yang terdegradasi	1	Meningkatkan upaya rehabilitasi di luar kawasan hutan dengan tanaman produktif, serta meningkatkan penyediaan bibit berkualitas dengan mengoptimalkan penggunaan DBH SDA DR untuk

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		2	Meningkatkan upaya pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan bersama masyarakat
		3	Meningkatkan sinergitas antar pihak dalam upaya pengelolaan DAS, TAHURA Provinsi, dan kawasan bernilai ekosistem penting
	Penurunan Emisi GRK dari sektor lahan	1	Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan
		2	Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan
	Peningkatan akses lahan kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan	1.	Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan.
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Peningkatan daya pembangkit listrik dengan EBT.		Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan menggunakan EBT.
Tujuan 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan BerAKHLAK yang Berorientasi Pelayanan Publik			
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT
		2	Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
		3	Deregulasi Kebijakan
		4	Penyederhanaan Organisasi
		5	Perbaikan Tata Laksana
		6	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel		1	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
		2	Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
		3	Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		4	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan aparatur
		5	Penguatan Pengawasan
		6	Optimalisasi kerja sama daerah yang sinergi dengan pembangunan IKN

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran, program prioritas, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, target kinerja program serta pagu anggaran program prioritas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.7

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM berdaya saing								
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,95	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK (%)			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP - 1
				Angka Partisipasi Kasar SLB (%)				
				Angka Kelulusan Sekolah Menengah (%)				
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,10	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)				PP - 1
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit yang terakreditasi (%)			Dinas Kesehatan	PP - 2
	Prevalensi Stunting	21,57		Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				
Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (%)	27,20	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PP - 1
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)				PP - 1
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat (orang)			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	PP - 1



TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
							Perumahan Rakyat	
Sasaran 4 : Meningkatnya daya saing perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,31	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SDM Pendamping Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik & Hukum yang melaksanakan KG (%)			Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PP - 1
Tujuan 2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas								
Sasaran 5 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara (%)	5,5 – 6,5	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi hasil hutan kayu (m3/tahun)			Dinas Kehutanan	PP - 3
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor (UKM)			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP - 3
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH DAN USAHA MIKRO	Jumlah Rumah Produksi Bersama				PP - 3
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase pertumbuhan nilai Ekspor Non Migas dan Non BatuBara berdasarkan SKA (%)				PP - 3
				Pertumbuhan UKM Ekspor (%)				
				Pertumbuhan nilai ekspor UKM (%)				
			PROGRAM PERENCANAAN DAN	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di Kawasan				PP - 3

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
			PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peruntukan Industri / Kawasan Industri (industri)				
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (orang) Jumlah pergerakan wisatawan mancanegara (orang)				PP - 3
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan (%)			Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu	PP - 3
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur (minat)				PP - 3
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Minat calon investor (calon investor)				PP - 3
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)			Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP - 3
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya (%)				PP - 3
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)				PP - 3

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)				PP - 3
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya				PP - 3
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)				PP - 3
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)				PP - 3
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya (%)				PP - 3
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			Dinas Kelautan dan Perikanan	PP - 3
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				PP - 3
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan				PP - 3

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
			PEMASARAN HASIL PERIKANAN	berkualitas (SNI) yang dipasarkan (Jenis)				
Sasaran 6 : Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0,74	PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial			Dinas Sosial	PP - 5
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PP - 5
	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0,11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase RTLH yang tertangani			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP - 5
				Persentase pengurangan luas kawasan kumuh				
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (poin)	7,36	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Rasio Konektivitas Transportasi Darat			Dinas Perhubungan	PP - 4
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP - 4
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi				PP - 4
				Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan				

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase penyediaan kapasitas air baku					
				Persentase panjang pantai kritis yang ditangani					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase yang berfungsi baik				PP - 4	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses air minum layak perpipaan (%)				PP - 4	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang				PP - 4	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bangunan dan lingkungan yang tertata				PP - 4	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU permukiman yang ditingkatkan				PP - 4	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 jam				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP - 4
			Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
Sasaran 8 : Terjaganya	Indeks Kualitas Air	53,52	PROGRAM PENGENDALIAN	Indeks Pencemaran				PP - 6	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air Laut	81,95	PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Udara	88,17						
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	82,35						
Sasaran 9 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU) (%)	31,05	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas lahan yang dapat direhabilitasi (%)			Dinas Kehutanan	PP - 6
				Penurunan kerusakan kawasan hutan (%)				
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola (Ha)				PP - 6
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)				PP - 6
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				PP - 6
				Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO <sub>2</sub> eq)			Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP - 6

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran 10 : Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)	10,39	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik (KK)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP - 6
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah pengembangan EBT (unit)				PP - 6
Tujuan 4 : <b>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik</b>								
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00						PP - 7
	Sistem Merit	272,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Persentase pemenuhan aspek-aspek Sistem Merit			Badan Kepegawaian Daerah	PP - 7
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
				Persentase ASN dengan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Baik (76 – 90)				
				Persentase ASN yang disiplin				
			PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat PIM			Badan Pengembangan	PP - 7

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
			SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat Fungsional			Sumber Daya Manusia	
				Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat Teknis 20 JP				
				Persentase ASN yang sudah mengikuti Seminar/workshop/sejenis				
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,70	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentas layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah			Dinas Komunikasi dan Informatika	PP - 7
				Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah				
				Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				



TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi				
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (survei)				
				Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda				PP - 7
				Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah				
				Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan				

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran 12 : Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,86 (BB)	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	literasi dan/atau sosialisasi SPBE			Biro Organisasi	PP - 7
				Persentase ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE				
				Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal B				
				Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan SOP dan proses bisnis				
	Tingkat maturitas SPIP	Level 3 (Skor 3,476)	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian program RKPD dan RPD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PP - 7
				Rata-rata tingkat capaian indikator program seluruh perangkat daerah				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			Inspektorat Daerah	PP - 7
				Persentase tindak lanjut hasil pengawasan				

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
				Rata-rata tingkat capaian indikator program seluruh perangkat daerah				

Dalam upaya penyelesaian permasalahan maupun isu strategis pembangunan daerah, pelaksanaan program pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya melibatkan Perangkat Daerah namun juga dari *stakeholders* lainnya diluar Perangkat Daerah yakni dengan melakukan kerjasama dengan Badan Usaha atau swasta. Dalam mensinergikan program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah Kalimantan Timur telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan dibidang usaha dan/atau jasa wajib melaksanakan TJSL dan PKBL. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 terdapat 2 (dua) program prioritas yaitu Program Rumah Layak Huni dan Program Pangan untuk Penghijauan dimana Program tersebut sudah dibentuk Badan Pengelolanya masing-masing yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan pelaksanaan program prioritas tahunan kepada masyarakat.
2. Melakukan validasi dan menyepakati rencana program dan kegiatan yang diusulkan Perusahaan, serta menyinergikan dengan program pembangunan daerah.
3. Melakukan identifikasi lokasi dan calon penerima bantuan
4. Mengusulkan rencana program dan kegiatan.
5. Melakukan penilaian terhadap perusahaan pelaksana.
6. Mengusulkan pemberian penghargaan pelaksana program prioritas terbaik oleh Gubernur
7. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kepada Perusahaan.
8. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait program Program Rumah Layak Huni dan Program Pangan untuk Penghijauan.

Selanjutnya, pelaksanaan program pembangunan melalui program-program prioritas Kalimantan Timur tahun 2024 juga dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Pengelolaan Hutan
  - b. Program Pengembangan UMKM
  - c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan Usaha Mikro
  - d. Program Pengembangan Ekspor
  - e. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - f. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program
  - g. Pelayanan Penanaman Modal
  - h. Program Promosi Penanaman Modal
  - i. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - j. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - k. Program Penyuluhan Pertanian
  - l. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - m. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - n. Program Penyuluhan Pertanian
  - o. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - p. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - q. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - r. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
2. Untuk mendukung Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka program prioritas daerah yang dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Untuk mendukung Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Program Pengelolaan Pendidikan
  - b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
  - c. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - d. Program Penempatan Tenaga Kerja

- e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
  - f. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
4. Untuk mendukung Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
5. Untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - b. Program Penyelenggaraan Jalan
  - c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
  - e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
  - g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (Psu)
  - h. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
6. Untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - b. Program Pengelolaan Hutan
  - c. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
  - d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
  - e. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
  - f. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  - g. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
  - h. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
7. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Program Kepegawaian
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- d. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- e. Program Penataan Organisasi
- f. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- g. Program Penyelenggaraan Pengawasan

4.2.4 Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2024

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD Tahun 2024-2026), mendukung Prioritas Pembangunan Nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan nasional disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel IV.8  
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	a. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertical dan horizontal pada sektor unggulan b. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	a. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar b. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja b. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024
		rumah sakit dan Fasyankes lainnya c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik

Tabel IV.9

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah Tahun 2024 agar target-target pada indikator TPB/SDGs baik nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal. Berikut program-program pembangunan yang mendukung kebijakan pengarusutamaan TPB/SDGs:

Tabel IV.10

Persandingan Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
Goal 1 Tanpa Kemiskinan Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia,	• Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</p> <p>Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan</p> <p>Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro</p> <p>Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant</li><li>• Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant</li><li>• Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant</li><li>• Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant</li><li>• Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</li><li>• Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</li><li>• Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</li><li>• Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li><li>• Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li><li>• Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</li><li>• Program Penanggulangan BencanaProgram Perencanaan Tenaga Kerja</li><li>• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li></ul>
<p>Goal 2 Tanpa Kelaparan</p> <p>Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p> <p>Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li><li>• Program Penanganan Kerawanan Pangan</li><li>• Program Pengawasan Keamanan Pangan</li><li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li></ul>

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p> <p>Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makananskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.</p> <p>Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p> <p>Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian</li><li>• Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li></ul>
<p>Goal 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</p> <p>Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</p> <p>Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li><li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li><li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li><li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li><li>• Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li></ul>

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p> <p>Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p> <p>Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p> <p>Target 3.8 Pada tahun 2030, mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p> <p>Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</p> <p>Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li></ul>
<p>Goal 4 Pendidikan Berkualitas</p> <p>Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>• Program Pengembangan Kurikulum</li><li>• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li></ul>

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p> <p>Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p> <p>Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</p> <p>Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p> <p>Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</p>	
<p>Goal 5 Kesetaraan Gender</p> <p>Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</p> <p>Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</p> <p>Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</p> <p>Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li><li>• Program Perlindungan Perempuan</li><li>• Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</li><li>• Program Perlindungan Khusus Anak</li></ul>
<p>Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</p> <p>Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li><li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li></ul>

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan</p> <p>Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p> <p>Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li><li>• Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</li></ul>
<p>Goal 7 Energi Bersih dan Terjangkau</p> <p>Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.</p> <p>Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.</p> <p>Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Energi Terbarukan (EBT)</li><li>• Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</li></ul>
<p>Goal 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</p> <p>Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p> <p>Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penempatan Tenaga Kerja</li><li>• Program Hubungan Industrial</li><li>• Program Pengawasan Ketenagakerjaan</li><li>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li><li>• Program Promosi Penanaman Modal</li><li>• Program Pelayanan Penanaman Modal</li><li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li><li>• Program Pemasaran Pariwisata</li></ul>



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>keuangan</p> <p>Target 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.</p> <p>Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</p> <p>Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</li></ul>
<p>Goal 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur</p> <p>Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</p> <p>Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</p> <p>Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</p> <p>Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penyelenggaraan Jalan</li><li>• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li><li>• Program Pengelolaan Pelayaran</li><li>• Program Pengelolaan Perkeretaapian</li><li>• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</li><li>• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li><li>• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li></ul>
<p>Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan</p> <p>Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li><li>• Program Penataan Desa</li><li>• Program Peningkatan Kerjasama Desa</li></ul>

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Administrasi Pemerintahan Desa</li><li>• Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</li></ul>
Goal 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li><li>• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li><li>• Program Pengembangan Perumahan</li><li>• Program Kawasan Pemukiman</li><li>• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li><li>• Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</li><li>• Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</li></ul>
Goal 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Target 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li><li>• Program Pengelolaan Persampahan</li></ul>

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim</p> <p>Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</p> <p>Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penanggulangan Bencana</li><li>• Program Penanganan Bencana</li><li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li><li>• Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</li><li>• Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li><li>• Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li></ul>
<p>Goal 14 Ekosistem Lautan</p> <p>Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.</p> <p>Target 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.</p> <p>Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li><li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li><li>• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li><li>• Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li><li>• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li></ul>
<p>Goal 15 Ekosistem Daratan</p> <p>Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</p> <p>Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Hutan</li><li>• Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li><li>• Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</li><li>• Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</li></ul>



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</p> <p>Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Target 15.9 Pada tahun 2021, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.</p> <p>Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.</p>	
<p>Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</p> <p>Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.</p> <p>Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</p> <p>Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li><li>• Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</li><li>• Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</li></ul>
<p>Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan</p> <p>Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</p> <p>Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance-ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengembangan Ekspor</li><li>• Program Perekonomian dan Pembangunan</li><li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li></ul>

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari oDA/GNI untuk negara kurang berkembang.</p> <p>Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.</p> <p>Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.</p> <p>Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.</p> <p>Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitas teknologi global.</p> <p>Target 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi yang disetujui bersama.</p> <p>Target 17.8 Mengoperionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasioal untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh</p>	

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.</p> <p>Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda</p> <p>Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.</p> <p>Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.</p> <p>Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.</p> <p>Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Target 17.15 menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan</p> <p>Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.</p> <p>Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.</p> <p>Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk</p>	

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografi dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p> <p>Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</p>	

RANCANGAN AWAL

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA





5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2024

Capaian kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2022 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2024.

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian IPM Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

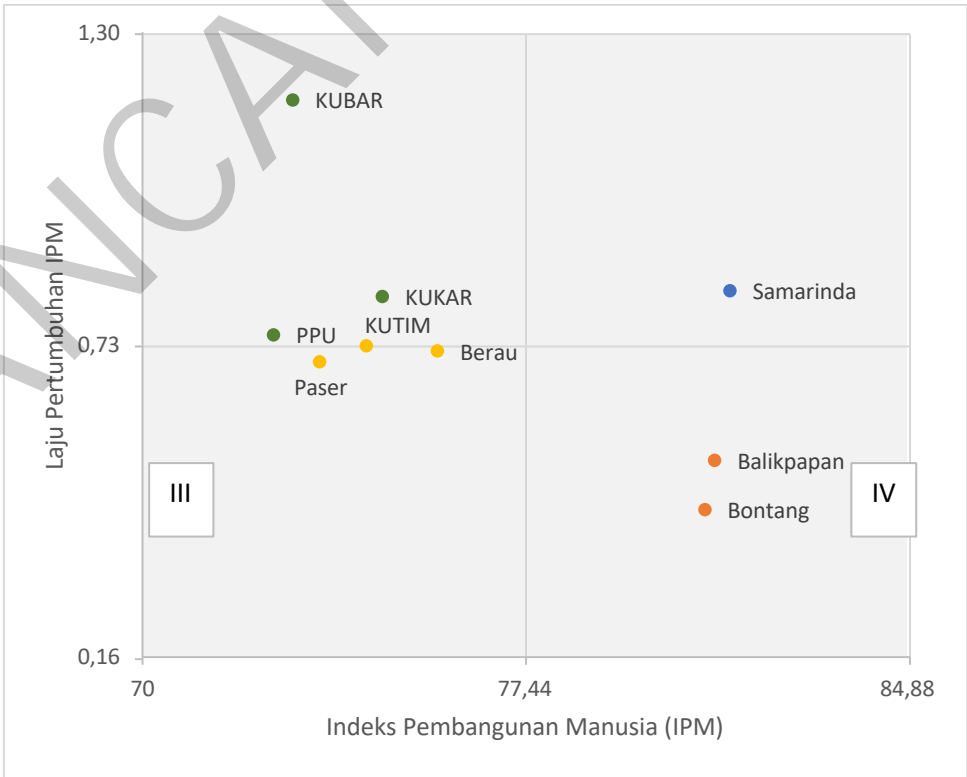
Tabel V.1  
Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM LEBIH RENDAH dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan Progress

		Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
--	--	---

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan progress pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian IPM dan progress pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Samarinda.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM dan progress pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan progress pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kota Bontang.



Gambar V.1

Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM  
Kabupaten/Kota Tahun 2022  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mencapai 77,44 meningkat 0,56 poin dibandingkan capaian tahun 2021 yang mencapai 76,88. Perbaikan kemajuan pembangunan manusia Kalimantan Timur pada tahun 2022 ditandai oleh peningkatan angka IPM sebesar 0,73 persen, setelah sebelumnya sempat tumbuh sebesar 0,84 persen pada tahun 2021. Peningkatan IPM tahun 2022 disebabkan oleh peningkatan yang terjadi disemua komponen penyusunnya. Berbeda dengan kondisi pada tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 telah menyebabkan kinerja pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan naik 3,31 persen dibanding tahun 2020.

Sebagai upaya dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dalam aspek pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur perlu upaya yang sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tujuan pembangunan mewujudkan SDM berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 sebesar 78,14 dengan kategori “Tinggi”. Adapun upaya yang dilakukan adalah pemerataan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang melalui penyediaan infrastruktur pendidik, peningkatan kualifikasi pendidik/tenaga kependidikan serta pemberian beasiswa.

Tabel V.2  
Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota  
Tahun 2024

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	72,04	72,93	73,44	73,77	74,35
2	KUBAR	71,19	72,07	72,92	73,45	73,90
3	KUKAR	73,59	74,06	74,67	75,12	75,70
4	KUTIM	73,00	73,81	74,35	75,10	75,72
5	Berau	74,71	75,20	75,74	75,98	76,53
6	PPU	71,41	72,01	72,55	73,02	73,54
7	MAHULU	67,09	67,95	68,75	69,45	69,93
8	Balikpapan	80,01	80,71	81,13	81,51	81,89
9	Samarinda	80,11	80,76	81,43	81,80	82,32







10	Bontang	80,02	80,59	80,94	81,20	81,53
Kalimantan Timur		76,24	76,88	77,44	77,75	78,32

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/ daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian LPE non batubara kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.3  
Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE LEBIH RENDAH dan Rata-rata LPE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE LEBIH TINGGI dan Rata-rata LPE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

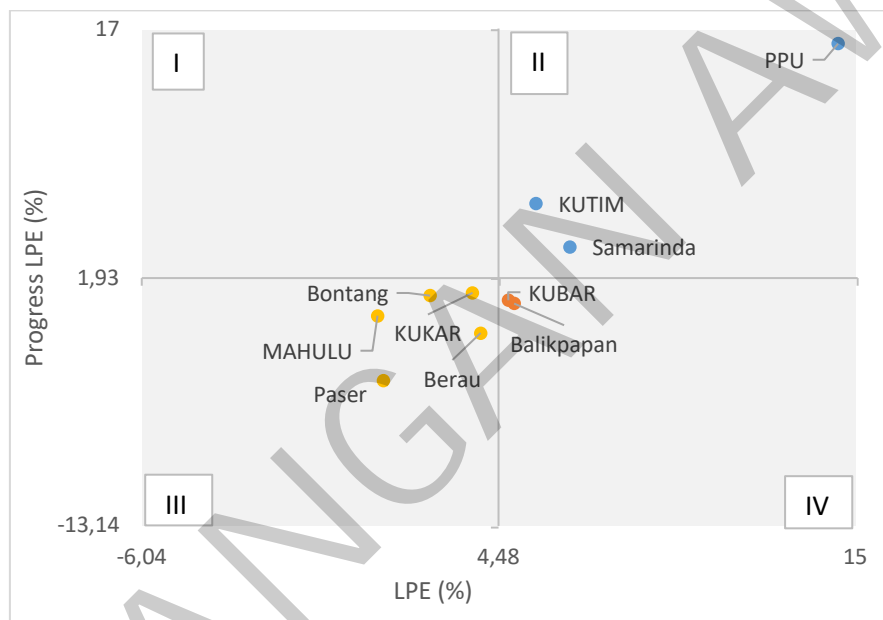
Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

- Kuadran I. Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian

provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat.



Gambar V.2

Analisis Kuadran Capaian dan Rata-Rata LPE Kabupaten/Kota  
Tahun 2022

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Timur menggambarkan bahwa produksi dan kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Dari 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terdapat 3 kabupaten yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun

2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dari -1,69 persen menjadi 14,49 persen.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, upaya yang dilakukan yakni mendorong peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung tumbuh dan menguatnya sektor perekonomian di Kabupaten/Kota, menjaga iklim investasi daerah dan serta mendorong munculnya hilirasi industri. Adapun target perekonomian Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi ekonomi daerah.

Tabel V.4  
Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	-2,86	5,39	1,09	1,27	2,61
2	KUBAR	-2,87	4,19	4,77	3,46	3,34
3	KUKAR	-4,21	2,68	3,71	2,39	3,03
4	KUTIM	-3,08	-0,89	5,58	4,25	4,18
5	Berau	-3,32	5,36	3,95	3,48	4,95
6	PPU	-2,34	-1,69	14,49	10,56	14,42
7	MAHULU	-0,23	1,27	0,91	1,81	1,23
8	Balikpapan	-0,93	4,56	4,94	3,38	5,04
9	Samarinda	-0,99	2,76	6,58	3,29	5,70
10	Bontang	-2,74	1,60	2,46	0,66	1,39
Kalimantan Timur		-2,90	2,55	4,48	3±1	4,10 – 4,90




Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

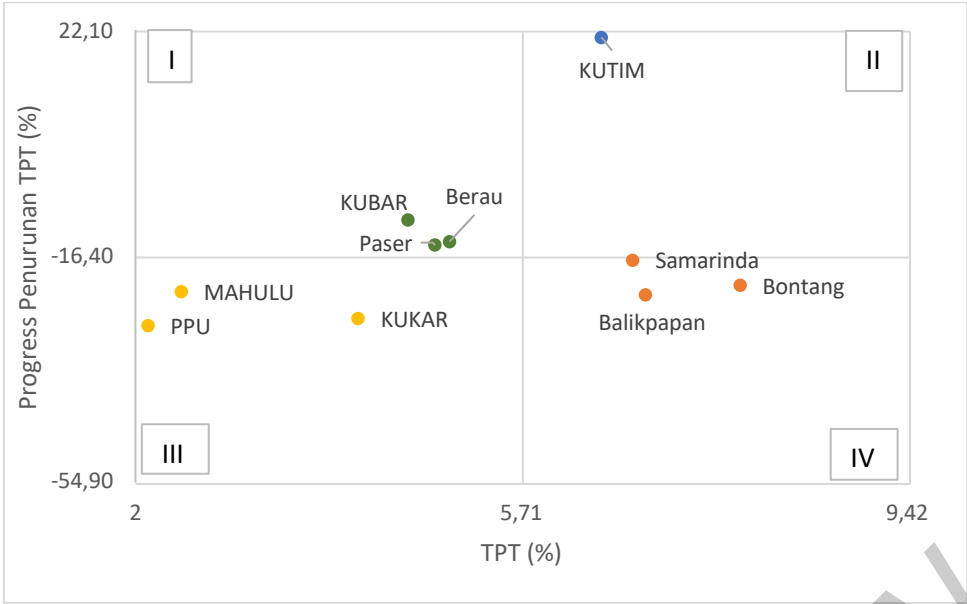
Tabel V.5  
Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi

Kuadran	Simbol	Interpretasi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dan progress pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian TPT dan progress pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Timur.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT dan progress pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kota dengan capaian TPT lebih tinggi dan progress pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.



Gambar V.3  
Analisis Kuadran Capaian dan Progress Penurunan Tingkat Pengangguran  
Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2022  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi. Penyelarasan target TPT Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diselaraskan dengan target Kabupaten/Kota, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

Tabel V.6  
Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota  
Tahun 2024

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	4,52	5,77	4,88	4,75	4,63
2	KUBAR	4,97	5,14	4,62	4,56	4,38
3	KUKAR	5,70	5,66	4,14	3,64	3,44
4	KUTIM	5,45	5,35	6,48	6,28	6,14
5	Berau	5,08	5,82	5,02	4,91	4,77





No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
6	PPU	6,22	2,95	2,12	1,57	1,31
7	MAHULU	3,49	3,14	2,44	2,00	1,56
8	Balikpapan	9,00	8,94	6,9	6,56	6,53
9	Samarinda	8,26	8,16	6,78	6,60	6,49
10	Bontang	9,46	9,92	7,81	7,69	7,54
Kalimantan Timur		6,87	6,83	5,71	5,44	5,46

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

5.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel V.7  
Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

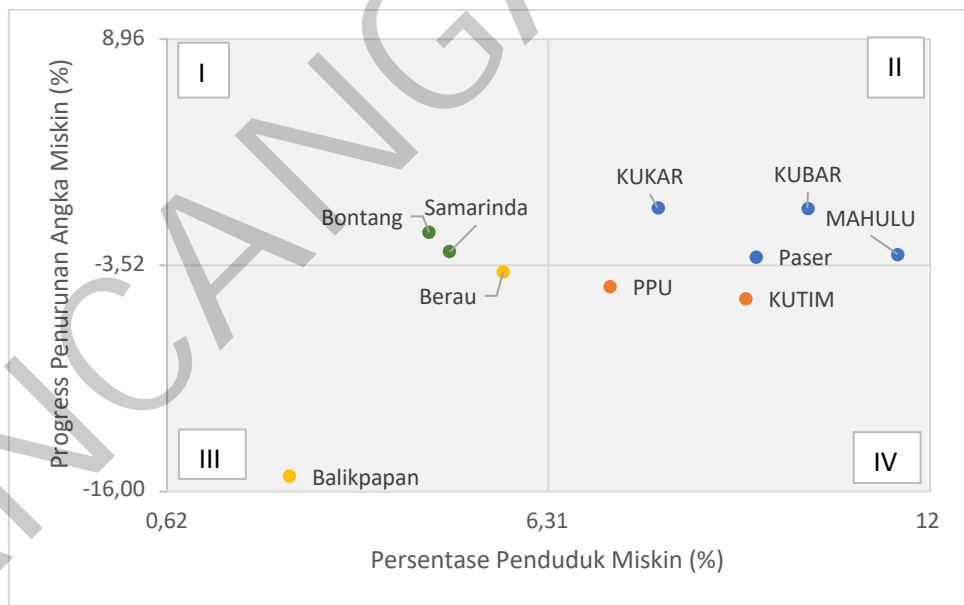
Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah dan progress

pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bontang dan Kota Samarinda.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin dan progress pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan progress pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi dan progress pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur.



Gambar V.4

Analisis Kuadran Capaian dan Progress Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2022  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Penurunan ini terjadi merupakan efek dari mulai

berkurangnya pandemic Covid-19 yang masuk ke Kalimantan Timur dan pulihnya perekonomian. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Sebagai upaya menurunkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur tahun 2024, penentuan target ditentukan dengan mensinergikan target Kabupaten/Kota tahun 2024 dengan analisis yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang diperkirakan akan semakin kondusif seiring dengan progres transisi pandemi COVID-19 menuju fase endemi.

Tabel V.8  
Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota  
Tahun 2024

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	9,23	9,73	9,43	9,25	9,09
2	KUBAR	9,29	10,24	10,20	10,14	10,03
3	KUKAR	7,31	7,99	7,96	7,82	7,66
4	KUTIM	9,55	9,81	9,28	9,07	8,72
5	Berau	5,19	5,88	5,65	5,59	5,32
6	PPU	7,36	7,61	7,25	7,08	6,76
7	MAHULU	11,44	11,90	11,55	11,22	11,14
8	Balikpapan	2,57	2,89	2,45	2,30	2,16
9	Samarinda	4,76	4,99	4,85	4,78	4,71
10	Bontang	4,38	4,62	4,54	4,44	4,31
Kalimantan Timur		6,10	6,54	6,31	5,90	5,78

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023





5.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Indeks Gini kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka



capaian Indeks Gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

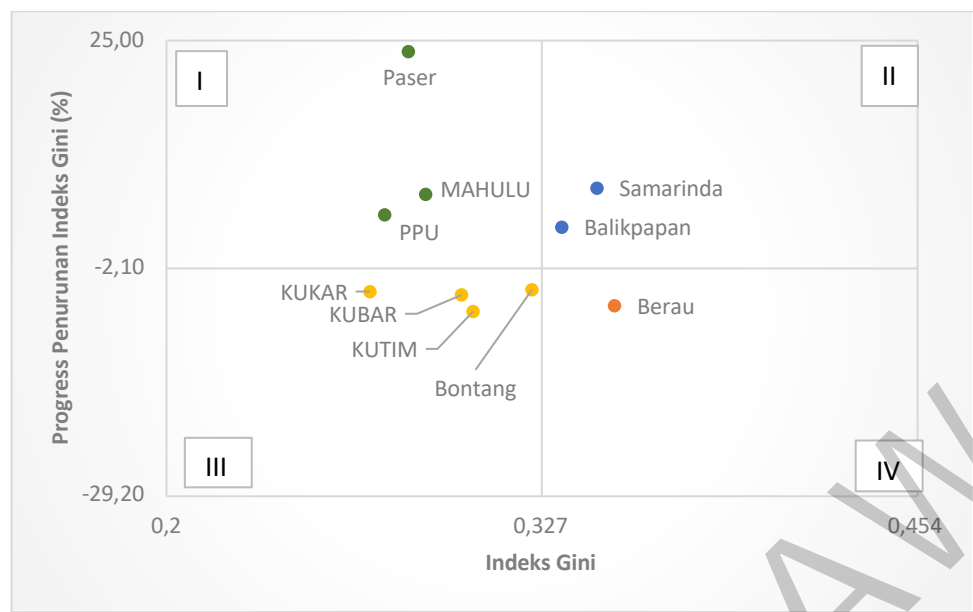
Tabel V.9  
Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini lebih rendah dan progress pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian Indeks Gini dan progress pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini dan progress pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian persentase Indeks Gini lebih tinggi dan progress pertumbuhan

Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Bontang.



Gambar V.5  
Analisis Kuadran Capaian dan Progress Pertumbuhan Indeks Gini  
Kabupaten/Kota Tahun 2022  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Indeks Gini daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perkotaan. Tercatat, pada tahun 2022 ketimpangan perkotaan mencapai 0,334 sedangkan untuk daerah perdesaan 0,283. Rendahnya Indeks Gini di daerah perdesaan tidak serta merta dapat menggeneralisasi bahwa kesejahteraan di daerah perdesaan lebih baik. Hal ini lebih menggambarkan keberagaman pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang mengakibatkan *gap* antar lapisan penduduk diperkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Guna pemerataan pendapatan pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dan tidak didominasi oleh golongan tertentu. Penentuan target indeks gini tahun 2024 dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penurunan target indeks gini.

Tabel V.10  
Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2024





No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	0,290	2,880	0,282	0,270	0,280
2	KUBAR	0,338	0,317	0,300	0,330	0,299
3	KUKAR	0,294	0,283	0,269	0,280	0,268
4	KUTIM	0,325	0,328	0,304	0,325	0,305
5	Berau	0,300	0,377	0,352	0,305	0,344
6	PPU	0,292	0,263	0,274	0,288	0,261
7	MAHULU	0,259	0,270	0,288	0,237	0,283
8	Balikpapan	0,311	0,325	0,334	0,300	0,320
9	Samarinda	0,324	0,322	0,346	0,290	0,327
10	Bontang	0,405	0,340	0,324	0,320	0,320
Kalimantan Timur		0,328	0,331	0,327	0,308	0,316

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

5.1.6 PDRB per Kapita

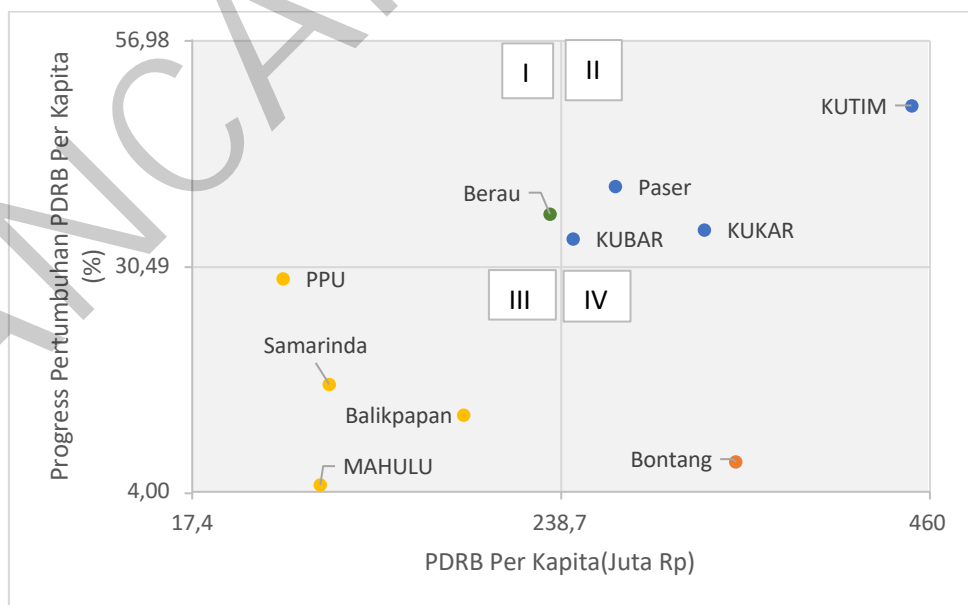
PDRB per Kapita adalah salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah/wilayah, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian PDRB per Kapita kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian PDRB per Kapita kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel V.11  
Kategori Capaian PDRB per Kapita Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan PDRB per Kapita LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita dan Progress pertumbuhan PDRB per Kapita LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita dan Progress pertumbuhan PDRB per Kapita LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan PDRB per Kapita LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian PDRB per Kapita lebih rendah dan progress pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian PDRB per Kapita dan progress pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian PDRB per Kapita dan progress pertumbuhan PDRB per Kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian PDRB per Kapita lebih tinggi dan progress pertumbuhan PDRB per Kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bontang.



Gambar V.6

Analisis Kuadran Capaian dan Progress Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2022

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022)

PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pandemi yang sudah mulai terkendali seiring dengan ditemukannya vaksin serta diselenggarakannya program vaksinasi Covid-19 yang cukup masif diberbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2022 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota baik dari aspek pembangunan ekonomi maupun aspek pembangunan manusia.

Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten/kota, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024. Penentuan target PDRB Perkapita ditentukan dengan analisis yang mempertimbangkan potensi perekonomian yang mendorong pertumbuhan PDRB serta proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten/Kota yang akan berkontribusi terhadap pencapaian target Kalimantan Timur Tahun 2024.

Tabel V.12  
Penetapan Target PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Tahun 2023



No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	157,20	194,51	272,09	197,00	
2	KUBAR	158,05	184,46	246,65	198,29	
3	KUKAR	204,50	241,70	325,67	244,00	
4	KUTIM	268,81	301,40	450,27	315,00	
5	Berau	143,66	170,29	232,68	165,00	
6	PPU	50,79	55,84	72,05	59,10	
7	MAHULU	85,37	90,16	94,51	110,60	
8	Balikpapan	151,20	160,10	180,96	175,54	
9	Samarinda	80,36	85,58	99,82	89,60	
10	Bontang	311,88	320,44	344,56	329,54	
Kalimantan Timur		161,80	182,92	238,70	193,00	

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

5.1.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Indeks ini dihitung dari nilai komposit berupa indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan dan indeks kualitas air laut. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IKLH kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian IKLH kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel V.13  
Kategori Capaian IKLH Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IKLH LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan IKLH LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IKLH dan Progress pertumbuhan IKLH LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IKLH dan Progress pertumbuhan IKLH LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IKLH LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan IKLH LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

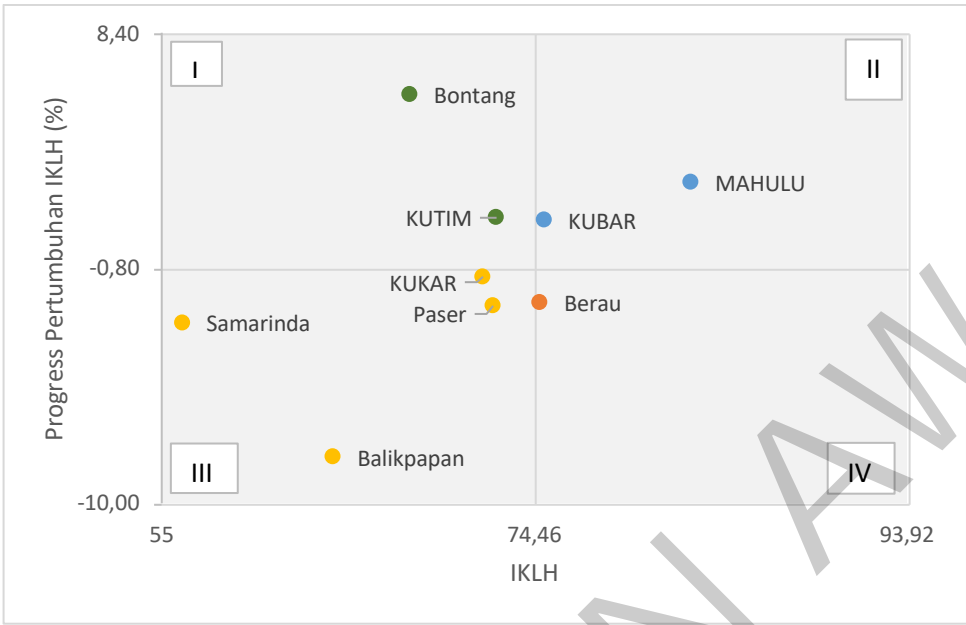
Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih rendah dan progress pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IKLH dan progress pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan progress pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian persentase IKLH lebih tinggi dan progress pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.



Gambar V.7  
Analisis Kuadran Capaian dan Progress Pertumbuhan IKLH  
Kabupaten/Kota Tahun 2022  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2022 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan dalam aspek lingkungan antar kabupaten/kota. Diperlukan kebijakan pembangunan yang selaras antara Provinsi dan Kabupaten/Kota agar target pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai. Penentuan target IKLH Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 berdasarkan analisis terhadap aspek yang mempengaruhi kualitas pengelolaan lingkungan.

Tabel V.14



Penetapan Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  
Tahun 2024

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	71,17	73,97	72,30	74,56	
2	KUBAR	81,47	74,15	74,97	75,95	
3	KUKAR	68,76	72,58	71,77	73,47	
4	KUTIM	69,47	71,62	72,48	72,21	
5	Berau	78,53	76,37	74,75	76,81	
6	PPU	70,01	-	68,10	73,59	
7	MAHULU	80,12	80,56	82,65	83,94	
8	Balikpapan	65,33	69,66	63,96	69,70	
9	Samarinda	52,36	57,78	56,09	60,26	
10	Bontang	64,29	64,09	67,96	64,69	
Kalimantan Timur		75,25	75,06	74,46	76,15	

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan di tahun 2022 menunjukkan bahwa masih terdapat 4 (empat) permasalahan utama pembangunan yang harus diselesaikan, yakni tingkat kemiskinan, indeks gini, kualitas lingkungan dan indeks reformasi birokrasi. Permasalahan tingkat kemiskinan dilihat dari daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa penduduk miskin lebih banyak di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan, terutama di wilayah kabupaten yakni wilayah Kabupaten Mahulu dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,55 persen, Kabupaten Kutai Barat sebesar 10,20 persen, dan Kabupaten Paser sebesar 9,43 persen. Indeks gini yang merupakan pengukuran dari tingkat ketimpangan pendapatan apabila dilihat berdasarkan tempat tinggal mengalami sedikit penurunan di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Selanjutnya untuk permasalahan kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui IKLH menunjukkan bahwa masih perlu upaya lebih terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan udara. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

Berdasarkan pertimbangan ke empat permasalahan tersebut, maka perlu strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang inklusif dan berkelanjutan, dalam upaya



pengentasan kemiskinan, yang berdampak positif pada pengurangan kesenjangan antar wilayah. Hal ini sejalan dengan tema RKPD Tahun 2024, yaitu *“Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan serta Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan”*, yang menekankan pada peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah untuk mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan dan Menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka mendukung pembangunan wilayah kabupaten/kota. Adapun arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota beserta lokasi khusus pelaksanaannya dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, target sasaran pembangunan daerah, serta sektor potensial di masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel V.15  
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
1	Paser	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 2 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Janju, SMKN 1 TANAH GROGOT Kec,Tanah Grogot Kelurahan Tanah Paser, SMKN 3 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 2 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Janju
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 2 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Janju
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 2 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Janju, SMKN 1 TANAH GROGOT Kec,Tanah Grogot Kelurahan Tanah Paser, SMKN 2 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang, SMKN 3 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang, SMKN 4 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tepian Batang
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 2 TANAH GROGOT
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Paser)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan Peran BUMDes Aktif dan Berbadan Hukum	Pelatihan dan Pendampingan bagi BUMDes	
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Tanah Grogot, Kec. Kuaro, Kec. Paser Belengkong
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Kuaro & Muara Samu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Tanah Grogot & Paser Belengkong Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Batu Sopang, Desa Senaken, Kec. Paser Belengkong, Tanah Grogot, Desa Padang Pengrapat, Desa Putang Kec. Long Kali, Kec. Kuaro, Desa Janju Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kec. Long Ikis Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan kawasan pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata Kawasan Gunung Embun	Desa Luan, Kec. Muara Samu
		Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan	Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani (komoditi kelapa sawit)	Kec. Long ikis/Kuaro
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan	Intensifikasi : Karet : Desa Tempakan Kec. Batu Engau, Desa Busui Kec. Batu Sopang, Desa Mendik Makmur Kec. Long Kali Kelapa Sawit : Desa Krayan Makmu Kec. Long Ikis Ekstensifikasi/Perluasan : Kelapa Sawit : Desa Tebru Pasir Damai Kec. Batu Engau
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Paser Belengkong, Tanah Grogot

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang)	Padang Pangrapat
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Paser
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kec. Tanah Grogot
		Pengembangan pengolahan CPO	Pembangunan Rumah Produksi CPO	Kec. Long Ikis
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Janju - Jone - Pondong Baru dan Ruas Jalan Prioritas Provinsi
			2. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa	DIR. Suliliran
			3. Evaluasi Rencana Tata Ruang	Kab. Paser
			4. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Paser
			5. Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum skala regional	Longkali
			6. Penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas di permukiman untuk menunjang fungsi hunian	Paser Belengkong
			7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Tanah Grogot
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. Paser
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Paser
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Paser
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Paser
			5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Paser
			6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Kasungai (Titik Hulu dan Titik Hilir)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
2	Kutai Barat	Peningkatan layanan pendidikan		Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (TERMINAL KM. 7), PERKANTORAN (KANTOR BUPATI PASER), PEMUKIMAN (KANTO DESA TAPIS), INDUSTRI (KANTOR DESA LONG PINANG)
				Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pelabuhan Pondong
			7. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Paser
			1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur, SMKN 3 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Ngenyan Asa, SMK KESEHATAN KARTINI Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu, SMKN 1 BONGAN Kecamatan Kecamatan Bongan Kelurahan Bukit Harapan, , SMKN 1 SENDAWAR Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Barong Tongkok, Kelurahan Barong Tongkok
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 4 Sendawar, SMAN 1 Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten KutaiBarat)
		Peningkatan Peran BUMDes Aktif dan Berbadan Hukum	Pelatihan dan Pendampingan bagi BUMDes	

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Siluq Ngurai & Muara Lawa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Melak & Barong Tongkok Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok, Melak Ulu Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kec. Damai Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi	Destinasi ekowisata berkelas dunia yang mendorong ekonomi kerakyatan (Pengembangan Danau Kaskade)	Danau Jempang (Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	<p>Intensifikasi :</p> <p>Kelapa Sawit : Kec. Bongan dan Kec. Jempang</p> <p>Karet : Kampung Tering lama Ulu Kec. Tering, Kampung Tering, Kamp. Baru, Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat.</p> <p>Kakao :Kec. Tering (Kamp. Muara Mujan dan Kamp. Tering Lama)</p> <p>Kelapa : Kecamatan Jempang, Kecamatan Bongan</p> <p>Peremajaan</p> <p>Kec.Barong Tongkok (karet)</p> <p>Ekstensifikasi/Perluasan :</p> <p>Kelapa Sawit : Kamp.Lendian Permai</p> <p>Kec. Siluq Ngurai, Kec. Damai.</p> <p>Karet : Kec. Sekolaq Darat (Kamp.Sekolaq Darat, Kampung Sekolaq Muliaq, dan Kampung Sekolaq Joleq)</p> <p>Kakao : Kec. Nyuatan</p> <p>Kopi : Kec. Tering, Kampung Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung</p>
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Barong Tongkok, Linggang Bigung, Sekolaq Darat, Tering
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Kutai Barat
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kec. Barong Tongkok



NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pembangunan Jalan menuju Kab. Mahulu	Ruas Jalan Tering - Batas Mahulu
			2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kutai Barat
			3. Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh	Besiq, Damai Kota, Cempedes
			4. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa	DIR. Resak
			5. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Kab. Kutai Barat
			6. Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian	Barong Tongkok
			7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Barong Tongkok
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. Kutai Barat
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Kutai Barat
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Kutai Barat
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Kutai Barat
			5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Kutai Barat
			6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau dan udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Mahakam Titik Tering
				Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (JL. PERKANTORAN NO.III PERSIMPANGAN LMPU MERAH BUSSINESS CENTER, KUTAI BARAT), PERKANTORAN (AREA PERKANTORAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KUBAR), PEMUKIMAN (KANTOR KECAMATAN SEKOLAQ DARAT), INDUSTRI (PABRIK TAHU KP. SUMBER SARI)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			7. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Kutai Barat
3	Kutai Kartanegara	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 3 LOA KULU Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 KOTA BANGUN Kec.Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 MUARA MUNTAI Kec.Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 3 LOA KULU Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 KOTA BANGUN Kec.Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 MUARA MUNTAI Kec.Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 3 LOA KULU Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 KOTA BANGUN Kec.Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 MUARA MUNTAI Kec.Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 3 LOA KULU Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 KOTA BANGUN Kec.Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 MUARA MUNTAI Kec.Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 3 LOA KULU, SMAN 3 KOTA BANGUN, SMAN 3 MUARA MUNTAI
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Kutai Kartanegara)
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Loa Kulu
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Muara Badak & Marangkayu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Tenggarong & Tenggarong Seberang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang, Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jaya, Desa Kota bangun III, Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja, Desa Loh Sumber Loa Kulu, Kel. Melayu Kec. Tenggarong, Desa Anggana Kec. Anggana, Desa Gn. Pegat Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Maluhu, Desa Loh Sumber Loa Kulu Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi	Destinasi ekowisata berkelas dunia yang mendorong ekonomi kerakyatan (Pengembangan Danau Kaskade)	Danau semayang (Kecamatan Kenohan)-Danau Melintang (Kecamatan Muara Wis)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	<p>Intensifikasi :</p> <p>Kelapa Sawit : Kec. muara Leka, Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu, Desa Teluk Muda Kec. Kenohan</p> <p>Karet : Poktan Tunas Harapan</p> <p>Kakao : Desa. Sumber Sari Kec. Kota Bangun</p> <p>Kelapa : Kel. Muara Jawa Ilir</p> <p>Ekstensifikasi/Perluasan :</p> <p>Kelapa Sawit : Desa Prian Kec. Muara Muntai, Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu, Desa Tuana Tua Kec. Kenohan</p> <p>Karet : Desa jembayan Dalam Kec. Loa Kulu</p> <p>Kopi : Kamp. Kopi Luwak kecamatan Marangkayu</p>
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Kota Bangun, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Amuntai, Muara Kaman, Muara wis, Semboja, Tenggarong, Tenggarong Seberang
		Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang)	Benamang
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Kutai Kertanegara
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kec. Tenggarong Kota
		Pengembangan pengolahan gula aren	Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren	Kec Kenohan

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Patung Lembuswana -
			2. Rekontruksi Jalan Provinsi	Sebulu dan Ruas Jalan yang mendukung perekonomian
			3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kutai Kartanegara
			4. Peningkatan layanan suplai air minum skala regional	Sekitar Marangkayu & Muara Badak
			5. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh	Muara Badak
			6. Pembangunan jaringan distribusi listrik	Kab. Kutai Kartanegara
			7. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	DI. Marangkayu, DI. Sungai Buluh
			8. Pengendalian banjir	Loa Ipuh
			9. Penyiapan readiness criteria pengelolaan air limbah domestik skala regional	Marangkayu
			10.Koordinasi dan penyiapan readiness criteria pengelolaan air limbah domestik skala regional	Loa Janan
			11. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Tenggarong
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	1. Pembangunan instalasi biogas	Kab. Kutai Kartanegara
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. Kutai Kartanegara
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Kutai Kartanegara
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Kutai Kartanegara
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Kutai Kartanegara
			5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Kutai Kartanegara

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Mahakam (Titik Anggana, Bloro, Kumala), Sungai Kedang Kepala (Titik Desa Kedang Kepala dan Desa Siran), Sungai Belayan (Titik Desa Sebelimbingan dan Muara Sungai Belayan), Sungai Santan (Titik Jembatan Marangkayu Santan Ulu dan Jembatan Santan Tengah)
				Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (SIMPANG 3 JAM BENTONG, JL. MULAWARMAN, KUKAR), PERKANTORAN (DINAS PERIKANAN TENGGARONG), PEMUKIMAN (KAMPUNG MANGKURAWANG, KUKAR), INDUSTRI (INDUSTRY READY MIX, KEC. TENGGARONG)
				Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pantai Pemedas, Pantai Tanah Merah, Pantai Mutiara Indah, Pantai Samboja, Pantai Keresik, Tanjung Sembilang
			7. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Kutai Kartanegara
4	Kutai Timur	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 2 Sandaran Kec.Sandaran Kelurahan Susuk Luar, SMKN 1 RANTAU PULUNG Kec. Rantau Pulung Kelurahan Margo Mulyo, SMKN 1 SANGKULIRANG Kec. Sangkulirang Kelurahan Kerayaan

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 2 Sandaran Kec.Sandaran Kelurahan Susuk Luar
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 2 Sandaran Kec.Sandaran Kelurahan Susuk Luar
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 2 Sandaran Sandaran Kec.Sandaran Kelurahan Susuk Luar, SMKN 1 Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kelurahan Karya Bakti, SMKN 1 Sangkulirang Kec. Sangkulirang Kelurahan Kerayaan, SMKN 1 TELEN Kec.Telen Kelurahan Muara Pantun, SMKN 2 BENGALON Kec. Bengalon Kelurahan Tepian Indah, SMKN 2 SANGKULIRANG Kec. Sangkulirang Kelurahan Mandu Pantai Sejahtera, SMKN 1 BENGALON Kec. Bengalon Kelurahan Sepaso Barat, SMKN 1 KONGBENG Kec. Kongbeng Kelurahan Marga Mulia , SMKN 1 MUARA BENGKAL Kec.Muara Bengkal Kelurahan Muara Bengkal Ulu, SMKN 1 SANGATA UTARA Kec.Sangatta Utara, SMKN 2 SANGATA UTARA Kec.Sangatta Utara Kelurahan Sanggatta Utara, SMKN 1 KALIORANG Kecamatan Kaliorang Kelurahan Bukit Makmur
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Sangatta Utara, Kelurahan Teluk Lingga
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 2 Sandaran
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Kutai Timur)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan Peran BUMDes Aktif dan Berbadan Hukum	Pelatihan dan Pendampingan bagi Bumdes	
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Teluk Pandan & Sanggatta Selatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Sanggatta Selatan & Sanggatta Utara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Simpang Tiga Bontang-Sanggatta, Teluk Lingga, Dea Miau Baru, Kec. Sanggatta Selatan Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi (KSPP)2	Pengembangan Destinasi, SDM dan Promosi	Karst Sangkulirang - Mangkalihat (Kecamatan Sangkulirang)
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan	Intensifikasi : Kelapa Sawit : Kec. Sangkulirang Karet : Kec. Long Mesangat Kakao : Kec. Kaubun Aren : Kecamatan Kaliorang  Peremajaan Karet : Kec. Long Mesangat Kakao : Kecamatan Busang  Ekstensifikasi/Perluasan : Kelapa Sawit : Kecamatan Karangan Kakao : Lada : Kec. Batu Ampar



NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Kaliorang, Kaubun, Kongbeng, Muara Wahau, Sangkulirang
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)	Udang dan Bandeng : Kec. Kaliorang (Desa Selangkau); Kec. Bengalon (Desa Muara Bengalon), Kec. Sangatta Selatan (Desa Teluk Singkama, Desa Sangkima dan Kel. Singa Geweh)  Rumput Laut : Kec. Sangatta Selatan (Desa Teluk Singkama)
		Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang)	Kaubun, Kaliorang, Bengalon, Ma. Ancalong
		Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan	Pemanfaatan limbah sawit menjadi bioenergi	Kec. Muara Wahau
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Kutai Timur
		Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan Pengembangan KEK MBTK	Kec. Kaliorang
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Sangatta
		Pengembangan Produk Gaharu	Pembangunan Rumah Produksi Gaharu	Sangatta
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Rekonstruksi Jaln Provinsi	Ruas Jalan Kaliorang - Talisayan
			2. Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mendukung perekonomian	Akses jalan dan jembatan Nibung
			3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kutai Timur
			4. Pembangunan infrastruktur dalam KEK MBTK	
			5. Pengendalian banjir	Normalisasi Sungai Sangatta
			6. Pembangunan pengaman pantai	Pantai Tanjung Pagar Sandaran

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			7. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Kab. Kutai Timur
			8. Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum skala regional	Kec. Teluk Pandan
			9. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Kutai Timur
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. Kutai Timur
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Kutai Timur
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Kutai Timur
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Kutai Timur
			5. Pengelolaan KBEP Karst Mangkalihat Ulu	Kab. Kutai Timur
			6. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Kutai Timur
			7. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Bontang Titik Jembatan Jl. Poros Bontang-Samarinda Km. 8 Kutai Timur
				Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (JL. A. WAHAB SYAHRANIE, KANTOR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. KUTIM, KUTAI TIMUR), PERKANTORAN (KANTOR PDAM UNIT PERKANTORAN BUKIT PELANGI), PEMUKIMAN (PERMUKIMAN JLN. D.I. PANJAITAN), INDUSTRI (SIMPANG SECURITY GATE PELANGI)
				Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pantai Kenyamukan, Pantai Teluk Lombok, dan Pantai Teluk Kaba

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
5	Berau	Peningkatan layanan pendidikan	8. Pemantauan dan penanganan sampah laut	Kab. Kutai Timur
			9. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Kutai Timur
			1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan, SMKN 6 BERAU Kec.Teluk Bayur Kelurahan Desa Labanan
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan, SMKN 7 BERAU Kecamatan Tabalar, SMKN 8 BERAU Kecamatan Talisayan Desa Bumi Jaya, SMKS INSAN CEMERLANG Kec. Tanjung Redeb Kelurahan Tanjung Redeb, SMKN 3 BERAU Kecamatan Pulau Derawan Kelurahan Tanjung Batu, SMKN 2 BERAU Kecamatan Tanjung Redeb Kelurahan Sungai Bedungun, SMKN 1 BERAU Kecamatan Tanjung Redeb Kelurahan Tanjung Redeb, SMKN 6 BERAU Kecamatan Gunung Tabur Kelurahan Merancang Ulu, SMKS SEHAT PERSADA Kecamatan Tanjung Redeb Kelurahan Gunung Panjang
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Tanjung Redeb, Kelurahan Karang Ambon
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 11 Berau, SMAN 13 Berau, SMAN 3 Berau
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kota Berau)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Tabalar & Talisayan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Tanjung Redeb & Gunung Tabur Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Sambaliung, Talisayan, Kec. Teluk Bayur, Kel. Karang Ambun Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi (KSPP) 1	Pengembangan Destinasi, SDM dan Promosi	Kaniungan - Biduk-biduk (Kecamatan Biduk Biduk), Maratua (Kecamatan Maratua) dan sekitarnya
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan	Intensifikasi : Kakao : Kampung. Gn. Tabur Lada : Kec. Gunung Tabur Kelapa : Kampung Tubaan, Kecamatan Biduk-Biduk Pala : Kampung Teluk Sumbang, Kampung Batu-Batu  Peremajaan Kakao : Kec. Kelay Kelapa : Kec. Biduk-biduk  Ekstensifikasi/Perluasan : Kakao Kec. Sambaliung
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Biduk Biduk, Gunung Tabur, Sambaliung, Talisayan, Teluk Bayur

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)	Udang dan Bandeng : Kec. Sambaliung (Desa Kampung Suaran); Kep. Derawan (Desa Kasai dan Desa Pegat Tumbuk)  Rajungan : Kep. Derawan (Desa Tanjung Batu)  Kepiting : Kec. Batu Putih (Kampung Batu Putih); Kep. Derawan (Desa Tabalar)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Berau
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kec. Tanjung Redeb
		Pengembangan Produk Rotan	Pembangunan Rumah Produksi Rotan	Kec. Tanjung Redeb
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Rekonstruksi Jalan Provinsi	Ruas Jalan Tanjung Redeb - Talisayan
			2. Pemeliharaan Jalan Provinsi	
			3. Penanganan Rumah tidak layak huni	Berau
			4. Pembangunan pengaman pantai	Pantai Talisayan - Dumaring
			5. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	DI. Biatan, DI. Labanan, DI. Merancang, DI. Semurut - Buyung buyung
			6. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh	Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Tanjung Redeb
			1. Pembangunan PLTS Terpusat	Kab. Berau
			2. Revitalisasi PLTS	Kab. Berau

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. Berau
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Berau
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Berau
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Berau
			5. Pengelolaan KBEP Karst Mangkalihat Pesisir	Kab. Berau
			6. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Berau
			7. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Segah (Titik Hulu PT. BBE, Hilir Berau Coal, Jembatan Gunung Tabur, Kerator Gunung Tabur), Sungai Kelay (Titik Kantor Bupati dan Keraton Sambaliung)
				Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (PEREMPATAN JL. H. ISA 2 APT. PRANOTO, BERAU), PERKANTORAN (KANTOR DPMPSTP, BERAU), PEMUKIMAN (PERUM KOPRI, JL. MURJANI 3), INDUSTRI (PLTU BERAU)
				Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pulau Derawan dan Pulau Panjang
			8. Pemantauan dan penanganan sampah laut	Kab. Berau
			9. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Berau

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
6	PPU	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam, SMK INNE DONGWHA Kec Penajam Kelurahan Gresik , SMKN 1 PENAJAM PASER UTARA Kelurahan Bukit Raya Kecamatan Sepaku, SMKN 4 PENAJAM PASER UTARA Kelurahan Kecamatan Waru Kelurahan Sesulu
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 1 PPU SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam, SMKN 1 PENAJAM PASER UTARA Kelurahan Bukit Raya Kecamatan Sepaku, SMKN 2 PPU Penajam Kelurahan Nipah Nipah, SMKN 3 PPU Kecamatan Babulu Kelurahan Babulu Darat, SMKN 4 PPU Kecamatan Babulu Kelurahan Babulu Darat, SMKN 5 PPU Kecamatan Sepaku Kelurahan Binuang, SMK INNE DONGWHA Kec Penajam Kelurahan Gresik
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Penajam, Kelurahan Penajam
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 1 PPU
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten PPU)



NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Penajam, Kec. Petung
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Penajam & Sepaku Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Penajam & Sepaku Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel. Nenang Kec. Penajam, Kel. Petung Kec. Penajam, Desa Girimukti, Kel. Gunung Seteleng, Desa Rawa Mulia Kec. Babulu Korban Bencana : semua Kecamatan
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan	Intensifikasi : Kelapa Sawit : Desa argomulyo, Poktan Sri Rejeki A Lada : Poktan Sumber Urip, Poktan Sumber Wangi, Poktan Dewi Sri A Kelapa : Kelurahan Pejala  Ekstensifikasi/Perluasan : Kelapa Sawit : Poktan Suka Maju
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Babulu, Penajam, Sepaku, Waru

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)	Udang : Kec. Penajam (Desa Sesumpu)  Rumput Laut : Kec. Penajam (Desa Sungai Parit, Desa Api-api, Desa Waru)  Kepiting : Kec. Penajam (Desa Janabora)  Bandeng : Kec. Penajam (Desa Babulu Laut)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Penajam Paser Utara
		Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Buluminung	Kec. Penajam
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kec. Penajam
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Buluminung)
			2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	PPU
			3. Pembangunan pengaman pantai	Pantai Tanjung Jumlai
			4. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Kab. PPU
			5. Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum & air limbah skala regional	Babulu, daerah berbatasan dengan IKN & Balikpapan
			6. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Penajam
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. PPU

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. PPU
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. PPU
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. PPU
			5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. PPU
			6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Sepaku (Titik Nursery Suring dan Titik Jembatan Sei Sepaku)
				Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (JL. PROPINSI KM 46, BABULU DARAT, PPU), PERKANTORAN (KANTOR CAMAT BABULU), PEMUKIMAN (JL. SUMBER AGUNG LABANGKA BARAT, PPU) INDUSTRI (PT. SUMBER BUNGA SAWIT LESTARI)
				Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pantai Tanjung Jumlai, Pantai Corong dan Pelabuhan TPI Api-api
			8. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. PPU
7	Mahakam Ulu	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I
			5. Optimalisasi <i>Boarding School</i>	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I
			6. Pemberian tambahan insentif bagi seluruh tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di daerah pedalaman dan 3T (GTK)	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Long Bagun, Kampung Ujoh Bilang
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Mahakam Ulu)
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang: Desa Long Apari, Kec. Long Apari
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Long Bagun & Ujoh Bilang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Long Bagun & Ujoh Bilang Korban bencana : semua kecamatan

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan	Ekstensifikasi/Perluasan : Kakao : Poktan Mambes II 20, Poktan Mambes III 20, Poktan Mambes IV 20, Poktan Maju Makmur 10
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Mahakam Ulu
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Ujoh Bilang
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pembangunan Jalan Perbatasan	Ruas Jalan Batas Kubar - Long Bagun - Long Pahangai
			2. Pembangunan Jembatan Perbatasan	
			3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Mahakam Ulu
			4. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa	DIR. Datah Bilang
			5. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Mahakam Ulu
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Terpusat	Kab. Mahakam Ulu
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Mahakam Ulu
			2. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Mahakam Ulu
			3. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Mahakam Ulu
			4. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Mahakam Ulu
			5. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, dan udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Boh titik Muara Sungai Boh, Sungai Mahakam (Titik Nyan, Batu Kelu, Long Bagun

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
				Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (JL. KUDCI SIMPANG TIGA PELABUHAN UJOH BILANG), PERKANTORAN (JL. CEMPEDAK), PEMUKIMAN (JL. LIKUR ULO SIMPANG EMPAT KANTOR KAMPUNG LONG BAGUN ULU), INDUSTRI (JL. POROS LONG MELAHAM-UJOH BILANG)
			6. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Mahakam Ulu
8	Balikpapan	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian , SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar, SMKN 7 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMK ADZKIYA BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKS MUHAMMADIYAH 1 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Tengah Kelurahan Sumber Rejo
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar, SMKN 5 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKN 6 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Graha Indah, SMKN 1 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian Raya, SMKN 4 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Gunung Bahagia, SMKN 5 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKS MUHAMMADIYAH 1 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Tengah Kelurahan Sumber Rejo, SMKN 3 BALIKPAPAN, SMKN 2 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan utara Kelurahan Gunung Sam
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Klandasan Ulu

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 8 Balikpapan, SMAN 4 Balikpapan, SMAN 6 Balikpapan BLKI Balikpapan: Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan di KOTA Balikpapan)
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Balikpapan Kota, Kec. Balikpapan Tengah
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Balikpapan Selatan & Balikpapan Kota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Balikpapan Tengah & Balikpapan Barat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Batu Ampar, Kel. Balikpapan Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kel. Sumber Rejo, Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur, Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara, Baru Tengah, Kel. Karang Joang, Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau	Kel. Kariangau



NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan	Intensifikasi : Lada : Kel. Karang Joang (Poktan Harapan Sejahtera), Kelurahan Teritip (Poktan Agri Sejahtera dan Poktan Jalan Beimbai) , , Kelurahan Karang Joang (Poktan Bunga Salak) , Kelurahan Lamaru (Poktan Mentari Jaya Baru)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Rumput Laut dan Kepiting)	Rumput Laut : Pokdakan Sumber Laut Berjaya, Pokdakan Nestapa  Kepiting : Pokdakan Soka Teritip Kaltim dan Pokdakan Mina Barokah)
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Balikpapan
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Kariangau)
			2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Balikpapan
			3. Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh	Klandasan Ilir
			4. Pembangunan pengaman pantai	Pantai Manggar
			5. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Kota Balikpapan
			6. Koordinasi dan upaya peningkatan suplai air curah untuk air minum skala regional	Kota Balikpapan (daerah berbatasan dengan PPU)
			7. Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian	-Permukiman Mentarang -Kel. Manggar
			8. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Balikpapan
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Atap Balikpapan 32 kWp	Kota Balikpapan

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kota Balikpapan
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kota Balikpapan
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kota Balikpapan
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kota Balikpapan
			5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kota Balikpapan
			6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut, udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Manggar Besar (Titik Sungai 28 dan Titik Pos PON 1)
				Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (JL. MARSMA ISWAHYUDI DEPAN KANTOR BMKG KOTA BALIKPAPAN), PERKANTORAN (AREA PERKANTORAN PT. TELKOM, JL. A YANI KOTA BALIKPAPAN), PEMUKIMAN (PERUM. KORPRI JLN. KLAUSS REPPE KM.7 RUSUNAWA BALIKPAPAN), INDUSTRI (KAWASAN INDUSTRI KM. 13 KARANGJOANG PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA BALIKPAPAN)
				Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Mangrove Pendopo Teritip, Benua Patra, Plaza Balikpapan, Balikpapan Super Blok, Batakan, Perumahan Auri, Pantai Lamaru.
			7. Pelaksanaan uji emisi kendaraan roda 4	Kota Balikpapan

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			8. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kota Balikpapan
9	Samarinda	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	Kota Samarinda
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Revitalisasi Terminal Tipe B	Terminal Tipe B Sungai Kunjang
			2. Pembangunan Jalan yang mendukung perekonomian	Akses Menuju Bandara APT Pranoto
			3. Pemeliharaan jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP Kawasan Perdagangan dan Jasa)
			4. Pengendalian Banjir	Normalisasi Sungai Karang Mumus, Normalisasi Sungai Sub Sistem Karang Asam Besar, Normalisasi Sungai Sub Sistem Karang Asam Kecil,
			5. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Samarinda
			6. Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh Samarinda
			7. Evaluasi Rencana Tata Ruang	Kota Samarinda
			8. Penyediaan Drainase Perkotaan	DI. Panjaitan

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 16 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua, SMKN 10 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah, SMKN 11 SAMARINDA Kecamatan Palaran Kelurahan Simoang Pasir, SMKN 15 SAMARINDA Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Lok Bahu, SMKN 20 SAMARINDA Kecamatan Sambutan Kelurahan Sungai Kapih, SMKN 8 SAMARINDA Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru, SMKN 14 SAMARINDA Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Tani Aman, SMKN 18 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake, SMKN 9 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya, SMKN 12 SAMARINDA Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Loa Buah, SMKS CENDANA DDI SAMARINDA Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Teluk Lerong ulu, SMKS MIFTAHUL ULUM SAMARINDA Kecamatan Sambutan Kelurahan Sambutan, SMKNS TERPADU MADINA SAMARINDA Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 16 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 16 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 16 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua, SMKN 8 SAMARINDA Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru, SMKN 7 SAMARINDA, SMKN 10 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah, SMKN 11 SAMARINDA Kecamatan Palaran Kelurahan Simoang Pasir, SMKN 15 SAMARINDA Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Lok Bahu, SMKN 2 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Hitam, SMN 14 SAMARINDA Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Tani Aman, SMKN 5 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan, SMKS CENDANA DDI SAMARINDA Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Teluk Lerong ulu, SMKN 9 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya, SMKN 17 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Hitam, SMKS KESEHATAN SAMARINDA , SMKN 19 SAMARINDA Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur, SMKN 6 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara, SMKN 8 SAMARINDA

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
				Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru, SMKN PELAYARAN Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara, SMKN 1 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya, SMKS MIFTAHUL ULUM SAMARINDA Kecamatan Sambutan Kelurahan Sambutan
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 16 SAMARINDA
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kota Samarinda)
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Samarinda Kota, Kec. Sungai Pinang, Kec. Samarinda Ilir, Kec. Samarinda Ulu

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Palaran & Loa Janan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Samarinda Kota & Sungai Pinang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel. Teluk Lerong, Kel. Sidodadi, Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu, Kel. Selili, Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kel. Sambutan Kec. Sambutan, Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran, Kel. Lempake Kec. samarinda Utara, Kel. Sempaja Utara Kec. samarinda Utara Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda samarinda Utara, Kec. Sungai Pinang, Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-PD) : Kec. Sungai Pinang, Sungai Kunjang Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi dan Promosi Kampung Ketupat	Samarinda Seberang (Kecamatan Samarinda Seberang)
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan	Intensifikasi : Kelapa Sawit : Poktan Subur Makmur Kel. Bentuas Karet : Kec. Bentuas (Poktan Tani Maju), Kec. Bukit Pinang (Poktan Tani

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
				Melati), Poktan Rawa Bakung, Poktan Pinang Raya)
		Peningkatan sistem distribusi perdagangan	Pengembangan pusat distribusi barang bahan pokok (food station)	Samarinda Kota
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Samarinda Kota
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Revitalisasi Terminal Tipe B	Terminal Tipe B Sungai Kunjang
			2. Pembangunan Jalan yang mendukung perekonomian	Akses Menuju Bandara APT Pranoto
			3. Pemeliharaan jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP Kawasan Perdagangan dan Jasa)
			4. Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kota Samarinda
			5. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh	Karang Mumus II (Temindung Permai, Sempaja Selatan) dan Sungai Kapih (Selili, Sungai Kapih)
			6. Pengendalian banjir	Normalisasi Sungai Karang Mumus, Normalisasi Sungai Sub Sistem Karang Asam Besar, Normalisasi Sungai Sub Sistem Karang Asam Kecil,
			7. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Kota Samarinda
			8. Penyiapan <i>readiness criteria</i> sistem pengelolaan limbah domestik terpusat skala regional	
			9. Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian	



NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kota Samarinda
			2. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kota Samarinda
			3. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Mahakam (Titik Kalamur, Titik Depan Kantor Gubernur, Titik Palaran), Sungai Karang Mumus (Titik Pampang Dalam dan Titik Jembatan Desa Pampang)
				Pemantau Kualitas Udara Ambien: Transportasi (TAMAN SIMPANG EMPAT JL. BASUKI RAHMAT, SAMARINDA), PERKANTORAN (PERTOKOAN MERAK SQUARE, SAMARINDA), PEMUKIMAN (JL. MT. HARYONO PERUMAHAN RAWASARI 1, SAMARINDA), INDUSTRI (PT. SAGA TRADE MURNI JL. SULTAN ALIMUDIN, SAMARINDA)
			4. Pelaksanaan uji emisi kendaraan roda 4	Kota Samarinda
10	Bontang	Peningkatan layanan pendidikan	5. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kota Samarinda
			1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut, SMKN 1 BONTANG Kecamatan Bontang Utara Kelurahan Gunung Elai, SMKN 2 BONTANG Kecatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut Indah, SMKN 3 BONTANG Kecamatan Bontang Barat Kelurahan Gunung Telihan, SMKN 4 BONTANG Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Bontang Lestari
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 2 Bontang BLKI Bontang :Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan di Kota Bontang)
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLKI Bontang	1. Pembangunan Workshop Las Air	BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan di Kalimantan Timur)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Bontang Selatan & Bontang Utara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Bontang Selatan & Bontang Utara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat, Bontang Selatan, Tanjung Laut, Loktuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Api-api Korban Bencana : semua Kecamatan
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)	Kota Bontang
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kel. Bontang Lestari
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Bontang)
			2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Bontang
			3. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh	Kampung Pesisir Kampung Kuala Tanjung Limau
			4. Penyediaan air baku	Long Storage Sungai Bontang
			5. Pengendalian banjir	Normalisasi Sungai Bontang
			6. Koordinasi peningkatan akses layanan air minum/peningkatan suplai air curah untuk air minum skala regional	-Kec. Bontang lestari -Kec. Bontang Barat
			7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Bontang
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kota Bontang

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			2. Pengendalian KARHUTLA	Kota Bontang
			3. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kota Bontang
			4. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kota Bontang
			5. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Titik Jembatan Jl. Soekarno-Hatta Bontang
				Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (HALAMAN RUKO PT. BADAK NGL, BONTANG), PERKANTORAN (HALAMAN KANTOR DPMPTSP), PEMUKIMAN (PERUMAHAN MULAWARMAN RESIDENCE, KEL. BONTANG BARU, BONTANG), INDUSTRI (KAWASAN PT. BLACKBEAR REASOURCE INDONESIA, BONTANG)
				Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pelabuhan Tanjung Laut, Pelabuhan Lok Tuan, Pantai Bontang Koala dan Wisata Mangrove BSD
			6. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kota Bontang

## BAB VI

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2024 adalah *“Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan”*.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, rencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan *stakeholders* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2024, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Penyusunan kerangka pendanaan daerah pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan realisasi belanja perangkat daerah pada tahun 2022 dan rencana belanja yang ditetapkan pada APBD Tahun 2023. Berdasarkan pendekatan tersebut, rencana belanja perangkat daerah dalam RKPD tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 16.555.842.110.030,- dengan rincian pembagian pagu indikatif per-Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel VI.1  
Pagu Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.966.642.488.000
2	Dinas Kesehatan	333.057.710.000
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	941.402.110.000
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	673.195.547.000
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	103.788.677.000
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.894.210.419.000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	29.500.000.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.900.000.000

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
9	Dinas Sosial	167.444.673.000
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	102.201.958.000
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	112.815.466.000
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	105.624.646.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	45.000.000.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	34.054.117.000
15	Dinas Perhubungan	45.561.000.000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.681.339.000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.000.000.000
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	109.907.867.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	37.946.499.000
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	79.766.887.000
20	Dinas Pariwisata	35.000.000.000
21	Dinas Perkebunan	68.735.749.000
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	81.935.083.000
23	Dinas Kehutanan	552.784.514.000
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	98.135.953.000
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	64.000.000.000
26	Sekretariat Daerah	281.145.259.000
27	Sekretariat DPRD	240.000.000.000
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.000.000.000
29	Badan Pendapatan Daerah	295.603.991.000
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.853.468.817.000
31	Badan Kepegawaian Daerah	43.332.000.000
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.121.278.000
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	25.000.000.000
34	Badan Penghubung Provinsi	22.500.000.000
35	Inspektorat	49.667.527.000
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.978.506.000

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/PD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

## 6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah

Data dan informasi rencana kerja Perangkat Daerah pada tahap rancangan awal telah di-*input* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui tautan <https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah>. Pengambilan data bersumber dari Menu “Renja” pada aplikasi SIPD di tahap Penetapan RKPD, dimana untuk indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan yang tercantum di dalamnya berasal dari Menu “RPJMD” dan Menu “RENSTRA” yang didasarkan pada Perubahan RPJMD dan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah.



Tabel VI.2  
Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				2.948.902.843.350	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	%	86	1.489.039.984.035	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & UPTD
	Angka Partisipasi Kasar SLB	%	82		
	Angka Kelulusan Sekolah Menengah	%	95		
	Rata-rata kompetensi numerasi SMA berdasarkan asesmen nasional	%	2,19		
	Rata-rata kompetensi numerasi SMK berdasarkan asesmen nasional	%	2,17		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	%	87,5	8.680.585.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	%	100	7.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	100	1.444.182.273.415	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & UPTD
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.051.444.043.999	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	69.102.415.000	Dinas Kesehatan
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	22.811.925.000	UPTD Rumah Sakit Mata
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	5.353.665.800	UPTD Labkes
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	9.159.395.000	UPTD Bapelkes
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	14.592.275.335	UPTD RS Korpri
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100%		

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	733.541.992.274	RSUD. A. W. Sjahranie
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	70	429.175.529.910	RSUD Kanujoso
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	96,10	85.729.363.096	RSJD Atma Husada
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100%		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100%	178.287.000.000	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	%	100%		Dinas Kesehatan
	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (RS Mata)	%	98%	5.500.000.000	UPTD Rumah Sakit Mata
	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang di bangun (UPTD Labkes)	Unit	1	4.000.000.000	UPTD Labkes
	Jumlah Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara (UPTD Labkes)	Unit	2	1.736.085.200	UPTD Labkes
	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	%	75%	6.837.948.665	UPTD RS Korpri
	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AWS)	%	88%	205.194.287.726	RSUD. A. W. Sjahranie
	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS Kanujoso)	%	88%	243.520.017.090	RSUD Kanujoso
	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	%	90%	16.897.233.903	RSJD Atma Husada
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	80%	9.000.000.000	Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (UPTD RS Korpri)	%	100%	3.060.000.000	UPTD RS Korpri
	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (RS AWS)	%	70%	2.665.830.000	RSUD. A. W. Sjahranie
	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (RS Kanujoso)	%	60%	500.000.000	RSUD Kanujoso
	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	%	92,5	1.162.080.000	RSJD Atma Husada
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	%	100%	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	%	60%	2.617.000.000	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>1.762.111.295.170</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	83,50	110.487.849.525	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	%	73	979.396.432.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1) Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	60,45	130.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	2) Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan	%	60,47		
	3) Persentase penyediaan kapasitas air baku	%	79,03		
	4) Persentase panjang pantai kritis yang ditangani	%	41,73		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase dalam kondisi baik	%	74,85	33.683.020.018	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penerapan SPM Air Minum Provinsi	%	73,15	343.750.000.745	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Capaian akses penanganan sampah domestik	%	74,00	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pemenuhan SPM air limbah	%	53,13	1.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani	%	70,00	76.993.992.882	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase jumlah gedung diluar kepentingan strategis provinsi yang ditangani	%	33,33		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	%	50	40.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	%	83,20	13.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Capaian sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	62,90	32.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>132.099.123.830</b>	

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan permukiman kumuh kewenangan provinsi	%	56,26	100.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyelenggaraan SPM perumahan	%	37,5	2.099.123.830	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS	Persentase penanganan PSU permukiman	%	26,92	30.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>55.400.000.000</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	85	18.900.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	80		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Penanganan Pra Bencana	%	100	2.500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	2.500.000.000	
	Presentase Pemulihan Pasca Bencana	%	100	2.000.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kualitas layanan kesekretariatan	%	90	24.254.739.100	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Trantibumlinmas sesuai dengan SPM	%	100	4.643.810.900	Satuan Polisi Pamong Praja
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	601.450.000	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>167.444.673.000</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	40.054.109.369	Dinas Sosial
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100		
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSTW-NP)	Indeks	82	3.745.162.930	UPTD PSTW-NP
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD PSTW-NP)	%	100		
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSPAD)	Indeks	82	2.675.436.000	UPTD PSPAD
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD PSPAD)	%	100		
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSAAH)	Indeks	82	3.115.917.000	UPTD PSAAH
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD PSAAH)	%	100		

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBR)	Indeks	82	2.815.062.654	UPTD PSBR
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD PSBR)	%	100		
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSKW-HM)	Indeks	82	1.218.573.000	UPTD PSKW-HM
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD PSKW-HM)	%	100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	%	36%	1.266.083.180	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial	%	30%	80.708.901.041	Dinas Sosial
	Jumlah Klien UPTD yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial Prov. Kaltim (UPTD PSTW-NP)	Orang	110	3.281.612.070	UPTD PSTW-NP
	Jumlah Klien UPTD yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial Prov. Kaltim (UPTD PSPAD)	Orang	80	2.563.000.000	UPTD PSPAD
	Jumlah Klien UPTD yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial Prov. Kaltim (UPTD PSAAH)	Orang	80	2.650.957.000	UPTD PSAAH
	Jumlah Klien UPTD yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial Prov. Kaltim (UPTD PSBR)	Orang	55	1.726.377.346	UPTD PSBR
	Jumlah Klien UPTD yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial Prov. Kaltim (UPTD PSKW-HM)	Orang	35	576.609.000	UPTD PSKW-HM
PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Orang	4.500	8.286.733.600	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Orang	17.870	11.986.306.500	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	Lokasi	1	773.832.310	Dinas Sosial
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>101.551.958.000</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	48.179.901.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100		Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	1	1.000.000.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang ditempatkan	%	75%	2.100.000.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang ditempatkan ( BLKI Balikpapan )	%	75%	28.466.059.000	UPTD BLKI Balikpapan
	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang ditempatkan ( BLKI Bontang )	%	75%	16.705.998.000	UPTD BLKI Bontang
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	27,10%	2.100.000.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	%	75%	1.400.000.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi	%	22,78%	1.600.000.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>109.695.466.000</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	103.695.466.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Orang	400	1.250.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	28,50%	1.250.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian data gender dan anak	%	75%	800.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kab/Kota Layak Anak (KLA)	%	70%	950.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	%	80%	1.750.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				<b>7.000.000.000</b>	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	97,6	3.775.000.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Skor	86,3		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Daerah Rawan Pangan yang diintervensi	kecamatan	20	1.900.000.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	85	1.325.000.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>45.000.000.000</b>	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1). Indeks Pencemaran	Indeks	≤5 (tercemar ringan)	7.050.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	2). Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	Indeks	48 (Baik)		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	%	100	2.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan	Ha	532	850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan	%	35	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	%	40	1.930.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kualitasnya terkait lingkungan hidup	Kelompok	110	1.300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	%	84,42	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	%	100	1.750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	88	1.450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	88	27.620.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>1.470.000.000</b>	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	60%	670.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	98,50%	300.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	Semester	2 semester	500.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				<b>34.054.117.000</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	87	21.180.469.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100%		
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kabupaten yang telah difasilitasi penataan Desanya	%	7 Kabupaten	530000000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa



Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa berkembang menjadi desa maju mandiri	%	5,89%	2.150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	%	5,3%	4.956.522.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa dan kelurahan, masyarakat hukum adat serta kelompok masyarakat	%	1,78%	5.767.125.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>1.650.000.000</b>	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern		67,98	500.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung KB Mandiri	%	50%	600.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,46	550.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				<b>45.561.000.000</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	70	28.190.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	82	13.196.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan	%	0,006		DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kualitas Layanan Pelabuhan Laut dan SDP	%	72	3.075.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Presentase Kajian Pelayanan Multimoda (%)	%	68	1.100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>69.781.339.000</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks	100	31.431.339.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah sesuai Strategi Komunikasi	%	70	17.250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengamanan dan Layanan Informasi	%	90	21.100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika



Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
	Persentase PD yang terhubung dengan jaringan intra dan sistem penghubung layanan pemerintah daerah				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				<b>47.159.590.260</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	88,5	33.612.421.260	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	88,5	3.002.800.000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	88,5	3.500.000.000	UPTD Pelatihan Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya UKM Naik Kelas	%	1	1.111.459.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	UKM	20	1.198.925.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rasio Koperasi Sehat	%	20	1.068.670.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Unggulan	Koperasi	4	1.965.315.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Terlatih	%	80	1.700.000.000	UPTD Pelatihan Koperasi
	Persentase UKM yang Terlatih	%	80		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>31.000.000.000</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	19.650.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Potensi Investasi yang direncanakan	Potensi Investasi	2	2.700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur	Minta	11	2.600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan	%	100	2.750.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi PMA - PMDN	%	1	2.700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Informasi yang Dimanfaatkan Pengguna Layanan	%	100	600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				<b>109.907.867.000</b>	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	20,49	19.475.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Persentase Wirausahawan Pemuda	%	1,02		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	%	82,63	31.590.297.400	Dinas Pemuda dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	8,21	9.193.569.600	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	100	49.649.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindak lanjuti	%	100		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>5.000.000.000</b>	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Elemen Data Statistik Sektoral dilingkup Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	%	100	5.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>1.900.000.000</b>	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks	3	1.900.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				<b>17.739.644.650</b>	
Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	%	86	8.628.175.290	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & UPTD
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%	66	3.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	%	77	845.339.660	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	%	62	2.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman	%	47	2.866.129.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & UPTD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				<b>34.125.945.300</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	Skor	82	25.390.945.300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	35	8.735.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	Nilai	46		

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				<b>3.820.553.700</b>	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	Jumlah OPD/LKD	5	1.820.553.700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Jumlah arsip	3,5	2.000.000.000	
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>79.766.887.000</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	84	42.844.213.600	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	84	1.949.324.550	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	84	3.546.393.124	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	84	940.563.631	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	190.000	8.000.000.000	Dinas Kelautan & Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	180.000	6.721.359.000	Dinas Kelautan & Perikanan
	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor	1.000.000.000	3.194.285.850	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	Ekor	4.181.000	2.654.750.876	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (produk olahan)	Produk Olahan	7	1.463.064.000	Dinas Kelautan & Perikanan
	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	%	70	442.143.369	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN. PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	72,97	4.711.502.000	Dinas Kelautan & Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dan kelautan	%	100	3.299.287.000	Dinas Kelautan & Perikanan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				<b>35.000.000.000</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	85	15.200.000.000	Dinas Pariwisata

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah DTW Pengembangan Pariwisata yang difasilitasi	DTW	6	7.900.000.000	Dinas Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,65	3.000.000.000	Dinas Pariwisata
	Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,70		Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	100	4.300.000.000	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tercapainya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan SDM-nya	%	100	4.600.000.000	Dinas Pariwisata
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				<b>249.295.478.002</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	82	62.974.646.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	81,5	1.950.000.000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	81,5	3.302.250.000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	81,5	4.200.000.000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	81,5	2.650.500.000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	75,8	2.202.750.000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan (%)	%	20,7	5.450.000.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura (%)	%	48,8	6.050.000.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah legalitas tanaman pangan dan hortikultura yang terawasi (sertifikat)	Sertifikat	195	1.300.000.000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi (varietas)	varietas	3		
	Pengawasan jumlah pestisida dan pupuk (kios)	kios	40	495.000.000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	%	11,56	2.000.000.000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	%	30,33		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan (%)	%	41,39	1.750.000.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura (%)	%	34	1.450.000.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	%	77	2.849.500.000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	78,93	29.887.316.800	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	85,7	1.731.871.000	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	79	1.822.937.800	UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	80	1.178.326.800	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	%	25,36	19.552.056.400	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	Benih	6000000	1.054.463.000	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	%	95	3.243.202.200	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun	Ha	50.702	600.000.000	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	%	32,5	4.159.827.600	Dinas Perkebunan
	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan	%	81,08		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Perkebunan)	%	40	3.126.533.100	Dinas Perkebunan
	Jumlah Luas Lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi akibat serangan OPT	Ha	1000	983.793.200	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	Perusahaan	40	1.395.421.100	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	93,30	26.378.979.666	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	93,30	2.962.992.178	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	93,30	2.592.618.156	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	%	91,16	21.605.151.297	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	%	90,65	3.086.450.185	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	%	90,20	1.975.328.119	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	%	93,75	6.172.900.371	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari PHMSZ (AKH)	%	65,00	8.642.060.519	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	%	90,05	3.703.740.222	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat (Score)	Skor	91,20	1.728.412.104	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	%	88,35	2.469.160.148	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	%	88,75	617.290.037	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>				<b>552.784.514.000</b>	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000	235.782.101.422	Dinas Kehutanan
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850		
	3). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi	%	0,47		
	4). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00		
	5). Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan	Juta Ton CO2e	1,45		
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1). Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Ha	545.726	12.649.911.900	Dinas Kehutanan
	2). Penurunan Emisi GRK berbasis hutan di KBEP dan Konservasi Provinsi	Juta Ton CO2e	0,68		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000	115.459.096.932	Dinas Kehutanan
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20		
	3). Penurunan Emisi GRK berbasis hutan dari Perhutanan Sosial	Juta Ton CO2e	0,13		
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	10.104	3.578.275.000	Dinas Kehutanan
	2). Penurunan Emisi GRK berbasis hutan di wilayah DAS dan Sub DAS yang dikelola	Juta Ton CO2e	0,03		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	185.315.128.746	Dinas Kehutanan

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	90		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>98.135.953.000</b>	
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam (%)	%	92,27	5.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	34,1	50.743.953.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT (kwh)	Kwh	30,346	6.500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT (TOE)	TOE	1.427		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	Indeks	84,2	30.122.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Presentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	%	3	3.020.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase terpenuhinya administrasi dan teknis untuk IUP MBLB tahap operasi produksi sesuai kewenangan Provinsi	%	58,51	2.750.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>12.640.409.740</b>	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase pertumbuhan nilai Ekspor Non Migas dan Non BatuBara berdasarkan SKA	%	2	1.723.190.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Eksportir baru yang mendaftar akun SKA	Eksportir	5	326.798.600	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	73	937.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai transaksi kerjasama perdagangan sektor indagkop & UKM	Miliar	2	450.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendampingan Pelaku Usaha Untuk Mendapatkan Ijin TDG	Pelaku Usaha	1	500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penyelesaian sengketa/ pengaduan	%	90	6.906.221.140	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Persentase peningkatan kegiatan pengawasan barang beredar (%)	%	5		
	Persentase peningkatan kegiatan pengawasan tertib niaga	%	5		
	Mutu layanan UPTD BPSMB	%	82 (A)	1.797.200.000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang



Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>4.200.000.000</b>	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di Kawasan Peruntukan Industri / Kawasan Industri	Industri	2	3.020.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase peningkatan pengendalian perijinan berusaha sektor industri	%	5	680.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan jumlah industri yang terdaftar di SIINas (%)	%	5	500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				<b>650.000.000</b>	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi	Kimtran	1	270.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	Kimtran	1	210.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain	Kesepakatan Bersama	1	170.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				<b>281.145.259.000</b>	
<b>Kesekretariatan Daerah</b>				<b>281.145.261.000</b>	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Umum	Indeks	83	192.686.351.300	Biro Umum
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	Indeks	83	4.957.383.280	Biro Administrasi Pimpinan
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	75	2.833.969.100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	Indeks	82	2.088.046.000	Biro Organisasi
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	Indeks	85	2.272.021.700	Biro Perekonomian
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	Indeks	87	1.677.098.880	Biro Hukum
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	indeks	83	2.505.746.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	Indeks	80	5.800.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	indeks	100	3.865.840.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Program Administrasi Umum	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	Indeks	80	17.300.372.700	Biro Umum
	Persentase hasil rekomendasi inspektorat yang ditindaklanjuti	%	90	7.351.936.720	Biro Administrasi Pimpinan
	Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Kepegawaian	Indeks	90		Biro Administrasi Pimpinan



Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan keprotokolan dan MKP	Indeks	100		Biro Administrasi Pimpinan
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level	PKP - PBJ Pro Aktif	7.463.901.900	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	%	30		
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	%	85	5.400.000.000	Biro Organsasi
	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	%	70		
	Indeks Kelembagaan	Indeks	72		
	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang disiapkan	%	100	4.925.090.300	Biro Perekonomian
	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	%	90		
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	%	100	4.325.079.120	Biro Hukum
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang disiapkan	%	100	5.850.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	%	80	6.700.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penerapan SPM	%	100	3.142.424.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Persentase IKK yang di laporkan				
	Persentase kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti				
	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi				
<b>Sekretariat DPRD</b>				<b>240.000.000.000</b>	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang- undangan	Indeks	83	120.000.000.000	Sekretariat DPRD
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	Indeks	83		
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	Indeks	83		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualiiitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	85	120.000.000.000	Sekretariat DPRD
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
<b>Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>					
<b>Perencanaan</b>				<b>55.000.000.000</b>	

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Waktu	%	100	9.251.730.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	%	100		
	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	%	100	10.858.818.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Waktu	%	100		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	80	34.889.452.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>KEUANGAN</b>				<b>6.149.072.808.000</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	45.720.851.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	5.797.974.461.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik	%	90	9.773.505.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	Indeks	75	228.947.960.700	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	Indeks	75	8.301.415.400	UPTD Pendapatan Daerah Samarinda
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	Indeks	75	7.023.116.040	UPTD Pendapatan Daerah Kukar
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	Indeks	75	4.347.158.000	UPTD Pendapatan Daerah Kutim
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	Indeks	75	4.297.274.200	UPTD Pendapatan Daerah Kubar
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100		

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	Indeks	75	6.963.163.000	UPTD Pendapatan Daerah Balikpapan
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	Indeks	75	4.037.078.000	UPTD Pendapatan Daerah Bontang
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	Indeks	75	3.879.305.200	UPTD Pendapatan Daerah PPU
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	Indeks	75	3.933.785.000	UPTD Pendapatan Daerah Paser
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	Indeks	75	4.105.216.800	UPTD Pendapatan Daerah Berau
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pajak daerah	%	100	13.985.359.300	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pajak daerah	%	100	668.377.600	UPTD Pendapatan Daerah Samarinda
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pajak daerah	%	100	588.767.960	UPTD Pendapatan Daerah Kukar
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pajak daerah	%	100	263.835.000	UPTD Pendapatan Daerah Kutim
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pajak daerah	%	100	467.266.800	UPTD Pendapatan Daerah Kubar
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pajak daerah	%	100	352.627.000	UPTD Pendapatan Daerah Balikpapan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pajak daerah	%	100	389.774.000	UPTD Pendapatan Daerah Baontang
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pajak daerah	%	100	527.117.800	UPTD Pendapatan Daerah PPU
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pajak daerah	%	100	572.902.000	UPTD Pendapatan Daerah Paser

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pajak daerah	%	100	467.491.200	UPTD Pendapatan Daerah Berau
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	%	100	1.485.000.000	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Realisasi lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	%	100		
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	%	100		
	Persentase Realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah	%	100		
<b>Kepegawaian</b>				<b>43.332.000.000</b>	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90	18.320.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks	85	25.012.000.000	Badan Kepegawaian Daerah & UPTD
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>				<b>56.121.278.000</b>	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial	%	86	8.268.078.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah	%	86	2.234.120.000	
	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	%	86	2.497.802.000	
	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	%	87	7.450.200.000	
	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	%	86	4.200.000.000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks	85,5	350.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur	%	88	31.121.078.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				<b>25.000.000.000</b>	
Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Hasil Riset yang diimplementasikan (ditindaklanjuti dalam penganggaran)	Riset	1	7.235.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Jumlah Hasil Inovasi yang diimplementasikan (ditindaklanjuti dalam penganggaran)	Inovasi	1		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	17.765.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
<b>Pengelolaan Penghubung</b>				<b>22.500.000.000</b>	
Program Pelayanan Penghubung	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Mess	Indeks	91,8	5.027.383.399	Badan Penghubung
	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga	Indeks	84		

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Perangkat Daerah
			Target	Rp	
	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Promosi dan Informasi	Indeks	95		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82,5	17.472.616.601	Badan Penghubung
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
Inspektorat Daerah				49.667.527.000	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda	%	100	22.000.000.000	Inspektorat
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Kab/Kota	%	100		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	%	85	6.000.000.000	Inspektorat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	100	21.667.527.000	Inspektorat
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindak Lanjuti	%	100		
Unsur Pemerintahan Umum					
Kesatuan Bangsa dan Politik				37.978.506.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82,6	18.526.287.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100		
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	67	3.755.335.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD	%	100	5.263.335.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	1,3		
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	85,3	1.858.783.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	%	100	1.858.975.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	6.715.791.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian kinerja pembangunan yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta turunannya, yakni tujuan dan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun

*output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja daerah ini selanjutnya dirumuskan kedalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan sebagai ukuran utama pencapaian kinerja pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Pada subbab ini memuat beberapa indikator kinerja yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2024. Rincian masing-masing indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

8.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja makro dan indikator kinerja utama (IKU) memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam membangun Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja makro dapat diartikan sebagai indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Pencapaian indikator makro didorong oleh pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah dengan melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan.

**Tabel VII.1**  
**Indikator Kinerja Makro Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,44	78,14
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,71	5,46
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,48	4,85
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,44	5,78
5	Indeks Gini	Poin	0,317	0,307
6	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	70,68	31,05

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja daerah pada tingkat tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Indikator kinerja tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.



Tabel VII.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Capaian 2022	Target 2024
INDIKATOR KINERJA TUJUAN				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,44	78,32
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,71	5,46
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,48	4,10-4,90
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,44	5,78
5	Indeks Gini	Poin	0,317	0,316
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74,46	75,00
7	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	70,68	31,05
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,70 (B)	69,00 (B)
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS				
9	Prevalensi Stunting	Poin	23,90	19,00
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,84	67,31
18	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	76,65	80,19
24	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	7,27	10,39
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,41	85,00

Sumber: hasil proyeksi, 2023

**8.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)**

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang termasuk ke dalam Indikator Kinerja Urusan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Adapun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

**Tabel VII.3**  
**Indikator Kinerja Daerah (IKD)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	92,31	100
	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	81,36	100
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	rasio	1,73	
	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	72,88	
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	91,16	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	rasio	47,66	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	rasio	15,08	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	rasio	57.86	60,45
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten /kota	%	Belum Dilaksanakan	
	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional	rasio	Belum Dilaksanakan	
	Rasio kemandapan jalan	rasio	77,52	73
	Rasio tenaga kerja konstruksi yang telah di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	rasio	74,61	62,62
4	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	Belum Ada	25
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	Belum Ada	42
	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	100	56,26
	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	26,92
5	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	72,73	
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	
	Persentase penanganan pra bencana	%	70	
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	95,97	
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	64,97	
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	60	
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	51	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	7,51	
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	20,52	
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	26,1	
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	86,26	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	11,38	
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	rasio	1,07	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 anak	rasio	24,65	
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
	Persentase Cadangan Pangan	%	70,52	88,83
10	URUSAN PERTANAHAN			
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	Tidak Ada	
	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	
	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	lokasi	Tidak Ada	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	indeks	74,46	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	96,34	
12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	
	Pemanfaatan data kependudukan	%	26,47	
13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	68,52	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	92,25	
14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,18	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	55,5	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	29,7	
15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			
	Rasio konektivitas provinsi	Poin	0,816	0,846
16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	68,42	
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	53,66	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	61,67	
17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	30,59	
	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	77,38	
18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			
	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	40,29	
19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,12	1,02
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	9,5	20,49
	Peningkatan Prestasi Olahraga (Mendali)	keping	10	100
20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	38,76	
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	59,92	62
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	indeks/skor	66.68	46
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	69,22	35
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	74,65	76
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	3,34	3,5
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	339.631,00	370.000
	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	59,09	100
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-8,52	
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	67,47	
	Tingkat hunian akomodasi	%	-	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,82	
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3,63	3,67
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	83,67	
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	76,19	
	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0,12	
	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	80,86	
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	86,17	
	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	72,58	
	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	72,22	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
	Tertib Usaha	%	100	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	92,67	
	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	76,04	
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,17	
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	20,7	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	124,25	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	23,61	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Tidak Ada	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Tidak Ada	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	informasi	220	
33	SEKRETARIAT DAERAH			
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	-	
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	4,35	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	63	
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	-	
35	PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	5,44	
	Rasio PAD	rasio	72,15	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	62,58	
	Opini Laporan Keuangan	predikat	WTP	
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	15,57	
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	27,18	
	Assets Management		4	
	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	54,01	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
37	KEPEGAWAIAN			
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	157,53	90
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	17,53	86
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	18,27	86
41	INSPEKTORAT DAERAH			
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	93,28	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	83,33	

Sumber: hasil proyeksi, 2023



## BAB VIII

### P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tema Pembangunan RKPD tahun 2024 adalah “Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan”. Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2024 yaitu menguatkan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal melalui percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD tahun 2024, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kabupaten/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan RKPD tahun 2024 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD tahun 2024 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan pelaksanaan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

#### 8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2024 yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen ini antara lain :

1. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efesiensi pelaksanaan;

2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
3. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mempedomani RKPD Tahun 2024 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2024 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2024;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
7. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala, untuk selanjutnya menjadi bahan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (jika dilakukan perubahan);

8. Kepala Bappeda melakukan evaluasi hasil di akhir tahun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
9. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun 2024.

RANCANGAN AWAL

**BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

---

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044, <https://bappeda.kaltimprov.go.id>